DJPb
Indonesian Treasury

InTress

KAJIAN Fiskal REGIONAL

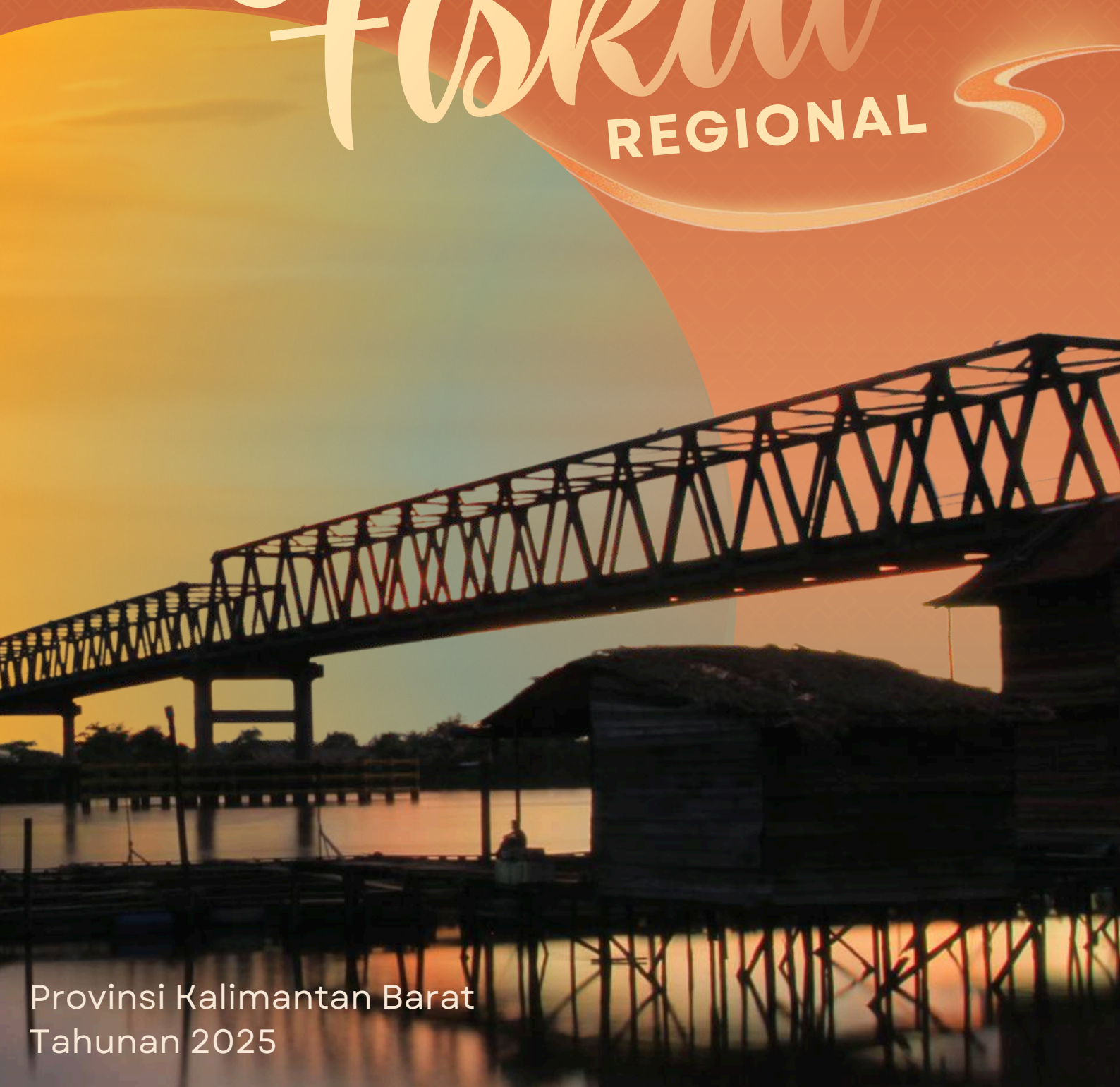

Provinsi Kalimantan Barat
Tahunan 2025

Tim Penyusun

Rahmat Mulyono

Hery Yulianto

Samsul Falah

Gunawan Setiono

Houlwan

Heru Ismiraldi

Tim Penyusun

Pengarah
Rahmat Mulyono

Ketua Tim
Hery Yulianto

Penulis & Penyaji Data

Samsul Falah
Gunawan Setiono
Houlwan
Heru Ismiraldi
Dinda Arin Kinantya
Satri Wiranti
Ega Putri Idam
Ringga Cendani
Talitha Zuleika

Berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)

Dinda Arin

Satri Wiranti

Ringga Cendani

Ega Putri

Talitha Zuleika

Sekapur sirih

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dapat menyusun dan menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025. KFR merupakan output pelaksanaan tugas Kanwil DJPb yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, dan representasi Kementerian Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal dan Regional Chief Economist.

Kajian Fiskal Regional Tahunan 2025 terdiri atas beberapa analisis diantaranya analisis ekonomi regional yang berisi sasaran pembangunan & tantangan daerah, data kondisi dan analisis perekonomian serta kesejahteraan regional seperti PDRB berdasarkan pengeluaran dan sektor/lapangan usaha, kontribusi dan pertumbuhan sektor/lapangan usaha terhadap PDRB dan fiskal, inflasi, serta indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan (rasio gini), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada KFR ini juga memaparkan analisis fiskal regional yang terdiri dari ringkasan dan analisis atas realisasi APBN, realisasi APBD, realisasi anggaran pendapatan dan belanja konsolidasian. dan Progres Implementasi MBG di Daerah.

Analisis tematik yang diangkat dalam KFR Tahunan 2025 yaitu Progres Implementasi MBG di Daerah dan Potret IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan KFR ini telah melalui proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak sehingga kami berharap substansi KFR yang disusun telah memuat informasi kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Barat yang komprehensif dan berguna kepada stakeholders regional Provinsi Kalimantan Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan KFR ini, terutama berkaitan dengan penyediaan data yang diperlukan. Sebagai upaya menyempurnakan KFR di masa yang akan mendatang, kami terbuka atas masukan dan saran untuk perbaikan KFR.

Pontianak, 02 Maret 2026

Rahmat Mulyono

Kepala Kanwil
DJPb Prov. Kalbar

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF ix
BAB I Sasaran Pembangunan Dan Tantangan Daerah 1
1.1. Pendahuluan 1
1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 1
1.2.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 1
1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 5
1.3. Keselarasan RPJMN Dengan RPJMD 8
1.4. Capaian Atas Keselarasan RPJMN dengan RPJMD Kalimantan Barat 10
1.5. Tantangan Sasaran Pembangunan 11
1.5.1. Tantangan Ekonomi Daerah 11
1.5.2. Tantangan Sosial Kependudukan 15
1.5.3. Tantangan Lainnya 18
BAB II Analisis Ekonomi Regional 21
2.1. Analisis Indikator Makro Ekonomi 21
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 21
2.1.2. Inflasi 25
2.2. Analisis Indikator Makro Ekonomi 27
2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional 33
BAB III Analisis Fiskal Regional 37
3.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 37
3.1.1. Pendapatan Negara 38
3.1.2. Belanja Negara 40
3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) 44
3.1.4. Surplus/Defisit APBN 46
3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat 46
3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat 47
3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah 51
3.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemerintah Daerah) 54
3.2.1. Pendapatan Daerah 54
3.2.2. Belanja Daerah 58
3.2.3 Surplus/Defisit APBD 59
3.2.4 Pembiayaan Daerah 59
3.2.5 Perkembangan BLU Daerah 60
3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD 61
3.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi 62
3.3.1. Pendapatan Konsolidasian 62
3.3.2. Belanja Konsolidasi 63
3.3.3. Surplus/Defisit 64
3.3.4. Pembiayaan Konsolidasi 64
BAB IV Pengembangan Ekonomi Daerah 65
4.1. Pendahuluan 65
4.2. Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/ DAK Fisik Di Tingkat Wilayah Kalimantan Barat 66
4.2.1. Alokasi Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik 68
4.2.2. Alokasi Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik 70
4.2.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik 71
4.2.4. Capaian RO utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik 75
4.3. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L 81

4.3.1. Penganggaran 82
4.3.2. Sumber Daya Manusia 82
4.3.3. Eksekusi Kegiatan 82
4.3.4. Pengadaan Barang dan Jasa 83
4.3.5. Regulasi Pelaksanaan Anggaran 83
4.3.6. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik Pada 10 Bidang 83
4.4. Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda 85

BAB V Analisis Tematik 87
5.1. Program Penyaluran MBG 87
5.1.1. Perkembangan Ketersediaan pangan 87
5.1.2. Dampak Implementasi Program MBG 89
5.1.3. Isu Pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Barat 93
5.1.4. Rekomendasi Pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Barat 95
5.2. Landasan Konseptual dan Potret IPM Kalimantan Barat 95
5.2.1 IPM sebagai Ukuran Pembangunan Manusia 96
5.2.2 Dimensi dan Komponen Pembentuk IPM 96
5.2.3 IPM sebagai Peta Pembangunan Manusia 97
5.2.4 Landasan Hukum yang Relevan 98
5.2.5 Potret IPM Kalimantan Barat 2023-2025 99
5.2.6 Potret IPM Kalimantan Barat 2023-2025 101
5.2.7 Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi IPM Provinsi Kalimantan Barat 107
5.2.8 Evaluasi Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Daerah 2023–2025 111
5.2.9 Rekomendasi dan Strategi 113

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran pada RPD Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 2
Tabel 1.2 Target Indikator Kinerja Dalam RPD Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 4
Tabel 1.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Pembangunan Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 5
Tabel 1.4 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 s.d. 2026 6
Tabel 1.5 Keterkaitan Prioritas Daerah Kalimantan Barat Dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 8
Tabel 1.6 Keterkaitan Visi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat 9
Tabel 1.7 Sasaran Indikator dan Capaian Pembangunan Daerah Pada RPJMN Tahun 2025-2029 10
Tabel 1.8 Kriteria Kondisi Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 12
Tabel 1.9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi 13
Tabel 1.10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agutus 2023 s.d. Agustus 2025 14
Tabel 1.11 Kepadatan Penduduk di Kalimantan Barat 15
Tabel 1.12 Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota 17
Tabel 1.13 Prevalensi Balita Provinsi Kalimantan Barat Bermasalah Gizi Berdasarkan Status Gizi menurut Kabupaten/Kota 18
Tabel 1.14 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Lingkup Kalimantan Barat 19
Tabel 1.15 Jumlah Kejadian Bencana Alam Di Kalimantan Barat Tahun 2024 20
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Menurut Lapangann Usaha pada Triwulan IV Tahun 2025 24
Tabel 2.2 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat 2025 26
Tabel 2.3 Garis Kemiskinan Kalimantan Barat 29
Tabel 2.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 31
Tabel 2.5 Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat Menurut Subsektor Tahun 2023-2025 32
Tabel 2.6 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat 2025 34
Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025 37
Tabel 3.2 Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDRB 40
Tabel 3.3 Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kalbar per Sektor Tahun 2024 40
Tabel 3.4 Pagu Dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023-2025 41
Tabel 3.5 Pagu Dan Realisasi 15 K/L Pagu Terbesar Tahun 2025 42
Tabel 3.6 Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN Kalbar Berdasarkan Fungsi Tahun 2023-2025 43
Tabel 3.7 Profil BLU di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 47
Tabel 3.8 Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Sektor Tahun 2025 49
Tabel 3.9 Penyaluran Pembiayaan UMi Kalbar 50
Tabel 3.10 Penyaluran UMi Kalimantan Barat per Sektor Tahun 2025 51
Tabel 3.11 Pagu & Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan, Kesehatan serta Perumahan dan Fasilitas Umum 52
Tabel 3.12 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 54
Tabel 3.13 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 56
Tabel 3.14 Derajat Desentralisasi Fiskal Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 57
Tabel 3.15 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah 57
Tabel 3.16 Derajat Ketergantungan Kalimantan Barat Tahun 2023-2024 57
Tabel 3.17 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 57

Tabel 3.18 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Di Kalimantan Barat Tahun 2023-2025.. 57
Tabel 3.19 Rasio PNBP Terhadap Total Belanja BLUD 60
Tabel 3.20 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 62
Tabel 3.21 Tax Ratio Konsolidasian 2023-2025 63
Tabel 3.22 Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap PDRB 64
Tabel 4.1 Alokasi DAK Fisik & Belanja K/L (RO Harmonis) Kalbar Tahun 2025 66
Tabel 4.2 Jenis RO Yang Terdapat Pencadangan 66
Tabel 4.3 Pencadangan TKD Per Bidang Tahun 2025 67
Tabel 4.4 Perbandingan Belanja KL yang mendukung DAK Fisik dengan DAK Fisik pada 10 Bidang 67
Tabel 4.5 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum 70
Tabel 4.6 Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) Per Kementerian 70
Tabel 4.7 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik 71
Tabel 4.8 Jenis Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Jalan 72
Tabel 4.9 Jenis Kegiatan dan Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Ketahanan Pangan 73
Tabel 4.10 Jenis Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Sanitasi 74
Tabel 4.11 Jenis Kegiatan dan Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Irigasi 74
Tabel 4.12 Jenis Kegiatan dan Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Perumahan 75
Tabel 4.13 Capaian Output Utama Belanja K/L Yang Mendukung 10 Bidang DAK Fisik 76
Tabel 4.14 Satuan Kerja Pengelola Rincian Sub-Ouput Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 77
Tabel 4.15 Satuan Kerja Pengelola Rincian Sub-Ouput Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 78
Tabel 4.16 Satuan Kerja Pengelola Rincian Sub-Ouput Presevasi Jembatan 78
Tabel 5.1 Data Sebaran Pelaksanaan MBG per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (s.d. Desember 2025) 88
Tabel 5.2 Realisasi Program MBG di Regional Kalimantan (s.d. Desember 2025) 88
Tabel 5.3 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tahun 2024 dan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tahun 2025 88
Tabel 5.4 Sebaran Jumlah Sekolah Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2025/2026 89
Tabel 5.5 Sebaran Jumlah Siswa Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2025/2026 (dalam ribuan) 89
Tabel 5.6 Harga Bahan Pokok Makanan di Kalimantan Barat 90
Tabel 5.7 Hasil Uji Normalitas Harga Bahan Pokok Makanan 91
Tabel 5.8 Hasil Uji Friedman Dampak MBG terhadap Harga Bahan Pokok Makanan 91
Tabel 5.9 Nilai NTP Per Subsektor 91
Tabel 5.10 Hasil Uji Friedman Dampak MBG terhadap Nilai NTP Per Subsektor 92
Tabel 5.11 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Lima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 92
Tabel 5.12 Hasil Uji Friedman Dampak MBG terhadap Inflasi 92
Tabel 5.13 Kebutuhan dan Realisasi SPPG Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 93
Tabel 5.14 Hasil Estimasi Parameter Model Regresi Linear Berganda 108
Tabel 5.15 Hasil Uji Individu Parameter Model Regresi Linear Berganda 108
Tabel 5.16 Hasil Uji Multikolinearitas 109
Tabel 5.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas 109

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Realisasi Investasi Realisasi Investasi Kalimantan Barat Dalam Satu Dekade 11
Grafik 1.2 Investasi Berdasarkan Sektor di Kalimantan Barat Tahun 2025 11
Grafik 1.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/KotaTahun 2024 13
Grafik 1.4 Capaian Nilai Tukar Nelayan Periode 2021 s.d. 2025 Provinsi Kalimantan Barat 15
Grafik 1.5 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat (Jiwa) 15
Grafik 1.6 APS Kalimantan Barat & Nasional Tahun 2025 16
Grafik 1.7 Presentase Stunting Kalimantan Barat 17
Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan & Nasional Tahun 2023-2025 21
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional secara qtq Tahun 2023-2025. 22
Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, Nasional dan Regional Kalimantan (ctc) Tahun 2023-2025 22
Grafik 2.4 Pertumbuhan PDRB Kalbar Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (ctc) 23
Grafik 2.5 Pemetaan Matriks Komponen PDRB sisi Permintaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 23
Grafik 2.6 Pemetaan Matriks Komponen PDRB sisi Penawaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 24
Grafik 2. 7 Tren Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional (yoy) Tahun 2022 s.d. 2025 25
Grafik 2.8 Perbandingan Inflasi Kalbar dan Nasional (mtm) Tahun 2025 25
Grafik 2.9 Capaian IMP Kalimantan Barat, Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2023-2025 27
Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 2025 28
Grafik 2.11 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kalbar & Nasional Tahun 2023 s.d. 2025 29
Grafik 2.12 Rasio Gini Regional Kalimantan dan Nasional 30
Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2023 s.d. 2025 30
Grafik 2.14 Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025 31
Grafik 2.15 Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025 32
Grafik 2.16 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 33
Grafik 3.1 Komponen Pendapatan Dalam APBN Regional Kalimantan Barat Tahun 2025 38
Grafik 3.2 Tren Penerimaan Pajak Tahun 2023-2025 (dalam miliar rupiah) 38
Grafik 3.3 Presentase Penerimaan Pajak Terhadap Total Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023-2025 39
Grafik 3.4 Tren Penerimaan Bea Dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023-2025 39
Grafik 3.5 Presentase Penerimaan Bea dan Cukai Terhadap Total Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023-2025 39
Grafik 3.6 Tren PNBP dan Hibah Tahun 2023-2025 39
Grafik 3.7 Pagu dan Realisasi Belanja K/L Tahun 2025 40
Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Belanja TKD Tahun 2025 41
Grafik 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023-2025 42
Grafik 3.10 Presentase Penyaluran TKD Kalimantan Barat Tahun 2025 44
Grafik 3.11 Tren DBH Kalimantan Barat 2023-2025 45

Grafik 3.12 Tren DAK Kalbar 2023-2025 45
Grafik 3.13 Realisasi Perkomponen TKD Kalimantan Barat Tahun 2025 45
Grafik 3.14 Presentase Defisit APBN Terhadap Belanja Tahun 2023-2025 46
Grafik 3.15 Penyaluran KUR Kalimantan Barat Tahun 2015 s.d. 2025 47
Grafik 3.16 Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2025 48
Grafik 3.17 Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Skema Tahun 2025 49
Grafik 3.18 Tren Pembiayaan UMi Kalimantan Barat Tahun 2025 50
Grafik 3.19 Tren Realisasi Pendapatan Daerah 2023 s.d. 2025 54
Grafik 3.20 Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 s.d. 2025 55
Grafik 3.21 Target & Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 s.d. 2025 55
Grafik 3.22 Target & Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 s.d. 2025 56
Grafik 2.23 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat 58
Grafik 3.24 Realisasi Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 58
Grafik 3.25 Surplus APBD Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 59
Grafik 3.26 SiLPA APBD Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 59
Grafik 3.27 Total Aset BLUD Lingkup Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 60
Grafik 3.28 Tren Pendapatan Konsolidasian Tahun 62
Grafik 3.29 Komponen Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023-2025 63
Grafik 3.30 Belanja Konsolidasian Tahun 2024-2025 63
Grafik 3.31 Tren Surplus/Defisit dan Pembiayaan Konsolidasian 64
Grafik 4.1 DAK Fisik Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 67
Grafik 4.2 Distribusi Pagu Harmonisasi Belanja K/L Dan DAK Fisik 68
Grafik 4.3 Distribusi Realisasi Harmonisasi Belanja K/L Dan DAK Fisik 69
Grafik 4.4 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Jalan 71
Grafik 4.5 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Kesehatan 72
Grafik 4.6 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L RO Harmonis Bidang Ketahanan Pangan 73
Grafik 4.7 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Sanitasi 73
Grafik 4.8 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Irigasi 74
Grafik 4.9 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Perumahan 75
Grafik 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Regional Kalimantan Tahun 2025 89
Grafik 5.2 Tren IPM Kalbar 2023-2025 99
Grafik 5.3 Perbandingan IPM Kalbar 2023-2025 99
Grafik 5.4 Perbandingan Δ IPM Kalbar 2023-2025 99
Grafik 5.5 Tren Umur Harapan Hidup Kalbar 2023-2025 100
Grafik 5.6 Tren HLS dan RLS Kalbar 2023-2025 100
Grafik 5.7 Tren Pengeluaran per Kapita Kalbar 2023-2025 100
Grafik 5.8 IPM Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2025 100
Grafik 5.9 Δ IPM Kabupaten/Kota di Kalbar 101
Grafik 5.10 Perbandingan Kesehatan Penduduk dan Pemanfaatan Pelayanan 101
Grafik 5.11 Pergerakan Tingkat Keluhan Kesehatan Kabupaten/Kota di Kalbar 102
Grafik 5.12 Perbandingan Tingkat Sanitasi dan Air Bersih Kalbar 102
Grafik 5.13 Perbandingan Belanja Pemerintah per Fungsi Terkait Dimensi Kesehatan 103
Grafik 5.14 Perbandingan APS Kalimantan Barat Menurut Kelompok Umur 104
Grafik 5.15 Komposisi Pendidikan Tertinggi Penduduk Kalbar 104
Grafik 5.16 Perbandingan APS 16–18 Tahun per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 104

Grafik 5.17 Komposisi Pendidikan Tertinggi per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 104
Grafik 5.18 Perbandingan Belanja Pemerintah per Fungsi Pendidikan 105
Grafik 5.19 Perbandingan TPAK Kalimantan Barat 106
Grafik 5.20 Perbandingan Kualitas Lantai Layak per Kabupaten/Kota 106
Grafik 5.21 Perbandingan Kerentanan Pangan (Rentan Pangan vs Tidak Rentan) per Kabupaten/Kota 106
Grafik 5.22 Perbandingan Kepemilikan Aset (Aset Rendah vs Relatif Baik) per Kabupaten/Kota 107
Grafik 5.23 Perbandingan Belanja Pemerintah per Fungsi Terkait Dimensi Standar Hidup Layak 107

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kondisi Peta Jalan Regional Pulau Kalimantan Tahun 2025 12
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Tahun 2025 22
Gambar 4.1 Affinity Diagram Kendala dan Tantangan DAK Fisik 84

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH :

a. Rencana dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Perspektif RPJMN dan RPJMD

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat disusun selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan visi jangka panjang RPJPN 2025–2045, dengan mengintegrasikan visi daerah "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" ke dalam RPJMD 2025–2029. Prioritas pembangunan daerah difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan, penguatan kualitas SDM dan kesetaraan gender, penguatan fondasi ekonomi inklusif berbasis potensi unggulan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik. Melalui pendekatan klaster wilayah dan strategi pembangunan tematik, pemerintah daerah memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian guna mendukung pencapaian agenda nasional Indonesia Emas 2045.

b. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah

Kinerja pembangunan Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan tren positif dan relatif selaras dengan target RPJMN dan RPJMD, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62%, inflasi terkendali pada 1,85%, TPT sebesar 4,63%, serta Rasio Gini 0,308 yang menunjukkan distribusi pendapatan membaik. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,09 dan tingkat kemiskinan 6,25% yang masih dalam batas terkendali meskipun beberapa indikator seperti kontribusi PDRB provinsi, IPM, Indeks Ketahanan Pangan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya memenuhi target. Secara umum, capaian tersebut mengindikasikan fondasi ekonomi dan sosial yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan kebijakan yang lebih terfokus dan sinergis untuk memastikan akselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

c. Tantangan Daerah yang Dihadapi

Tantangan pembangunan Kalimantan Barat mencakup aspek struktural ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan kualitas pelayanan dasar antarwilayah. Meskipun investasi meningkat signifikan, dominasi PMA dibanding PMDN berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang, sementara kontribusi sektor hilirisasi dan nilai tambah industri masih perlu diperkuat. Dari sisi infrastruktur, karakteristik geografis berupa wilayah rawa, gambut, dan sungai besar menyebabkan tingginya kebutuhan pembiayaan konektivitas jalan, jembatan, dan air bersih, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang masih mengalami disparitas layanan. Selain itu, isu kemiskinan, stunting, kualitas pendidikan, ketahanan pangan, dan degradasi lingkungan menjadi tantangan strategis yang memerlukan pendekatan lintas sektor, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan efektivitas

kebijakan fiskal daerah agar sasaran pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

ANALISIS EKONOMI REGIONAL :

a. Kondisi PDRB Kalimantan Barat Triwulan IV 2025

Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan sebesar 5,39% (c-to-c) dan 5,62% pada Triwulan IV-2025, serta tumbuh 2,83% secara q-to-q yang didorong oleh hampir seluruh lapangan usaha. Pada Triwulan IV-2025, PDRB tercatat sebesar Rp328,57 triliun (ADHB) dan Rp171,33 triliun (ADHK 2010). Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi Desember 2025 sebesar 1,85% (y-on-y) dan IHK 108,8.

b. Indikator Kesejahteraan Regional

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari IPM sebesar 72,09 (kategori tinggi) yang terus meningkat sejak 2023, persentase penduduk miskin sebesar 5,97% yang berada di bawah nasional dan menurun dibanding Maret 2025, serta Gini Ratio 0,308 yang menunjukkan ketimpangan moderat dan terjaga. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,63% juga konsisten di bawah nasional, meskipun struktur tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dan tenaga kerja berpendidikan dasar. Dari sisi kesejahteraan petani dan nelayan, NTP sebesar 170,26 (tertinggi se-Kalimantan) dan NTN yang tetap di atas 100 mengindikasikan kondisi surplus. Secara keseluruhan, seluruh sasaran makro dan kesejahteraan dalam RKPD 2025 telah tercapai, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang resilien dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ANALISIS FISKAL REGIONAL :

a. Analisis dan Kinerja APBN

Kinerja APBN Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan capaian yang solid baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pada tahun 2025 Pendapatan Negara dan Hibah tercatat sebesar Rp112.980,92 miliar atau 104,54% dari target, dengan kontribusi utama berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai 101,18%. Pada sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp29.982,95 miliar atau 95,79% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp9.756,75 miliar (94,45%), di mana Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp4.611,40 miliar. Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp20.226,20 miliar atau 96,45% dari pagu. Dari sisi pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Barat tahun 2025 mengalami penurunan tipis sebesar 0,36% (yoy) dari Rp4,31 triliun pada 2024 menjadi Rp4,30 triliun. Berbanding terbalik dengan KUR, penyaluran UMi justru meningkat signifikan sebesar 153,11% menjadi Rp181,56 miliar, hal tersebut mencerminkan penguatan dukungan terhadap pembiayaan pada skema Ultra Mikro.

b. Analisis dan Kinerja APBD

Pelaksanaan APBD Kalimantan Barat Tahun 2025 secara konsolidasi menunjukkan kinerja pendapatan sebesar Rp23.329,47 miliar (81,46% dari target) dan realisasi belanja sebesar Rp20.534,43 miliar (69,88% dari pagu), sehingga mencatat surplus Rp2.795,04 miliar dengan SILPA Rp3.430,48 miliar. Surplus terutama disebabkan belum optimalnya penyerapan belanja, khususnya belanja modal. Pendapatan daerah mengalami kontraksi 12,65%

dibanding tahun sebelumnya, terutama dari penurunan pendapatan transfer Sementara itu, struktur belanja masih didominasi belanja operasi.

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH :

a. **Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis**

Pada tahun 2025, upaya harmonisasi antara Belanja K/L (RO Harmonis) dan DAK Fisik di Kalimantan Barat menunjukkan kinerja yang kuat dengan capaian realisasi yang sangat optimal. Belanja K/L mencapai Rp616,03 miliar dengan tingkat serapan 99,07%, sementara DAK Fisik mencapai 95,45% dari pagu akhir sebesar Rp795,68 miliar. Kedua instrumen pendanaan ini saling melengkapi, di mana Belanja K/L lebih banyak memperkuat sektor konektivitas dan irigasi, sementara DAK Fisik terkonsentrasi pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan permukiman. Kementrian Pekerjaan Umum memiliki alokasi pagi terbesar mencapai 98,32% dari total pagu Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, menggambarkan fokus pembangunan infrastruktur strategis, khususnya jalan. Optimalnya capaian realisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fleksibilitas anggaran, SDM perbendaharaan yang terbatas, hingga kendala teknis dalam pengadaan barang/jasa, regulasi yang berubah di tengah tahun, serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan kenaikan harga bahan.

b. **Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat**

Pada sisi DAK Fisik, tantangan yang dihadapi dipetakan melalui *Affinity diagaram* berdasarkan lima kategori utama yakni: regulasi, dokumen dan pelaporan, pelaksanaan, koordinasi, serta perencanaan. Permasalahan seperti keterlambatan penerbitan petunjuk teknis, dokumen syarat salur yang tidak lengkap, hingga perencanaan yang belum selaras dengan pagu menandai perlunya penguatan tata kelola.

c. **Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah**

Hasil survei upaya sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik menunjukkan bahwa baik pemerintah daerah maupun satuan kerja telah melakukan koordinasi, namun masih bersifat tentatif dan lebih fokus pada aspek teknis, belum ke arah koordinasi strategis jangka panjang. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan dan K/L untuk memastikan penyelarasan program semakin optimal. Penguatan pada aspek tata kelola, perencanaan, dan koordinasi tetap menjadi kunci untuk memastikan harmonisasi tersebut menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar dan merata bagi masyarakat Kalimantan Barat.

ANALISIS TEMATIK :

a. **Implementasi Program Makan Bergizi Gratis**

Implementasi MBG hingga Desember 2025, program ini telah menjangkau 31,2 juta penerima manfaat secara nasional atau 49,9 persen dari target. Di Kalimantan Barat, realisasi mencapai 634.364 penerima manfaat atau 50,74 persen dari target 1,25 juta. Pertumbuhan jumlah SPPG yang signifikan (dari 59 menjadi 219 unit) menunjukkan perluasan implementasi, meskipun masih jauh di bawah target 586 SPPG sehingga memerlukan percepatan. Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan cakupan MBG tertinggi di wilayah Kalimantan, terutama karena faktor jumlah penduduk, infrastruktur

sekolah, serta sasaran usia didik yang lebih besar dibandingkan provinsi lain. Dari sisi dampak, program MBG tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap harga bahan pokok, namun memberi efek terhadap inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di lima kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan permintaan akibat MBG berkontribusi pada pergerakan inflasi di tingkat regional. Sementara itu, program MBG belum menunjukkan dampak berarti terhadap kesejahteraan petani dan nelayan, tercermin dari tidak adanya perubahan signifikan pada NTP maupun NTN. Tantangan utama program meliputi lambatnya realisasi SPPG, kualitas laporan penggunaan anggaran yang belum seragam, serta tekanan harga pangan lokal akibat meningkatnya permintaan. Untuk itu, beberapa strategi direkomendasikan, seperti percepatan pembentukan SPPG, standardisasi pelaporan penggunaan anggaran melalui aplikasi nasional, penguatan produksi pangan lokal, serta agregasi kebutuhan pangan agar dapat dikaitkan dengan kelompok tani dan nelayan.

b. Potret IPM Provinsi Kalimantan Barat

IPM Kalimantan Barat periode 2023–2025 menunjukkan tren membaik, namun capaian agregat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan antar kabupaten/kota karena masih terdapat variasi indikator dan kantong wilayah tertahan yang berpotensi menghambat akselerasi. Pada dimensi kesehatan, peningkatan UHH belum sepenuhnya selaras dengan kondisi rumah tangga, ditandai dinamika keluhan kesehatan dan pola pemanfaatan layanan, sehingga diperlukan penguatan layanan primer serta pendekatan promotif–preventif yang lebih terarah. Di bidang pendidikan, HLS dan RLS meningkat, namun tantangan utama berada pada keberlanjutan ke jenjang menengah atas, khususnya usia 16–18 tahun, sehingga penguatan transisi SMP ke SMA menjadi krusial agar peningkatan RLS tidak melambat. Pada dimensi standar hidup, masih terdapat kerentanan di sejumlah wilayah yang tercermin dari variasi kualitas hunian, ketahanan pangan, dan kepemilikan aset, sehingga intervensi perlu lebih berbasis spasial dan kelompok rentan. Analisis regresi pada Kbupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan bahwa kemiskinan, TPAK, belanja kesehatan, dan belanja pendidikan relevan secara simultan terhadap IPM, namun secara parsial hanya TPAK signifikan dengan arah negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi kerja belum identik dengan peningkatan kesejahteraan karena masih didominasi pekerjaan berproduktivitas rendah. Seiring berakhirnya Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022, diperlukan evaluasi menyeluruh dan penyusunan rencana aksi periode berikutnya yang lebih menekankan pemerataan wilayah, penguatan layanan dasar, peningkatan transisi pendidikan menengah, serta penciptaan kerja yang lebih berkualitas.

KINERJA EKONOMI REGIONAL

INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi

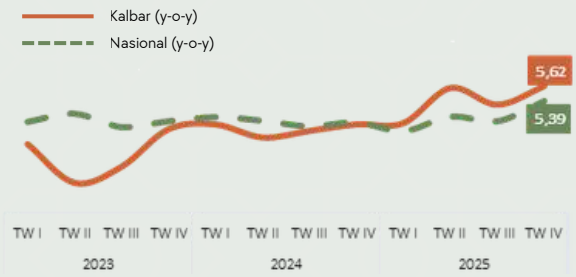

Q-TO-Q	Y-ON-Y	C-TO-C
2,83%	5,62%	5,39%

Kontribusi PDRB Menurut Regional Kalimantan

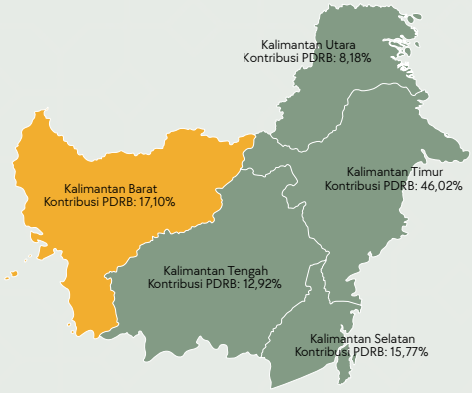

Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (y-on-y)

Pertambangan & Penggalian
38,11%

Jasa Keuangan & Asuransi
16,02%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
13,89%

Konstruksi
7,82%

NERACA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan

107,59
14,69% ▼ m-to-m

Nilai Impor

69,10
35,44% ▲ m-to-m

Nilai Ekspor

176,69
0,25% ▼ m-to-m

(Juta USD)

Negara Ekspor

Tiongkok	27,36
Belanda	20,22
Arab Saudi	12,92

Negara Impor

Tiongkok	49,07
Malaysia	41,20
Jepang	3,11

INFLASI, NTP, & NTN

Tingkat Inflasi

1,85% (y-on-y)
▲ 0,28% (m-to-m)

Andil Inflasi (y-on-y)

Makanan, Minuman, Tembakau

Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Transportasi

Penyediaan Makanan & Minuman

Nilai Tukar Petani

170,26
▼ 0,23%

It Indeks Harga Diterima Petani ▲ 0,04%
Ib Indeks Harga Dibayar Petani ▲ 0,28%

Nilai Tukar Nelayan

100,27
▼ 0,42%

It Indeks Harga Diterima Nelayan ▼ 0,15%
Ib Indeks Harga Dibayar Nelayan ▲ 0,27%

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Tingkat Kemiskinan

5,97%

322,54 Ribu orang penduduk miskin di Kalimantan Barat

P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan ▼ 0,727

P2 Indeks Keparahan Kemiskinan ▼ 0,154

(Data September 2025)

Rasio Gini

(Data Septenber 2025)

0,308

Perkotaan
0,341
▼ Turun 0,007 poin dibandingkan Maret 2025

Pedesaan
0,267
Tidak berubah dibandingkan capaian Maret 2025.

Tingkat Pengangguran

(Data November 2025)

TPT November 2025
4,63%
▼ Turun 0,19 persen poin dibanding Agustus 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM

Kalimantan Barat Tahun 2025
72,09

Harapan Hidup
74,28 Tahun

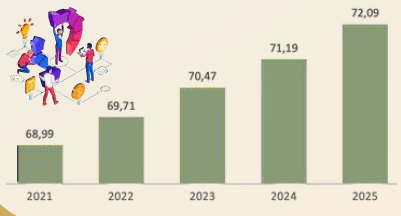

Harapan Lama Sekolah
12,69 Tahun

Pengeluaran Perkapita
10.689 Ribu

Sumber: BPS (diolah)

KINERJA FISKAL REGIONAL

KINERJA APBN

Pendapatan APBN

Pagu	12.417,38 M
Realisasi	12.980,92 M
▼ 1,98% (y-on-y)	

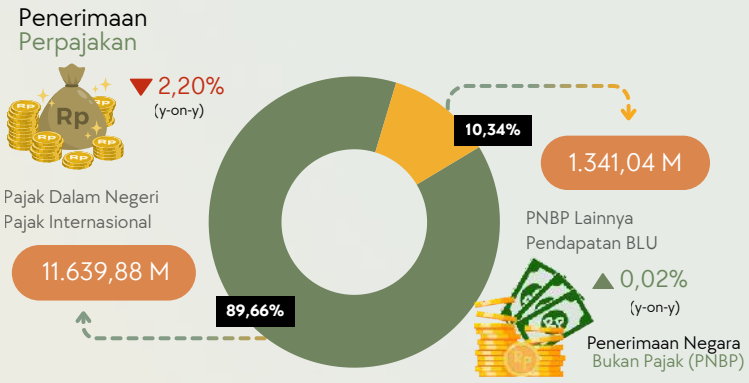

Belanja APBN

Pagu	31.301,68 M
Realisasi	29.982,95 M
▼ 9,11% (y-on-y)	

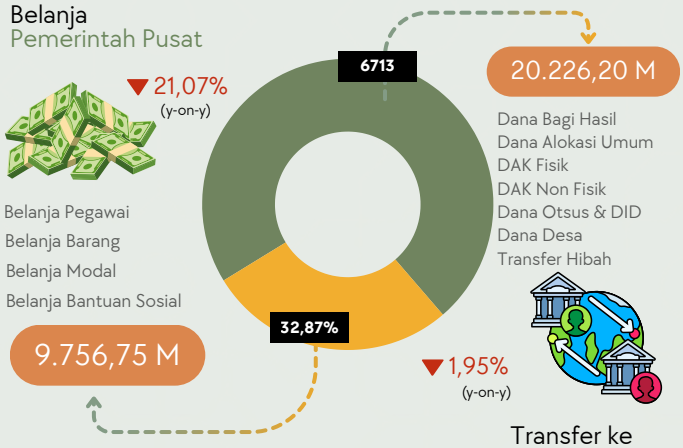

Defisit 17.002,03 M

Sumber: Treasury Big Data (diolah)

KINERJA APBD

Pendapatan APBD

Pagu	28.638,69 M
Realisasi	23.329,47 M
▼ 12,65% (y-on-y)	

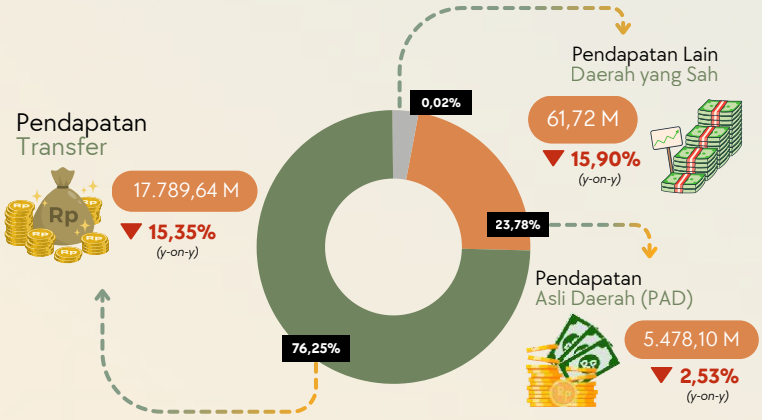

Surplus 2.795,04 M

SILPA 3.430,48 M

Belanja APBD

Pagu	29.387,17 M
Realisasi	15.268,12 M
▼ 22,73% (y-on-y)	

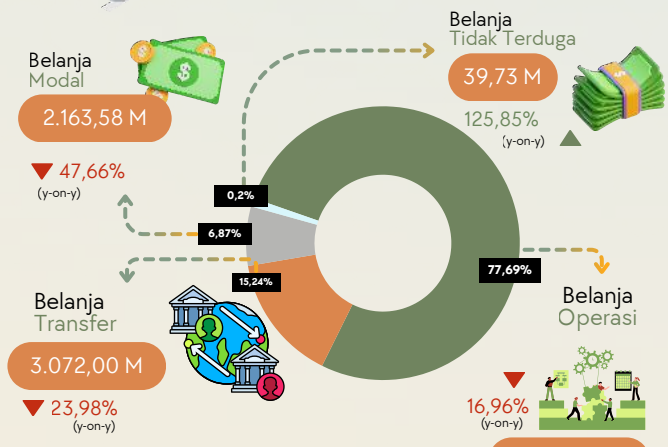

Pembiayaan 635,44 M

Sumber: SIKRI dan SIKD (diolah)

Program Prioritas Nasional

IMPLEMENTASI MBG

Sebaran SPPG Kalbar

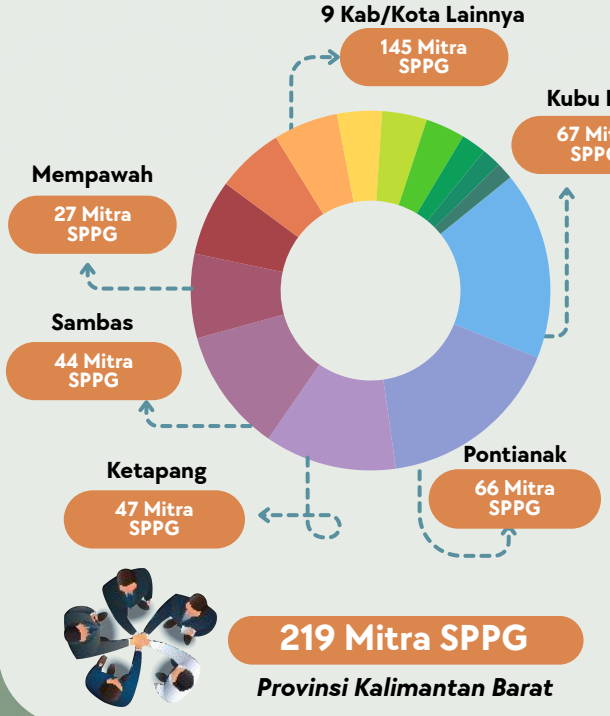

219 Mitra SPPG

Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah Sekolah di Kalbar

6.600 Sekolah

Jumlah Siswa di Kalbar

2.071.817 Siswa

Jumlah Penduduk di Kalbar

5.766,03 Ribu Jiwa

Mitra SPPG & Jumlah Penerima di Regional Kalimantan

Sumber: BPS, Sintesa dan Koordinator SPPG Prov. Kalbar (diolah)

Potret IPM Kalimantan Barat

Perbandingan Δ IPM Kalbar 2023-2025

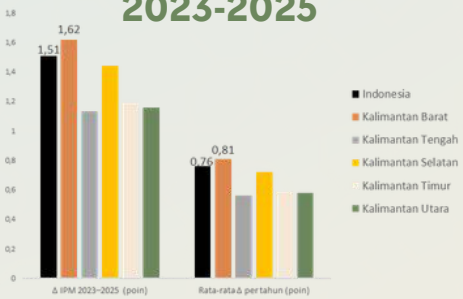

IPM Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2025

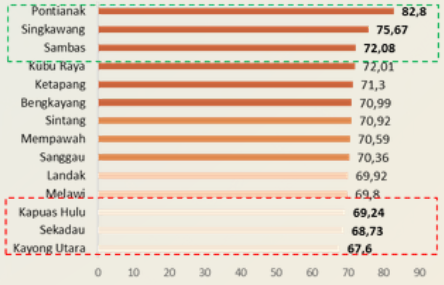

Tren Umur Harapan Hidup Kalbar 2023-2025

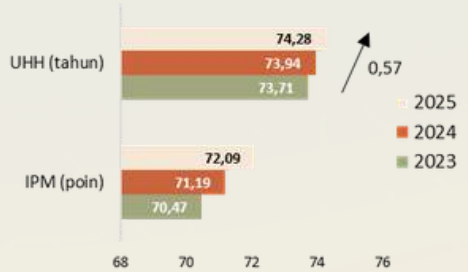

Tren HLS dan RLS Kalbar 2023-2025

Tren Pengeluaran per Kapita Kalbar 2023-2025

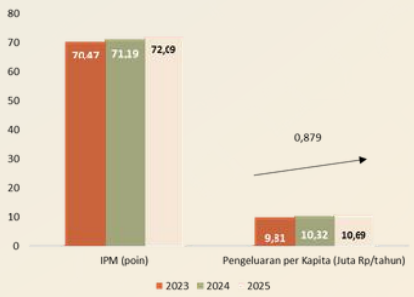

Sumber: BPS dan BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

BAB I
Sasaran Pembangunan Dan Tantangan Daerah

1.1. Pendahuluan

Setiap negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Secara umum, tujuan bernegara tersebut berpedoman pada konsep mensejahterakan rakyatnya (*welfare state*), tidak terkecuali untuk NKRI. Tujuan bernegara di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi mewujudkan cita-cita mulia NKRI tersebut, secara lebih rinci tujuan negara diuraikan ke dalam perencanaan pembangunan yang terbagi dalam jangka panjang (RPJP Nasional/Daerah); jangka menengah (RPJM/RPJMD); dan jangka pendek (RKP/RKPD).

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahapan tersebut terdiri dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kualitas perencanaan yang baik, perlu didukung oleh kualitas eksekusi yang baik agar sasaran pembangunan dan tujuan negara dapat terwujud. Oleh karena itu, pada tataran pelaksanaan rencana, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen yang penting dan menentukan.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian atas sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah ditingkat pusat maupun daerah dalam memastikan efektivitasnya. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama yakni sebagai alat alokasi; distribusi; dan stabilisasi, maka kebijakan fiskal yang efektif diharapkan mampu meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator-indikator ekonomi makro serta kesejahteraan di daerah yang menjadi indikator dalam keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan. Kebijakan fiskal dapat menjadi umpan balik dalam perbaikan dan penyempurnaan rencana ke depan. Pada tahapan pelaksanaan akan muncul berbagai tantangan dan kendala dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dalam tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Identifikasi atas berbagai fenomena dan dinamika pada tahapan pelaksanaan yang optimal, dapat menghasilkan umpan balik yang berkualitas dan tepat sasaran.

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dengan berlakunya asas otonomi daerah mengartikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daya saing dan mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah wajib menyusun tujuan dan sasaran pembangunannya dengan memperhatikan karakteristik dan potensi di daerahnya, namun tetap mengacu, memperhatikan serta selaras dengan rencana pembangunan nasional. Prinsip ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, guna memastikan pembangunan yang harmonis, terarah, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional.

1.2.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Provinsi Kalimantan Barat menetapkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yaitu "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Visi ini menjadi

pedoman utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sebagai bentuk implementasi, pemerintah daerah telah merumuskan RPJMD dengan visi pembangunan "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan". Langkah strategis yang diimplementasikan untuk mewujudkan visi yang tertera pada RPJPD dan RPJMD adalah dengan mengarahkan pembangunan Kalimantan Barat pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang adil dan berkelanjutan melalui pemerataan pembangunan wilayah, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal, serta penjaminan kepastian hukum, stabilitas daerah, dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diperintah secara khusus untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Instruksi penyusunan RPD ini merupakan solusi untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepala daerah, sehingga keberlanjutan program dan kebijakan pembangunan daerah tetap terjamin hingga ditetapkannya RPJMD yang baru.

RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berperan sebagai instrumen transisi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan selama masa kepemimpinan Penjabat Gubernur. Meskipun bersifat transisi, tujuan pembangunan yang ditetapkan tetap berpedoman pada visi pembangunan jangka panjang, dengan fokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing, perwujudan perekonomian yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan serta reformasi birokrasi yang berprinsip *good governance*.

Mengutip dari RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun, pada periode saat ini karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun RPD 2024-2026 menggunakan pendekatan yang berbeda dari periode sebelumnya dengan mempertimbangkan empat hal sebagai berikut:

1. Sembilan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045;
2. Delapan agenda pembangunan RPJMN 2025-2029;
3. Tujuh agenda pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029;
4. Isu-isu strategis 2024-2026.

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran pada RPD Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Keterjangkauan Pendidikan Yang Berkeadilan.
		Meningkatnya Standar Hidup Layak Berfokus pada Peningkatan Pendapatan, Akses Pangan, Lapangan Kerja, Daya Beli dan Kehidupan Sosial.
2	Mewujudkan Perekonomian yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
		Meningkatnya Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan.
		Meningkatnya Kondusifitas, Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana.
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berprinsip *Good Governance*	Meningkatnya Kualitas SDM, efektivitas dan Efisiensi Layanan Publik.
		Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Kebijakan Publik.

Sumber: RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (diolah)

Isu strategis Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2026 dalam Rencana Pembangunan Daerah merupakan kristalisasi dari berbagai permasalahan pokok yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan arah pembangunan daerah. Isu-isu tersebut tidak hanya merefleksikan tantangan aktual yang dihadapi, tetapi juga menjadi titik ungkit (*leverage point*) dalam menentukan prioritas kebijakan, alokasi sumber daya, serta fokus intervensi pembangunan selama periode perencanaan. Berikut beberapa aspek yang menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, permasalahan yang masih menjadi isu antara lain:
   a. Masih terdapat kesenjangan pendapatan antar wilayah;
   b. Tingkat keparahan kemiskinan cenderung naik;
   c. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
   d. Prevalensi balita gizi buruk masih cukup tinggi;
   e. Tingginya kasus perkawinan anak di daerah.
2. Aspek Pelayanan Umum, permasalahan yang masih menjadi isu antara lain:
   a. Meningkatnya Angka Putus Sekolah;
   b. Masih rendahnya partisipasi pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA);
   c. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik;
   d. Masih belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan;
   e. Masih tingginya fluktuasi stabilitas harga pangan pokok antar waktu dan antar wilayah terutama pada harga pangan yang menjadi pemicu inflasi daerah;
   f. Belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi sesuai dengan Program (100 0-100);
   g. Masih rendahnya kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Kalimantan Barat;
   h. Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi provinsi/kabupaten;
   i. Masih banyak desa disekitar perkebunan, kawasan hutan dan pulau- pulau kecil yang belum teraliri listrik;
   j. Kalimantan Barat masih merupakan provinsi pengemisi Gas Rumah Kaca (GRK);
   k. Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan Penataan Ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007;
   l. Masih kurang transparannya pengelolaan keuangan daerah;
   m. Masih belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Aspek Daya Saing Daerah, permasalahan yang masih menjadi isu antara lain:
   a. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha/Investasi yang kondusif untuk menarik masuknya arus penanaman modal baik PMDN maupun PMA;
   b. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
   c. Kapasitas produksi UMKM cenderung stagnan;
   d. Kondisi jalan provinsi masih banyak dalam kondisi rusak;
   e. Masih banyak jalan yang belum memenuhi standar teknis;
   f. Masih banyak terdapat blank spot terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil.

Permasalahan pembangunan yang dijabarkan adalah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya). Atas dasar permasalahan strategis, prioritas pembangunan, kebijakan dalam RTRW 2005 s.d. 2-25, RPJMN, dan hasil evaluasi capaian SDGs, berikut telah dirumuskan empat isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023 s.d. 2026 diantaranya:

1. Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan;
2. Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing;
3. Transformasi Pelayanan Publik;
4. Aksesibilitas Infrastruktur Dan Ketahanan Bencana.

Untuk menwujudkan cita-cita pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, berikut disusun target indikator kinerja yang tertuang pada RPD Kalimantan Barat tahun 2024 s.d. 2026 pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target Indikator Kinerja Dalam RPD Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Pembangunan	Tahun 2024	Tahun 2025	*Forecasting* Akhir Periode (2026)
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,98	71,61	72,13
Indeks Pendidikan	10,95	11,13	11,03
Usia Harapan Hidup (UHH)	71,50	71,55	71,75
Prevelensi Stunting	15	14	13
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,2		89,5
PPP	9.500.000	9.650.000	9.730.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,32	3,53	2,78
Angka Kemiskinan	6,55	6,37	6,19
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	78,01	81,61	85,21
Mewujudkan Perekonomian yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan			
Pertumbuhan Ekonomi	5,82	6,16	6,45
Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca	27,24		27,99
Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan	5,01	5,39	5,78
Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,08	3,15
Indeks Infrastruktur	74,29	75,29	80,2
Jumlah Desa Mandiri	615,00	683	700
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	100	100	100
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,78	8,21	4,96
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,59	72,9	73,21
Nilai Emisi GRK Sektor	21.903.957,36	22.725.154,35	23.554.335,38
Indeks Risiko Bencana	135,00	133,00	130,00
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berprinsip *Good Governance*			
Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	A
Indeks Kepuasan Masyarakat	86,42	86,98	87,54
Indeks Sistem Merit	301	301,5	302
Nilai SAKIP	A	A	A
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
Tingkat Keberhasilan Kinerja Daerah	82,5	84,0	85,5

Sumber: RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (diolah)

1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun demikian, dalam konteks Provinsi Kalimantan Barat, terjadi kekosongan dokumen RPJMD seiring berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan pelaksanaan Pilkada serentak. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari RPD 2024–2026 guna menjamin kesinambungan arah dan prioritas pembangunan daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 mengusung tema "Penguatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka makro, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam dokumen ini termuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan tahunan, serta rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Lebih lanjut, RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus landasan strategis dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Melalui perumusan sasaran, indikator kinerja, dan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, RKPD memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan pembangunan jangka menengah transisi. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen administratif tahunan, tetapi juga alat pengendali untuk menjaga konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Rumusan strategis merepresentasikan refleksi atas capaian kinerja pemerintah, baik keberhasilan yang perlu diperkuat maupun kendala yang harus diperbaiki. Melalui rumusan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor penghambat, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta menetapkan arah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, dibutuhkan pendekatan komprehensif, terukur, dan terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dengan konsistensi antara prioritas, alokasi sumber daya, serta pengendalian dan evaluasi. Langkah strategis selanjutnya disajikan pada Tabel 1.3 sebagai pedoman operasional.

Tabel 1.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Pembangunan Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing	Meningkatnya SDM Yang Berdaya Saing, Berfokus pada Keterjangkauan Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan serta Standar Hidup Layak	Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Kesehatan
		Menciptakan Kestabilan Harga untuk Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat
Mewujudkan Perekonomian Yang tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penyediaan Infrastruktur Produksi
		Penguatan dan Pengawalan Investasi
		Menciptakan Akses Pasar
		Pendampingan Pelaku Usaha
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lapangan Usaha Unggulan
Reformasi Birokrasi Yang Berprinsip *Good Governance* Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis, Adaptif dan Berorientasi pada Pelayanan

Sumber : RKPD Kalimantan Barat Tahun 2025 (diolah)

Tabel 1.4 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 s.d. 2026

No.	Kluster dan Wilayah	Sektor Unggulan	Permasalahan Wilayah	Prioritas Pembangunan
1	**Kluster I** (Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, dan Kab. Mempawah)	- Jasa dan Perdagangan - Industri - Pertanian - Perkebunan	- Banjir - Karhutla - Kemacetan	- Pembangunan Jembatan Kapuas III - Pembangunan *Outer Ring Road dan Outer Ring Canal* PKN Pontianak - Pengembangan Pelabuhan Kijing Tahap 1 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus - Pengembangan *Food Station* - Pembangunan TPA Regional - Pembangunan Jalan Tol Supadio –Pontianak – Mempawah – Kijing
2	**Kluster II** (Kota Singkawang, Kab. Sambas, dan Kab. Bengkayang)	- Jasa dan Perdagangan - Perikanan - Pertanian - Perkebunan - Kriya	- Banjir - Abrasi Pantai - Penyediaan Air Bersih - Penanganan Kawasan Kumuh	- Pembangunan Bandara Singkawang - Pembangunan Jembatan Sambas Besar - Pengembangan Kawasan PLBN Jagoi Babang - Pembangunan PLB Temajuk - Pengembangan *Food Estate* dan Minapolitan - Pengembangan Sanitasi Rumah Tangga - Penanganan Abrasi Pantai
3	**Kluster III** (Kab. Sanggau, Kab. Landak, dan Kab. Sekadau)	- Pertambangan - Pertanian - Perkebunan - Hasil Hutan	- Longsor - *Illegal Logging* - *Illegal Mining* - Sanitasi	- Pembangunan Jalan Pararel dan Akses Perbatasan - Pengembangan Kawasan *Hinterland* Perbatasan - Peningkatan Jalan Provinsi - Pengembangan Kawasan Perdesaan - Pengembangan Energi Baru Terbarukan - Pengembangan *Cross Border Tourism* - Pengembangan Sanitasi Rumah Tangga
4	**Kluster IV** (Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, dan Kab. Melawi)	- Jasa dan Perdagangan - Perikanan - Pertanian - Perkebunan - Pertambangan - Industri	- Deforestasi - Banjir - Desa Gelap Gulita	- Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan - Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Lintas Tengah - Peningkatan Jalan Provinsi, Pembangunan Jembatan Semitau - Pengembangan PLBN Badau - Pembangunan PLBN Sei Kelik, - Pengembangan *Food Estate* - Pengembangan Bandara Pangsuma - Pembangunan Terminal Tipe A Sintang - Pembangunan PLTA Pinoh dan PLTA Kalis - Pembangunan PLTMH Ketungau - Pengembangan Sanitasi Rumah Tangga
5	**Kluster V** (Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara)	- Jasa dan Perdagangan - Perikanan - Pertanian - Perkebunan - Pertambangan - Industri	- Banjir - Abrasi Pantai - Karhutla	- Pembangunan Bandara Sukadana - Peningkatan Jalan Nasional Siduk – Sungai Kelik - Peningkatan Jalan Provinsi Nanga Tayap – Manis Mata - Pengembangan Food Estate Seponti Jaya - Pembangunan RS Pratama Sandai - Pengembangan Minapolitan Teluk Batang - Pengembangan Sanitasi Rumah Tangga, - Penanganan Abrasi Pantai

Sumber: RKPD Kalimantan Barat Tahun 2025 (diolah)

Dalam rangka mengarahkan pembangunan yang lebih terfokus dan berdampak nyata, Provinsi Kalimantan Barat menerapkan pendekatan pengembangan wilayah berbasis kluster sebagai strategi percepatan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah sekaligus menjawab ketimpangan antar daerah, sehingga pembangunan

tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan saling menguatkan.

Fokus pembangunan tersebut dibagi dalam basis Kluster (tertera pada Tabel 1.4) yang menjadi pedoman dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 selain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034. Pembagian Kluster Pengembangan Wilayah mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

- Kondisi Geografis;
- Ekoregion (Tipe Ekosistem dan Kondisi Sistem Lahan);
- Memiliki Pusat Kegiatan Nasional atau Pusat Kegiatan Wilayah sebagai Pusat Kluster;
- Memiliki Pusat Layanan Kesehatan (RS);
- Memiliki Pusat Layanan Pendidikan (Universitas/Akademi);
- Memiliki Pusat Layanan Perekonomian Skala Regional.

Secara makro, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dikelompokkan ke dalam beberapa kluster dirancang untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih terarah dan berbasis potensi unggulan masing-masing wilayah. Pendekatan kluster ini mempertimbangkan karakteristik sumber daya alam, struktur ekonomi, konektivitas wilayah, serta kapasitas sumber daya manusia, sehingga setiap daerah dapat berkembang sesuai keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Dengan pengelompokan tersebut, pembangunan diarahkan agar tidak berjalan secara parsial atau sektoral semata, melainkan terintegrasi melalui keterkaitan antarwilayah, penguatan rantai pasok, serta sinergi pusat-pusat pertumbuhan. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi disparitas antar daerah, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta menciptakan sistem pembangunan yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam jangka menengah maupun panjang.

Pendekatan kluster memungkinkan penguatan sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak utama aktivitas perekonomian, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Melalui penguatan tersebut, diharapkan terbentuk pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi wilayah sekitarnya.

Dengan optimalisasi sektor unggulan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah dapat diwujudkan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Penguatan pada sektor-sektor produktif tidak hanya mendorong peningkatan output, tetapi juga memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB, memperluas rantai nilai (*value chain*), serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional. Dampak lanjutannya diharapkan berupa terbukanya lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta tumbuhnya iklim investasi yang kondusif. Dalam jangka menengah dan panjang, kondisi ini akan mendukung transformasi struktur ekonomi daerah dari yang berbasis komoditas mentah menuju ekonomi yang lebih bernilai tambah, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Peningkatan aktivitas ekonomi pada setiap kluster wilayah selanjutnya diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata, selaras dengan target indikator kinerja dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2026.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 tidak terlepas dari hasil realisasi capaian pembangunan ekonomi tahun 2023, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2025. Pada tahun 2025, fokus pembangunan diarahkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta dukungan infrastruktur dasar dan tata kelola data yang terpadu. Selain itu, kebijakan difokuskan pada stabilisasi daya beli, percepatan penurunan stunting melalui peningkatan gizi, sanitasi, dan akses air bersih, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan, serta penguatan ekspor dan daya saing daerah melalui UMKM, pengelolaan SDA berkelanjutan, peningkatan investasi, pengembangan SDM, dan perbaikan pelayanan dasar.

1.3. Keselarasan RPJMN Dengan RPJMD

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang disusun dengan mengacu dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025–2029 guna memastikan keterpaduan arah kebijakan nasional dan daerah. Penyelarasan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tercipta sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun regional.

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan rencana strategis, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas sektor, serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan selama periode lima tahun.

Tabel 1.5 Keterkaitan Prioritas Daerah Kalimantan Barat Dengan Prioritas Nasional Tahun 2025

Klasifikasi	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	PD1. Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	PN3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Pembangunan SDM dan Kesetaraan Gender	PD2. Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
	PD4. Meningkatkan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan	
	PD5. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda	
Perekonomian Inklusif dan Berkelanjutan	PD3. Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		PN2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA	PD6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	PN5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum	PD7. Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang Baik	PN1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
		PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Sumber: RPMD Kalimantan Barat 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 (diolah)

Keterkaitan antara Visi pembangunan daerah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045, serta RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2029 sangatlah penting untuk memastikan keselarasan Tujuan dan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Pada tahun 2025, Kalimantan Barat memiliki tujuh prioritas daerah (PD) berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029. Ketujuh prioritas daerah tersebut meliputi:

1. PD1 - Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan;
2. PD2 - Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender;
3. PD3 - Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan;
4. PD4 - Meningkatkan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan;
5. PD5 - Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda;
6. PD 6 - Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan;
7. PD7 - Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang Baik.

Ketujuh prioritas daerah tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional, mengingat penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan dan mempertimbangkan delapan agenda RPJMN 2025-2029. Di samping itu, penyusunan RPJMD juga tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Keterkaitan antara delapan prioritas nasional dan ketujuh prioritas daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 tertera pada tabel 1.5.

Selain itu, Visi nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 mengusung konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang mengarah pada cita-cita Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju, serta menjaga keberlanjutan dalam segala aspek. Visi ini menjadi pijakan untuk mencapai kemajuan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang efisien.

Visi ini kemudian dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, yang menargetkan Visi berupa Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN ini berfokus pada pencapaian kemajuan bangsa dalam jangka menengah, mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Indonesia Emas. Pencapaian ini melibatkan pembangunan yang merata di seluruh sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi berbasis digital.

Berkaitan dengan Visi nasional tersebut, RPJPD 2025-2045 Provinsi Kalimantan Barat merumuskan arah pembangunan jangka panjang dengan Visi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen provinsi untuk mendukung Tujuan nasional dengan memperhatikan potensi lokal dan kekhasan daerah, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tabel 1.6 Keterkaitan Visi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat

Visi Nasional		Visi Provinsi Kalimantan Barat	
RPJPN 2025 – 2045	RPJMN 2025 – 2029	RPJPD 2025 – 2045	RPJMD 2025 – 2029
Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, Dan Berwawasan Lingkungan

Sumber: RPJMD Kalimantan Barat 2025 s.d. 2029 (diolah)

1.4. Capaian Atas Keselarasan RPJMN dengan RPJMD Kalimantan Barat

Tabel 1.7 Sasaran Indikator dan Capaian Pembangunan Daerah Pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kalbar 2025-2029

No.	Sasaran	Target RPJMN 2025	Target RPJMD 2025	Realisasi 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,30–5,65	5,62
2	Tingkat Inflasi	2,5±1,0	1.5-3.5	1,85
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)		1,3	0,81
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0–8,0	5,65–6,15	6,25
5	Rasio Gini	0,378–0,382	0,315–0,321	0,308
6	Indeks Ketahanan Pangan	73,2	70,3	71,52
7	Indeks Pembangunan Manusia		72,47	72,09
8	IKLH	74,69	77,51	
9	TPT	4,50–5,00	4,73–4,86	4,63

Sumber : RPD Kalimantan Barat 2024-2026, RPJMN Tahun 2025-2029 dan BPS (diolah)

RPJMN 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi acuan dan pedoman bagi perencanaan di tingkat daerah. Harmonisasi antara RPJMN dan RPJMD menjadi hal yang vital untuk memastikan program serta kegiatan daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan capaian tahun 2025 yang tertera pada table 1.7, kinerja pembangunan Kalimantan Barat menunjukkan tren yang cukup menggembirakan dan berada pada jalur yang sejalan dengan target perencanaan. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,62 persen, berada dalam rentang target RPJMD (5,30–5,65 persen) serta melampaui target nasional (5,3 persen). Tingkat inflasi berhasil dijaga pada level 1,85 persen, tetap dalam rentang sasaran daerah (1,5–3,5 persen) dan mencerminkan stabilitas harga yang terkendali. Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,63 persen juga berada dalam kisaran target RPJMD (4,73–4,86 persen), menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja yang cukup solid.

Tingkat kemiskinan sebesar 6,25 persen masih berada dalam rentang target RPJMD (5,65–6,15 persen) dan menunjukkan arah yang semakin terkendali. Rasio Gini tercatat 0,308, lebih baik dari rentang target (0,315–0,321), yang mengindikasikan distribusi pendapatan yang semakin merata. Indeks Ketahanan Pangan mencapai 71,52, mendekati target yang ditetapkan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 72,09, mencerminkan konsistensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, capaian ini menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Barat tahun 2025 berada pada fondasi yang kuat dan progresif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dari sembilan sasaran indikator pembangunan tahun 2025, terdapat empat indikator yang belum mencapai target RPJMD, yaitu Kontribusi PDRB Provinsi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Meskipun demikian, capaian keempat indikator tersebut masih berada dalam batas yang relatif terkendali dan mencerminkan adanya ruang penguatan melalui kebijakan yang lebih terarah, terpadu, dan berbasis prioritas. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025, terdapat dua indikator kesejahteraan yang belum memenuhi sasaran nasional, yakni Indeks Ketahanan Pangan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sehingga diperlukan peningkatan sinergi kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan guna memastikan keselarasan capaian pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

1.5. Tantangan Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan, permasalahan dan isu strategi perlu diperhatikan dan dikedepankan mengingat dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan. Selanjutnya penting untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi dan penyelesaian permasalahan yang timbul sepanjang tahapan pembangunan. Berikut tantangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat:

1.5.1. Tantangan Ekonomi Daerah

Dilihat dari kacamata ekonomi makro, pembangunan ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan setiap daerah diharapkan mampu mencapai bahkan melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan dari sisi mikro penting untuk melihat apakah perekonomian telah meningkat pada masing-masing sektor perekonomian yang mengarah pada peningkatan ekspor dan hilirisasi. Di wilayah Kalimantan Barat tantangan pembangunan di bidang ekonomi dapat di kelompokan sebagai berikut:

1. Investasi dan Permodalan

Fokus masalah yang menjadi perhatian adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan koperasi serta lembaga keuangan mikro masyarakat lainnya. Berbagai tantangan dalam pembangunan penanaman modal diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Dalam satu dekade terakhir 2016 s.d. 2025, realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang cukup kuat meskipun diwarnai fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Realisasi perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2016–2025 yang didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan tren meningkat dalam jangka panjang, meskipun sempat berfluktuasi pada 2018 dan 2022. Memasuki periode 2023–2025, kinerja investasi mengalami akselerasi yang signifikan, ditandai dengan lonjakan PMDN dan peningkatan tajam PMA pada tahun 2025.

Grafik 1.1 Realisasi Investasi Realisasi Investasi Kalimantan Barat Dalam Satu Dekade

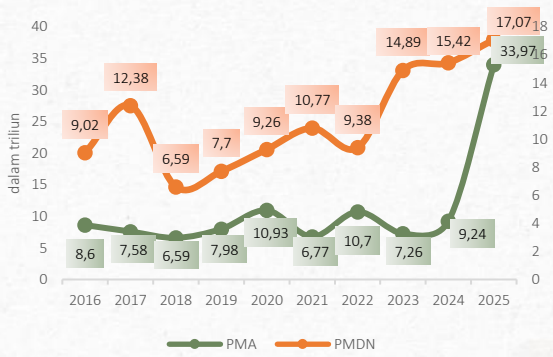

Sumber: Data BKPM (diolah)

Pada tahun 2025, realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, ditandai dengan lonjakan PMA yang mencapai sekitar Rp33,97 triliun serta PMDN yang meningkat menjadi sekitar Rp17,07 triliun. Total investasi Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai Rp51 T dengan lonjakan pertumbuhan yang signifikan sebesar 107,03%. Capaian ini mencerminkan menguatnya kepercayaan investor, baik asing maupun domestik, sekaligus menunjukkan akselerasi aktivitas ekonomi dan efektivitas kebijakan penguatan iklim investasi di daerah. Investasi pada tahun 2025 didominasi oleh sektor Industri Logam Dasar; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI; Indsutri Makanan; dan Pegudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan.

Grafik 1.2 Investasi Berdasarkan Sektor di Kalimantan Barat Tahun 2025

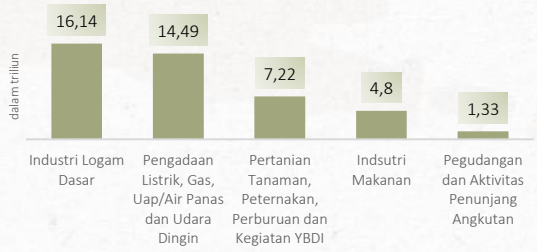

Sumber: Data BKPM (diolah)

Dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tantangan tersendiri. Meskipun kondisi ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas kesempatan kerja, ketidakseimbangan tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan struktural terhadap investor asing dalam jangka panjang.

2. Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis dilewati oleh sejumlah sungai besar dan anak sungai yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota, dengan karakteristik wilayah yang didominasi tanah rawa dan gambut. Kondisi bentang alam tersebut menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, mengingat daya dukung tanah yang relatif rendah, mudah mengalami penurunan, serta rentan terhadap genangan dan banjir musiman. Banyaknya aliran sungai juga meningkatkan kebutuhan pembangunan jembatan dan struktur penyeberangan guna menjamin konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di Kalimantan Barat memerlukan pendekatan teknis khusus yang memadai agar infrastruktur dapat berfungsi secara optimal, aman, dan berkelanjutan.

Jika dilihat berdasarkan per kabupaten/kota, kondisi infrastruktur memperlihatkan disparitas yang cukup signifikan. Di pusat kota dan kabupaten besar seperti Pontianak, Kubu Raya, Singkawang, serta Sambas kondisi pelayanan jalan relatif lebih mantap, mengikuti pertumbuhan ekonomi dan aktivitas urban. Sementara itu, wilayah pedalaman dan kabupaten interior seperti Sintang menunjukkan tantangan serius: data 2024 menunjukkan hanya sekitar 11% dari total 1.700 km jalan kabupaten yang berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya bervariasi dalam tingkat kerusakan dari ringan hingga berat.

Merujuk pada data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Tahun 2025, total panjang jalan nasional di Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebesar 2.287,52 kilometer, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria kondisi diantaranya:

Tabel 1.8 Kriteria Kondisi Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

No	Kondisi Jalan	Jumlah (km)	%
1	Baik	1081,42	47,27
2	Sedang	1146,87	50,14
3	Rusak Ringan	55,03	2,41
4	Rusak Berat	4,20	0,18
Total		**2287,52**	**100%**

Sumber: Kementerian PUPR (diolah)

Secara rata-rata kondisi jalan 96,40% dalam keadaan mantap dan 3,60% dalam keadaan tidak mantap. Jalan dikatakan mantap apabila jalan dalam keadaan kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang dikatakan tidak mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Gambar 1.1 Kondisi Peta Jalan Regional Pulau Kalimantan Tahun 2025

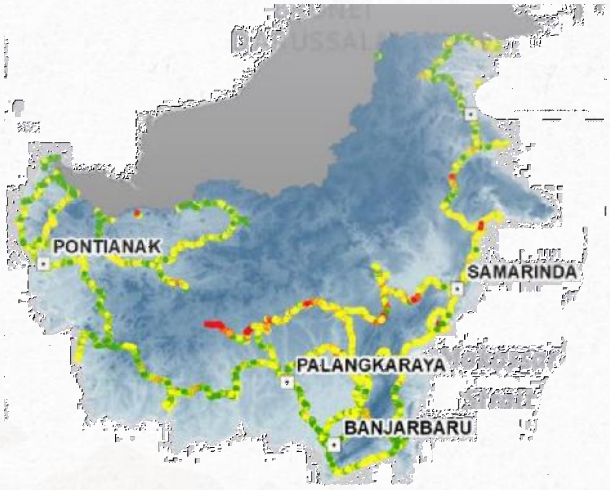

Sumber: Kementerian PUPR (diolah)

Jika dicermati pada Gambar 1.1, konektivitas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masih belum optimal. Tantangan pembangunan konektivitas antarprovinsi semakin kompleks mengingat luasnya wilayah, karakteristik geografis yang didominasi hutan dan lahan rawa, serta kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang relatif besar. Oleh karena itu, percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lintas provinsi menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disamping infrastruktur jalan, Ketersediaan infrastruktur air bersih di Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mendukung pembangunan daerah. Sebaran permukiman yang relatif terpencar, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, menyulitkan pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis jaringan perpipaan secara efisien. Pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi membutuhkan investasi besar, sementara kapasitas fiskal daerah serta kemampuan

pembiayaan masyarakat masih terbatas. Akibatnya, cakupan layanan air minum perpipaan di beberapa wilayah belum optimal dan masyarakat masih bergantung pada sumber air alternatif yang kualitasnya belum terjamin.

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sejalan dengan UUD 1945 tersebut, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Secara definisi, air minum layak adalah sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dan sumber air minum kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung. Sementara, Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air minum kemasan, air isi ulang, leding, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter (Kementerian Kesehatan, 2020).

Grafik 1.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/KotaTahun 2024

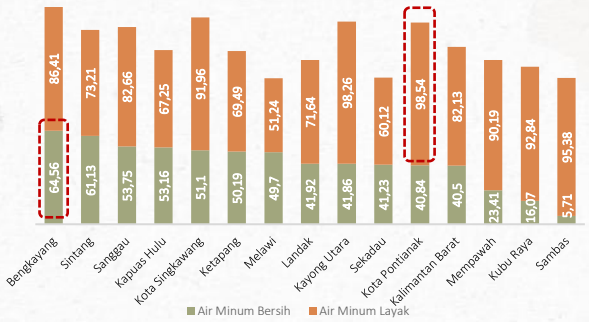

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Berdasarkan data BPS Kalbar Tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di kabupaten/kota relatif tinggi, umumnya berada di atas 70 persen secara rata-rata, bahkan mendekati 100 persen di beberapa daerah seperti Kayong Utara dan Kota Pontianak. Namun, kepemilikan sumber air minum bersih menunjukkan capaian yang lebih rendah dan cenderung berkisar pada rentang 40–60 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun akses terhadap air minum layak cukup luas, kualitas sumber air bersih yang memenuhi standar kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis rawa dan gambut seperti Kalimantan Barat.

Tabel 1.9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi

Rank	Provinsi	Perkotaan (A)	Perdesaan (B)	A+B
1	DKI Jakarta	99,98	-	99,98
28	Kalimantan Barat	92,18	79,47	84,32
39	Papua Pegununngan	88,47	27,56	32,89

Sumber: BPS (diolah)

Dari 39 provinsi di Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat menempati peringkat ke-28 dalam persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Secara rinci, capaian akses air minum layak di wilayah perkotaan mencapai 92,18%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 79,47%, sehingga rata-rata provinsi tercatat sebesar 84,32%. Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan capaian 99,98%, sementara Papua Pegunungan berada pada peringkat ke-39 dengan capaian 32,89%.

Posisi peringkat ke-28 ini menunjukkan bahwa capaian Kalimantan Barat masih berada di bawah rata-rata sejumlah provinsi lainnya dan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan layanan dasar air bersih. Peringkat tersebut mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan air bersih, terutama untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memperkuat ketahanan layanan di daerah pedesaan dan terpencil.

3. Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir Dalam konteks pembangunan nasional, tenaga kerja menempati posisi strategis sebagai subjek sekaligus sasaran pembangunan. Secara

konseptual, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sejalan dengan definisi tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan penduduk usia kerja sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana wilayah lain di Indonesia, masih menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini menuntut peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu terserap secara optimal di pasar kerja. Kesenjangan tersebut turut berkontribusi terhadap tingkat pengangguran, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren perbaikan. Berdasarkan data BPS (2025), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 sebesar 4,82%, turun sebesar 0,04 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024.

Tabel 1.10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agutus 2023 s.d. Agustus 2025

Jenis Kegiatan	Agt-23	Agt-24	Agt-25
Penduduk Angkatan Kerja (juta jiwa)	2,92	3,01	3,08
Bekerja (juta jiwa)	2,78	2,87	2,93
Pengangguran (ribu jiwa)	147,57	146,20	148,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,42	70,44	70,90
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,05	4,86	4,82

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2025 sebanyak 4,34 juta orang, naik sebanyak 69,25 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 3,08 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,26 juta orang. Menjadi tantangan tersendiri bahwa Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 2,93 juta orang penduduk yang bekerja dan 148,25 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 68,96 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 66,91 ribu orang, serta pengangguran meningkat sebanyak 2,05 ribu orang. Pengangguran yang terjadi di Kalimantan Barat disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai.

Peningkatan jumlah penduduk turut mendorong bertambahnya tekanan terhadap pasar kerja di Kalimantan Barat. Struktur tenaga kerja daerah ini masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah, dengan 40,73 persen penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum sekolah, belum tamat SD, dan tamat SD). Sebaliknya, proporsi tenaga kerja berpendidikan Diploma I/II/III relatif kecil, yakni hanya 2,51 persen. Komposisi tersebut mencerminkan tantangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi lapangan usaha, mayoritas penduduk bekerja terserap pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 42,67 persen, yang umumnya bersifat padat karya dan tidak memerlukan keterampilan spesifik. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyusul sebesar 14,53 persen, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,96 persen. Struktur ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor primer dan informal, yang berimplikasi pada rendahnya nilai tambah dan tingkat upah tenaga kerja.

4. Sektor Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak yang sangat strategis, dimana bagian sebelah Barat berbatasan dengan laut Cina Selatan, sedangkan di daerah pedalamannya dibelah oleh aliran sungai Kapuas. Oleh sebab itu Kalimantan Barat memiliki sumber daya perikanan tangkap yang cukup melimpah baik di laut maupun di perairan umum, serta memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di laut, di perairan payau dan di perairan air tawar. Permasalahan yang terjadi dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari ikan bagi masyarakat Kalimantan Barat diantaranya hilirisasi produk perikanan yang masih belum berkembang, kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi sarana penangkapan dan adaptasi terhadap anomali iklim yang terjadi masih

belum memadai. Hal ini menyebabkan mutu produk yang masih belum memenuhi standar yang juga disebabkan oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang belum berjalan secara optimal.

Grafik 1.4 Capaian Nilai Tukar Nelayan Periode 2021 s.d. 2025 Provinsi Kalimantan Barat

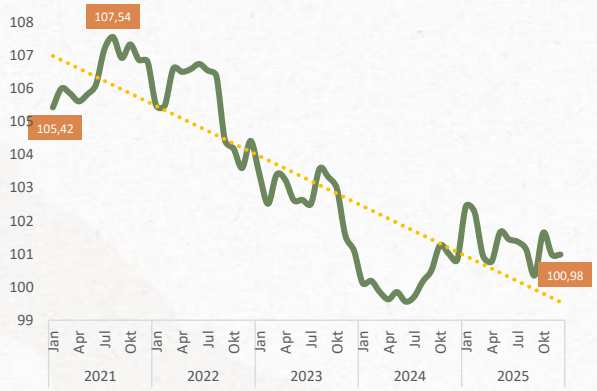

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Selama lima tahun terakhir, capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada akhir tahun 2025. Pada Desember 2025, NTN Kalimantan Barat tercatat sebesar 100,98, lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 105,32 pada periode yang sama. Dalam rentang 2021–2025, posisi tertinggi terjadi pada Agustus 2021 dengan nilai 107,54. Namun demikian, sepanjang tahun 2025, capaian NTN Kalimantan Barat konsisten berada di bawah rata-rata nasional sehingga mengindikasikan daya beli dan tingkat kesejahteraan nelayan yang relatif tertinggal. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara konsisten menempati posisi tertinggi di regional Kalimantan dan melampaui rata-rata nasional. Rendahnya NTN dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap bahan bakar bersubsidi yang menghambat intensitas melaut, fluktuasi harga hasil tangkapan, serta keberadaan kapal cantrang asing yang mempersempit wilayah tangkap dan menekan produktivitas nelayan lokal.

1.5.2. Tantangan Sosial Kependudukan

1. Struktur Jumlah Penduduk

Penduduk memiliki peranan yang sangat siginifikan dalam pembangunan di suatu daerah. Tercatat pada tahun 2025, jumlah penduduk di Kalimantan Barat mencapai angka 5,77 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24%.

Grafik 1.5 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat (Jiwa)

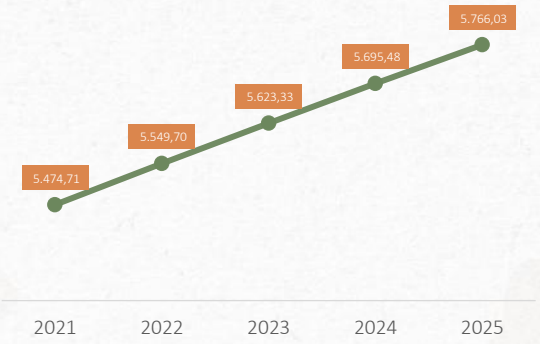

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Kota Pontianak masih menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 686 ribu jiwa atau 11,90% dari total penduduk di Kalimantan Barat. Diikuti dengan Kabupaten Sambas dan Kubu Raya yang masing-masing sebesar 661,5 ribu jiwa dan 660,4 ribu jiwa pada tahun 2025.

Tabel 1.11 Kepadatan Penduduk di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km²)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	95	96	109	110	111
Bengkayang	57	58	54	55	56
Landak	45	45	49	50	50
Mempawah	109	111	162	164	166
Sanggau	38	38	40	41	41
Ketapang	19	19	20	20	20
Sintang	20	20	20	20	20
Kapuas Hulu	9	9	8	8	9
Sekadau	39	39	37	37	38
Melawi	22	22	24	24	24
Kayong Utara	28	29	32	33	33
Kubu Raya	88	89	75	76	77
Pontianak	6.157	6.213	5.714	5760	5803
Singkawang	472	479	447	454	461
Kalimantan Barat	37	38	38	39	39

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Di samping itu pada tahun 2025, Kota Pontianak menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kalimantan Barat mencapai 5.803 jiwa per Km^2, diikuti Kota Singkawang dan Kabupaten Mempawah.

Dengan luas wilayah mencapai 147.307 Km^2 rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kalimantan Barat tahun 2024 adalah 39 jiwa per Km^2. Persebaran penduduk di Kalimantan Barat tidak merata, kecenderungan masyarakat untuk tinggal di daerah perkotaan disebabkan oleh kemudahan dalam aksesibilitas, fasilitas infrastruktur yang memadai, serta perekonomian yang lebih baik dibandingkan daerah kabupaten.

2. Pendidikan

Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu wilayah adalah salah satunya melalui peningkatan tingkat partisipasi pendidikan penduduk. Permasalahan klasik pendidikan di Kalimantan Barat masih seputar ketersediaan sarana prasarana dan kuantitas serta kualitas tenaga pendidik yang kurang memadai. Tingkat Partisipasi Sekolah yang diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan bersetaraan. APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2025, nilai APM di Provinsi Kalimantan Barat adalah 95,65 untuk SD/sederajat, 72,48% untuk SMP sederajat, dan 57,60% untuk SM/sederajat.

Sedangkan, APK merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Menurut data BPS, APS di Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 98,95% untuk kelompok umur 7-12 tahun; 94,36% untuk kelompok umur 13-15 tahun; 70,95% untuk kelompok umur 16-18 tahun; dan 26,84% untuk kelompok umum 19-23 tahun. Angka tersebut berada di bawah capaian nasional.

Grafik 1.6 APS Kalimantan Barat & Nasional Tahun 2025

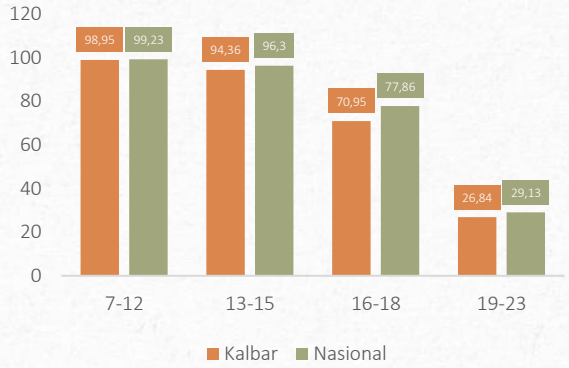

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Rendahnya APS pada kelompok usia 16–23 tahun di Kalimantan Barat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas regional. Dalam kerangka teori *human capital*, pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan keterampilan, inovasi, dan daya saing tenaga kerja. Ketika partisipasi pendidikan menengah atas dan tinggi tertinggal dari capaian nasional, struktur angkatan kerja cenderung didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah–menengah yang produktivitasnya relatif terbatas. Kondisi ini mempersempit peluang transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi dan memperbesar risiko terjebaknya tenaga kerja pada pekerjaan berupah rendah dan sektor informal. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan daya tarik investasi berbasis teknologi dan industri pengolahan.

Selain itu, kesenjangan partisipasi pendidikan juga berimplikasi pada ketimpangan wilayah dan efek multigenerasi. Daerah dengan capaian pendidikan lebih rendah cenderung mengalami ketertinggalan dalam Indeks Pembangunan Manusia dan daya saing dibanding provinsi lain, sehingga memperlebar disparitas regional. Pada level rumah tangga, rendahnya pendidikan orang tua berkontribusi terhadap terbatasnya aspirasi, dukungan belajar, serta kapasitas ekonomi untuk membiayai pendidikan anak. Siklus ini berpotensi mereproduksi kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga mobilitas sosial vertikal menjadi semakin sulit dicapai.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan APS dengan langkah yang sederhana namun tepat sasaran. Penelitian menunjukkan

bahwa bantuan biaya pendidikan dan bantuan tunai bersyarat efektif mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi, terutama pada usia 16–23 tahun. Karena itu, beasiswa berbasis kebutuhan dan subsidi transportasi bagi siswa di daerah terpencil penting untuk diperluas. Selain itu, penguatan SMA/SMK yang terhubung langsung dengan dunia usaha—misalnya sektor perkebunan, perikanan, dan logistik—dapat meningkatkan keyakinan bahwa sekolah memberi manfaat nyata bagi masa depan kerja, sehingga anak lebih terdorong untuk melanjutkan pendidikan. Penyediaan kelas jarak jauh atau kampus satelit juga dapat memperluas akses tanpa harus membangun fasilitas besar di setiap kabupaten.

Di sisi lain, edukasi kepada keluarga untuk menunda perkawinan usia dini dan mendorong aspirasi pendidikan anak penting dilakukan, karena banyak studi membuktikan bahwa dukungan orang tua sangat menentukan keberlanjutan sekolah dan peluang mobilitas sosial generasi berikutnya.

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pasal 28H ayat (1), negara menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari kesejahteraan lahir dan batin.

Grafik 1.7 Presentase Stunting Kalimantan Barat

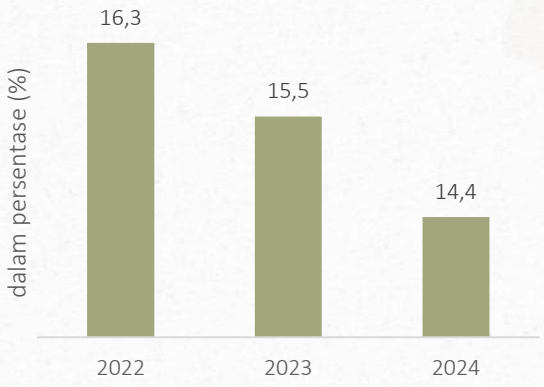

Sumber: data kalbar (diolah)

Prevalensi stunting (tinggi badan menurut umur) pada balita di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 14,4% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 19,8%.

Pembangunan urusan kesehatan memiliki implikasi yang sangat luas dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena kualitas kesehatan menentukan produktivitas, daya saing, serta kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Salah satu indikator yang paling merefleksikan tingkat kesejahteraan sekaligus kualitas pembangunan kesehatan adalah prevalensi stunting.

Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, terdapat empat daerah di Kalimantan Barat yakni Sambas, Sanggau, Sintang, dan Pontianak yang justru mengalami peningkatan angka stunting pada tahun 2024.

Tabel 1.12 Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	Growth 2023 s.d. 2024
1	Kab. Sambas	15,7	15,8	17,4	1,6
2	Kab. Bengkayang	21,6	17,4	16,6	-0,8
3	Kab. Landak	19,8	19,9	18,6	-1,4
4	Kab. Mempawah	8,1	10,3	7,5	-2,7
5	Kab. Sanggau	17,5	20,2	22,0	1,8
6	Kab. Ketapang	19,4	19,3	10,3	-9,0
7	Kab. Sintang	27,1	25,9	26,6	0,7
8	Kab. Kapuas Hulu	31,5	33,0	31,4	-1,7
9	Kab. Sekadau	21,0	19,2	17,4	-1,7
10	Kab. Melawi	26,9	24,2	22,8	-1,4
11	Kab. Kayong Utara	23,0	20,0	18,6	-1,4
12	Kab. Kubu Raya	6,8	8,8	8,6	-0,2
13	Kota Pontianak	7,3	7,0	7,7	0,7
14	Kota Singkawang	14,5	14,8	13,7	-1,1
15	Kalimantan Barat	16,3	15,5	14,4	-1,1

Sumber: data kalbar (diolah)

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh data capaian berbagai indikator status gizi balita pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

- Total balita stunting tertinggi berada di Kabupaten Sambas dengan persentase stunting mencapai 36,4%.

Tabel 1.13 Prevalensi Balita Provinsi Kalimantan Barat Bermasalah Gizi Berdasarkan Status Gizi menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Status Gizi Balita									
	Stunting		*Underweight*		*Severe Wasting*		*Wasting*		*Overweight*	
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI
Sambas	36,4	30.9 - 42.3	30,5	26.7 - 34.5	2	1.2 - 3.4	9,7	7.6 - 12.4	3,8	2.5 - 5.8
Bengkayang	23,4	20.1 - 27.1	21,5	18.0 - 25.4	3,5	2.0 - 6.1	8,1	5.5 - 11.9	7,8	5.7 - 10.5
Landak	28,6	24.7 - 32.8	23,4	19.5 - 27.8	2,2	1.4 - 3.7	9,1	6.8 - 12.0	4,2	2.9 - 6.0
Mempawah	28,6	24.3 - 33.4	25,5	21.8 - 29.6	1,6	0.8 - 3.3	10,4	8.3 - 12.9	2,8	1.6 - 4.7
Sanggau	21,3	17.7 - 25.4	21,7	18.3 - 25.4	4,3	2.8 - 6.7	7,7	5.6 - 10.3	5,8	4.2 - 8.0
Ketapang	17,9	14.7 - 21.7	17,3	13.9 - 21.3	1	0.3 - 2.9	4,9	3.5 - 6.8	5,2	3.6 - 7.6
Sintang	31	26.7 - 35.7	26,2	22.3 - 30.5	3,2	1.9 - 5.4	8,8	6.3 - 12.1	3,9	2.7 - 5.6
Kapuas Hulu	23,6	13.7 - 33.5	21,8	12.8 - 30.7	3	1.4 - 4.6	10,6	7.5 - 13.6	4	2.5 - 5.5
Sekadau	14,4	11.3 - 18.0	21,4	17.8 - 25.7	2,7	1.6 - 4.6	12,6	9.7 - 16.2	2,6	1.5 - 4.4
Melawi	35,2	28.1 - 42.3	27,4	20.1 - 34.8	3,1	1.5 - 4.7	10,8	7.7 - 13.9	2,8	1.6 - 4.0
Kayong Utara	23,8	19.2 - 29.1	24,8	20.6 - 29.5	2,9	1.7 - 4.9	9,9	7.3 - 13.3	5,1	3.4 - 7.5
Kubu Raya	30,2	24.9 - 36.2	24,1	19.7 - 29.0	1,2	0.6 - 2.6	6	3.8 - 9.3	4,3	2.8 - 6.5
Pontianak	22,3	19.1 - 26.0	17,5	14.1 - 21.5	1,4	0.5 - 3.9	6,8	5.0 - 9.1	5,2	3.5 - 7.6
Singkawang	21,9	17.7 - 26.7	22,7	17.7 - 28.6	2,6	1.4 - 4.8	11	7.7 - 15.4	2	1.1 - 3.6

Sumber: SSGI 2024

- Total balita *underweight* (berat badan kurang) tertinggi berada di Kabupaten Sambas dengan persentase mencapai 30,5%.
- Total balita *severe wasting* (gizi buruk akut) tertinggi berada di Kabupaten Sanggau dengan persentase mencapai 4,3%.
- Total balita *wasting* (kurus) tertinggi berada di Kabupaten Melawi dengan persentase mencapai 10,8%.
- Total balita *overweight* (berat badan lebih) tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang dengan persentase mencapai 7,8%.

Secara umum, permasalahan gizi balita di Kalimantan Barat masih menunjukkan beban yang signifikan dan tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan karakteristik yang berbeda. Kabupaten Sambas menonjol pada indikator stunting dan *underweight*, Kabupaten Sanggau pada severe wasting, Kabupaten Melawi pada wasting, serta Kabupaten Bengkayang pada overweight. Pola ini mengindikasikan bahwa tantangan gizi di Kalimantan Barat tidak bersifat tunggal, melainkan mencerminkan fenomena beban gizi ganda, di mana kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terarah, spesifik lokasi, dan terintegrasi untuk menangani masing-masing permasalahan sesuai karakteristik wilayahnya.

1.5.3. Tantangan Lainnya

1. Luas Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua (sebelum pemekaran) dan Provinsi Kalimantan Tengah. Luas Wilayah Kalimantan Barat mencapai 147.037 km^2. Kalimantan Barat merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki lima wilayah kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Terdapat lima pintu masuk perbatasan yang terdiri atas Entikong, Aruk, Badau, Jagoi Babang, dan Sei Kelik. Hal tersebut mengartikan bahwa Kalimantan Barat memiliki peran penting sebagai pandangan pertama border tourism di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 14 wilayah kabupaten/kota dengan jarak tempuh dari ibukota provinsi yang beragam. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jarak yang cukup jauh yaitu 814 km dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dan untuk menempuhnya melalui perjalanan darat diperlukan

waktu kurang lebih 12 jam. Namun saat ini sudah dapat ditempuh menggunakan angkutan udara.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak dapat ditempuh melalui transportasi udara dengan rute penerbangan langsung dengan tujuan Jakarta, Batam, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Semarang, Banjarmasin, Balikpapan, dst. Mulai tahun 2024, sudah tidak terdapat penerbangan internasional di Kota Pontianak atau di lingkup Kalimantan Barat karena perubahan status Bandara Supadio dari internasional menjadi domestik. Rute penerbangan lokal dari dan ke Pontianak menggunakan pesawat perintis dilakukan untuk penerbangan ke beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang.

Namun beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Barat seperti Bengkayang, dan Kayong Utara yang tidak memiliki akses transportasi udara masih memiliki kondisi jalan yang memprihatinkan. Dengan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki, Provinsi Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah terkait konektivitas antar daerah.

Tabel 1.14 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Lingkup Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km^2)
Sambas	Sambas	5.938,00
Bengkayang	Bengkayang	5.488,61
Landak	Ngabang	8.430,71
Mempawah	Mempawah	1.935,42
Sanggau	Sanggau	12.452,22
Ketapang	Ketapang	30.018,68
Sintang	Sintang	22.025,79
Kapuas Hulu	Putussibau	31.318,25
Sekadau	Sekadau	5.979,04
Melawi	Nangapinoh	10.122,51
Kayong Utara	Sukadana	4.110,12
Kubu Raya	Sungai Raya	8.549,29
Kota Pontianak	Pontianak	118,21
Kota Singkawang	Singkawang	550,19

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

2. Struktur Tanah dan Air

Kalimantan Barat yang berada di sebelah barat pulau Kalimantan, di antara 2°08 LU dan 3°05 LS serta di antara 108°0' BT dan 114°10' BT. Secara geografis, letak wilayah Kalimantan Barat tepat berada di garis Khatulistiwa. Kondisi tersebutlah yang menjadi keistimewaan Provinsi Kalimantan Barat. Ilmuwan mencatat bahwa setiap tanggal 23 Maret terjadi Titik Kulminasi di Kota Pontianak, yaitu bayangan benda pada siang hari di sekitar puncak Tugu Khatulistiwa menghilang seketika. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dibagi menjadi tiga dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman, dan wilayah perbatasan antar negara. Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas kabupaten dan kota, yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa- rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Sektor pertanian, perkebunan, dan perhutanan yang menjadi sektor dominan di Kalimantan Barat tentunya menjadikan tanah sebagai bagian yang berpengaruh signifikan. Dengan kondisi lahan gambut dan rawa, untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan lahan, diperlukan penanganan yang bersifat spesifik. Agar pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, maka pemanfaatannya harus hati-hati melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan, diantaranya adalah melalui pengelolaan drainase yang baik.

3. Risiko Bencana

Kalimantan Barat dikenal sebagai "Provinsi Seribu Sungai", sebuah julukan yang merefleksikan karakter geografisnya yang unik dengan ratusan sungai besar dan kecil yang membentang di hampir seluruh wilayah. Sejak dahulu, sungai-sungai tersebut tidak hanya menjadi bagian dari identitas

sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai urat nadi perekonomian, khususnya sebagai jalur transportasi utama bagi kawasan pedalaman yang sulit dijangkau. Meskipun pembangunan infrastruktur jalan darat dalam beberapa tahun terakhir telah menjangkau sebagian besar kecamatan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, peran sungai tetap strategis dalam mendukung mobilitas barang dan orang, terutama di wilayah dengan kondisi lahan rawa dan gambut.

Tabel 1.15 Jumlah Kejadian Bencana Alam Di Kalimantan Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Cuaca Ekstrem
Sambas	4	2	1
Bengkayang	3		
Landak	4		
Mempawah			
Sanggau	6		
Ketapang	4		
Sintang	4		
Kapuas Hulu	1		
Sekadau	3		
Melawi	7	1	
Kayong Utara		1	
Kubu Raya	5	3	1
Kota Pontianak			
Kota Singkawang			
Kalimantan Barat	41	7	2

Sumber: BPS Kalbar (diolah) - Angka Sementara

Namun demikian, di tengah potensi dan keunggulan geografis tersebut, Kalimantan Barat menghadapi tantangan serius berupa penurunan kualitas lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Degradasi hutan, alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran air turut meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir, kabut asap, dan tanah longsor. Kondisi ini menuntut penguatan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi, agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.

Sepanjang tahun 2024, Kalimantan Barat mencatat 50 kejadian bencana alam, dengan banjir; kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana yang paling dominan. Degradasi hutan dan kebakaran lahan masih sering terjadi, diperburuk oleh belum tuntasnya penataan batas kawasan hutan yang memicu konflik kepentingan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung serta konservasi yang masih belum optimal di bawah kewenangan pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri. Kebakaran hutan yang dipicu oleh cuaca ekstrem serta praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran menyebabkan kabut asap tebal, yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

BAB II

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

BAB II
Analisis Ekonomi Regional

2.1. Analisis Indikator Makro Ekonomi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki visi yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan". Visi ini mencerminkan komitmen dari pemerintah daerah dalam membangun Kalimantan Barat secara menyeluruh, dari aspek ekonomi, menjamin keadilan social, kehidupan beragam yang harmonis, demokrasi yang sehat, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan RKPD Kalimantan Barat Tahun 2025 terdapat tiga prioritas pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing; mewujudkan perekonomian yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan; serta reformasi birokrasi yang berprinsip *good governance* untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu fokus utama pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat tersebut meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, rasio Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya, salah satu tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah secara inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran antara lain Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan indikator terkait lainnya. Selain itu, tingkat inflasi yang berfluktuasi namun tetap terkendali turut mendukung stabilitas perekonomian daerah. Indikator-indikator tersebut juga menjadi dasar dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, khususnya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik baik dalam suatu negara ataupun suatu daerah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu Penyusunan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (Tarigan, 2014).

APBN berperan sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui dukungan investasi, Pendidikan, infrastruktur, dan sektor strategis lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak positif pada PDB maupun PDRB. Di tengah tantangan ekonomi global menuju akhir 2025, perekonomian Indonesia tetap berapa pada lajut pertumbuhan yang yang solid, demikian pula ekonomi Kalimantan Barat yang menunjukkan konsistensi pertumbuhan.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh 5,62% secara *yoy*, tumbuh 2,83% secara *qtq,* dan tumbuh 5,39% secara *ctc.*

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan dalam periode waktu tertentu.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan & Nasional Tahun 2023-2025

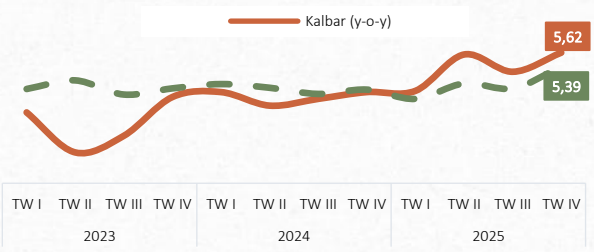

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Pada penutup tahun 2025 perekonomian Indonesia menunjukkan angka capaian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% (*yoy*) atau secara kumulatif 5,11% (*ctc*). Sejalan dengan ekonomi di tingkat Nasional yang tumbuh konsisten di atas 4%, ekonomi Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,62% (*yoy*) lebih tinggi secara tahunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Angka tersebut mencerminkan penguatan ekonomi Kalimantan Barat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian di suatu wilayah secara berkesinambungan selama periode waktu tertentu.

Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional secara *qtq* Tahun 2023-2025.

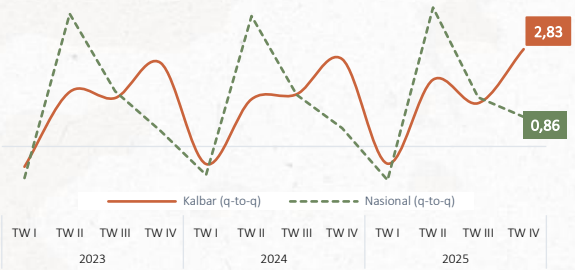

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Berdasarkan grafik 2.2 pada tahun 2025, perekonomian Kalimantan Barat tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlanjut, secara *qtq* pada Triwulan IV tahun 2025 mencapai angka 2,83% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2025. Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 8,54%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi yaitu pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 12,49%.

Secara kumulatif, perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,39 persen (c-to-c). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Laju perumbuhan ekonomi (c-to-c) selama tahun 2023-2025 menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya.

Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, Nasional dan Regional Kalimantan (*ctc)* Tahun 2023-2025

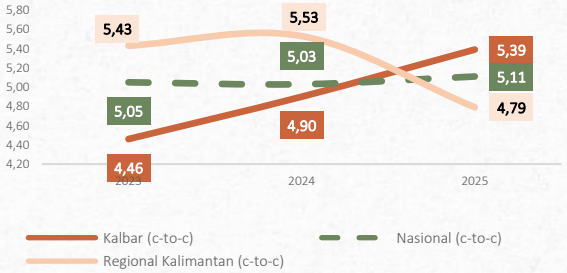

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, target laju pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,30–5,65%. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (yoy) tercatat sebesar 5,62%, yang berada dalam rentang target RPJMD dan mendekati batas atas yang ditetapkan.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Tahun 2025

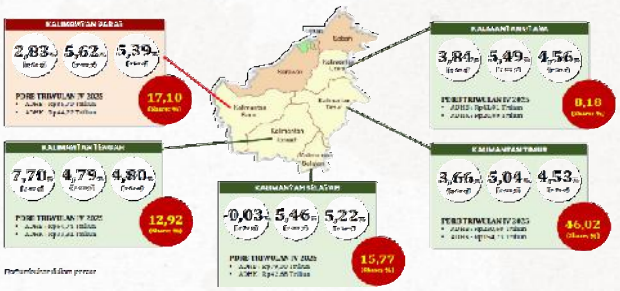

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pulau Kalimantan memberikan kontribusi terhadap perekoomian Indonesia sebesar 8,12% dengan pertumbuhan sebesar 4,79%. Dari sisi kontribusi terhadap PDRB Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat menyumbang 17,10%, menempati posisi kedua setelah Kalimantan Timur yang berkontribusi 46,02%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,62% (*yoy)*, tertinggi di antara provinsi di wilayah Kalimantan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat tidak hanya tumbuh lebih cepat dari rata-rata kawasan, tetapi juga berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian regional, sehingga penting dalam perencanaan dan pengalokasian kebijakan fiskal di tingkat sub-nasional.

b. PDRB Kalimantan Barat

PDRB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu, mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dijelaskan oleh Sadono Sukirno (2006).

Pada Triwulan IV Tahun 2025 PDRB ADHB Kalimantan Barat adalah Rp328,57 triliun, sedangkan PDRB ADHK (2010) adalah sebesar Rp171,33 triliun.

Kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh berbagai indikator makro, salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama yang mencerminkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Triwulan IV 2025 mencapai Rp85,70 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp44,22 triliun pada triwulan IV 2025. Secara akumulatif Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2025, PDRB ADHB mencapai Rp328,57 triliun dan PDRB ADHK 2010 mencapai Rp171,33 triliun.

1) PDRB Menurut Pengeluaran (Sisi Permintaan)

PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar *(basic measure)* yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Berdasarkan grafik 2.6 perekonomian Kalimantan Barat menurut pengeluaran pada Tahun 2025 (*ctc)* tumbuh sebesar 5,39%. Pertumbuhan signifikan terutama pada komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang sebesar 41,75%, diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 29,10%. Selanjutnya PMTB tumbuh sebesar 6,71%, PK-LNPRT sebesar 5,89%, PK-RT sebesar 4,35%.

Grafik 2.4 Pertumbuhan PDRB Kalbar Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (*ctc*)

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Komponen PMTB menjadi komponen terbesar setelah net ekspor. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi ini dapat berupa tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan (Kesuma dan Astuti, 2020).

Grafik 2.5 Pemetaan Matriks Komponen PDRB sisi Permintaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

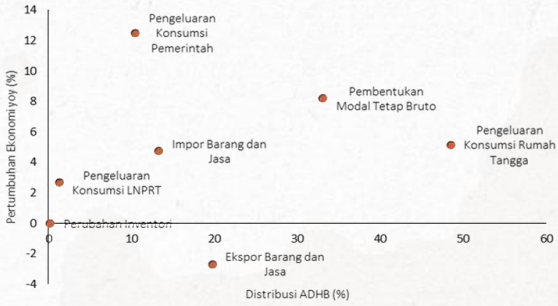

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Selanjutnya berdasarkan grafik 2.7, pada tahun 2025 pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki kontribusi relatif besar terhadap PDRB sehingga berperan penting dalam menopang perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini mencerminkan kuatnya peran konsumsi masyarakat dalam menopang aktivitas ekonomi. Sementara kinerja ekspor barang dan jasa tetap lebih tinggi dibandingkan impor. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah yang tetap tumbuh dan relatif stabil sepanjang tahun 2025.

Dengan demikian pada tahun 2025 meskipun secara *c-to-c* PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi, struktur PDRB Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB.

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sisi Penawaran)

Menurut Lapangan Usaha, ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2025 (*q-to-q*) tumbuh sebesar 2,83% dibanding triwulan III 2025. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pertambangan dan penggalian serta kontruksi mengalami pertumbuhan cukup tinggi.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Menurut Lapangann Usaha pada Triwulan IV Tahun 2025

Lapangan Usaha	Quarter (qtq)	Year on Year (yoy)	Kumulatif (c-to-c)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,50	0,06	21,15
Pertambangan dan Penggalian	7,07	38,11	31,48
Industri Pengolahan	-0,71	1,39	3,37
Pengadaan Listrik, Gas	1,77	7,35	4,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,77	-1,08	0,49
Konstruksi	6,87	7,82	8,69
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,16	6,4	4,94
Transportasi dan Pergudangan	4,33	6,25	4,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,65	5,59	3,32
Informasi dan Komunikasi	2,39	7,29	6,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,05	9,48	3,76
Real Estat	2,68	6,53	3,95
Jasa Perusahaan	-0,12	-0,33	3,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,54	8,24	2,18
Jasa Pendidikan	0,17	3,18	1,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	4,3	5,15
Jasa Lainnya	5,32	4,94	7,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**2,83**	**5,62**	**5,39**

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV 205 terhadap triwulan IV 2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,62%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta jasa lainnya.

Grafik 2.6 Pemetaan Matriks Komponen PDRB sisi Penawaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

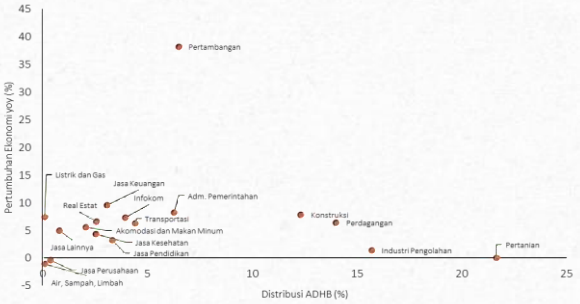

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Berdasarkan grafik 2.5, pada tahun 2025, perekonomian Kalimantan Barat ditopang oleh lapangan usaha dengan kontribusi besar seperti pertanian dan industri pengolahan, meskipun pertumbuhannya relatif rendah. Di sisi lain, pertambangan dan penggalian menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan kontribusi yang lebih kecil, sehingga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, kinerja perekonomian Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang relatif terjaga, dengan dukungan dari berbagai lapangan usaha. Sektor-sektor dengan kontribusi besar seperti pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah, meskipun pertumbuhannya relatif terbatas. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kontruksi dan beberapa sektor jasa, berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui laju pertumbuhan yang lebih tinggi.

Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ke depan perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor penopang utama sekaligus mendorong sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.

2.1.2. Inflasi

Pada Desember 2025, tingkat inflasi Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,85% (y-on-y), berada di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 2,92%"

Inflasi merupakan suatu keadaan ketika harga barang dan jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam periode tertentu. Inflasi yang berada pada tingkat terkendali dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang meningkat secara berlebihan dan tidak terkendali berpotensi menurunkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 7 Tren Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional (*yoy*) Tahun 2022 s.d. 2025

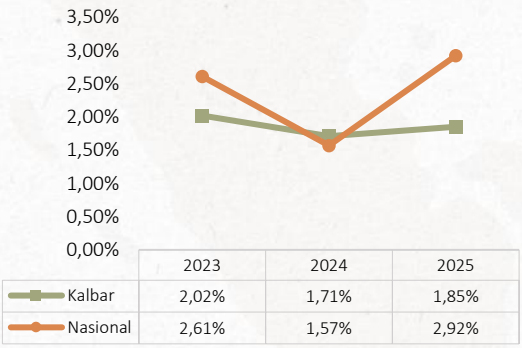

	2023	2024	2025
Kalbar	2,02%	1,71%	1,85%
Nasional	2,61%	1,57%	2,92%

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Berdasarkan Grafik 2.6, selama tiga tahun terakhir inflasi Kalimantan Barat dan nasional menunjukkan kecenderungan pola tren yang sama. Pada tahun 2025, tingkat inflasi Kalimantan Barat dan nasional secara *year-on-year* tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh dinamika harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Barat pada Desember 2025 (BPS Kalbar, 2026). Tekanan harga pada kelompok tersebut dipicu oleh pergerakan harga sejumlah komoditas, yaitu beras, ikan kembung, cabai rawit, telur ayam ras, ikan baung, ikan nila, sigaret kretek mesin (SKM), udang basah, ikan tongkol, minyak goreng, serta ikan bandeng.

Selain itu, emas perhiasan tercatat sebagai komoditas dengan andil terbesar kedua terhadap inflasi *year-on-year* pada Desember 2025 di Kalimantan Barat maupun secara nasional, yang mencerminkan pergerakan harga komoditas non-pangan yang turut memengaruhi pembentukan inflasi pada periode tersebut.

BPS Pusat mencatat bahwa emas perhiasan merupakan salah satu penyumbang andil inflasi tahunan terbesar sepanjang tahun 2025, dengan kontribusi yang tercatat sebagai penyumbang inflasi bulanan utama pada 11 bulan sepanjang Januari hingga Desember 2025 (Liman, 2026). Kondisi ini tidak terlepas dari tren kenaikan harga emas dunia yang berlanjut hingga akhir 2025, yang mendorong permintaan terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai dan selanjutnya memengaruhi harga emas perhiasan di dalam negeri.

Grafik 2.8 Perbandingan Inflasi Kalbar dan Nasional (*mtm*) Tahun 2025

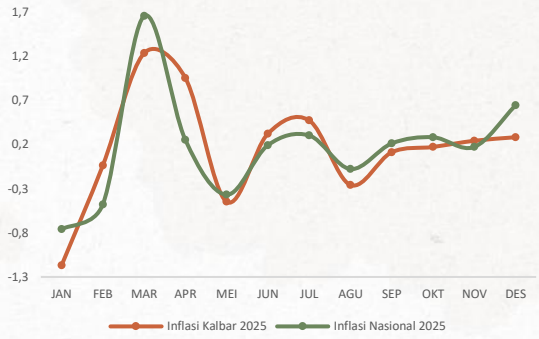

Sumber : BPS Kalbar (diolah)

Tingkat inflasi Kalimantan Barat secara *month to month (mtm)* pada Desember 2025 sebesar 0,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,80. Inflasi secara *m-to-m* Kalimantan Barat pada Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan November 2024 serta berada di bawah tingkat inflasi Nasional (0,64%).

Inflasi m-to-m terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada delapan kelompok pengeluaran, turunnya indeks pada dua kelompok pengeluaran, serta satu kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,36%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07%; kelompok transportasi sebesar 0,73%; kelompok rekreasi,

Tabel 2.2 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat 2025

Kelompok Pengeluaran Inflasi (2018=100)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,22	0,48	0,15	0,08	-1,11	0,36	1,17	-0,46	-0,08	0,38	0,3	0,36
Pakaian dan Alas Kaki	0,18	0	0,18	0,01	0,06	0,04	0,07	-0,01	0	0,07	0,05	0
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-11,78	-4,4	11,6	6,27	-0,02	0,07	0,11	0,04	0,02	0,02	0,02	0,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,01	0,05	0,08	-0,23	0,05	-0,06	-0,43	-0,06	0,01	-0,03	-0,1	-0,03
Kesehatan	0,32	0,15	0,13	0,09	-0,17	0,07	-0,11	0,09	0,09	0,02	0,06	-0,11
Transportasi	-0,13	2,45	-2	0,66	-0,62	1,03	-0,29	-0,9	0,78	-0,73	0,71	0,73
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0	-0,02	-0,05	-0,7	0,45	0	-0,04	-0,01	-0,01	0	0,03	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,05	0	0,03	0	0,1	0,14	-0,15	0	0,03	-0,02	0,16	0,01
Pendidikan	0	0	0	0,03	0,05	0,12	2,13	0,07	0	0	0	0,04
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,08	0,01	0,01	0,35	0	0,32	0,13	0,01	0	0,02	0	0,1
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,03	0,55	0,43	0,83	0,17	0,29	0,04	0,1	0,64	1,71	0,52	0,7
Umum	-1,17	-0,04	1,23	0,95	-0,45	0,32	0,47	-0,26	0,11	0,17	0,24	0,28

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

olahraga, dan budaya sebesar 0,01%; kelompok pendidikan sebesar 0,04%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,1%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,7%. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03%; kelompok kesehatan sebesar 0,11%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2025, antara lain: cabai rawit, angkutan udara, cabai merah, emas perhiasan, telur ayam ras, wortel, bawang merah, dan jeruk. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: daging ayam ras, beras, ikan tongkol, kacang panjang, ikan tenggiri, buncis, terong, dan bayam.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui penguatan sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD). Pada tahun 2025, arah kebijakan pengendalian inflasi terfokus pada penguatan ketahanan pangan strategis sebagai respon terhadap dinamika harga komoditas pangan yang secara konsisten memberikan tekanan inflasi di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sebagai langkah jangka pendek, TPID Kalimantan Barat melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui penyelenggaraan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) (Bank Indonesia, 2025). Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, perbankan, kelompok petani, pelaku usaha, serta mitra kerja strategis lainnya. OP dan GPM dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional dengan fokus pada komoditas pangan yang berkontribusi terhadap perkembangan inflasi, sehingga diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas produksi pangan, khususnya komoditas strategis, dalam mendukung pengendalian inflasi jangka menengah. Program OPLAH diarahkan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan rawa potensial yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, pelaksanaan OPLAH difokuskan pada peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas pertanian, dengan salah satu fokus utama di Kabupaten Sambas seluas sekitar 1.600 hektare yang diarahkan untuk mencapai target indeks pertanaman hingga IP400. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong program swasembada jagung yang dilaksanakan secara sinergis dengan dukungan TNI

dan POLRI guna memperkuat ketersediaan pasokan pangan strategis dan memitigasi potensi tekanan inflasi dari sisi penawaran (Bank Indonesia, 2025).

Dalam rangka memastikan efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kalimantan Barat melaksanakan koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan berpedoman pada peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi melalui penerapan strategi 4K yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pada aspek keterjangkauan harga, upaya stabilisasi harga pangan strategis dilakukan antara lain melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP di Kalimantan Barat tercatat sebesar 17,21 ribu ton atau sekitar 46,35 persen dari target penyaluran yang didukung oleh 681 mitra penyalur. Selain itu, penyaluran beras SPHP juga dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat melalui mekanisme GO-Link dengan volume penyaluran sebesar 22 ton pada September 2025, sebagai upaya memperluas jangkauan distribusi kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2025).

Dari sisi ketersediaan pasokan, Bulog Kalimantan Barat didukung oleh 19 unit gudang dengan kapasitas 47.500 ton, serta langkah antisipatif berupa extra dropping LPG sebanyak 40 metrik ton di wilayah Pontianak dan Kubu Raya. Sementara itu, kelancaran distribusi diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antar daerah dengan sentra produksi, serta dibukanya kembali rute DAMRI Pontianak–Ketapang sebanyak empat kali seminggu (Bank Indonesia, 2025). Dari aspek komunikasi efektif, pengendalian inflasi diperkuat melalui partisipasi TPID Kalimantan Barat dalam Rakor TPIP–TPID dan GNPIP Wilayah Kalimantan, pelaksanaan High Level Meeting di tingkat daerah, serta edukasi publik dan publikasi informasi pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

2.2. Analisis Indikator Makro Ekonomi

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain memperhatikan sisi ekonomi juga harus menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, kinerja ekonomi publik ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam beberapa indikator diantaranya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah yang diukur melalui pendekatan tiga dimensi (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak).

IPM di Kalimantan Barat pada Tahun 2025 mencapai 72,09 (Kategori Tinggi), Namun Masih Berada di Bawah Capaian IPM Nasional.

Grafik 2.9 Capaian IMP Kalimantan Barat, Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2023-2025

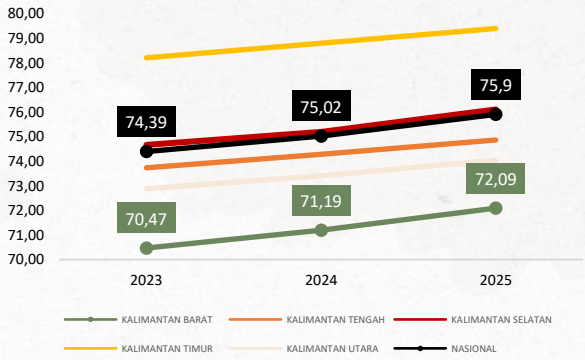

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)
Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat berdasarkan SP2020 LF pada tahun 2025 mencapai 72,09. Selama periode 2023 – 2025, IPM Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan dan berada dalam kategori tinggi (BPS Kalbar, 2025). Meskipun demikian, IPM Kalimantan Barat pada periode tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional dan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian keempat provinsi lain di regional Pulau Kalimantan.

Peningkatan IPM Kalimantan Barat didukung oleh perkembangan beberapa dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan

Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 2025

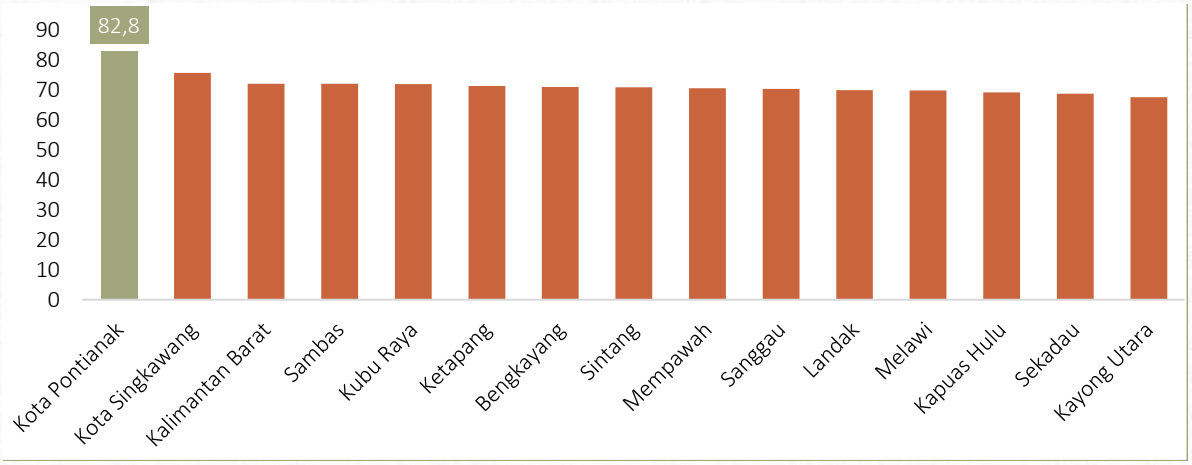

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Hidup (UHH). UHH Kalimantan Barat tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,34 tahun atau

0,46% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mencapai 74,28 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi baru lahir tahun 2025 diperkirakan dapat bertahan hidup hingga usia 74 s.d. 75 tahun, peningkatan UHH mencerminkan perbaikan derajat kesehatan penduduk. Selanjutnya, dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2025, RLS Kalimantan Barat tercatat sebesar 8,07 tahun, yang menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga 8,07 tahun atau setara kelas VIII (kelas II SMP). Sementara itu, nilai HLS Kalimantan Barat mencapai 12,69 tahun, yang mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun yang memasuki jenjang pendidikan formal diharapkan mampu bersekolah hingga 12,69 tahun atau setara dengan kelas III SMA.

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai Rp10,69 juta rupiah per kapita per tahun. Capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp10,32 juta rupiah per kapita per tahun. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penguatan daya beli masyarakat yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa. Apabila ditinjau berdasarkan capaian IPM pada tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, terdapat satu daerah dengan kategori IPM sangat tinggi, yaitu Kota Pontianak dengan nilai 82,80. Selanjutnya, terdapat 8 kabupaten/kota dengan kategori IPM tinggi, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Bengkayang, serta dua kabupaten yang pada tahun 2025 meningkat ke kategori IPM tinggi, yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau. Sementara itu, 5 kabupaten lainnya masih berada pada kategori IPM sedang.

Peningkatan IPM Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan peningkatan IPM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029. Upaya peningkatan IPM pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan kapasitas dasar penduduk melalui peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, perluasan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia 25 tahun ke atas, serta penguatan program kesehatan seperti peningkatan cakupan imunisasi, percepatan penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan guna mendukung kualitas hidup masyarakat (Oxtora, 2025).

2.2.2. Tingkat Kemiskinan

Pembangunan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, tetapi apabila tidak berlangsung secara merata, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan keterbelakangan serta memperparah kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin Pada September 2025 Sebesar 5,97%, dan Selalu Berada di Bawah Presentase Kemiskinan Nasional Sejak Tahun 2023 s.d. 2025

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat pada September 2025 tercatat sebesar 5,97% menurun sebesar 0,19% poin terhadap kemiskinan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada September 2025 sebesar 322,54 ribu orang, menurun 8,41 ribu orang terhadap Maret 2025. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025-September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 2,62 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 5,78 ribu orang.

Grafik 2.11 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kalbar & Nasional Tahun 2023 s.d. 2025

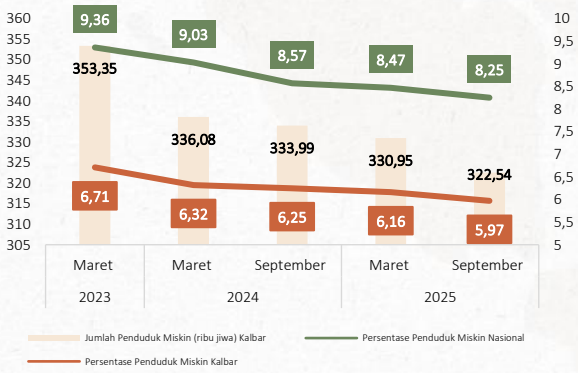

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan fundamental yang dihadapi oleh daerah-daerah di negara berkembang, salah satunya Negara Indonesia. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kalimantan Barat tergolong cukup baik dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang selalu beradai di bawah angka kemiskinan nasional sejak tahun 2023 s.d. 2025. BPS (2025) menyatakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2025-September 2025 yaitu perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 3,22% pada Triwulan III 2025 dibandingkan dengan Triwulan I 2025, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III 2025 tumbuh sebesar 2,65% dibandingkan Triwulan I 2025. TPT Agustus 2025 dibandingkan dengan TPT 2025 mengalami penurunan sebesar 0,04% poin. Selain itu, berbagai upaya dan intervensi baik pemerintah pusat maupun daerah terus dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap khususnya pada masa pandemi tahun 2020-2022. Hal ini sejalan dengan penelitian Tirta et al. (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berperan dalam menekan tingkat kemiskinan serta adanya peningkatan tingkat pengangguran akan berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan.

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan Kalimantan Barat

Gabungan Perkotaan & Perdesaan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2023	425.767	137.521	563.288
Maret 2024	450.558	144.951	595.509
September 2024	460.485	150.835	611.320
Maret 2025	468.496	154.386	622.882
September 2025	**491.177**	**161.043**	**652.220**
Perubahan Sept'24 - Sept'25 (%)	6,67	6,77	6,69
Perubahan Mar'25 - Sept'25 (%)	4,84	4,31	4,71

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Koefisien *Gini Ratio* Kalimantan Barat Sebesar 0,308 pada September 2025 dan Berada di Bawah Rata-rata Nasional.

Indeks Gini (Gini Ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, Koefisien Gini memiliki indeks yang

memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut (BPS Kalbar, 2025). Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35 (Heryanah, 2017).

Grafik 2.12 Rasio Gini Regional Kalimantan dan Nasional

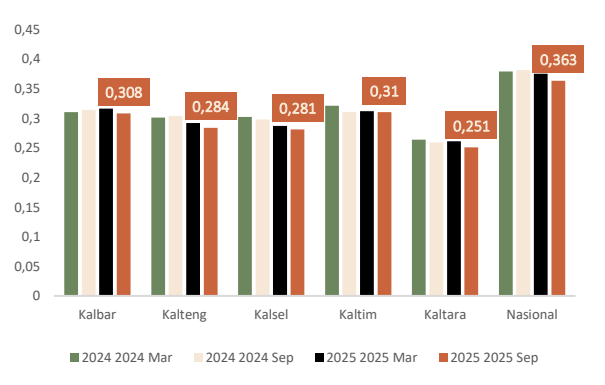

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Pada September 2025, koefisien rasio gini di Kalimantan Barat terpantau lebih baik karena masih terjaga dibawah rata-rata nasional. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,308. Angka ini turun 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,316.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,341, mengalami penurunan 0,007 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,348. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,267, relatif tidak berubah dibandingkan capaian Maret 2025. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2025 distribusi pengeluaran kelompok penduduk Provinsi Kalimantan Barat 40% terbawah adalah sebesar 22,01 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,52%. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 23,69%.

Mengacu pada laporan Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Kalimantan Barat dan Indonesia masih termasuk ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. Meskipun sudah berada dibawah rata-rata nasional, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya peningkatan pemerataan masyarakat Kalimantan Barat dengan memfokuskan penurunan kemiskinan dan ketimpangan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Ardianto, 2026). Kebijakan ini didukung dengan perbaikan produksi pertanian, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan perlindungan sosial. Pelaksanaan MBG turut meringankan beban pengeluaran rumah tangga kelompok sasaran melalui penyediaan konsumsi bergizi, sekaligus mendorong terciptanya aktivitas ekonomi dan peluang kerja dalam rantai pelaksanaannya. Penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program pemerintah tersebut tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah kabupaten di Kalimantan Barat. Pemerataan aktivitas ekonomi antarwilayah ini memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat di luar pusat pertumbuhan utama, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan berkontribusi dalam menekan ketimpangan antarwilayah yang tercermin dalam pergerakan *Gini Ratio*.

2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

TPT di Kalimantan Barat Sebesar 4,63% (Berada di Bawah TPT Nasional Sejak Tahun 2022 s.d. 2025)

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,77 juta jiwa, meningkat 0,07 juta jiwa dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 5,70 juta jiwa. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat mencapai 4,63% pada November 2025. Presentase TPT pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2025.

Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2023 s.d. 2025

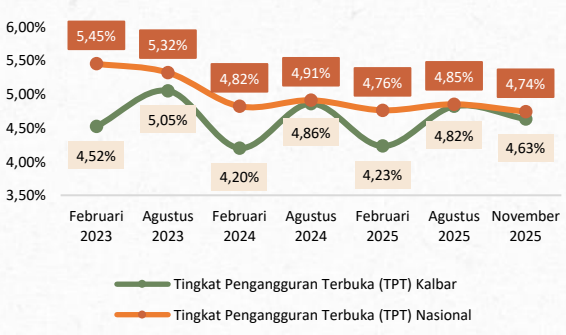

Sumber: BPS Kalbar dan Nasional (diolah)

Jumlah angkatan kerja pada November 2025 sebanyak 3,12 juta orang, naik 40,55 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) November 2025 naik sebesar 0,68% poin dibandingkan pada Agustus 2025. Lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Barat berada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 41,44% pada November 2025.

Grafik 2.14 Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025

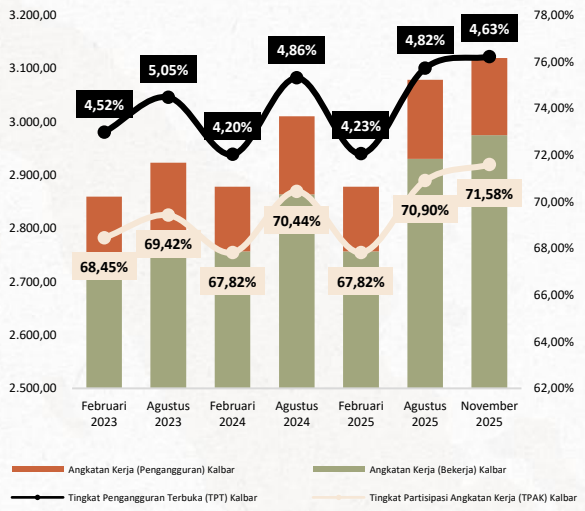

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Sedangkan, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD kebawah sebesar 38,73%. Sementara yang terendah terdapat pada tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,51%. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

JENIS PENDIDIKAN	Agustus 2023 (%)	Agustus 2024 (%)	Agustus 2025 (%)	November 2025 (%)
SD ke Bawah	46,05	43,10	40,73	38,17
SMP	16,96	16,60	16,48	23,80
SMA	20,37	21,82	23,32	18,35
SMK	6,22	6,89	7,57	8,62
Diploma I/II/III	2,53	2,70	2,51	8,56
Universitas	7,87	8,89	9,39	2,51
JUMLAH	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan tenaga kerja di Kalimantan Barat masih perlu ditingkatkan, yang umumnya terserap pada sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor tersebut pada umumnya tidak mensyaratkan tingkat pendidikan atau keterampilan formal yang tinggi, sehingga lebih mudah menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dasar. Untuk meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru, diperlukan peningkatan jumlah lulusan terdidik yang memiliki kompetensi sesuai pasar kerja. Selain itu, pengembangan produk unggulan UMKM daerah berbasis sumber daya alam, kerajinan, dan kearifan lokal dapat menumbuhkan usaha yang berkelanjutan serta memperluas kesempatan kerja. Seiring meningkatnya digitalisasi dan intensifikasi promosi, perkembangan UMKM Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah UMKM terdaftar meningkat sebesar 12,5%, koperasi aktif 8,3%, dan industri kecil 15,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Total omzet UMKM Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan sebesar 22,1% di tahun 2025, dengan sektor unggulan meliputi kuliner, *fashion*, kriya, dan hasil pertanian/perikanan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat daya saing tenaga kerja dan menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) (Narwati, 2025). Pelaksanaan pelatihan tersebut juga didukung oleh revitalisasi fasilitas pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK), serta dilakukan kolaborasi dengan dunia industri dan lembaga sertifikasi untuk memastikan keterampilan yang diperoleh relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pelibatan tenaga kerja lokal dalam rantai pelaksanaannya (Oxtora, 2026).

2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat Bulan Desember 2025 sebesar 170,26 Poin (Tertinggi se-Regional Kalimantan) dan NTP Tahunan 2025 Sebesar 169,94 Poin.

Grafik 2.15 Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025

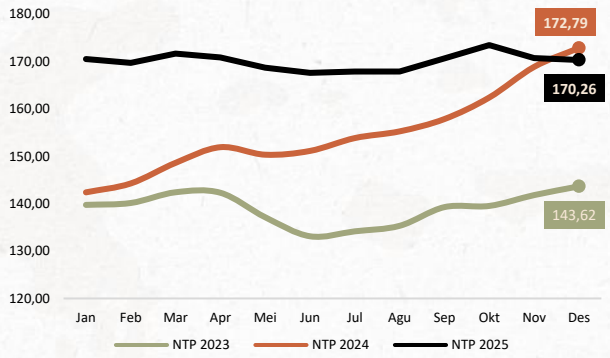

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Berdasarkan hasil pemantauan harga di wilayah perdesaan pada 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat pada Desember 2025 tercatat sebesar 170,26 poin, atau mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan November 2025. Penurunan NTP tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,04 persen, yang relatif lebih rendah dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,28%.

Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat selama periode 2023–2025 tercatat secara konsisten berada di atas 100. Secara konseptual, nilai NTP > 100 menunjukkan bahwa petani berada dalam kondisi surplus, di mana kenaikan harga hasil produksi lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, sehingga pendapatan petani meningkat lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Tingginya capaian NTP Kalimantan Barat tersebut menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan NTP tertinggi di regional Pulau Kalimantan. Namun demikian, apabila dicermati capaian NTP yang begitu tinggi di Kalimantan Barat ini tidak lepas dari sawit dan karet (tanaman perkebunan rakyat) yang menjadi andalan petani atau masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 2.5 Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat Menurut Subsektor Tahun 2023-2025

Subsektor	2023	2024	2025
Nilai Tukar Petani	**139,03**	**154,93**	**170,26**
Tanaman Pangan	95,98	98,70	103,25
Hortikultura	106,63	103,65	108,11
Tanaman Perkebunan Rakyat	162,51	214,91	208,95
Peternakan	102,04	102,03	99,83
Perikanan	101,45	99,92	100,09

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Jika dilihat lebih rinci pada NTP per subsektor tahun 2025, NTP subsektor peternakan masih berada dibawah nilai 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani pada subsektor peternakan mengalami defisit, di mana kenaikan harga produksi relatif lebih rendah dibandingkan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

NTP tahunan 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan NTP tahunan 2024. Komoditas utama yang berkontribusi atas kenaikan NTP tahun 2024 pada harga yang diterima petani adalah jeruk, cabai rawit, cabai merah, ketimun, dan ayam ras pedaging. Sejalan dengan peningkatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 terus berupaya memperkuat kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berfokus pada pencapaian swasembada pangan dan modernisasi pertanian. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan optimalisasi lahan, cetak sawah baru, serta pemberian dukungan produksi berupa bantuan benih padi dan alat mesin pertanian (alsintan), disertai penguatan posisi tawar petani melalui pembangunan gudang dan penggilingan padi di beberapa kabupaten. Dalam implementasinya,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Perum Bulog menyiapkan pembangunan gudang di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, serta penggilingan padi di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang (Kabaronline, 2025). Selain itu, BRMP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program tanam perdana padi pada lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 19 hektare di Kabupaten Bengkayang yang disertai bantuan benih padi Inpari 32 dan alsintan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BRMP, TNI, serta kelompok tani diharapkan dapat mendukung keberlanjutan modernisasi pertanian menuju swasembada pangan di Kalimantan Barat (BRMP Kalbar, 2025).

2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Menurut data yang dirilis oleh BPS Kalbar, Provinsi Kalimantan Barat tidak menghitung Nilai Tukar Nelayan, namun masuk dalam sub sektor perikanan (tangkap dan budidaya) pada perhitungan Nilai Tukar Petani. Jika diasumsikan NTN adalah perhitungan nilai tukar di sektor perikanan saja (Subsektor Perikanan Tangkap dan Subsektor Perikanan Budidaya).

Grafik 16 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

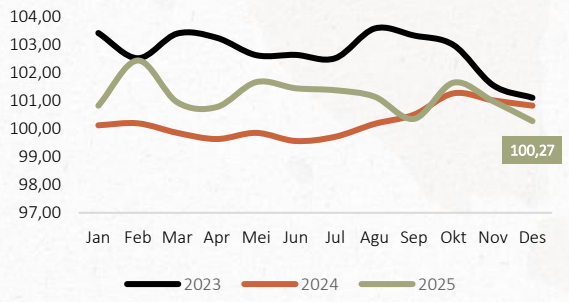

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Pada Desember 2025, NTNP mengalami penurunan 0,42%. Penurunan NTNP disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan (It) turun sebesar 0,15%, sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) naik sebesar 0,27%. Penurunan It disebabkan oleh turunnya harga pada Kelompok Penangkapan Laut sebesar 0,61% (komoditas ikan tongkol, udang laut, dan manyung). Sedangkan Kelompok Penangkapan Perairan Umum mengalami kenaikan sebesar 0,31% (komoditas ikan lais). Sedangkan kenaikan Ib pada subsektor ini disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok IKRT sebesar 0,38% dan kelompok BPPBM sebesar 0,07%.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, NTN di Kalimantan Barat selalu terjaga di angka >100, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi nelayan Kalbar mengalami surplus karena harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Meskipun demikian karena NTN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, Dinas Kelautan serta Perikanan Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT Pelabuhan Perikanan dan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT PBAPL), melaksanakan lima program, antara lain Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengawasan Sumber Daya Kelau tan dan Perikanan; dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pada tahun 2025 melalui Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) yang melibatkan pelaku perikanan, pemangku kepentingan, dan mitra strategis. Program ini dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta USAID BER-IKAN untuk memperkuat tata kelola perikanan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kapasitas dan kelembagaan nelayan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan, alat tangkap, serta kegiatan peningkatan kapasitas melalui kolaborasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) guna mendukung produktivitas usaha dan keberlanjutan pendapatan nelayan.

2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umu. Berikut rekapitulasi dan reviu capaian kinerja makro dan kesejahteraan regional di Kalimantan Barat Tahun 2025.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,39%, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2024 yang

tumbuh sebesar 4,90%. Pada tahun 2025, petumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat sejalan dengan angka yang ditetapkan dalam target nasional. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 31,48%. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 41,75%. Percepatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya komoditas bauksit yang ada di Kalimatan Barat. Kalimantan Barat memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan sebesar 17,10% dari 4,79% dan berada pada urutan kedua setelah Kalimantan Timur yang memberikan kontribusi sebesar 46,02%.

Kalimantan Barat menghadapi tantangan dalam menjaga kecukupan ketersediaan pangan. Kondisi ini menyebabkan sebagian kebutuhan komoditas pangan masih dipenuhi dari luar daerah, sehingga menghadapi risiko ketidakstabilan harga dan pasokan.

IPM Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai 72,09 dan terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2023 s.d. 2025. Namun meskipun demikian, IPM Kalimantan Barat masih berada dibawah capaian nasional. Kemiskinan Kalimantan Barat tahun 2024 sudah mencapai target sebesar 5,97% dari target kemiskinan Kalbar sebesar 5,65-6,15%. Meski demikan, penyebab masih terjadinya kemiskinan jika didasari oleh daerah tempat tinggal terdapat perbedaan dinamika antara perkontaan dan perdesaan.

Tabel 2.6 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat 2025

No.	Sasaran Makro Kesejahteraan	Target 2025	Capaian 2025	Hasil Reviu
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,65	5,62	Tercapai
2	Tingkat Inflasi	1,5-3,5	1,85	Tercapai
3	IPM	71,61	72,09	Tercapai
4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65-6,15	5,97	Tercapai
5	TPT	4,73-4,86	4,63	Tercapai
6	Rasio Gini	0,315-0,321	0,308	Tercapai
7	NTP	105	170,26	Tercapai
8	NTN		100,27	-

Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar (diolah)

Inflasi (*y-on-y*) Kalimantan Barat 2025 sebesar 1,85% berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,92% secara *year on year*. Penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2025 terdapat pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menyumbang mayoritas inflasi sebesar 2,87%. Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi terbesar adalah emas perhiasan, beras, ikan kembung, cabai rawit, telur ayam ras. Harga emas dunia antara tahun 2021 dan 2025 mengalami kenaikan drastis karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan politik global. Sedangkan disisi lain penyebab beras, ikan kembung, cabai rawit, telur ayam ras yang terus mengalami kenaikan sehingga menyebabkan inflasi disebabkan karena adanya lonjakan permintaan di masyarakat pada priode Nataru serta lonjakan permintaan untuk pemenuhan program MBG. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi,

Pada periode 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan dan sebaliknya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Hal ini bisa terjadi disebabkan sebagaian sebagian anak muda dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di daerah kota karena mereka tidak memiliki kebun dan tanah di desa mereka akibat ketimpangan kepemilikan lahan. Hal ini selaras dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,63% pada tahun 2025, capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan realisasi berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Rasio Gini Kalimantan Barat termasuk kategori ketimpangan sedang. Dibandingkan dengan bulan Maret 2025, angka Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat mengalami sedikit penurunan pada September 2025. Penurunan ini mencerminkan

adanya perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan sebesar 0,70% dengan posisi indeks mencapai 100,27. Hal ini terjadi karena adanya penurunan Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan (It) sebesar 0,43% disebabkan turunnya kelompok penangkapan laut (komoditas ikan tongkol, udang laut dan manyung), hal ini berpotensi terjadi akibat cuaca ekstrem yang menghambat kegiatan melaut, masih dominannya penggunaan alat tangkap tradisional, serta keterbatasan armada penangkapan untuk menjangkau laut lepas. Dari sisi Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib), indeks konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,38%, hal ini menunjukkan peningkatan, yang berpotensi dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup. Sejalan dengan adanya inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang merupakan kelompok utama dalam pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat, target laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 2026 yaitu sebesar 5,19-6,17%, target inflasi sebesar 2026 sebesar 1,35 – 3,5%, target IPM sebesar 72,47, target kemiskinan 2026 sebesar 5.75-6.25%, target pengangguran terbuka 2026 sebesar 4,71%, target rasio gini sebesar 0,302. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yaitu percepatan pembangunan serta peningkatan infrastruktur secara adil berkelanjutan; meningkatkan kualitas SDM, kualitas kehidupan masyarakat, dan kesetaraan gender; memperkuat fondasi perekonomian kalimantan barat yang inklusif dan berkelanjutan; meningkatkan insentif tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; meningkatkan partisipasi generasi muda; meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sda berkelanjutan dan mewujudkan kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Kerja Keras Adalah Kunci Mencapai Kesuksesan, Tak Ada Jalan Pintas

–

Prubaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan

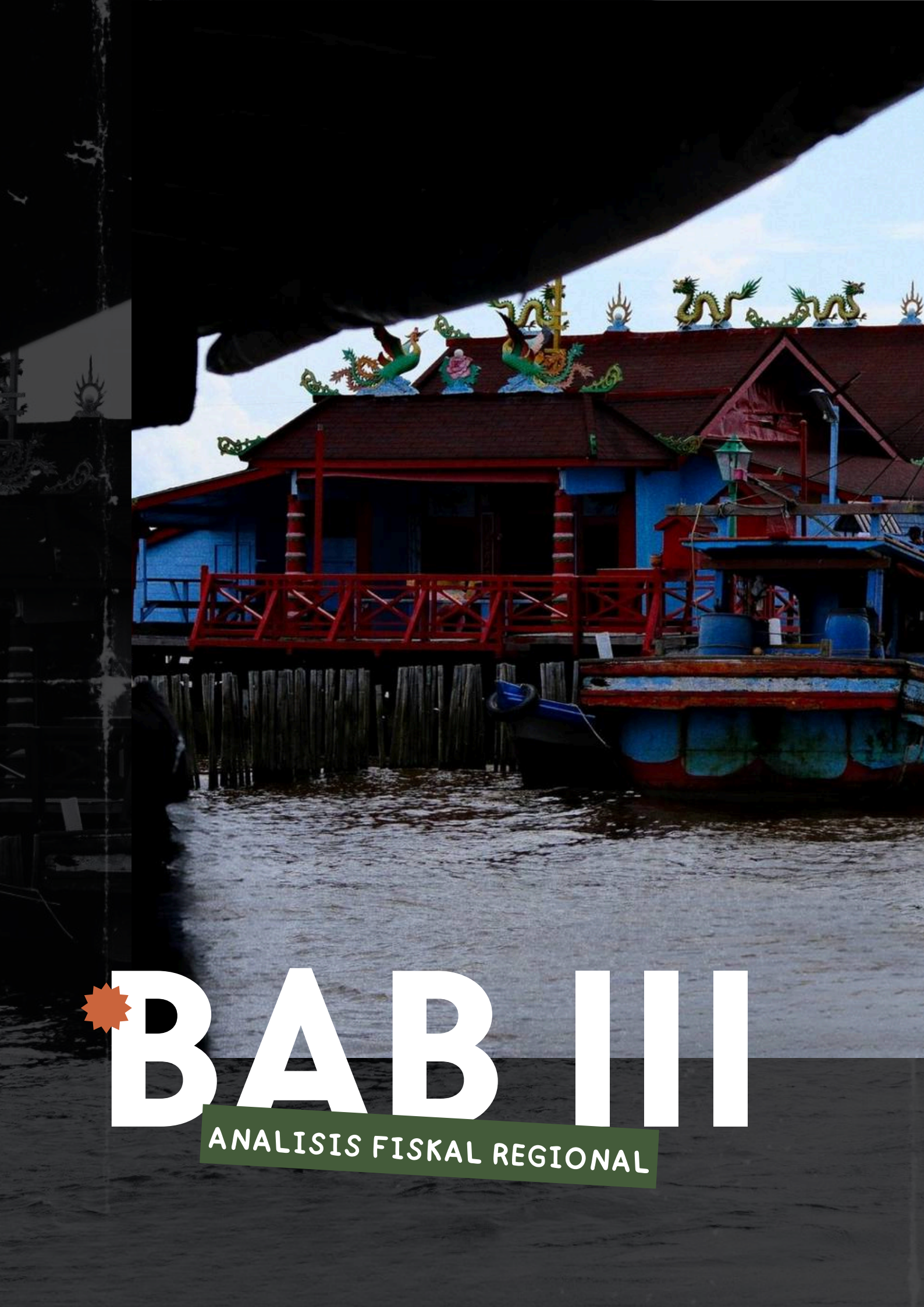

BAB III

ANALISIS FISKAL REGIONAL

BAB III
Analisis Fiskal Regional

3.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, serta proses transisi kepemimpinan nasional, APBN tetap menjadi instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun tingkat regional Kalimantan Barat. APBN berperan secara substansial dalam menahan tekanan harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kegiatan ekonomi regional tetap berjalan. APBN juga terus menjadi pendorong pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, serta menjaga pengelolaan kebijakan fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025
(dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			%Growth	
	Target/Pagu	realisasi	%real	Target/Pagu	realisasi	%real	Target/Pagu	realisasi	%real	Pagu	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	11.504,30	12.660,15	110,0471	12.578,61	13.243,54	105,29	12.417,38	12.980,92	104,54%	(1,28)	(1,98)
Penerimaan Perpajakan	**10.719,89**	**11.278,45**	**105,2105**	**11.774,30**	**11.902,30**	**101,09**	**11.503,76**	**11.639,88**	**101,18%**	**(2,30)**	**(2,20)**
a. Pajak Dalam Negeri	**10.432,23**	**10.975,34**	**105,2061**	**11.460,88**	**11.574,62**	**100,99**	**11.365,94**	**11.222,65**	**98,74%**	(0,83)	(3,04)
Pajak Penghasilan	4.671,93	4.707,82	100,7682	4.607,50	4.682,09	101,62	4.438,29	3.745,59	84,39%	(3,67)	(20,00)
Pajak Pertambahan Nilai	5.163,25	5.576,14	107,9967	6.139,00	6.049,18	98,54	6.629,87	6.347,56	95,74%	8,00	4,93
Pajak Bumi dan Bangunan	402,45	477,51	118,6508	489,35	508,81	103,98	154,63	167,49	108,32%	(68,40)	(67,08)
Cukai	91,29	106,49	116,6502	128,23	129,22	100,77	128,06	248,02	193,67%	(0,13)	91,94
Pajak Lainnya	103,32	107,38	103,9295	96,81	205,31	212,08	15,08	714	4734,75%	(84,42)	247,77
b. Pajak Perdagangan Internasional	**287,66**	303,11	**105,3709**	**313,42**	327,68	**104,55**	**137,82**	**417,23**	**302,74%**	(56,03)	27,33
Bea Masuk	31,35	48,78	155,5981	73,57	75,11	102,09	35,47	68,79	193,94%	(51,79)	(8,41)
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	256,31	254,33	99,2275	239,85	252,57	105,30	102,35	348,44	340,44%	(57,33)	37,96
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**784,41**	**1.381,43**	**176,1107**	**804,31**	**1.340,72**	**166,69**	**913,62**	**1.341,04**	**146,78%**	**13,59**	**0,02**
PNBP Lainnya	329,97	784,43	237,7277	307,22	718,91	234,00	369,06	740,57	200,66%	20,13	3,01
Pendapatan BLU	454,44	597,00	131,3705	497,09	621,81	125,09	544,56	600,47	110,27%	9,55	(3,43)
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Negara	32.577,82	32.171,28	98,7521	33.557,37	32.989,52	98,31	31.301,68	29.982,95	95,79%	(6,72)	(9,11)
Belanja Pemerintah Pusat	**11.772,10**	**11.486,15**	**97,5710**	**12.582,05**	**12.360,70**	**98,24**	**10.330,43**	**9.756,75**	**94,45%**	**(17,90)**	**(21,07)**
Belanja Pegawai	3.849,63	3.809,36	98,9539	4.190,73	4.234,67	101,05	4.680,75	4.611,40	98,52%	11,69	8,90
Belanja Barang	5.470,92	5.334,86	97,5130	6.055,80	5.837,44	96,39	4.327,09	3.940,64	91,07%	(28,55)	(32,49)
Belanja Modal	2.441,11	2.331,49	95,5094	2.321,50	2.274,61	97,98	1.305,03	1.187,24	90,97%	(43,79)	(47,80)
Belanja Bantuan Sosial	10,44	10,44	100,0000	14,03	13,97	99,57	17,57	17,47	99,43%	25,23	25,05
Transfer Ke Daerah	**20.805,72**	**20.685,13**	**99,4204**	**20.975,32**	**20.628,82**	**98,35**	**20.971,25**	**20.226,20**	**96,45%**	**(0,02)**	**(1,95)**
Dana Bagi Hasil	2.379,51	2.378,93	99,9756	1.311,13	1.310,90	99,98	1.512,84	1.313,88	86,85%	15,38	0,23
Dana Alokasi Umum	11.552,61	11.571,52	100,1637	12.776,70	12.597,55	98,60	13.127,53	12.980,98	98,88%	2,75	3,04
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.706,79	1.623,83	95,1394	1.665,71	4.639,91	278,55	802,08	765,72	95,47%	(51,85)	(83,50)
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	3.114,36	3.063,19	98,3570	3.131,19	1.580,68	50,48	3.563,82	3.517,94	98,71%	13,82	122,56
Dana Insentif Fiskal	136,61	136,61	100,0000	145,93	140,33	96,16	51,95	51,95	100,00%	(64,40)	(62,98)
Surplus/Defisit Anggaran	(21.073,52)	(19.511,13)	92,59	(20.978,76)	(19.745,98)	94,12	(18.884,31)	(17.002,03)	90,03%	(9,98)	(13,90)

Sepanjang tahun 2025, secara umum realisasi pendapatan dalam APBN regional Kalimantan Barat mampu terjaga dan melampaui target yang telah ditetapkan. Total realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2025 mencapai Rp12.980,92 miliar atau 104,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp12.417,38 miliar. Meskipun target maupun realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami kontraksi y.o.y masing-masing sebesar 1,28% pada sisi pagu dan 1,98% pada sisi realisasi, belanja negara mampu dikelola dengan efektif dan efisien. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tekanan pada sisi penerimaan tidak serta merta menurunkan kualitas pelaksanaan APBN. Kinerja realisasi penerimaan perpajakan tetap terjaga dengan realisasi di atas 100%. Demikian juga pendapatan PNBP menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan positif. Peningkatan pendapatan negara mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat, perluasan usaha, atau peningkatan transaksi impor dan ekspor di Kalimantan Barat, yang akan diuraikan lebih lanjut pada subbab selanjutnya.

Pada sisi belanja, secara keseluruhan realisasi Belanja Negara di APBN regional Kalimantan Barat

baik Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp29.982,95miliar atau 95,79% dari pagu yang telah ditetapkan. Pos Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp9.756,miliar atau 94,45% dari pagu yang telah ditetapkan, sedangkan pos TKD terealisasi sebesar Rp20.226,20 miliar atau 96,45% dari pagu yang telah ditetapkan.

3.1.1. Pendapatan Negara

a. Analisa Kontribusi Pendapatan Negara Dan Hibah

Penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai Rp12.980,92 miliar atau sebesar 104,54% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Negara Dan Hibah didominasi oleh pos Penerimaan Perpajakan sebesar Rp11.639,88 miliar atau 89,67% dari total Pedapatan Negara dan Hibah. Sedangkan, untuk PNBP menyumbangkan 10,33% atau Rp1.341,04 miliar untuk total Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2025. Pertumbuhan positif PNBP didukung oleh pengoptimalan pemanfaatan BMN yang *idle*.

Grafik 3.1 Komponen Pendapatan Dalam APBN Regional Kalimantan Barat Tahun 2025
(dalam miliar rupiah)

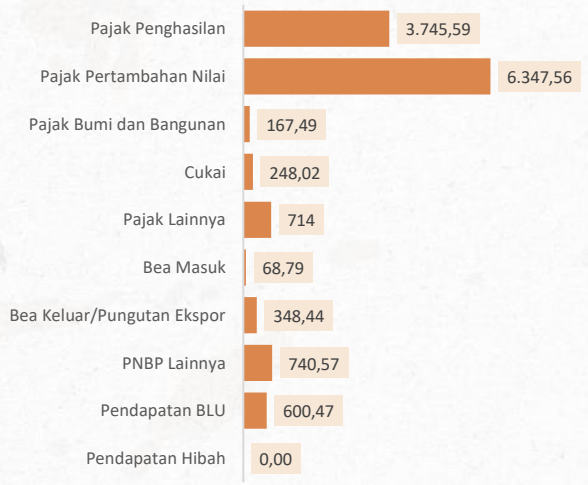

Sumber: OM SPAN, Kanwil DJP Kalbar, Kanwil DJBC Kalbagbar (diolah)

b. Analisis Penerimaan Perpajakan

1) Penerimaan Pajak

Total Penerimaan Pajak pada tahun 2025 mencapai Rp11.222,65 miliar atau 86,45% dari total Pendapatan Negara dan Hibah di Kalimantan Barat.

Sektor penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup regional Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp6.347,56 miliar untuk PPN dan Rp 3.745,59 miliar untuk PPh. Pos Pajak Lainnya mencatat pertumbuhan signifikan akibat kebijakan deposit pajak pada tahun 2025 yang berpotensi dapat mengkoreksi pos penerimaan pajak yang lain. Deposit pajak bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam penyetoran kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pos Pajak Penghasilan mengalami kontraksi sebesar 20% jika dibandingkan tahun 2024, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan peniadaan NPWP cabang, sehingga sejumlah pajak dibayarkan sesuai lokasi NPWP induk Perusahaan. Disamping itu, meskipun PBB terkontraksi sebesar 67,08% pada tahun 2025, realisasi sebesar Rp167,49 tersebut telah melampaui target yang ditentukan. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan pelimpahan perpajakan ke kantor pusat serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Grafik 3.2 Tren Penerimaan Pajak Tahun 2023-2025
(dalam miliar rupiah)

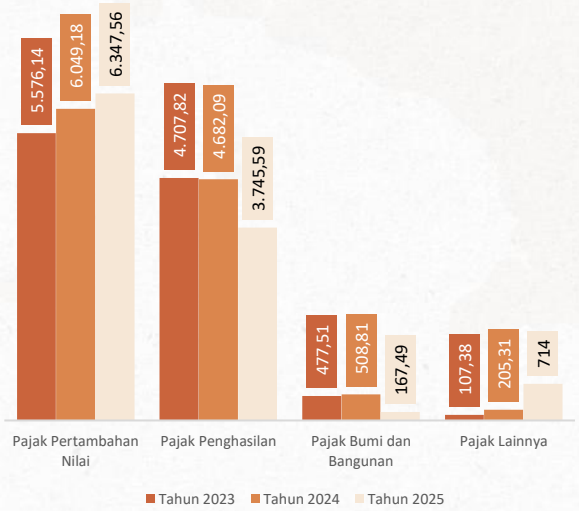

Sumber: OM SPAN dan Kanwil DJP Kalbar (diolah)

Penerimaan pajak pada periode 2023–2025 konsisten menjadi kontributor terbesar dalam Pendapatan Negara dan Hibah di Kalimantan Barat. Kondisi ini menegaskan peran strategis pajak yang masih menjadi sumber penerimaan utama untuk menopang belanja negara dan memastikan keberlangsungan program pembangunan.

Grafik 3.3 Persentase Penerimaan Pajak Terhadap Total Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023-2025 (dalam miliar rupiah)

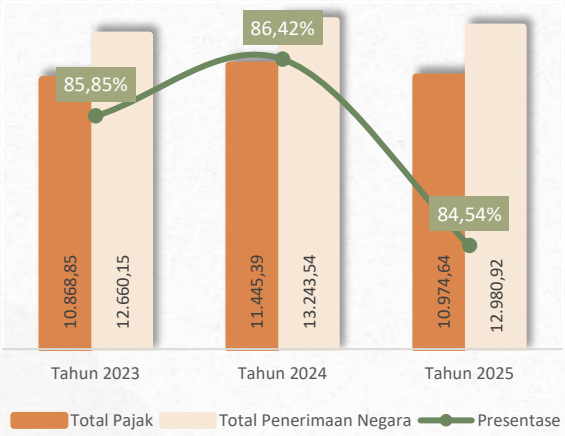

Sumber: OM SPAN (diolah)

2) Penerimaan Bea Cukai

Grafik 3.4 Tren Penerimaan Bea Dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023-2025 (dalam miliar rupiah)

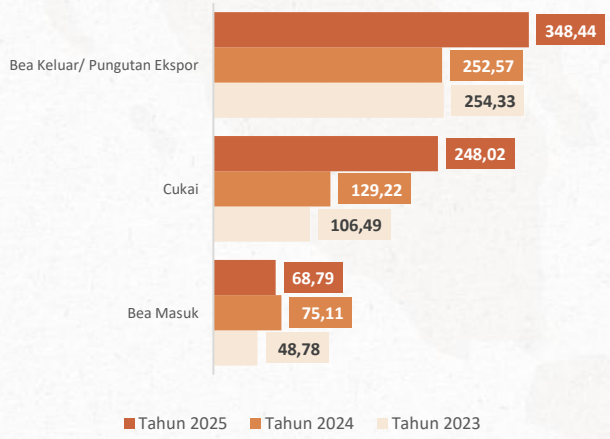

Sumber: OM SPAN dan Kanwil DJBC Kalbagbar (diolah)

Total penerimaan sektor Bea dan Cukai wilayah Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2025 mencapai Rp665,25 miliar atau sebesar 5,12% dari total Pendapatan Negara dan Hibah di Kalimantan Barat. Penerimaan Bea dan Cukai pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif sekitar 45,60% (yoy). Penerimaan Bea Keluar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yakni mencapai 37,96% (yoy). Pertumbuhan capaian Bea Keluar 2025 didongkrak oleh naiknya volume ekspor turunan CPO. Sementara itu, meskipun penerimaan Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 8,41% secara yoy namun realisasi Bea Masuk telah melampau target pada tahun 2025. Kontraksi Bea Masuk terjadi karena tidak adanya impor komoditas beras.

Grafik 3.5 Persentase Penerimaan Bea dan Cukai Terhadap Total Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023-2025 (dalam miliar rupiah)

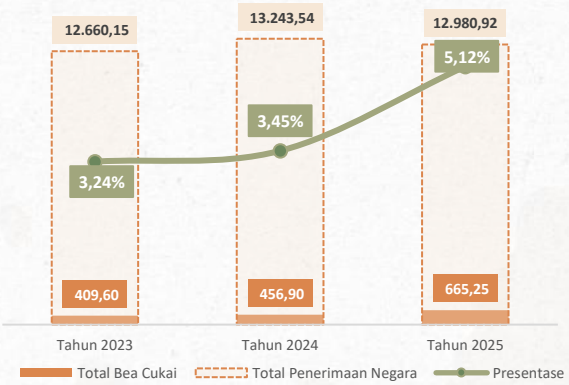

Sumber: OM SPAN (diolah)

Realisasi penerimaan pada pos Cukai pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 91,943% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pos Cukai mengalami mengalami tren yang meningkat selama tiga tahun terakhir (2022-2024). Peningkatan ini mencerminkan efektivitas intensifikasi pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai di Kalimantan Barat.

Nilai devisa impor pada tahun 2025 mengalami peningkatan disumbang oleh tiga komoditi ekspor dengan devisa terbesar pada tahun 2025 adalah *Smelter Grade Alumina & Chemical Grade Alumina* (63,2%), *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya (18,9%) dan Natural Rubber (5,5%).

c. Analisis Komposisi PNBP

Grafik 3.6 Tren PNBP dan Hibah Tahun 2023-2025 (dalam miliar rupiah)

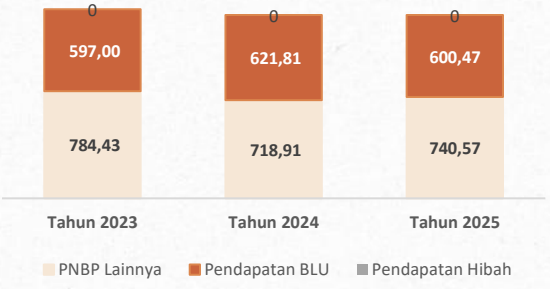

Sumber: OM SPAN & Bidang PPA I Kanwil DJPb

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 mencapai Rp1341,04 miliar atau

menyumbang 10,33% dari total pendapatan negara mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,02%. Realisasi penerimaan PNBP ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp740,57 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp600,47 miliar. Kinerja ini tidak terlepas dari upaya pengoptimalan pemanfaatan BMN sehingga dapat memberikan nilai tambah sekaligus memperluas sumber penerimaan negara. Sementara itu, seperti tahun 2023 dan 2024, pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah di Kalimantan Barat.

d. Analisis Tax Ratio Terhadap PDRB

Tabel 3.2 Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDRB (dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	PDRB ADHB	Ratio
2023	11.278	274.469	4,11%
2024	11.902	300.167	3,97%
2025	11.640	328.570	3,54%

Sumber: OM SPAN dan BPS Kalbar (diolah)

Tax Ratio Penerimaan Pajak terhadap PDRB wilayah Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 mengalami tren penurunan. Faktor yang mempengaruhi kontraksi pada penerimaan perpajakan disebabkan oleh adanya pelimpahan perpajakan ke kantor pusat serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, ditetapkannya peraturan terkait larangan ekspor bijih bauksit dan tidak adanya impor beras mengakibatkan pos bea keluar mengalami kontraksi dan mempengaruhi penerimaan perpajakan di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2025.

e. Analisis Perpajakan Sektoral Terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, secara kumulatif seluruh sektor dominan (5 sektor unggulan) pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,09% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, secara total seluruh sektor (5 sektor unggulan ditambah dengan sektor lainnya) menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 17,83%.

Tabel 3.3 Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kalbar per Sektor Tahun 2024

Sektor	Realisasi		Growth (%)		Kontribusi (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Perdagangan Besar dan Eceran	2.528,34	2.611,95	10,33%	3,31%	26,18%	23,70%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.695,32	2.211,38	23,82%	30,44%	17,56%	20,07%
Industri Pengolahan	1.205,58	1.887,45	-9,21%	56,56%	12,49%	17,13%
Administrasi Pemerintahan	1.919,94	1.716,25	-1,18%	-10,61%	19,88%	15,57%
Transportasi dan Pergudangan	882,78	966,35	9,96%	9,47%	9,14%	8,77%
Sektor Lainnya	1.423,82	1.626,51	5,81%	14,24%	14,75%	14,76%

Sumber: Kanwil DJP Kalbar (diolah)

Jumlah kontribusi atas 5 sektor unggulan sebesar 85,24% dari total penerimaan, menurun dari tahun 2024 yang sebesar 85,23%. Sektor lainnya terdiri dari 16 sektor memberikan kontribusi sebesar 14,76% yang berarti mengalami kenaikan dari kontribusi tahun 2024 sebesar 14,75 %.

3.1.2. Belanja Negara

Secara keseluruhan Belanja Negara di regional Kalimantan Barat s.d. 31 Desember 2025 terkontraksi 9,11% yoy dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada turunnya penyerapan belanja pada Satuan Kerja.

Grafik 3.7 Pagu dan Realisasi Belanja K/L Tahun 2025

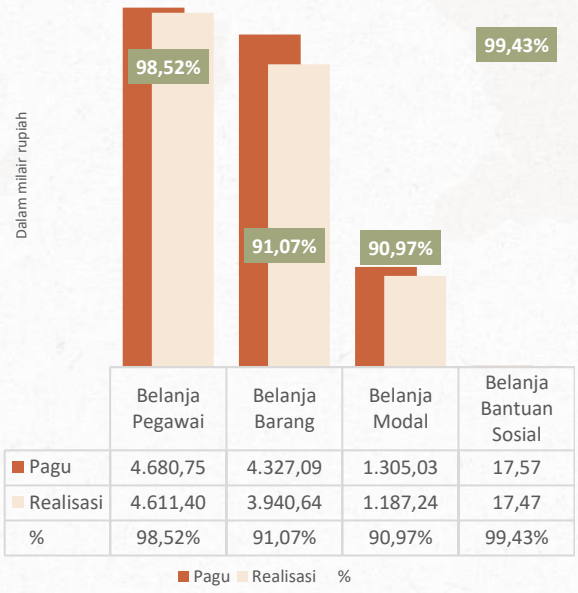

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial
Pagu	4.680,75	4.327,09	1.305,03	17,57
Realisasi	4.611,40	3.940,64	1.187,24	17,47
%	98,52%	91,07%	90,97%	99,43%

Sumber: OM SPAN dan Simtrada (diolah)

Tabel 3.4 Pagu Dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023-2025
(dalam miliar rupiah)

URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target / Pagu	Realisasi	%real	Target / Pagu	Realisasi	%real	Target / Pagu	Realisasi	%real
Belanja Pegawai	3.849,63	3.809,36	98,95%	4.190,73	4.234,67	101,05%	4.680,75	4.611,40	98,52%
Belanja Barang	5.470,92	5.334,86	97,51%	6.055,80	5.837,44	96,39%	4.327,09	3.940,64	91,07%
Belanja Modal	2.441,11	2.331,49	95,51%	2.321,50	2.274,61	97,98%	1.305,03	1.187,24	90,97%
Belanja Bantuan Sosial	10,44	10,44	100,00%	14,03	13,97	99,57%	17,57	17,47	99,43%

Sumber: OM SPAN (diolah)

Total realisasi Belanja Negara dalam APBN Kalimantan Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp29.982,95 miliar atau 95,79% dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp31.301,68 miliar. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) adalah sebesar Rp9.756,75 miliar atau 94,45% dari pagu yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp20.226,2 miliar atau 96,45% dari pagu yang telah ditetapkan. Secara akumulatif, Belanja Negara mengalami pertumbuhan yang positif baik dari segi pagu maupun realisasi yang telah dicapai. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terbesar secara nominal berada pada pos Belanja Pegawai yakni Rp4.611,4 miliar yang dipengaruhi oleh lonjakan belanja pada penutupan tahun anggaran sedangkan secara persentase realisasi berada pada pos Belanja Bantuan Sosial sebesar 99,43%.

Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Belanja TKD Tahun 2025

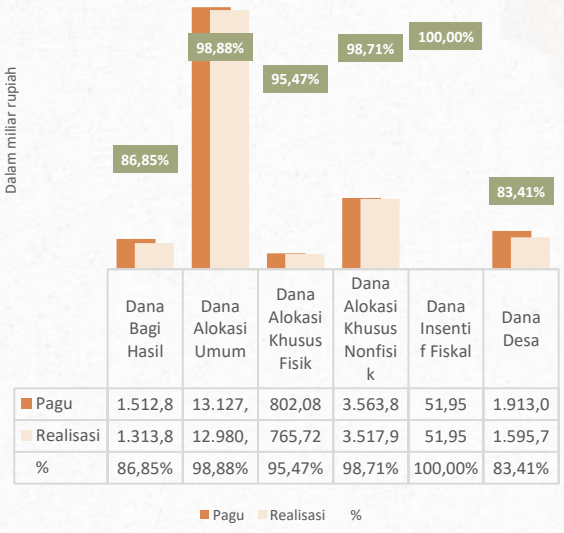

Sumber: OM SPAN dan Simtrada (diolah)

Disamping itu, total realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2025 mencapai Rp220.226,2miliar atau 96,45% dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp20.971,25 miliar. Secara akumulatif, baik pagu maupun realisasi TKD mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun 2024. Jika diuraikan Dana Aokasi Khusus Fisik, Dana Intensif Fiskal, Dana Desa mengalami penurunan pagu dan realisasi di tahun 2025, sementara jenis belanja DBH, DAU, dan DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan positif secara yoy.

a. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Belanja pemerintah pusat merupakan bagian dari belanja negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat. Belanja ini juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal. Secara umum, stimulus fiskal terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengurangan beban pajak dan peningkatan belanja pemerintah (*increased spending*).

Pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari pengeluaran untuk sektor konsumtif dan produktif. Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai administrasi dan kebutuhan birokrasi seperti gaji, tunjangan, honor, belanja operasional kantor, pengadaan kendaraan dinas. Sedangkan sektor produktif antara lain peningkatan mutu jalan, jaringan, irigasi, intensifikasi dan ektensifikasi pertanian, pengadaan traktor untuk masyarakat.

Berikut adalah tren realisasi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenis belanja selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Grafik 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023-2025

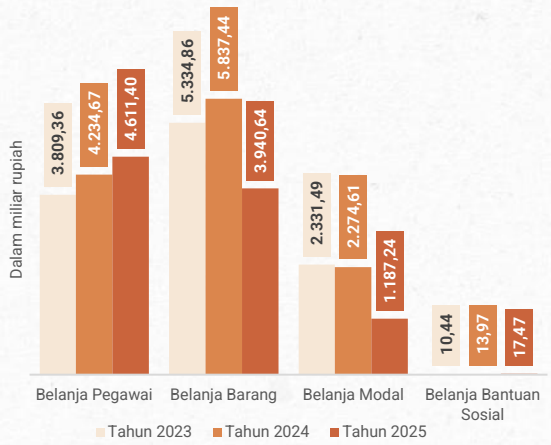

Sumber: OM SPAN (diolah)

Pada tahun 2023-2025 jenis belanja BPP dengan realisasi tertinggi terdapat pada jenis Belanja Barang, disusul oleh Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa jenis belanja konsumtif masih mendominasi dibandingkan dengan belanja produktif (Belanja Modal).

Disamping itu, Belanja Modal dari tahun 2023-2025 selalu memiliki tingkat persentase realisasi terendah terhadap pagu yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Bidang Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa faktor penyebab terkendalanya realisasi pada Belanja Modal, yakni sebagai berikut:

1) Kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan penyesuaian pagu belanja modal.
2) Keterbatasan akses dan infrastruktur: Kondisi infrastruktur jalan utama yang rusak berat menghambat proses pengadaan sehingga realisasi belanja menjadi lebih lambat dan kurang optimal.
3) Penyesuaian akun belanja modal yang harus disesuaikan kembali dengan kegunaannya.
4) Terbatasnya calon penyedia/vendor yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
5) Keterlambatan proses pengadaan, pendaftaran kontrak, dan penyelesaian fisik pekerjaan dan konstruksi.
6) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tidak berdomisili di kota yang sama, sehingga koordinasi menjadi tidak efektif.
7) Kontrak pihak ketiga terkendala kondisi lapangan/cuaca.
8) Kendala sistem, aplikasi, dan jaringan lainnya.
9) Faktor alam yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

b. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Alokasi belanja terbesar pada tahun 2025 masih tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur diproyeksikan mampu meningkatkan aksesibilitas serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Barat. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat maupun dunia usaha. Berikut merupakan lima belas

Tabel 3.5 Pagu Dan Realisasi 15 K/L Pagu Terbesar Tahun 2025
(dalam miliar rupiah)

No	Nama/KL	Pagu	Realisasi	% Real	%Undisbursed
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	2.030,54	1.936,63	95,38%	4,62%
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.502,93	1.467,76	97,66%	2,34%
3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	932,88	932,63	99,97%	0,03%
4	KEMENTERIAN AGAMA	872,35	860,13	98,60%	1,40%
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI	329,99	324,32	98,28%	1,72%
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	427,56	372,30	87,08%	12,92%
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	331,39	258,55	78,02%	21,98%
8	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	277,06	253,25	91,41%	8,59%
9	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	199,62	197,23	98,80%	1,20%
10	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	190,26	165,99	87,24%	12,76%
11	MAHKAMAH AGUNG	186,20	184,03	98,84%	1,16%
12	KEMENTERIAN KEUANGAN	129,78	84,73	65,29%	34,71%
13	KEMENTERIAN KEHUTANAN	127,03	118,56	93,33%	6,67%
14	KEMENTERIAN KESEHATAN	113,02	100,53	88,95%	11,05%
15	KOMISI PEMILIHAN UMUM	108,45	108,37	99,92%	0,08%
	Total	7.759,06	7.365,01	91,92%	8,08%

Sumber: OM SPAN (diolah)

Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar pada tahun 2025:

Pada tahun 2025, total pagu untuk APBN Kalbar yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (K/L) adalah sebesar Rp10.330,43miliar dan terealisasi sebesar Rp9.756,75miliar, dari jumlah tersebut sebesar lebih dari 94% anggaran tersebar di 15 K/L atau satuan kerja besar dengan total pagu sebesar Rp7.759.060,66 miliar dan terealisasi sebesar Rp7.365.011,62 miliar.

Beberapa K/L dengan pagu dan realisasi tertinggi diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, MA, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan KPU. .Jika diperhatikan, jumlah alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada 15 K/L dengan pagu terbesar dimaksud mencapai 91,92% terhadap semua pagu anggaran K/L. Tingkat capaian/realisasi pada 15 K/L tersebut tentu akan mempengaruhi keseluruhan realisasi penyerapan K/L yang ada di Kalimantan Barat, sehingga pengawasan dan monitoring perkembangan pelaksanaan anggaran pada 15 K/L dengan pagu tertinggi tersebut harus memperoleh pengawasan yang lebih intensif dari Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat.

Berdasarkan Fungsi

Pada periode tahun anggaran 2022 s.d 2024 alokasi anggaran didominasi oleh fungsi Pelayanan Umum, Ekonomi, Ketertiban dan Kemanan, Pendidikan serta Pertahanan. Pengelompokan anggaran menurut Fungsi memiliki pengertian, perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengelompokan ini juga bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi Kementerian/ Lembaga, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja Kementerian/Lembaga, termasuk menciptakan penganggaran yang lebih tepat sasaran.

Kelima fungsi belanja tersebut memiliki proporsi lebih dari 90% dari pagu yang dianggarkan untuk seluruh fungsi yang ada selama tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada tahun 2025, alokasi untuk kelima fungsi yang mendominasi tersebut mencapai Rp28.686,98 miliar atau 91,66% dari total pagu keseluruhan dengan realisasi sebesar 28.853,69miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN di Kalimantan Barat lebih terkonsentrasi pada kelima bidang tersebut, yaitu Pelayanan Umum, Ekonomi, Ketertiban dan Kemanan, Pendidikan serta Pertahanan.

Apabila dilihat secara lebih detail distribusi Belanja APBN Regional Kalimantan Barat per fungsi berdasarkan realisasi pada tahun 2025, Belanja Pelayanan Umum memiliki distribusi terbesar dengan total belanja sebesar 69,94%. Disusul dengan fungsi belanja Ekonomi sebesar 7,30%, Ketertiban dan Keamanan sebesar 7,20%,

Tabel 3.6 Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN Kalbar Berdasarkan Fungsi Tahun 2023-2025
(dalam miliar rupiah)

	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pelayanan Umum	21.941.977,50	21.750.176,12	99,13%	22.785.465,71	22.351.782,37	98,10%	21.493.481,95	20.688.776,84	96,26%
Ekonomi	3.727.868,77	3.612.252,00	96,90%	3.298.031,98	3.211.861,02	97,39%	2.710.221,52	2.159.919,70	79,70%
Ketertiban dan Keamanan	1.968.932,77	1.957.556,65	99,42%	2.239.200,74	2.212.759,18	98,82%	2.203.748,65	2.130.046,86	96,66%
Pendidikan	2.026.537,26	1.988.926,14	98,14%	2.230.627,71	2.238.337,34	100,35%	2.279.532,92	2.122.758,84	93,12%
Pertahanan	1.555.723,94	1.533.159,38	98,55%	1.694.663,10	1.689.381,76	99,69%	1.794.941,13	1.752.185,47	97,62%
Perlindungan Lingkungan Hidup	323.206,35	317.328,22	98,18%	340.129,87	328.210,24	96,50%	236.491,30	205.229,15	86,78%
Perumahan dan Fasilitas Umum	689.578,42	686.312,10	99,53%	544.866,94	532.857,16	97,80%	216.352,25	195.134,99	90,19%
Agama	191.315,55	188.086,94	98,31%	251.288,44	259.098,31	103,11%	199.472,09	191.748,18	96,13%
Kesehatan	170.134,32	159.665,70	110,55%	171.668,72	163.941,18	95,50%	159.796,87	135.336,06	84,69%
Grand Total	**32.595.274,87**	**32.193.463,26**	**100%**	**33.555.943,20**	**32.988.228,56**	**98,58%**	**31.294.038,69**	**29.581.136,08**	**91,24%**

Sumber: Sintesa (diolah)

Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan juga belanja TKD (Transfer Ke Daerah) terbagi menjadi 10 fungsi.

Pendidikan sebesar 7,18% serta Pertanahan sebesar 5,92%. Alokasi ini telah disesuaikan dengan

Fokus APBN 2025 untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Pagu dan realisasi belanja per fungsi mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun pagu jenis belanja Pendidikan dan Pertahanan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024.

3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat di Pemprov Kalimantan Barat sebesar Rp2.991,50 miliar dan terendah di Kota Singkawang sebesar Rp669,12 miliar. Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kabupaten Melawi (99,18%) dan terendah adalah Kabupaten Sekadau (94,21%).

Dana Alokasi Umum

Tren Dana Alokasi Umum di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2023 s.d. 2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi pagu

Grafik 3.10 Persentase Penyaluran TKD Kalimantan Barat Tahun 2025

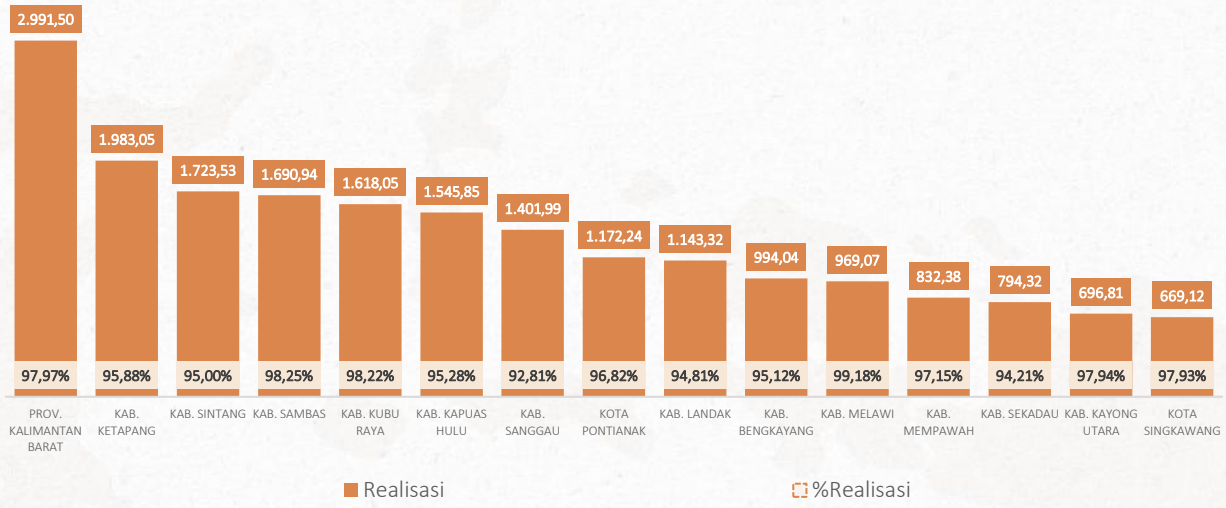

Sumber: OMSPAN (diolah)

Desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah pusat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonominya untuk membiayai pendelegasian beberapa fungsi/kewenangan kepada pemerintahan daerah (*money follows function*). Dalam perkembangannya, mekanisme penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) terus dilakukan penyesuaian agar tercapai *intergovermnmental fiscal relation*. Hubungan fiskal yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mendukung pemerataan pembangunan, kesetaraan pelayanan bagi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dari total Rp20.226,20 miliar dana Transfer ke Daerah yang telah disalurkan di Kalimantan Barat pada tahun 2025.

mapun realisasi. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya menjadi komponen yang mendominasi realisasi pada tahun 2023 s.d. 2025. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan penggunaannya kepada kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas daerah, kewenangan daerah, dan kebutuhan fiskal masing-masing. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk gaji ASN, belanja operasional, dan pembangunan daerah.

3.1.3.1. Dana Bagi Hasil

Pagu dan realisasi alokasi DBH di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2023 s.d. 2025 cukup fluktuatif. Pada tahun 2024 pagu dan realisasi DAU turun sekitar 45%. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan larangan impor bijih bauksit yang dimulai pada pertengahan tahun 2023.

Grafik 3.11 Tren DBH Kalimantan Barat 2023-2025

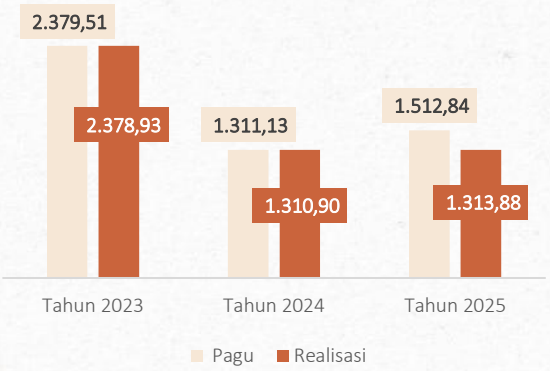

Sumber: OM SPAN (diolah)

3.1.3.2. Dana Alokasi Khusus

Grafik 3.12 Tren DAK Kalbar 2023-2025

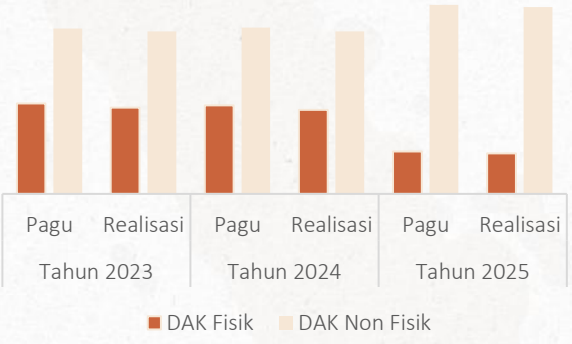

Sumber: OM SPAN (diolah)

Secara umum tren pagu dan realisasi anggaran DAK fisik Kalimantan Barat pada tahun 2023-2025 mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2025 baik dari sisi pagu maupun realisasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya keterlambatan turunnya petunjuk teknis dari Kementerian terkait sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyaluran DAK Fisik serta terdapat pola dari pemerintah daerah yang mengajukan dokumen syarat penyaluran mendekati batas waktu (*last minute*) dikarenakan pemda menunggu pemenuhan dokumen administrasi. Berbeda dengan tren DAK Fisik yang terus menurun dari tahun ke tahun, DAK Non Fisik justru mengalami peningkatan dari tahun 2023 s.d. 2025

3.1.3.3. Dana Desa

Tren pagu dan realisasi Dana Desa di Kalimantan barat pada tahun 2023 s.d. 2025 mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 1,50% baik pagu maupun realisasi sampai akhir tahun. Alokasi pagu Dana Desa pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,63% dibandingkan tahun 2024, sementara realisasinya mengalami penurunan sekitar 17,75%.

Hal tersebut disebabkan oleh perubahan regulasi pada November 2025 melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Dana Desa tahap II tidak dapat disalurkan apabila dokumen persyaratan belum disampaikan secara lengkap dan benar hingga 17 September 2025, dan alokasinya dialihkan untuk mendukung prioritas pemerintah atau pengendalian fiskal. Pada penyaluran Dana Desa *non earmark* tahap II, realisasi penyaluran baru menjangkau 779 desa dari total 2.046 desa.

Grafik 3.13 Realisasi Perkomponen TKD Kalimantan Barat Tahun 2025

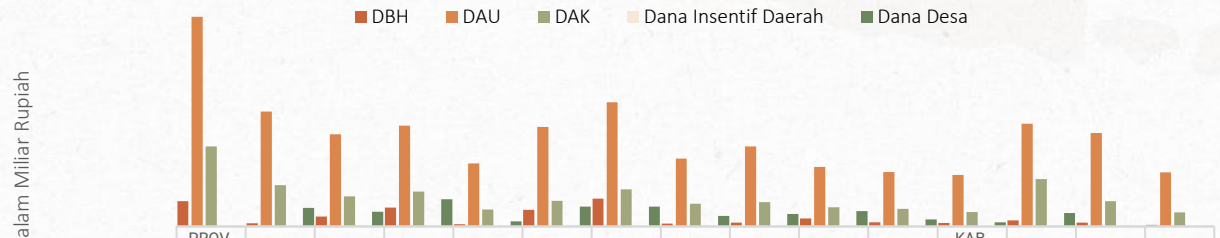

	PROV. KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	KAB. SANGGAU	KAB. SINTANG	KAB. MEMPAWAH	KAB. KAPUAS HULU	KAB. KETAPANG	KAB. BENGKAYANG	KAB. LANDAK	KAB. MELAWI	KAB. SEKADAU	KAB. KAYONG UTARA	KAB. KUBU RAYA	KOTA PONTIANAK	KOTA SINGKAWANG
DBH	239,73	31,29	92,69	180,63	22,27	158,99	265,04	27,50	35,35	77,30	38,96	33,17	57,89	36,61	16,47
DAU	1.990,91	1.090,40	875,25	956,17	598,64	946,05	1.178,19	643,25	758,32	565,15	515,04	487,87	975,49	887,84	512,39
DAK	760,86	393,18	285,86	330,01	161,99	244,48	352,85	215,13	231,84	182,39	165,92	135,73	450,44	240,15	132,82
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	7,33	0,00	7,44	0,00	0,00	7,36	0,00	7,05	7,64	7,43
Dana Desa	0,00	176,06	140,48	256,72	49,47	189,00	186,97	100,73	117,80	144,23	67,04	40,04	127,17	0,00	0,00

Sumber: OMSPAN (diolah)

3.1.4. Surplus/Defisit APBN

Surplus/Defisit APBN merupakan selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara dalam satu tahun anggaran. APBN dinyatakan surplus apabila pendapatan negara lebih besar dibandingkan dengan belanja negara, sedangkan defisit terjadi ketika belanja negara melampaui pendapatan yang dihimpun. Besaran surplus atau defisit menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal, keberlanjutan pengelolaan keuangan negara, serta arah kebijakan pembiayaan dan stabilitas perekonomian nasional.

Grafik 3.14 Persentase Defisit APBN Terhadap Belanja Tahun 2023-2025

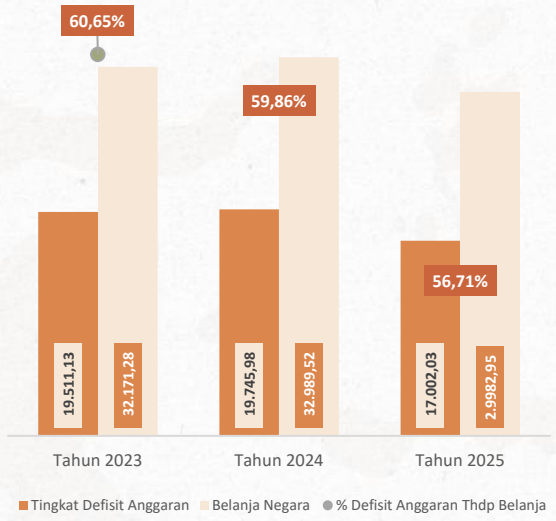

Sumber: OM SPAN dan SIMTRADA (diolah)

Realisasi pendapatan APBN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sebesar Rp12.980,92 miliar, sedangkan belanja APBN mencapai Rp29.982,95 miliar. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi defisit APBN sebesar Rp17.002,03miliar.

Posisi defisit APBN pada tahun 2025 turun jika dibandingkan dengan tahun 2024 baik secara persentase maupun nominal yang sebelumnya sebesar 19.745,98. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi belanja pada tahun 2025. Defisit APBN Kalbar tercatat menyempit 13,90% (yoy). Penyempitan ini mencerminkan pengelolaan belanja negara yang semakin efisien, efektif, dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kondisi penerimaan negara.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, APBN 2025 kembali menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, dengan tingkat belanja yang tetap lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Langkah ini dipilih sebagai stimulus untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional.

Kebijakan fiskal juga diarahkan agar semakin *countercyclical*, sehingga mampu memperkuat pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan perekonomian Indonesia tetap sehat, tangguh, dan berkelanjutan

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip dan efisiensi-produktivitas yang dimiliki, BLU memiliki keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Pada lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) satuan kerja BLU, yang terdiri dari 3 (tiga) satker BLU bidang pendidikan yakni Universitas Tanjungpura, Politeknik Kesehatan Pontianak serta Politeknik Negeri Pontianak dan 2 (dua) satker bidang kesehatan yakni Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak serta Rumah Sakit Tk II Kartika Husada.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui efektifitas dibentuknya BLU adalah melalui analisis efektifitas BLU. Analisis efektifitas BLU dapat dilihat dari rasio pendapatan operasional terhadap aset tetap atau rasio perputaran aset tetap. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kemampuan BLU untuk menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.

Dari hasil perhitungan rasio pendapatan operasional terhadap aset tetap, terdapat dua BLU yang terus mengalami pertumbuhan selama tahun 2022 sampai 2024, yakni Rumkit Tk. II Kartika Husada dan Politeknik Kesehatan. Sedangkan BLU yang lain cenderung fluktuatif.

pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota

Tabel 3.7 Profil BLU di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025
(miliar rupiah)

No	Nama Satker BLU	TAHUN 2023				
		Target PNBP	Realisasi PNBP	% Realisasi PNBP	Nilai Aset	Rasio Pendapatan Terhadap Aset
1	Rumkit Bhayangkara (06001-130467) b	51	60,69	119,00%	150,65	46,82%
2	Politeknik Kesehatan (02412-632291)	30,66	39,95	130,30%	232,19	17,21%
3	Universitas Tanjungpura (02317-677517)	320	394,45	123,27%	21.261,63	1,86%
4	Rumkit Tk. II Kartika Husada (01222-418394)	52,78	62,79	118,97%	78,36	80,13%
5	Politeknik Negeri Pontianak (02318-677609)	BLU terbaru yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2023				
No	Nama Satker BLU	TAHUN 2024				
		Target PNBP	Realisasi PNBP	% Realisasi PNBP	Nilai Aset	Rasio Pendapatan Terhadap Aset
1	Rumkit Bhayangkara (06001-130467)	52	62,88	120,92%	134,29	40,29%
2	Politeknik Kesehatan (02412-632291)	32,89	45,24	137,52%	229,6	19,70%
3	Universitas Tanjungpura (02317-677517)	330	376,78	114,18%	21.246,65	1,77%
4	Rumkit Tk. II Kartika Husada (01222-418394)	52,78	62,79	118,97%	78,36	80,13%
5	Politeknik Negeri Pontianak (02318-677609)	28,02	61,89	220,91%	1.291,99	4,79%
No	Nama Satker BLU	TAHUN 2025				
		Target PNBP	Realisasi PNBP	% Realisasi PNBP	Nilai Aset	Rasio Pendapatan Terhadap Aset
1	Rumkit Bhayangkara (06001-130467)	76,62	66,26	86,47%%	134,45	49,28%
2	Politeknik Kesehatan (02412-632291)	36,47	49,66	136,17%	225,36	22,04%
3	Universitas Tanjungpura (02317-677517)	340	358,78	105,52%	21.222,00	1,69%
4	Rumkit Tk. II Kartika Husada (01222-418394)	24,62	64,66	262,63%	40,71	158,83%
5	Politeknik Negeri Pontianak (02318-677609)	66,85	62,16	92,98%	1.308,74	4,75%

Sumber: SAKTI, Neraca dan LRA BLU Tahun 2022-2024 (diolah)

Ditinjau dari realisasi PNBP sampai dengan akhir tahun 2025, Rumkit Tk. II Kartika Husada mencapai persentase realisasi tertinggi yaitu 262,43% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan persentase realisasi terendah terdapat di Rumkit Bhayangkara yaitu sebesar 86,47% dari target yang ditetapkan. Satker Universitas Tanjungpura memiliki total nilai aset tertinggi yaitu sebesar Rp21.222,00 miliar.

3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

a. Penerusan Pinjaman

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menatausahakan satu penerusan pinjaman pemerintah pusat (*subsidiary loan agreement)* kepada Pemerintah Kota Singkawang. Pada awalnya, pinjaman tersebut berasal dari Kabupaten Sambas, namun karena adanya pemekaran wilayah, administrasi pinjaman dimasukkan ke Kota Singkawang. Meskipun pelunasan pinjaman Singkawang telah dilakukan, namun surat resmi dari presiden yang menyatakan pinjaman tersebut telah lunas belum diterbitkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang masih terdapat kewajiban untuk melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb Kalimantan Barat.

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Grafik 3.15 Penyaluran KUR Kalimantan Barat Tahun 2015 s.d. 2025

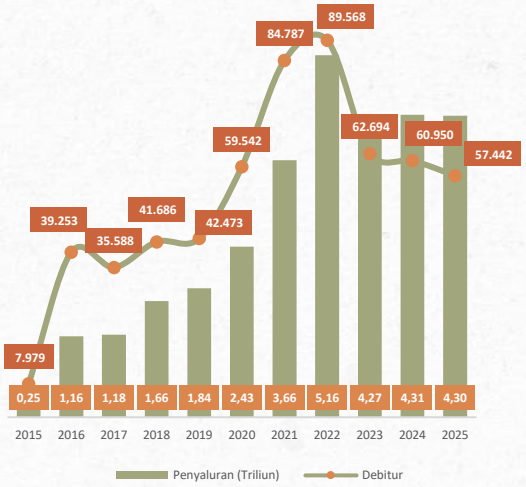

Sumber: SIKP 2024 (diolah)

Kredit Usaha Rakyat dengan skema subsidi bunga mulai disalurkan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Selama kurun waktu tersebut, penyaluran KUR di wilayah Provinsi Kalimantan Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada tahun 2023. Penyaluran KUR di Kalimantan Barat turun sekitar Rp15 miliar pada tahun 2025 atau sekitar 0,36 persen dari realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp4,27 triliun menjadi sebesar Rp4,31 triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1) Perubahan persyaratan KUR berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 7 tahun 2025;
2) Pengenaan sanksi kepada penyalur KUR atas permintaan agunan tambahan yang tidak

Grafik 3.16 Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2025

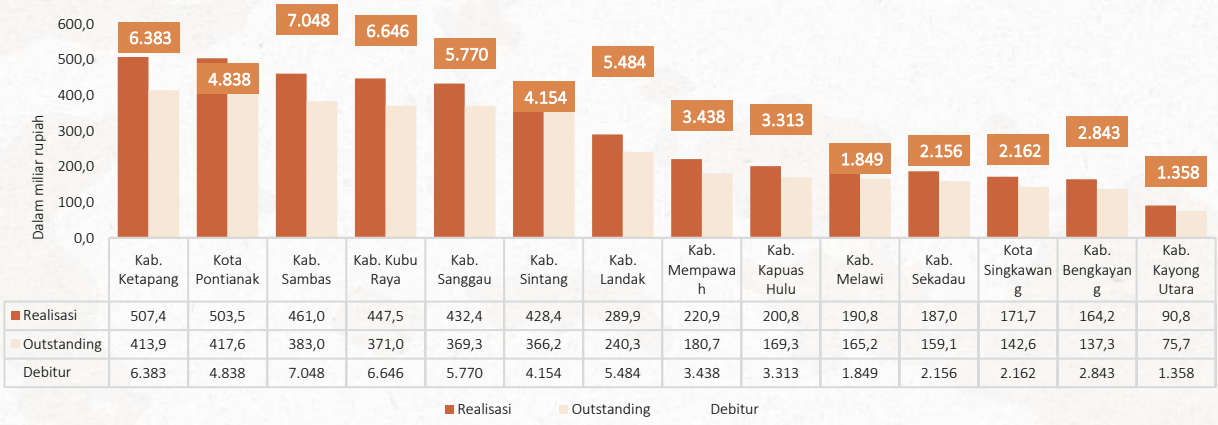

	Kab. Ketapang	Kota Pontianak	Kab. Sambas	Kab. Kubu Raya	Kab. Sanggau	Kab. Sintang	Kab. Landak	Kab. Mempawah	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Melawi	Kab. Sekadau	Kota Singkawang	Kab. Bengkayang	Kab. Kayong Utara
Realisasi	507,4	503,5	461,0	447,5	432,4	428,4	289,9	220,9	200,8	190,8	187,0	171,7	164,2	90,8
Outstanding	413,9	417,6	383,0	371,0	369,3	366,2	240,3	180,7	169,3	165,2	159,1	142,6	137,3	75,7
Debitur	6.383	4.838	7.048	6.646	5.770	4.154	5.484	3.438	3.313	1.849	2.156	2.162	2.843	1.358

Sumber: SIKP 2025 (diolah)

Pemerintah mendukung penguatan permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan fasilitas kredit program. Salah satu instrumen utamanya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan dengan skema subsidi bunga dari pemerintah. Melalui subsidi tersebut, pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga pasar.

Pemberian subsidi bunga pada program KUR diharapkan mampu mendorong bangkitnya aktivitas usaha UMKM, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan usaha. Pada akhirnya, penguatan sektor UMKM ini diharapkan menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat regional maupun nasional.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan turut berdampak terhadap kebijakan pihak bank penyalur KUR untuk semakin memperketat proses verifikasi kepada calon debitur dalam penyaluran KUR. Selain itu perbankan tidak hanya memiliki misi menyalurkan KUR saja tetapi juga terdapat target lain di luar itu yang membuat KUR tidak sepenuhnya optimal dirasakan masyarakat (pelaku UMKM);

3) Dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat sedikit banyak berpengaruh terhadap tren keuangan tidak hanya di Kalimantan Barat tetapi juga di Indonesia. Saat ini di kalangan masyarakat sedang marak mekanisme *Peer-to-Peer Lending* (pinjaman *online*) dengan segala kemudahan persyaratan yang ditawarkan untuk mendapatkan pinjaman

dengan jumlah tertentu. Tanpa melihat lebih jauh mengenai salah satu produk *Fintech* (*Financial Technology*) ini, masyarakat tertarik dan mulai beralih menggunakan mekanisme pinjaman tersebut;

4) Masyarakat (pelaku UMKM) masih memiliki pinjaman dari tahun sebelumnya dan membutuhkan pembiayaan yang bukan hanya untuk tujuan produktif;
5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perbankan mengenai KUR.

disebabkan oleh adanya penyaluran kredit yang berasal dari pihak swasta seperti Koperasi *Credit Union* yang banyak tersebar wilayah kabupaten. Selain itu jumlah UMKM yang banyak terkonsenterasi di wilayah perkotaan dan sekitarnya menyebabkan penyaluran KUR banyak terjadi di Kabupaten Kubu Raya dan juga Kota Pontianak.

Dilihat dari sisi Lembaga Penyalur, Bank Rakyat Indonesia mampu menyalurkan KUR terbesar (51,58%) dengan penyaluran sebesar Rp2.216,27 miliar kepada 41.428 debitur diikuti oleh Bank

Tabel 3.8 Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Sektor Tahun 2025

Sektor	Debitur	Penyaluran (miliar rupiah)	*Outstanding* (miliar rupiah)
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	34.169	2.285,79	1.923,75
Perdagangan Besar Dan Eceran	14.222	1.254,13	1.039,25
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	2.949	225,07	186,33
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1.397	169,37	142,27
Industri Pengolahan	1.862	138,49	114,43
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	961	97,34	80,92
Perikanan	1.589	83,94	69,68
Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	192	25,60	21,59
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	54	8,73	7,50
Konstruksi	16	5,06	2,83
Jasa Pendidikan	31	2,88	2,48
Total Keseluruhan	**57.442**	**4.296,40**	**3.591,05**

Sumber: SIKP 2025 (diolah)

Penyaluran KUR tahun 2025 paling besar terealisasi di Kabupaten Ketapang dengan total penyaluran mencapai Rp507,24 miliar atau 11,81% dari total penyaluran dan disalurkan kepada 6.381 debitur. Adapun jumalh outstanding pinjaman tercatat sebesar Rp413,9 miliar. Sementara itu penyaluran terendah terealisasi di Kayong Utara dengan total penyaluran Rp90,84 miliar atau 2,11% dari total penyaluran dengan jumlah outstanding pinjaman yang tercatat adalah sebesar Rp75,7 miliar. Kondisi penyaluran pembiayaan di wilayah Kalimantan Barat dipengaruhi oleh kualitas akses infrastruktur daerah. Di Kabupaten Kayong Utara, akses infrastruktur masih relatif terbatas dibandingkan wilayah lainnya, sehingga turut berimbas pada keterbatasan akses pembiayaan. Ketimpangan penyaluran KUR antar daerah tersebut juga

Mandiri, BPD Kalimantan Barat, Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia yang berada di lima besar penyalur KUR terbanyak di Kalimantan Barat. Banyaknya kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu yang mampu memberikan layanan KUR menyebabkan kelima bank penyalur tersebut mampu menyalurkan KUR terbanyak di Kalimantan Barat.

Grafik 3.17 Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Skema Tahun 2025

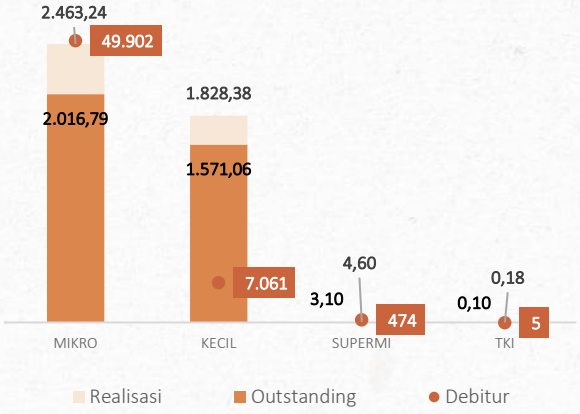

Sumber: SIKP 2025 (diolah)

Penyaluran KUR terbanyak terdapat pada skema Mikro, yaitu KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kalimantan Barat merupakan usaha berskala mikro hingga menengah. Sementara itu tidak tercatat penyaluran KUR dengan KUR Khusus. Berdasarkan data SIKP KUR, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan menjadi sektor dengan penyaluran KUR terbesar dengan jumlah nasabah KUR sebanyak 34.169 debitur dan jumlah penyaluran sebesar Rp2.285,79 miliar. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki hutan yang luas di daerah kabupaten, terutama perkebunan kelapa sawit. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah usaha perdagangan di Kalimantan Barat menjadikan sektor tersebut memiliki penyaluran KUR terbanyak setelah sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan penyaluran Rp1.254,13 miliar untuk 14.222 pelaku usaha

c. Kredit Ultra Mikro (UMi)

Masyarakat yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan dapat menjalankan kredit program berupa pembiayaan UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024, Pembiayaan UMKM adalah program fasilitas pembiayaan konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah kepada UMKM yang disertai dengan pendampingan. Pembiayaan UMKM terdiri dari Pembiayaan UMi dengan plafon sampai dengan Rp20 juta yang diberikan kepada usaha mikro dan Pembiayaan UMi Pro dengan plafon di atas Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta yang diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria debitur. Sasaran Pembiayaan UMi adalah Usaha Ultra Mikro di lapisan bawah masyarakat yang belum bisa mendapat fasilitas perbankan.

Grafik 3.18 Tren Pembiayaan UMi Kalimantan Barat Tahun 2025

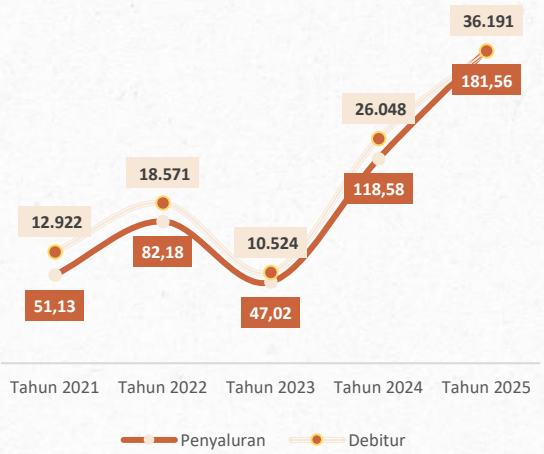

Sumber: SIKPUMi 2025(diolah)

Tren penyaluran UMi cukup fluktuatif dari tahun 2021 s.d. 2025. Dengan lembaga penyalur yang aktif menyalurkan Pembiayaan UMi di Kalimantan Barat yaitu PT. PNM, PT. Pegadaian, PT. BAV, dan KSPPS Bina Ummat Sejahtera. Pada tahun 2025 penyaluran UMi mengalami peningkatan yang relatife signifikan sekitar Rp62,98 miliar atau setara dengan 153,11%.

Penyaluran pembiayaan UMi di Kalimantan Barat mengalami pergeseran kembali ke masa sebelum pandemi berbanding lurus dengan kondisi perekonomian yang semakin pulih pasca pandemi *Covid-19*. Disamping itu, *Peer-to-Peer Lending* (pinjaman *online*) juga turut berdampak pada realisasi penyaluran, yang mana masyarakat memiliki kecenderungan lebih memilih *Fintech* (*Financial Technology*) ini dikarenakan kecepatan dan jangkauan promosi yang lebih luas di masyarakat. Berbeda dengan KUR, penyaluran UMi paling banyak terealisasi di Kota Pontianak dengan total penyaluran Rp22,83 miliar untuk 4.644 debitur diikuti Kabupaten Kubu Raya dan Kab. Mempawah dengan masing-masing penyaluran Rp19,94 miliar dan Rp19,93 miliar.

Tabel 3.9 Penyaluran Pembiayaan UMi Kalbar

Kab./Kota	Debitur	Penyaluran (miliar rupiah)

KOTA PONTIANAK	4.644	22,83
KAB. KUBU RAYA	3.863	19,93
KAB. LANDAK	3.706	19,93
KAB. SAMBAS	3.700	19,52
KAB. MEMPAWAH	3.547	19,08
KAB. SINTANG	3.250	16,28
KAB. KETAPANG	3.383	15,41
KAB. BENGKAYANG	2.732	13,68
KAB. SANGGAU	2.029	10,41
KAB. KAPUAS HULU	2.205	8,71
KOTA SINGKAWANG	1.333	6,99
KAB. SEKADAU	1.099	5,60
KAB. MELAWI	698	3,16
KAB. KAYONG UTARA	2	0,03
Total	**36.191**	**181,56**

Sumber: SIKP UMi 2025 (diolah)

besar bergerak pada kegiatan perdagangan. Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya masih menjadi sektor dengan realisasi penyaluran UMi paling rendah sebesar Rp11 juta yang disalurkan kepada 2 Debitur kelompok.

3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

a. Evaluasi Dan Tantangan Atas Ketercapaian output program strategis pemerintah yang didanai oleh APBN di daerah

APBN 2025 disusun dengan semangat optimisme namun tetap dilandasi kewaspadaan terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. APBN dioptimalkan untuk berperan sebagai *shock absorber* dalam merespons tekanan eksternal, seperti ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan potensi tekanan inflasi. Melalui fungsi stabilisasi tersebut, APBN diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat,

Tabel 3.10 Penyaluran UMi Kalimantan Barat per Sektor Tahun 2025

Sektor	Debitur	Penyaluran (miliar rupiah)
Perdagangan Besar Dan Eceran	35.397	176,75
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	465	2,54
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	186	1,08
Industri Pengolahan	79	0,76
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	41	0,23
Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	13	0,12
Konstruksi	7	0,06
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	1	0,01
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	2	0,01
Total	**36.191**	**181,56**

Sumber: SIKP UMi 2025 (diolah)

Pada saat ini, hampir seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat mengalami peningkatan realisasi penyaluran UMi pada tahun 2025. Hal ini merupakan usaha bersama pihak penyalur dan juga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih menjangkau masyarakat kelas bawah.

Lebih dari 98% atau sekitar Rp179 miliar Pembiayaan UMi terealisasi pada skema kelompok dengan penyaluran terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp176,75 miliar atau sekitar 97,35%. Dominasi sektor ini cukup selaras dengan struktur mayoritas sektor usaha di Kalimantan Barat yang sebagian

mempertahankan momentum pemulihan ekonomi, serta memperkuat ketahanan fiskal nasional.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, APBN 2025 memfokuskan alokasi anggaran pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta perluasan perlindungan sosial sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran strategisnya sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN diarahkan untuk menghasilkan berbagai output yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

Tabel 3.11 Pagu & Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan, Kesehatan serta Perumahan dan Fasilitas Umum (miliar rupiah)

Fungsi-Nama Output	Pagu	Realisasi	Volume	RVRO	Satuan
	Miliar Rupiah				
Pendidikan					
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	269,80	190,27	32	19	Unit
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	20,40	20,11	9.689	9.635	Orang
Bantuan Pendidikan Tinggi	13,84	13,84	1.248	3.596	Orang
Kesehatan					
Sarana Bidang Kesehatan	8,22	6,98	1	1	Paket
Bantuan Lembaga	3,54	3,54	404	404	Lembaga
Standarisasi Lembaga	2,20	2,20	2	2	Lembaga
Keamanan dan Ketertiban					
Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	17,58	17,53	39	39	Unit
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1,43	1,26	4.102	4.165	Orang
Perkara Hukum Perseorangan	1,17	1,07	1.640	1.676	Perkara
Perumahan dan Fasilitas Umum					
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	66,85	66,37	3.096	3.096	Unit
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	63,38	10,25	1	1	KK
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	13,15	9,46	20	20	Hektar

Sumber : SINTESA (diolah)

Pagu belanja output strategis dan layanan dasar publik di Kalimantan Barat untuk bidang pendidikan mencapai Rp325,19 miliar yang dialokasikan ke tujuh kementerian. Alokasi tertinggi berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp269,80 atau sekitar 82,97%. Sementara itu alokasi pagu terendah berada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yakni sebesar Rp1,26 miliar atau sebesar 0,39% dari total pagu belanja bidang Pendidikan. Dari keselurhan pagu yang telah ditetapkan realisasi belanja sebesar Rp243,02 miliar atau 74,73%. Seluruh output strategis pada bidang pendidikan telah terdapat realisasi antara lain untuk Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp190,26 miliar untuk 19 unit, Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah mencapai Rp20,11 miliar dengan jumlah penerima 9.635 orang. Sementara itu, bantuan pendidikan tinggi terealisasi sebesar Rp13,84 miliar untuk 3.596 orang, di mana capaian satuan realisasinya melampaui target yang ditetapkan hingga lebih dari 200 persen.

Pada bidang kesehatan pagu output strategis untuk Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp21,29 miliar yang dialokasikan kepada BKKBN, BPOM dan Kementerian Kesehatan. Alokasi pagu terbesar berada pada BPOM dengan pagu Rp14,81 miliar atau 69,59% dari pagu belanja bidang kesehatan. Sementara alokasi pagu terendah pada Kementerian Kesehatan yakni Rp1,70 miliar atau sekitar 7,9% dari total pagu. Realisasi untuk ouput strategis bidang kesehatan mencapai Rp17,61 miliar atau 82,71% dari pagu yang telah ditetapkan. Pada bidang kesehatan, output yang telah terealisasi antara lain Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat kepada 570 kelompok dengan realisasi Rp414, 79 miliar, Pengawasan dan Pengendalian Produk yang terealisasi sebesar Rp1,24 miliar atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,25 miliar namun secara satuan realisasi terpenuhi sesuai dengan target yakni untuk 1.761 produk. Realisasi Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga juga lebih rendah dari target yang ditentukan secara rupiah yakni Rp281,02juta dari target sebesar Rp284,70 juta dengan capaian output memenuhi target secara satuan yakni 79.898 keluarga. Hal tersebut menunjukkan capaian yang cukup optimal pada beberapa output belanja pada bidang kesehatan.

Belanja prioritas nasional pada fungsi Ketertiban dan Keamanan di Kalimantan Barat memiliki pagu sebesar Rp22,38 miliar dengan realisasi Rp1,60

miliar atau 60,87%. Alokasi tersebut terdistribusi pada lima Kementerian/Lembaga. Alokasi pagu terbesar berada pada Kepolisian RI dengan pagu Rp17,58 atau sekitar 78,5% sementara alokasi pagu terendah pada Kejaksaan sebesar Rp524,1 juta atau sekitar 2,34% dari total pagu belanja pada bidang Ketertiban dan Kemanan. Kementerian Hukum merupakan hasil restrukturisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, yang pada Kabinet 2024–2029 dipisahkan sehingga fungsi hukum berdiri sebagai kementerian tersendiri. Tiga output dengan alokasi tertinggi ialah Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Perkara Hukum Perseorangan, dan Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

Untuk bidang perumahan dan fasilitas umum, pagu output strategis untuk Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp145,40 miliar dengan realisasi sebesar Rp87,43 miliar atau sebesar 60,13%. Bidang perumahan dan fasilitas umum dialokasikan kepada tiga kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi. Output yang telah terealisasi antara lain Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman untuk 3.096 unit dengan realisasi Rp66,37 miliar, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat untuk 3.038 orang dengan realisasi Rp533,45 juta, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebanyak 14 daerah sebesar Rp815,71 juta.

Seluruh komponen output strategis sampai dengan akhir tahun 2025 telah terdapat realisasi baik secara nominal maupun capaian/output dari belanja yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja.

b. Permasalahan Dan Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pencapaian Belanja Pemerintah Yang Berkualitas Yang Didanai APBN Di Daerah

Capaian belanja pemerintah yang berkualitas sangat ditentukan oleh konsistensi perencanaan, ketepatan jadwal pelaksanaan, serta kesiapan regulasi dan SDM pengelola anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran.

Pertama, kebijakan efisiensi melalui pemblokiran pagu sejak awal tahun menyebabkan akselerasi kegiatan terhambat. Pembukaan blokir yang dilakukan secara bertahap hingga pertengahan tahun membuat realisasi belanja barang dan belanja modal tidak dapat berjalan sesuai jadwal.

Kedua, kualitas belanja turut dipengaruhi oleh ketidaksinkronan antara target output dan pagu netto setelah pemotongan atau pemblokiran anggaran. Banyak satker kesulitan memenuhi target RVRO karena volume output tidak disesuaikan kembali dengan pagu yang berkurang. Selain itu, pelaksanaan PBJ menghadapi berbagai hambatan, seperti keterlambatan lelang, proses sanggah, minimnya penyedia, serta transisi sistem e-katalog V6 yang memperlambat realisasi.

Pada aspek eksekusi, masih ditemukan belanja operasional yang rendah, pagu minus pada belanja pegawai akibat perencanaan yang tidak akurat, serta tertundanya penyaluran bansos dan banpem karena juknis terlambat diterbitkan atau administrasi sekolah/penerima belum lengkap. Di sisi lain, kegiatan satker juga terhambat ketika MP PNBP yang diterima tidak mencukupi kebutuhan RPD bulanan, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Dari sisi SDM, perubahan nomenklatur K/L menimbulkan kekosongan pejabat perbendaharaan, minimnya pejabat PBJ tersertifikasi, lemahnya transfer *knowledge*, serta rangkap jabatan yang berpengaruh pada kualitas pengelolaan anggaran. Perubahan regulasi yang cepat—termasuk kewajiban clearance TIK dan keterlambatan penetapan juknis—juga semakin menambah beban administrasi dan memperlambat proses pelaksanaan anggaran di daerah.

c. Permasalahan Dan Tantangan Dalam Upaya Akselerasi Belanja APBN Di Daerah

Sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan *Financial Advisor*, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBN di daerah melalui pengawasan teknis pada satker guna memastikan kepatuhan terhadap kaidah dan prosedur serta mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menurunkan kualitas belanja negara. Berdasarkan hasil monev, akselerasi belanja APBN di regional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pemblokiran anggaran, revisi yang tidak tepat waktu, serta proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang berjalan lambat. Pada awal tahun, sebagian besar satker belum dapat memulai kegiatan karena pagu diblokir dalam rangka efisiensi. Meskipun pembukaan blokir dimulai sejak April, prosesnya tidak serentak sehingga

percepatan pelaksanaan belum optimal. Dari sisi PBJ, hambatan meliputi keterbatasan penyedia, gagal lelang, ketergantungan musim tanam untuk komoditas pertanian, serta transisi platform yang mengharuskan penyesuaian dokumen. Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas, akses transportasi terbatas, dan cuaca ekstrem turut memperlambat distribusi logistik dan penyelesaian pekerjaan fisik. Diperlukan percepatan penetapan juknis, penjadwalan revisi selaras siklus IKPA, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi monev, konsolidasi paket, serta pelaksanaan lelang dini dan penguatan koordinasi dengan unit eselon I/KL. penumpukan pekerjaan pada akhir tahun.

3.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemerintah Daerah)

Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp3.430,48 miliar.

Tabel 3.12 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			GROWTH (%)
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	**25.988,89**	**25.329,88**	**97,46**	**27.645,28**	**26.708,32**	**96,61**	**28.638,69**	**23.329,47**	**81,46**	**(12,65)**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.279,05	5.397,70	102,25	5.668,20	5.620,31	99,16	5.882,39	5.478,10	93,13	(2,53)
Pendapatan Transfer	20.541,83	19.790,06	96,34	21.869,58	21.014,63	96,09	22.660,64	17.789,64	78,50	(15,35)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	168,01	142,12	84,59	107,50	73,39	68,27	95,66	61,72	64,52	(15,90)
BELANJA DAERAH	**26.905,36**	**24.888,33**	**92,50**	**28.781,19**	**26.574,43**	**92,33**	**29.387,17**	**20.534,43**	**69,88**	**(22,73)**
Belanja Operasi	**17.923,26**	**16.401,56**	**91,51**	**19.924,88**	**18.385,97**	**92,28**	**20.831,67**	**15.268,12**	**73,29**	**(16,96)**
Belanja Pegawai	9.532,21	8.512,23	89,30	10.406,37	9.670,28	92,93	11.635,28	9.055,40	77,83	(6,36)
Belanja Barang dan Jasa	7.403,02	6.692,68	90,40	7.802,66	7.247,04	92,88	8.260,74	5.669,33	68,63	(21,77)
Belanja Bunga	33,57	27,61	82,27	22,09	22,94	103,88	45,17	10,82	23,95	(52,86)
Belanja Subsidi	1,50	3,96	263,69	0,94	2,19	232,98	3,27	0,36	11,16	-
Belanja Hibah	921,31	1.135,95	123,30	1.667,10	1.415,89	84,93	863,24	517,59	59,96	(63,44)
Belanja Bantuan Sosial	31,65	29,13	92,05	25,72	27,63	107,43	23,97	14,62	61,00	(47,08)
Belanja Modal	**4.673,21**	**4.556,24**	**97,50**	**4.533,84**	**4.133,87**	**91,18**	**4.437,08**	**2.163,58**	**48,76**	**(47,66)**
Belanja Modal	4.673,21	4.556,24	97,50	4.533,84	4.133,87	91,18	4.437,08	2.163,58	48,76	(47,66)
Belanja Tidak Terduga	**119,93**	**35,57**	**29,66**	**112,99**	**13,60**	**12,04**	**135,67**	**30,73**	**22,65**	**125,85**
Belanja Tidak Terduga	119,93	35,57	29,66	112,99	13,60	12,04	135,67	30,73	22,65	125,85
Belanja Transfer	**4.188,96**	**3.894,96**	**92,98**	**4.209,48**	**4.040,98**	**96,00**	**3.982,75**	**3.072,00**	**77,13**	**(23,98)**
Belanja Bagi Hasil	1.277,27	1.298,40	101,65	1.332,50	1.215,23	91,20	1.049,84	867,29	82,61	(28,63)
Belanja Bantuan Keuangan	2.911,69	2.596,57	89,18	2.876,97	2.825,75	98,22	2.932,91	2.204,71	75,17	(21,98)
SURPLUS/ (DEFISIT)	**(916,47)**	**441,55**	**(48,18)**	**(1.135,91)**	**133,89**	**(11,79)**	**(748,48)**	**2.795,04**	**(373,43)**	**1.987,50**
PEMBIAYAAN	**899,45**	**1.223,79**	**136,06**	**1.135,91**	**923,58**	**81,31**	**748,48**	**635,44**	**84,90**	**(31,20)**
Penerimaan Pembiayaan	1.507,05	1.966,97	130,52	1.671,82	1.346,70	80,55	1.168,70	885,46	75,76	(34,25)
Pengeluaran Pembiayaan	607,61	743,17	122,31	535,91	423,12	78,95	420,22	250,02	59,50	(40,91)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**(17,02)**	**1.665,34**	**-**	**-**	**1.057,47**	**-**	**-**	**3.430,48**	**-**	**224,40**

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting yang mendukung pengelolaan keuangan serta pembangunan di tingkat daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan dan merancang kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Target Pendapatan untuk APBD Kalbar 2025 adalah sebesar Rp28.638,69 miliar dan pagu belanja mencapai Rp29.387,17 miliar sehingga terdapat rencana defisit Rp748,48 miliar. Berdasarkan data dari SIKRI atas LRA konsolidasi seluruh Pemda Kalimantan Barat, sampai dengan menunjukkan pencapaian sebesar Rp23.329,47 miliar atau 81,46% dari target yang telah ditetapkan. Sementara pada sisi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp20.534,43 miliar atau 69,88% dari pagu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi anggaran hingga akhir tahun 2025 pada APBD Kalimantan Barat masih menujukkan kondisi surplus sebesar Rp2.795,04 miliar dan Sisa Lebih

3.2.1. Pendapatan Daerah

Selama tahun 2023 sampai dengan 2025, Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif terutama pada tahun 2025 realisasi

Grafik 3.19 Tren Realisasi Pendapatan Daerah 2023 s.d. 2025

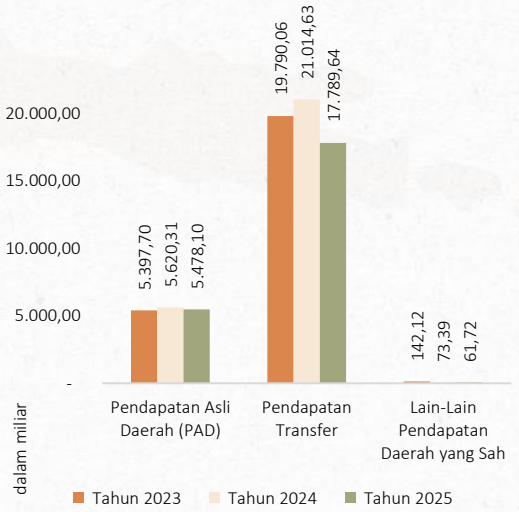

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar 12,65% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan terkontraksi ini terjadi

pada setiap pos pada Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang terkontraksi sebesar 2,53% dan Pendapatan Transfer sebesar 15,35%. Sedangkan untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kontraksi sebesar 15,90%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun 2023 s. 2025, kemudian disusul dengan Pendapatan Transfer yang mengalami pertumbuhan fluktuatif juga dari tahun 2023 s.d. 2025. Namun komponen pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah mengalami kontraksi selama tiga tahun belakangan dari tahun 2023 s.d. 2025.

Grafik 3.20 Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 s.d. 2025

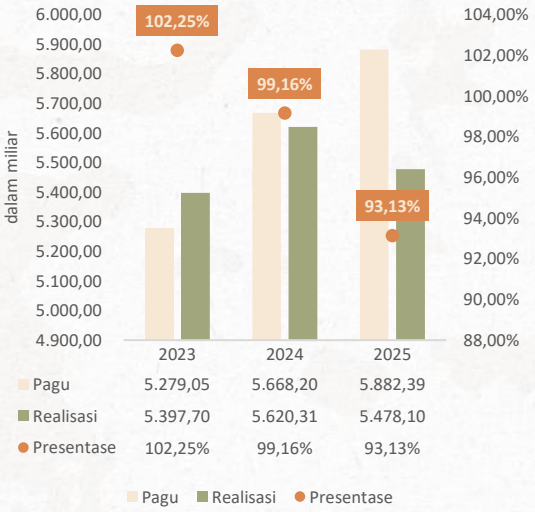

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Pada tahun 2025, realisasi pendapatan daerah secara total menunjukkan pencapaian sebesar Rp23.329,47 miliar atau 81,46% dari target yang telah ditetapkan. Jika dijabarkan sesuai komponennya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar Rp5.478,10 miliar atau 93,13% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp17.789,64 miliar atau 78,50% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai sebesar Rp61,72 miliar atau 64,52% dari target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2023 sampai dengan 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi pertumbuhan dan secara persentase realisasi tahun 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai 100% atau hanya sebesar 93,13%. Pertumbuhan fluktuatif PAD dan cenderung menurun pada tahun 2025. Komponen Retribusi Daerah menyumbang pertumbuhan PAD paling besar yaitu sebesar 59,06%, disusul dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 1,05%, sedangkan komponen Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah masing-masing terkontraksi sebesar 2,52% dan 40,53%. Meskipun selama tiga tahun terakhir Pajak Daerah mengalami kontraksi pertumbuhan namun Pajak Daerah menjadi kontribusi dominan secara nomimal dalam PAD selama tahun 2023 s.d 2025. Retribusi jasa umum menjadi komponen penyumbang pertumbuhan terbesar pada Retribusi Daerah, hal ini menjadi sinyal bahwa masyarakat aktif berkontribusi pada pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Selain itu, pertumbuhan pada hasil pengelolalan kekayaan daerah yang dipisahkan dipicu oleh laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Grafik 3.21 Target & Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 s.d. 2025

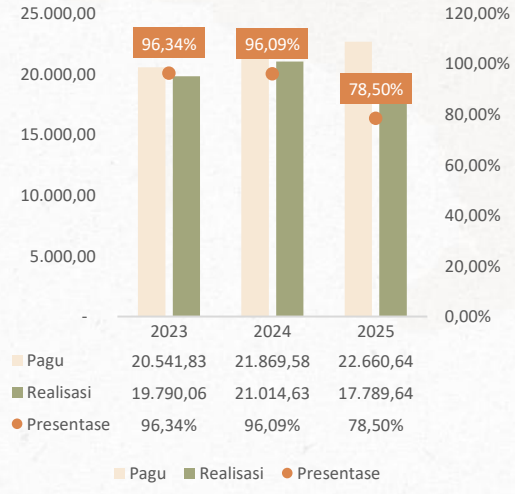

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Selama tahun 2023 sampai dengan 2025, realisasi Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Transfer secara nominal berada pada tahun 2024 dengan realisasi Rp21.014,63 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2025 yang capaian realisasinya cenderung lebih rendah.

Sedangkan secara presentasi, Pendapatan Transfer pada tahun 2023 memperoleh capaian tertinggi yaitu sebesar 96,34%. Pada tahun 2025, Pendapatan Transfer mengalami penurunan tidak hanya secara nominal namun juga presentasi yang mencapai realisasi sebesar Rp17.789,64 miliar (78,50%).

Penurunan pendapatan transfer ke daerah selama beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2025, mencerminkan langkah pemerintah dalam menjalankan efisiensi belanja negara sesuai Instruksi Presiden serta penyesuaian alokasi dalam APBN dan APBD. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional dan sekaligus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai bagi program-program prioritas pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat luas, seperti program ketahanan pangan, program pemenuhan gizi, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Grafik 3.22 Target & Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 s.d. 2025

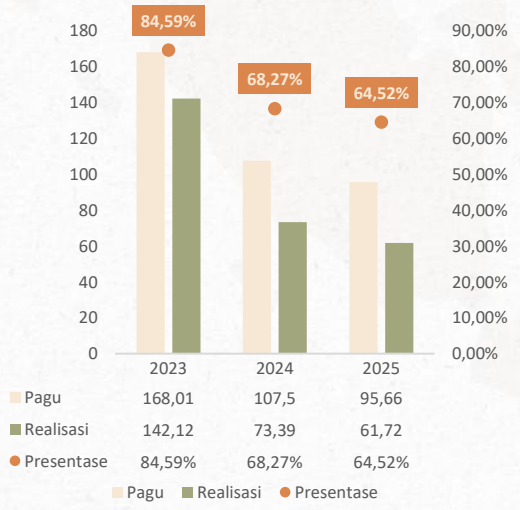

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Disisi lain, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) menjadi salah satu komponen Pendapatan Daerah meskipun jumlahnya tidak begitu besar dibandingkan PAD dan Pendapatan Transfer. Data menunjukkan bahwa, realisasi LLPDyS mengalami penurunan selama tiga tahun belakangan dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Realisasi LLPDyS paling besar terdapat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp142,12 miliar sedangkan realisasi LLPDyS pada tahun 2025 hanya sebesar Rp61,72 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan hibah terutama hibah dari pemerintah pusat.

Salah satu pilar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) adalah mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Untuk mencapai tujuan ini maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kemandirian daerah. Tiga ukuran untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah adalah melalui perhitungan derajat desentralisasi fiskal, derajat ketergantungan, dan rasio kemandirian fiskal.

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\textit{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 3.13 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Hanafi, dkk (2005)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Berdasarkan perhitungan atas realisasi APBD Kalbar tahun 2025, diperoleh hasil bahwa Kalimantan Barat termasuk kedalam golongan "sedang" dengan capaian rasio desentralisasi fiskal mencapai 23,48%. Kategori tersebut masih sama jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun 2023. Hal tersebut mengidikasikan bahwa Kalimantan Barat harus terus meningkatkan potensi daerahnya untuk memperkuat basis PAD. Namun demikian, dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 21,04%, kinerja fiskal daerah tahun 2025 mengalami peningkatan yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin baik.

Tabel 3.14 Derajat Desentralisasi Fiskal Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

Keterangan	Rasio	Keterangan
Tahun 2023	21,31%	Sedang
Tahun 2024	21,04%	Sedang
Tahun 2025	23,48%	Sedang

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

b. Derajat Ketergantungan

$$Derajat\ Ketergantungan = \frac{Pendapatan\ Transfer\ Pempus}{Total\ Penerimaan\ Daerah}$$

Tabel 3.15
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,00 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup Tinggi
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bangga (2017)

Rasio Derajat Ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total penerimaan daerah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas realisasi APBD tahun 2025, diperoleh hasil bahwa Kalimantan Barat termasuk ke dalam kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah yang "sangat tinggi". Ketergantungan masih berada pada kategori yang sama dengan persentase ketergantungan yang cenderung menurun hingga 2025.

Tabel 3.16 Derajat Ketergantungan Kalimantan Barat Tahun 2023-2024

Keterangan	Derajat Ketergantungan	Keterangan
Tahun 2023	78,13%	Sangat Tinggi
Tahun 2024	78,68%	Sangat Tinggi
Tahun 2025	76,25%	Sangat Tinggi

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

c. Rasio Kemandirian Fiskal

$$Rasio\ Kemandirian\ Fiskal = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Bantuan\ Pempus\ \&\ Pinjaman}$$

Tabel 3.17 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Rasio Kemandirian fiskal adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas realisasi APBD Kalbar tahun 2024, diperoleh hasil bahwa Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kalbar masih masuk kedalam kategori "Konsultatif". Sejalan dengan hasil perhitungan Derajat Ketergantungan pada tahun 2023-2025, Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kalbar pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan 2024 meskipun masih berada di kategori yang sama yakni Kosultatif.

Tabel 3.18 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Di Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

Keterangan	Kemandirian Fiskal	Keterangan
Tahun 2023	27,27%	Kosultatif
Tahun 2024	26,74%	Kosultatif
Tahun 2025	30,79%	Kosultatif

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Meskipun secara konsolidasi (seluruh Pemda) belum mencapai tingkat kemandirian yang optimal, namun apabila dihitung berdasarkan LRA APBD masing-masing Pemerintah Daerah, maka beberapa daerah di Kalbar telah menunjukkan kemandirian yang lebih baik, misalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Singkawang. Kenaikan kemandirian fiskal suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya/kebutuhannya sendiri. Selain itu, naiknya kontribusi PAD juga merupakan indikasi kinerja keuangan daerah yang positif.

3.2.2. Belanja Daerah

Grafik 2.23 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat

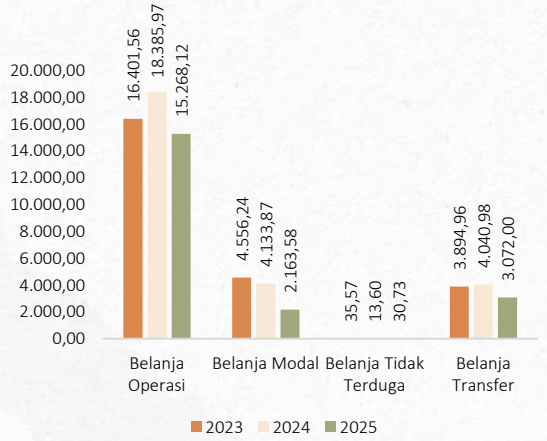

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Pagu belanja pada APBD Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai Rp29.387,17 miliar, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp20.534,43 miliar atau 69,88%. Apabila ditinjau dari pengeluaran per jenis belanja secara lebih rinci, realisasi terbesar berasal dari pos belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp15.268,12 miliar, disusul oleh belanja transfer sebesar Rp3.072,00 miliar dan belanja modal sebesar Rp2.163,58 miliar serta belanja tidak terduga sebesar Rp30,73 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, hanya jenis belanja tidak terduga yang mengalami peningkatan realisasi.

Jika disimak pada grafik 3.23, belanja modal mengalami fluktuasi realisasi selama tiga tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp4.556,24 miliar dari pagu anggaran Rp4.673,21 miliar. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup dalam dengan realisasi sebesar Rp4.437,08 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp2.163,58 miliar. Penurunan belanja modal ini terjadi disebabkan karena hampir sebagian besar komponen belanja modal pada tahun 20245 mengalami penurunan yaitu pada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalanan, irigasi, dan jaringan, dll. Belanja transfer juga mengalami pertumbuhan fluktuatif pada periode 2023 s.d. 2025.

Jika dilihat dari komposisi pagu belanja secara keseluruhan, sebesar 40,63% atau Rp11.635,28 miliar pada APBD Kalimantan Barat diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan 28,85% atau Rp8.260,74 miliar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan, proporsi pagu untuk Belanja Modal hanya sebesar 15,49% atau Rp4.437,08 miliar dari total belanja APBD. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat karena sesuai dengan amanat baru UU HKPD, batas maksimal belanja pegawai selain tunjangan guru adalah sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja infrastruktur adalah sebesar 40% dari Pemda, dan amanat ini memiliki masa transisi untuk dilakukan penyesuaian selama 5 tahun.

Grafik 3.24 Realisasi Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

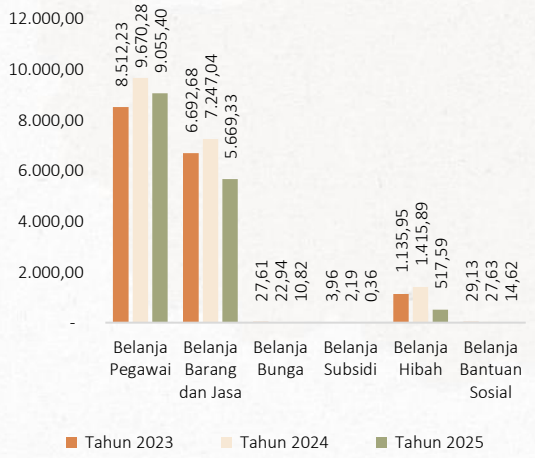

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Sebagian besar belanja operasi terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun 2023 namun cenderung menurun menurun pada tahun 2025 dengan realisasi terbesar pada tahun 2024 sebesar Rp9.670,28. Penurunan belanja pegawai ini disebabkan karena penurunan drastis secara nominal pada komponen Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan pertumbuhan terkontraksi 6,4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja barang dan jasa pun mengalami pertumbuhan fluktuatif yang sama dengan belanja pegawai selama tiga tahun terakhir dan cenderung menurun pada tahun 2025. Penurunan belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran yang diwajibkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 2025. Jenis belanja lainnya seperti belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengalami kontraksi pertumbuhan. Secara presentasi, belanja hibah merupakan jenis belanja dengan kontraksi terbesar pada tahun 2025 sedangkan jika dibandingkan secara nominal maka belanja pegawai merupakan belanja dengan kontraksi terbesar pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.3 Surplus/Defisit APBD

Grafik 3.26 Surplus APBD Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

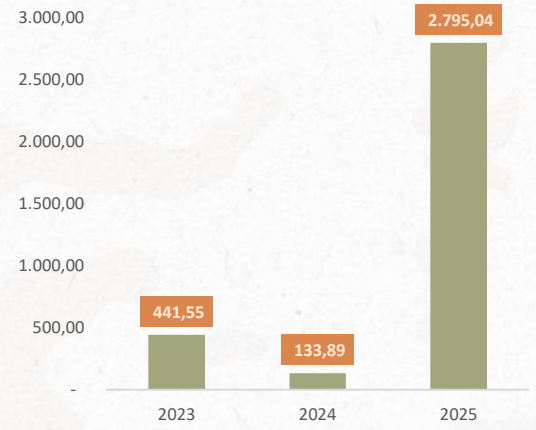

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Dengan kondisi penyerapan belanja yang masih belum optimal hingga akhir tahun anggaran 2025 menyebabkan APBD Kalimantan Barat surplus sebesar Rp2.795,04 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan rencana anggaran dimana pagu APBD 2025 yang direncanakan defisit sebesar Rp748,48 miliar. Kondisi surplus APBD pada tahun 2025 lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data, surplus APBD Kalimantan Barat mengalami tren fluktuatif selama tiga tahun terakhir namun cenderung mengalami peningkatan pada 2025. Surplus terbesar terjadi pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp2.795,04 miliar. Penurunan realisasi belanja pada tahun 2025 berdampak pada meningkatnya kondisi surplus APBD di Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan manajemen kas dan mengakselerasi belanja modal yang produktif sebagai langkah untuk menangani kondisi APBD yang surplus dan menciptakan *multiplier effec*t di Kalimantan Barat.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Meskipun kondisi surplus yang terjadi berbanding terbalik dengan rencana pada pagu/anggaran tahun 2025, rencana anggaran untuk pembiayaan tetap berjalan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp885,46 miliar yang berasal dari penggunaan SiLPA sebesar Rp757,92 miliar dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp127,53 miliar. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp250,02 miliar yang berasal dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp47,00 miliar dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp203,02 miliar.

Grafik 3.25 SiLPA APBD Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

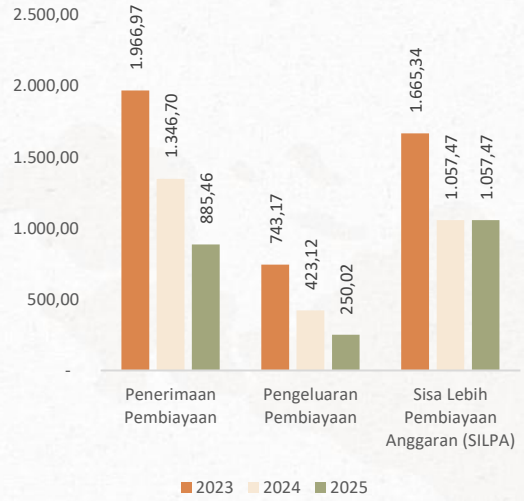

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, SiLPA Kalimantan Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Mempertimbangkan kebijakan penurunan TKD pada TA 2026, Surplus saldo kas di RKUD dapat dijaga untuk penyediaan pembiayaan APBD TA 2026 yang dapat dioptimalkan pada penguatan belanja modal produktif yang menciptakan nilai jangka panjang dan optimalisasi investasi daerah melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD).

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran strategis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat memiliki 56 rumah sakit baik milik swasta maupun milik pemerintah dan terdapat 248 puskesmas yang seluruhnya merupakan milik pemerintah.

Menurut informasi dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, semua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalimantan Barat adalah BLUD dalam sektor kesehatan, mencakup total 136 BLUD yang terbagi menjadi 119 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas dan 18 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hasil survei dan pembinaan langsung terhadap RSUD BLUD menunjukkan bahwa jenis layanan yang disediakan oleh BLUD RSUD di Kalimantan Barat umumnya serupa satu sama lain.

Grafik 3.27 Total Aset BLUD Lingkup Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

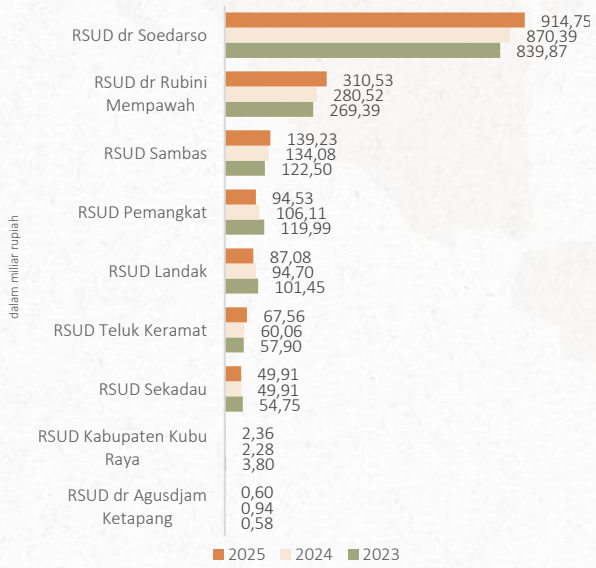

Sumber: Survei Profil BLUD 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil survei profil BLUD tahun 2025 yang telah dilaksanakan, terdapat sembilan RSUD yang telah berpartisipasi dalam survei tersebut. RSUD dr Soedarso merupakan BLUD dengan total aset terbesar pada tahun 2023 s.d. 2025. Total aset yang dimiliki oleh RSUD dr Soedarso mengalami pertumbuhan yang positif selama tiga tahun terakhir yakni Rp839,87 miliar pada tahun 2023 Rp870,39 miliar untuk tahun 2024, dan Rp914,75 miliar untuk tahun 2025.

Disamping itu, terdapat RSUD dr Rubini Mempawah, RSUD Sambas, dan RSUD Teluk Keramat yang juga mengalami pertumbuhan postif selama tiga tahun terakhir jika dilihat dari sisi total aset. Tingkat kemandirian BLUD dapat tercerminkan melalui rasio pendapatan atas jasa layanan yang dihasilkan (PNBP) terhadap total belanja BLUD. Rasio tersebut dapat mencerminkan sejauh mana BLUD mampu membiayai operasional dan kegiatannya tanpa bergantung kepada sumber pendanaan eksternal seperti APBD. Semakin tinggi rasio pendapatan terhadap belanja, maka semakin tinggi tingkat kemandirian BLUD.

Tabel 3.19 Rasio PNBP Terhadap Total Belanja BLUD

Nama BLUD	2023	2024	2025
RSUD Pemangkat	89,38%	95,78%	85,99%
RSUD Kabupaten Kubu Raya	0,63%	0,38%	0,34%
RSUD Teluk Keramat	46,97%	52,87%	42,25%
RSUD dr Agusdjam Ketapang	91,26%	96,43%	98,25%
RSUD Sekadau	79,76%	90,44%	65,45%
RSUD dr Rubini Mempawah	82,86%	85,19%	78,66%
RSUD dr Soedarso	93,37%	100,75%	103,37%
RSUD Landak	100,00%	84,65%	82,62%
RSUD Sambas	109,31%	93,92%	101,32%

Sumber: Survei Profil BLUD 2025 (diolah)

RSUD Soedarso memiliki nilai rasio 100 selama tahun 2024 s.d. 2025. Nilai tersebut mencerminkan bahwa belanja operasional RSUD Pemangkat mampu dipenuhi oleh pendapatan PNBPnya. Namun, secara umum rata-rata pendapatan BLUD masih belum bisa menutup biaya operasional, BLUD masih dibantu oleh APBD.

Kendala yang dihadapi oleh BLUD di lingkup Kalimantan Barat diantaranya sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan dan belanja UPTD Puskesmas belum optimal akibat kebijakan layanan gratis dan/atau tarif rendah.
b. Kendala penggunaan e-BLUD dan FORSA BLUD menghambat digitalisasi pengelolaan keuangan dan layanan.

c. Fleksibilitas BLUD terhambat karena regulasi antar pihak belum selaras.
d. Keterbatasan kapasitas SDM memengaruhi kinerja dan kualitas layanan.
e. Keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya, dan layanan menghambat optimalisasi kinerja BLUD.
f. Pembayaran melalui QRIS terkendala biaya administrasi yang relatif tinggi.

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Kondisi APBD Kalimantan Barat yang mencatat surplus sebesar Rp2.795,04 miliar pada tahun 2025 terutama disebabkan belum optimalnya penyerapan belanja daerah, khususnya belanja modal. Capaian belanja tersebut dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal pada lingkup Pemerintah Daerah. Berdasarkan survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, sejumlah faktor internal menjadi penghambat utama optimalisasi belanja daerah, diantaranya:

a. Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian menghambat capaian belanja daerah.
b. Keterbatasan SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
c. OPD/SKPD terlambat melakukan pencairan dana sehingga tidak sesuai anggaran kas.
d. Kompleksitas penyusunan regulasi menyebabkan proses memakan waktu lama.
e. Perencanaan kegiatan oleh OPD/SKPD kurang matang sehingga realisasi anggaran tidak optimal.
f. Efisiensi anggaran yang sering terjadi membuat perencanaan awal kurang optimal.

Sedangkan untuk faktor eksternal yang mengakibatkan capaian belanja daerah dalam APBD lingkup Kalimantan Barat belum optimal meliputi:

a. Keterbatasan jumlah penyedia yang terdaftar pada platform belanja pemerintah disebabkan minimnya pemahaman terkait mekanisme pendaftaran.
b. Proses pemenuhan dokumen oleh pihak ketiga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan tender.
c. terbatasnya pihak ketiga/penyedia yang terdaftar dalam *platform* belanja pemerintah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait proses pendaftaran.
d. faktor cuaca yang tidak menentu yang menghambat pekerjaan fisik.

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang terjadi untuk mencapai belanja daerah yang optimal, pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Barat dinilai perlu melakukan upaya sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah melalui BPKAD/Bappeda perlu menyusun jadwal pelaksanaan program earmark dan non-earmark secara bersamaan guna mencegah dominasi pada satu jenis belanja;
b. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja sesuai target perencanaan serta menekan deviasi anggaran.
c. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap OPD/SKPD perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi belanja dan output yang dihasilkan.
d. Perencanaan kegiatan penyerapan belanja daerah perlu disusun secara presisi pada setiap triwulan sebagai dasar realisasi anggaran.
e. Pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi berupa *dashboard* pemantauan jadwal program dan kebutuhan kas secara real-time untuk mempercepat pengambilan keputusan.
f. Perencanaan anggaran perlu segera disesuaikan kembali dengan kebijakan efisiensi yang berlaku.
g. Perlu dibentuk tim khusus yang melakukan pemantauan berkala atas penyerapan belanja dan capaian output OPD/SKPD.

3.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi

Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan

Tabel 3.20 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

URAIAN	2023		2024		2025				% Growth
	Konsolidasi	%Proporsi	Konsolidasi	%Proporsi	Pusat	Daerah	Konsolidasi	%Proporsi	
PENDAPATAN DAERAH	**18.128,10**		**19.207,38**		**12.981,04**	**22.803,08**	**18.474,15**		**-3,82%**
Pendapatan Perpajakan	14.999,60	82,74%	15.689,65	81,69%	11.639,87	3.691,93	15.331,80	82,99%	**-2,28%**
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.058,03	16,87%	3.476,96	18,10%	1.341,17	1.844,90	3.139,36	16,99%	**-9,71%**
Hibah	70,46	0,39%	40,77	0,21%	0,00	3,00	3,00	0,02%	**-92,65%**
Transfer	-	0,00%	-	0,00%	-	17.263,25	-	0,00%	**-**
BELANJA KONSOLIDASI	**37.197,90**		**38.819,98**		**29.993,35**	**17.813,74**	**32.691,42**		**-15,79%**
Belanja Pemerintah	32.479,52	87,32%	34.894,15	89,89%	9.767,15	15.268,12	27.229,58	83,29%	**-21,97%**
Transfer	4.718,38	12,68%	3.925,83	10,11%	20.226,20	2.545,62	5.461,85	16,71%	**39,13%**
DEFISIT	**-19.069,81**		**-19.612,60**		**-17.012,31**	**2.795,04**	**-14.217,27**		**-27,51%**
PEMBIAYAAN	**1.223,79**		**923,58**		-	**635,44**	**635,44**		**-31,20%**
Penerimaan Pembiayaan	1.969,70	160,73%	1.346,70	145,81%	-	885,46	885,46	139,35%	**-34,25%**
Pengeluaran Pembiayaan	743,17	37,78%	423,12	45,81%	-	250,02	250,02	39,35%	**-40,91%**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**-17.846,01**		**-18.689,02**		**-17.012,31**	**3.430,48**	**-13.581,83**		**-27,33%**

Sumber: GFS 2024, GFS Preliminary Tahun 2025, LKPDK, dan LKPK (diolah)

*Catatan: seluruh pengeluaran transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan penerimaan transfer penerimaan daerah

Untuk menyediakan informasi bagi publik/*stakeholders* serta sebagai alat dan data manajerial untuk melaksanakan evaluasi dan pengambilan keputusan kebijakan fiskal dibentuk Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 mencapai Rp18.474,15 miliar, mengalami kontraksi sedalam 3,28% dibanding tahun 2024. Kontraksi disebabkan karena seluruh komponen yaitu Pendapatan

Grafik 3.28 Tren Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023-2025

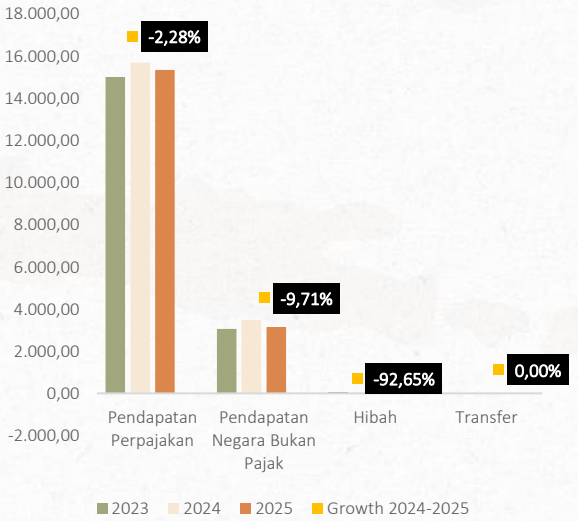

Sumber: GFS 2024, GFS Preliminary Tahun 2025, LKPDK dan LKPK (diolah)

hibah mengalami kontraksi. Pendapatan konsolidasi pada tahun 2025 didominasi oleh pos Pendapatan Perpajakan sebesar Rp15.331,80 miliar, disusul dengan pos PNBP sebesar Rp3.139,36 miliar, dan hibah sebsar Rp3,00 miliar Apabila melihat tren

sejak tahun 2023 sampai dengan 2025, Pendapatan Perpajakan masih menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat.

Grafik 3.29 Komponen Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023-2025

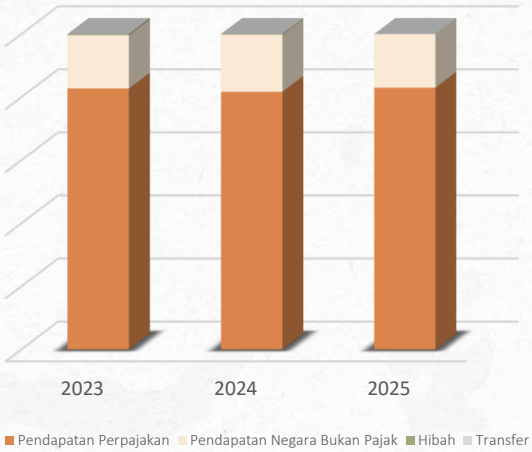

Sumber: GFS 2024, GFS Preliminary Tahun 2025, LKPDK, dan LKPK (diolah)

Tabel 3.21 Tax Ratio Konsolidasian 2023-2025

Tahun	Penerimaan Perpajakan	PDRB ADHB	Ratio
2023	14.999,60	274.468,58	5,46%
2024	15.689,65	300.166,89	5,34%
2025	15.331,80	328.569,51	4,67%

Sumber: LKPDK, LKPK, BPS Kalbar (diolah)

Tax ratio Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar 4,67% dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pendapatan Pajak Konsolidasian pada tahun 2025 yang mengalami kontraksi menyebabkan penurunan *tax ratio*. Faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan konsolidasian adalah Penerimaan Bea Masuk belum optimal akibat kebijakan pengurangan impor beras, gula, dan komoditas pertanian lainnya dalam rangka mendukung program swasembada pangan. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh proses penyesuaian wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi *Coretax* yang relatif baru diterapkan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penggalian potensi pendapatan negara yang terdapat di Kalimantan Barat dengan terus melakukan penyempurnaan sistem, administrasi maupun simplifikasi regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi *coretax*. Aplikasi ini dibuat untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Selain itu, coretax dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Harapannya aplikasi ini dapat memudahkan para pengguna dan wajib pajak disamping menambahkan pendapatan negara.

3.3.2. Belanja Konsolidasi

Belanja konsolidasian tingkat wilayah Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai Rp32.691,42 miliar, mengalami kontraksi sebesar 15,79% dibanding tahun 2024. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp27.229,58 miliar dan belanja transfer sebesar Rp5.461,62 miliar dan telah mengalami proses eliminasi atas akun-akun resiprokal.

Grafik 3.30 Belanja Konsolidasian Tahun 2024-2025

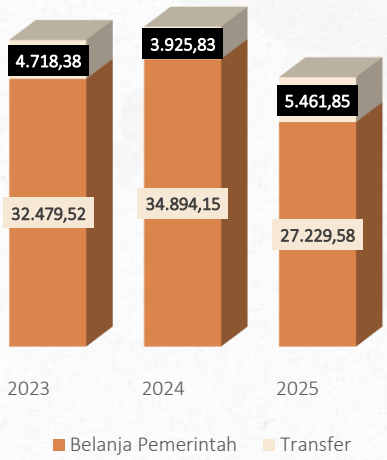

Sumber: GFS 2024, GFS Preliminary Tahun 2025, LKPDK, dan LKPK (diolah)

Kontraksi pada belanja konsolidasian Kalimantan Barat yang terjadi pada tahun 2024 disebabkan karena Belanja Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 21,97% meskipun disisi lain belanja transfer mengalami pertumbuhan sebesar 39,13% namun

hal tersebut tidak mempengaruhi total keseluruhan belanja konsolidasi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan belanja konsolidasi selama tiga tahun terakhir, maka pergerakan belanja konsolidasi mengalami fluktuasi. Belanja konsolidasi pada tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Komponen Belanja Pemerintah selalu memiliki proporsi yang cukup besar dalam total belanja kosolidasian selama tahun 2023 s.d. 2025.

Tabel 3.22
Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap PDRB

Tahun	Belanja Konsolidasian	PDRB ADHB	Rasio
2023	37.197,90	274.468,58	13,55%
2024	38.819,98	300.166,89	12,93%
2025	27.229,58	328.569,51	8,59%

Sumber: LKPDK, LKPK, BPS Kalbar (diolah)

Rasio belanja konsolidasian terhadap PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2023 s.d. 2025 menujukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, rasio belanja konsolidasian sebesar 13,55% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 12,93% lalu menurun kembali pada tahun 2025 menjadi 8,59%. Penurunan rasio belanja konsolidasian terhadap PDRB Kalimantan Barat pada periode 2023–2025 menunjukkan semakin mengecilnya proporsi belanja pemerintah terhadap total aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran fiskal pemerintah dalam mendorong perekonomian relatif menurun, baik karena pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan belanja maupun adanya penyesuaian kebijakan belanja. Rasio belanja konsolidasian dapat mengindikasikan seberapa efektif dan efisien belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Belanja pemerintah produktif dan tepat sasaran tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Sebaliknya jika belanja pemerintah tidak terarah dan kurang produktif maka akan menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sehingga manfaatnyapun kurang bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, belanja pemerintah harus dirancang dengan baik dan terus disempurnakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertujuan akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3. Surplus/Defisit

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 masih dalam posisi defisit Rp14.217,27 miliar. Posisi defisit disumbangkan oleh defisit pemerintah pusat sebesar Rp17.012,31 miliar dan surplus pada pemerintah daerah sebesar Rp2.795,04 miliar. Angka defisit pada tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 defisit ditetapkan sebesar Rp19.069,81 miliar, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp19.612,60 miliar dan menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp14.217,27 miliar.

Grafik 3.31 Tren Surplus/Defisit dan Pembiayaan Konsolidasian

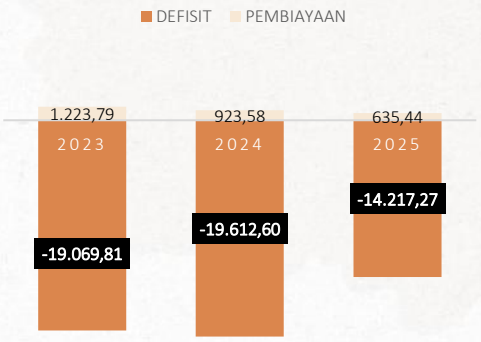

Sumber: GFS 2024, GFS Preliminary Tahun 2025, LKPDK dan LKPK (diolah)

3.3.4. Pembiayaan Konsolidasi

Pembiayaan konsolidasi pada tahun 2025 sebesar Rp635,44 miliar, turun 31,20% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian pembiayaan konsolidasi Kalimantan Barat pada tahun 2025 merupakan yang terendah selama tiga tahun terakhir. Pembiayaan konsolidasian selama tahun 2023 s.d. 2025 hanya berasal dari realisasi pembiayaan daerah tanpa adanya pembiayaan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Pembiayaan berasal dari pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp885,46 milar dan pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp250,02 miliar, sehingga menghasilkan SiKPA sebesar Rp13.581,83 miliar.

BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

BAB IV
Pengembangan Ekonomi Daerah

4.1. Pendahuluan

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN dan Belanja Pemerintah Daerah dalam APBD merupakan urat nadi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kebijakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat dan implementatif, Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mengakselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dan tepat sasaran maka Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memunculkan *side effect* berupa menurunnya efisiensi dan pemborosan anggaran yang berujung pada perlambatan ekonomi .

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Negara Indonesia pada tahun 2023 memiliki 17.001 pulau dengan luas wilayah mencapai 1.892.410,09 KM^2, sehingga setiap daerah memiliki keunikan dan potensi masing-masing yang dapat dioptimalkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian dari Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan agar setiap daerah dapat mandiri, mengembangkan potensi lokal dan menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik serta kebutuhan daerah dan masyarakatnya sendiri.

Implementasi Otonomi Daerah menuntut adanya dukungan Desentralisasi Fiskal, agar daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat untuk menjalakan layanan publik, pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi lokalnya. Transfer Ke Daerah atau disingkat dengan TKD merupakah salah satu instrumen fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah.

Melalui TKD, pemerintah pusat tidak hanya mendukung keberlanjutan fiskal daerah, tetapi juga mengarahkan pencapaian prioritas pembangunan nasional agar selaras dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di suatu wilayah perlu direncanakan secara terpadu, saling melengkapi, dan menghindari terjadinya tumpang tindih program maupun anggaran.

Urgensi penyelarasan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mengamanatkan perlunya harmonisasi antara belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan dan penganggaran APBN dan APBD sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, serta berkontribusi terhadap pemerataan perekonomian antarwilayah.

Salah satu komponen TKD yang berperan penting dalam mendukung pembangunan fisik dan infrastruktur daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik dialokasikan untuk membiayai kegiatan fisik/infrastruktur di daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan infrastruktur yang didanai melalui DAK Fisik perlu diharmonisasikan dengan Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilaksanakan di wilayah yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan menghadirkan SOP Link 70 Tahun 2023 guna melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah. Implementasi SOP Link 70 tahun 2023 ini melibatkan kolaborasi antara Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan

Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai kantor vertikal DJPb di daerah dan *Regional Chief Economist* (RCE) tentunya turun aktif dalam mengawal harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Berdasarkan peran tersebut, pada Bab IV Pengembangan Ekonomi Daerah akan diuraikan mengenai Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah (Kalimantan Barat) yang meliputi:

a. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian *output* harmonis;
b. Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik;
c. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

4.2. Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/ DAK Fisik Di Tingkat Wilayah Kalimantan Barat

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Provinsi Kalimantan Barat, indikator yang digunakan adalah Rincian Output (RO) Harmonis. RO Harmonis sendiri merupakan *output*/keluaran rill yang telah dihasilkan oleh satuan kerja K/L dan telah diselaraskan dengan DAK Fisik di Kalimantan Barat.

Tabel 4.1 Alokasi DAK Fisik & Belanja K/L (RO Harmonis) Kalbar Tahun 2025

Keterangan	DAK Fisik	Belanja K/L (RO Harmonis)
Pagu	Rp802,08 M	Rp616,03 M
Realisasi	Rp765,72 M	Rp610,34 M
Jumlah Bidang	7 Bidang	8 Bidang
Pelaksana Kegiatan	OPD/SKPD	Satker Vertikal K/L

Sumber: OMSPAN TKD dan SINTESA (diolah)

Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) di lingkup Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai Rp616,03 miliar yang tersebar dalam 8 bidang DAK Fisik yakni Air Minum, Irigasi, Jalan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Perumahan, serta Sanitasi. terdapat 11 jenis RO dalam Belanja K/L (RO Harmonis) yang terjadi blokir anggaran dalam rangka efisiensi belanja pemerintah. Kesebelas jenis RO tersebut tertera pada tabel 5.2.

Tabel 4.2 Jenis RO Yang Terdapat Pencadangan

BIDANG/JENIS RO	NAMA K/L
Air Minum	
Pembangunan Spam Kabupaten/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum
Irigasi	
Dokumen Teknis Bidang Irigasi Dan Rawa	Kementerian Pekerjaan Umum
Pembangunan Embung Dan Tampungan Air Lainnya Pada Kawasan Metropolitan, Perkotaan Dan Strategis Ekonomi	Kementerian Pekerjaan Umum
Program Padat Karya Irigasi	Kementerian Pekerjaan Umum
Jalan	
Jalan Strategis (Propn)	Kementerian Pekerjaan Umum
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kementerian Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Kementerian Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Jalan Baru	Kementerian Pekerjaan Umum
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum
Ketahanan Pangan	
Instrumen Pertanian Terstandar Yang Diuji	Kementerian Pertanian
Sanitasi	
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber: SINTESA (diolah)

DAK Fisik di Kalimantan Barat pada awal tahun 2025 dialokasi sebesar sebesar Rp1.545,34 miliar yang tersebar pada 15 pemerintah daerah dan 11 bidang. Pasca terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, alokasi DAK Fisik di Kalimantan Barat terdapat pencadangan sehingga terjadi perubahan pagu menjadi Rp802,08 miliar atau turun 48,10% dari pagu awal. Pencadangan tersebut mencakup bidang Konektivitas, Irigasi, Pangan Pertanian, dan Pangan Akuatik, dengan nilai pencadangan masing-masing sebesar 100% dari pagu awal, sehingga hanya tersisa 7 Bidang yang memiliki alokasi pagu akhir DAK Fisik.

Tabel 4.3 Pencadangan TKD Per Bidang Tahun 2025

BIDANG	PAGU	PAGU AKHIR	% PENCADANGAN
	miliar rupiah		
Air Minum	149,4	149,4	0,00%
Irigasi	32,26	0	100,00%
Kesehatan dan KB	484,98	484,98	0,00%
Konektivitas	663,4	0	100,00%
Pangan Akuatik	31,7	0	100,00%
Pangan Pertanian	15,9	0	100,00%
Pendidikan	67,81	67,81	0,00%
Perdagangan	6,4	6,4	0,00%
Perlindungan Perempuan dan Anak	1,28	1,28	0,00%
Perumahan dan Permukiman	5,39	5,39	0,00%
Sanitasi	86,83	86,83	0,00%
TOTAL	1.545,34	802,08	48,10%

Sumber: OMSPAN TKD dan SINTESA (diolah)

DAK Fisik tahun 2025 mampu tersalurkan Rp765,72 miliar atau 95,47%. Kabupaten Kubu Raya menjadi pemda yang memperoleh alokasi pagu DAK Fisik tertinggi yakni Rp211,45 miliar dan diikuti oleh Kabupaten Sambas yakni Rp765,72 miliar. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di kedua daerah tersebut yang merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Kalimantan Barat (BPS, 2024).

Grafik 4.1 DAK Fisik Per Kabupaten/Kota Tahun 2025

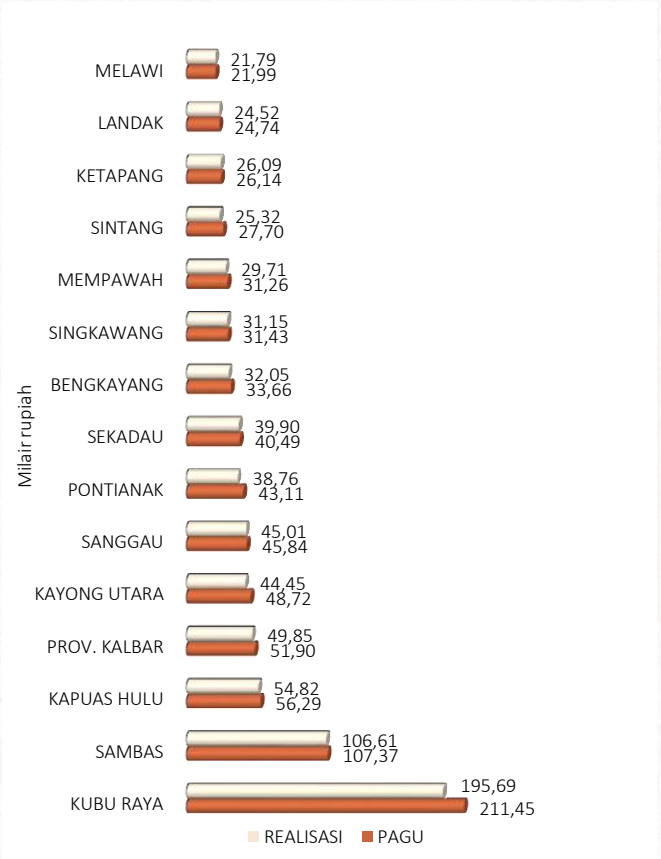

Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

Tabel 4.4 Perbandingan Belanja KL yang mendukung DAK Fisik dengan DAK Fisik pada 10 Bidang

Bidang	Belanja KL (RO Harmonis)			TKD DAK Fisik		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pendidikan	5,65	4,06	71,78%	67,81	57,00	84,05%
Kesehatan	1,02	0,86	84,88%	484,98	464,90	95,86%
Jalan	460,97	460,41	99,88%			
Air Minum	14,82	14,75	99,48%	149,40	146,74	98,22%
Sanitasi	36,05	33,54	93,05%	86,83	86,33	99,43%
Ketahanan Pangan	3,71	3,64	98,21%			
Irigasi	91,34	90,85	99,46%			
Infrastruktur						
Perumahan	2,48	2,23	89,92%	5,39	4,35	80,74%
Perlindungan Perempuan dan Anak				1,28	0,00	0,00%
TOTAL	616,03	610,34	99,07%	795,68	759,32	95,43%

*)Pagu dan Realisasi dalam miliar rupiah

Sumber: OMSPAN TKD dan SINTESA (diolah)

Dalam rangka memperkuat harmonisasi belanja pusat dan daerah, Belanja Pemerintah Pusat melalui K/L senantiasa mendukung kegiatan daerah yang didanai oleh DAK Fisik.

SOP Link 70 Tahun 2023 diterapkan terhadap 10 bidang DAK fisik yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Perumahan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Pangan, serta Infrastruktur.

4.2.1. Alokasi Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 memperoleh alokasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp10.322,79 miliar, dimana Rp616,03 miliar atau 5,97% didistribusikan untuk harmonisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Satuan Kerja pengelola Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik hanya terdapat di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Penyerapan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik (RO Harmonis) sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 99,07% atau Rp610,34 miliar.

Sedangkan, alokasi DAK Fisik yang telah dilakukan sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat pada tahap perencanaan/penganggaran berdasarkan pagu akhir setelah dilaksanakan pencadangan sebesar Rp795,68 miliar dan tersalurkan sebesar 95,43% atau Rp759,32 miliar. Alokasi pagu tersebut tersebar dalam enam bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ditinjau dari besaran pagu yang ada, alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) didominasi oleh bidang Jalan dengan porsi mencapai 74,83%. Penekanan pada bidang jalan ini secara signifikan mendukung pembangunan infrastruktur jalan di daerah dalam rangka meningkatkan kelancaran konektivitas wilayah yang berperan sebagai tulang punggung penggerak perekonomian daerah. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat DAK Fisik bidang konektivitas telah dilakukan pencadangan secara penuh (100%) sebagai bagian dari implementasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah sekaligus upaya menjaga stabilitas fiskal.

Alokasi pagu terbesar berikutnya pada Belanja K/L (RO Harmonis) terdapat pada bidang Irigasi. Sejalan dengan kebijakan pada bidang konektivitas, DAK Fisik bidang Irigasi juga mengalami pencadangan secara penuh (100%). Oleh karena itu, pengalokasian Belanja K/L (RO Harmonis) pada bidang Irigasi menjadi bentuk penyesuaian dan keselarasan terhadap kebijakan pencadangan tersebut. Bidang irigasi memiliki peran strategis dalam mendukung penanggulangan bencana dan ketahanan pangan, khususnya melalui pengelolaan distribusi air bagi tanaman pangan serta optimalisasi fungsi drainase untuk mencegah terjadinya genangan dan banjir.

Pagu DAK Fisik dalam rangka harmonisasi dan sikronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat difokuskan pada layanan dasar masyarakat yakni bidang Kesehatan dan Air Minum yang masing-masing memperoleh distribusi pagu mencapai 60,95% dan 18,78%. Kondisi ini mencerminkan

Grafik 4.2 Distribusi Pagu Harmonisasi Belanja K/L Dan DAK Fisik

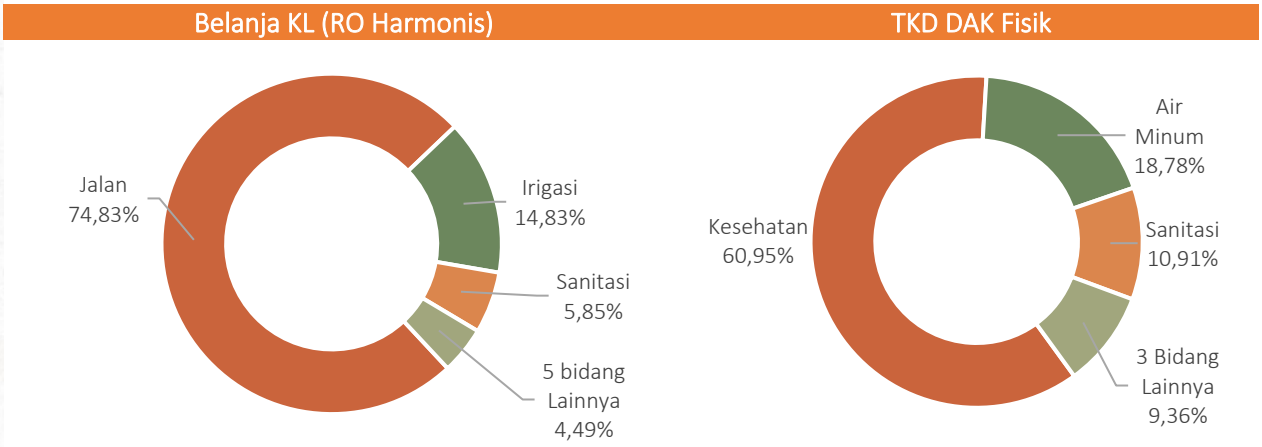

Sumber: OMSPAN TKD dan SINTESA (diolah)

bahwa Belanja K/L (RO Harmonis) difokuskan pada penguatan infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan, sementara DAK Fisik lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat. Keselarasan serta sifat saling melengkapi antara Belanja K/L (RO Harmonis) dan DAK Fisik tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dengan tetap menjaga serta memastikan terjaganya kualitas layanan publik yang berdampak pada tingkat persentase realisasi/penyerapan terhadap pagu.

Persentase penyaluran/realisasi DAK Fisik tertinggi terdapat pada Bidang Sanitasi, yaitu sebesar 99,43%. Dari sisi besaran anggaran, bidang ini juga memiliki distribusi pagu dan realisasi yang relatif tinggi, setelah Bidang Kesehatan dan Air Minum. Alokasi DAK Fisik pada Bidang Sanitasi difokuskan

Grafik 4.3 Distribusi Realisasi Harmonisasi Belanja K/L Dan DAK Fisik

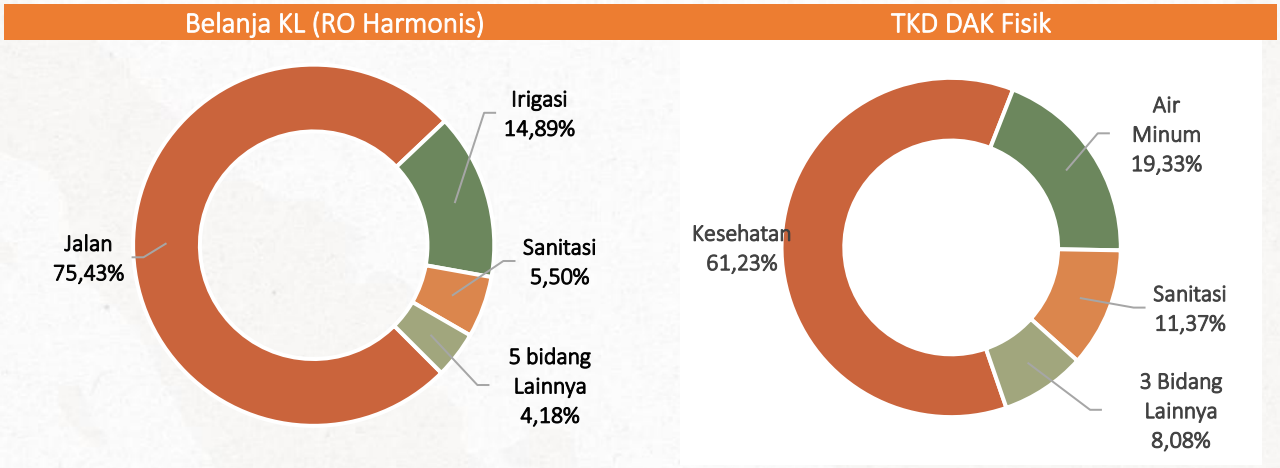

Sumber: OMSPAN TKD dan SINTESA (diolah)

diterima oleh masyarakat.

Sejalan dengan pagu yang tersedia, realisasinya juga menunjukkan bahwa distribusi penyerapan Belanja KL (RO Harmonis) tertinggi terdapat pada bidang Jalan dan Irigasi. Sedangkan, distribusi realisasi penyaluran TKD DAK Fisik dalam rangka harmonisasi dan sikronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat terdapat pada bidang Kesehatan dan Air Minum.

Ditinjau dari persentase realisasi terhadap pagu, Bidang Jalan pada Belanja K/L (RO Harmonis) mencatat tingkat penyerapan yang sangat optimal, yakni mencapai 99,88%. Alokasi pada bidang ini difokuskan pada kegiatan preservasi serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan sebagai infrastruktur pendukung konektivitas wilayah. Sebaliknya, persentase penyerapan terendah terdapat pada Bidang Pendidikan, yaitu sebesar 71,78%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penggabungan kegiatan sejenis dalam rangka implementasi efisiensi anggaran, sehingga untuk meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman, mendukung pengentasan permukiman kumuh, mencegah *stunting*, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Persentase penyaluran/realisasi DAK Fisik terendah terdapat pada Bidang Perumahan yakni 80,74% karena hanya mampu dilakukan kontrak sebesar Rp4,35 miliar. Pada tahun 2025, alokasi DAK Fisik Bidang Perumahan dalam skema TKD hanya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang guna pengentasan permukiman kumuh terpadu.

TKD DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2025 hanya dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Namun, hingga akhir tahun tidak terdapat penyaluran/realisasi. Kondisi tersebut terjadi karena rencana kegiatan yang diajukan tidak memperoleh persetujuan dari kementerian teknis, mengingat usulan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan DAK Fisik pada

Tabel 4.5 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

Kode BA	Nama K/L	Pagu Yang Mendukung DAK Fisik	Total Pagu	Porsi (%)	Jumlah Satker	Jumlah RO
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3,71	331,39	1,12%	4	6
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1,02	113,02	0,90%	2	1
138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	5,65	56,83	9,95%	1	1
145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	605,66	2.030,54	29,83%	13	26
TOTAL		616,03	2.531,78	24,33%	20	34

*)Pagu dalam miliar rupiah

Sumber: SINTESA (diolah)

bidang dimaksud. Akibatnya, proses penetapan RK, kontrak dan penyaluran TKD tidak dapat dilanjutkan.

Secara akumulatif persentase realisasi Belanja KL (RO Harmonis) menunjukkan capaian yang lebih tinggi (99,07%) jika dibandingkan dengan DAK Fisik (95,43%). Meskipun tingkat penyerapan dan penyaluran keduanya tergolong tinggi karena berada di atas 90%, kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan ketepatan eksekusi kegiatan di tingkat pemerintah daerah yang dianggarkan menggunakan DAK Fisik. Upaya tersebut penting untuk semakin mengoptimalkan efektivitas dan sinergi dalam pelaksanaan harmonisasi antara Belanja K/L dan DAK Fisik.

4.2.2. Alokasi Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik

Pagu alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Kalimantan Barat mencapai 24,33% dari total pagu belanja K/L yang mendapatkan alokasi untuk mendukung pelaksanaan harmonisasi DAK Fisik. Alokasi tersebut terdistribusi pada empat kementerian. Secara operasional, dukungan Belanja K/L tersebut dilaksanakan oleh 20 satuan kerja di Kalimantan Barat dengan total 34 jenis *Rincian Output* (RO).

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki pagu tertinggi dibanding tiga kementerian lainnya yakni Rp 616,03 miliar atau 98,32% dari total pagu Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Sedangkan, alokasi terendah terdapat di Kementerian Kesehatan yakni Rp1,02 miliar atau 0,17% dari total pagu Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Tiga Satuan kerja yang terdistribusi pagu Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar adalah Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalbar, dan Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk – Temajok yakni secara berturut-turut mencapai 30,99%, 15,90% dan 12,03% dari total Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Kalimantan Barat. Ketiga satuan kerja tersebut berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan alokasi pagunya berfokus pada pembangunan, preservasi dan dukungan infrastruktur konektivitas.

Tabel 4.6 Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) Per Kementerian

Nama K/L	Realisasi	%Real
KEMENTERIAN PERTANIAN	3,64	98,21%
KEMENTERIAN KESEHATAN	0,86	84,88%
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	4,06	71,78%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	601,77	99,36%
TOTAL	610,34	99,07%

*)Realisasi dalam miliar rupiah

Sumber: SINTESA (diolah)

Ditinjau dari realisasi terhadap pagu Belanja K/L RO Harmonis, Kementerian Pekerjaan Umum mencatatkan capaian tertinggi dengan persentase sebesar 99,36%. Sebaliknya, capaian terendah

terdapat pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu sebesar 71,78%. Rendahnya realisasi tersebut sejalan dengan belum optimalnya penyerapan anggaran pada bidang Pendidikan, yang antara lain dipengaruhi oleh penggabungan sejumlah kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran.

4.2.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

dan Menengah yakni BPMP Provinsi Kalimantan Barat (693245) yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan jenis uraian rincian sub-*output* Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya.

Belanja K/L (RO Harmonis) dibidang Kesehatan

Tabel 4.7 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Bidang DAK Fisik	Nama K/L	Pagu	Realisasi	%Real	Jumlah Satker	Jumlah RO
		miliar rupiah				
Pendidikan	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	5,65	4,06	71,78%	1	1
Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1,02	0,86	84,88%	2	1
Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum	460,97	460,41	99,88%	7	12
Air Minum	Kementerian Pekerjaan Umum	14,82	14,75	99,48%	3	3
Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian	3,71	3,64	98,21%	4	6
Sanitasi	Kementerian Pekerjaan Umum	36,05	33,54	93,05%	2	3
Irigasi	Kementerian Pekerjaan Umum	91,34	90,85	99,46%	3	5
Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum	2,48	2,23	89,92%	3	3

Sumber: SINTESA (diolah)

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki sebaran pagu Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik (RO Harmonis) terbanyak yakni pada bidang Air Minum, Irigasi, Jalan, Perumahan, serta Sanitasi. Sedangkan, ketiga Kementerian lainnya masing-masing hanya tersebar dalam satu bidang yakni (i) Kementerian Kesehatan mengelola bidang Kesehatan, (ii) Kementerian Pertanian mengelola bidang Ketahanan Pangan, serta (iii) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengelola bidang Pendidikan.

Belanja K/L (RO Harmonis) dibidang pendidikan hanya didistribusikan kepada satu satuan kerja dibawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar

didistribusikan pada dua satuan kerja yakni Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak (415975) dan Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong (690546). Alokasi pada dikedua satuan kerja tersebut digunakan untuk kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan jenis uraian rincian sub-*output* Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29). Ditinjau dari realisasi anggaran, capaian Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Kesehatan tercatat sebesar 84,88%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh tingkat penyerapan pada masing-masing satuan kerja, yakni 88,62% pada Balai Kekarantinaan Kesehatan

Grafik 4.4 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Jalan

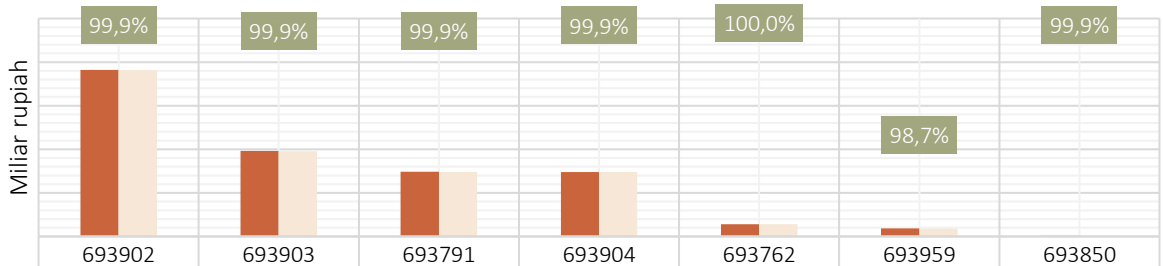

	693902	693903	693791	693904	693762	693959	693850
Pagu	190,90	98,06	74,11	73,99	14,13	9,11	0,66
Realisasi	190,77	97,92	74,01	73,93	14,13	8,99	0,66
%Real	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	98,7%	99,9%

Sumber: SINTESA (diolah)

Kelas I Pontianak dan 74,80% pada Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong. Belum optimalnya realisasi anggaran tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi belanja pemerintah.

Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) di Kalimantan Barat didominasi untuk bidang Jalan yang seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan tersebar tujuh satuan kerja yakni (i) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar (693902), (ii) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalbar (693903), (iii) Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk – Temajok (693791), (iv) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar (693904), (v) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (693762), (vi) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (693959), serta (vii) Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat (693850). Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional menjadi fokus kegiatan utama untuk Belanja K/l (RO Harmonis) di bidang Jalan. Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik (RO Harmonis) terkhususnya untuk bidang Jalan terdistribusi pada 12 jenis uraian *sub-output*.

Tabel 4.8 Jenis Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Jalan

Uraian *Sub-Output*	Pagu	Realisasi	%Real
	miliar rupiah		
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	122,14	122,13	99,99%
Jalan Strategis (ProPN)	55,20	55,20	100,00%
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	49,58	49,58	100,00%
Preservasi Jembatan	45,85	45,76	99,82%
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	42,51	42,49	99,97%
Dukungan Penanganan Jalan Daerah	38,95	38,95	100,00%
Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	32,95	32,95	100,00%
Penggantian Jembatan	31,94	31,94	100,00%
Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	17,38	16,94	97,50%
Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	12,80	12,78	99,90%
Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	6,68	6,68	100,00%
Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	4,99	4,99	100,00%

Sumber: SINTESA (diolah)

Hampir seluruh rincian *sub-output* pada Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Jalan memiliki persentase realisasi diatas 99% kecuali pada Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh blokir anggaran pada *output* dukungan teknis.

Pada bidang Air Minum, Belanja K/L (RO Harmonis) juga dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang teralokasikan pada tiga satuan kerja yakni (i) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat (693975), (ii) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (694013), serta (iii) Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I (694133). Satuan kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I memperoleh distribusi pagu terbesar yakni 93,66% dari total pagu Belanja K/L (RO Harmonis) bidang kesehatan.

Grafik 4.5 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Kesehatan

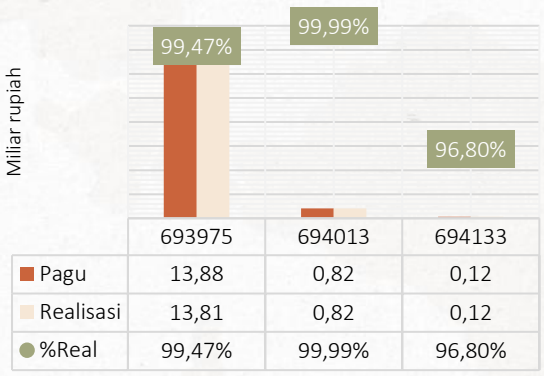

Sumber: SINTESA (diolah)

Terdapat dua fokus kegiatan utama untuk alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Air Minum yakni (i) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana yang terdistribusi satu jenis rincian *sub-ouput* yakni Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku, serta (ii) Penyelenggaraan Air Minum yang Aman yang terdistribusi pada dua jenis rincian *sub-output* yakni Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM.

Seluruh rincian *sub-output* (RO harmonis) pada bidang Air Minum mampu mencatatkan tingkat realisasi diatas 99% kecuali pada Operasi Dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang

hanya mencapai 96,80%. Alokasi *sub-output* (RO harmonis) dikelola oleh satuan kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I (694133).

Belanja K/L (RO Harmonis) di bidang Ketahanan Pangan dialokasikan kepada Kementerian Pertanian dan tersebar pada tiga satuan kerja Dekonsentrasi yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139077), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (418013), Dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (567521) serta satu satuan kerja Tugas Perbantuan yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139134). Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak memiliki distribusi alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) tertinggi di bidang Ketahanan Pangan yakni 85,97%.

Grafik 4.6 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L RO Harmonis Bidang Ketahanan Pangan

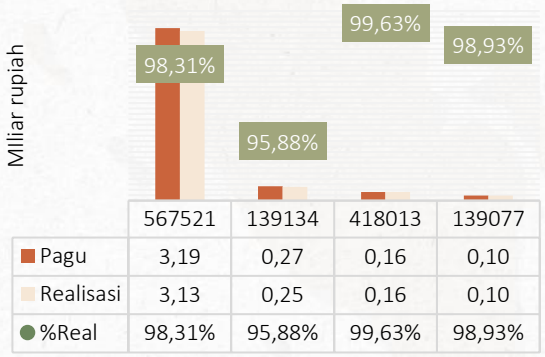

	567521	139134	418013	139077
Pagu	3,19	0,27	0,16	0,10
Realisasi	3,13	0,25	0,16	0,10
%Real	98,31%	95,88%	99,63%	98,93%

Sumber: SINTESA (diolah)

Ditinjau dari segi kegiatan, Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Ketahanan Pangan tersebar pada 4 jenis kegiatan dengan fokus utama pada Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Dan dari segi rincian *sub-outout*, Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Ketahanan Pangan tersebar pada 6 jenis rincian *sub-outout* dengan alokasi tertinggi terletak pada Kawasan Kelapa. Tingkat realisasi rincian *sub-output* Perangkat Perlindungan Perkebunan dan Alat serta Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW) menunjukkan capaian terendah yakni kurang dari 96% dari pagu. Kedua rincian *sub-output* tersebut dikelola oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (567521) Dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139134).

Tabel 4.9 Jenis Kegiatan dan Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Ketahanan Pangan

Jenis Kegiatan- Rincian *Sub* Ouput (RO Harmonis)	Pagu	Realisasi	Real
	Miliar rupiah		(%)
Pelindungan Perkebunan	0,67	0,65	96,40%
Perangkat Perlindungan Perkebunan	0,47	0,45	95,32%
Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	0,20	0,20	98,97%
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	0,27	0,25	95,88%
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	0,27	0,25	95,88%
Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	0,10	0,10	98,93%
Sertifikat Benih padi	0,10	0,10	98,93%
Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	2,51	2,48	98,82%
Kawasan Kelapa	2,51	2,48	98,82%
Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	0,16	0,16	99,63%
Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi	0,16	0,16	99,63%

Sumber: SINTESA (diolah)

Selanjutnya, pada Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Sanitasi di Kalimantan Barat seluruhnya di kelola oleh kantor vertikal Kementerian Pekerjaan Umum yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (694013) dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat (694044).

Grafik 4.7 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Sanitasi

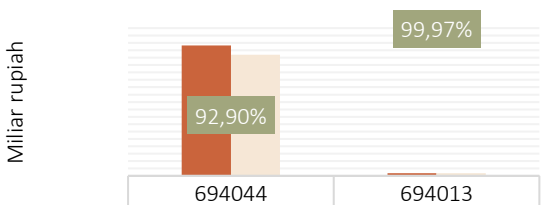

	694044	694013
Pagu	35,31	0,73
Realisasi	32,81	0,73
%Real	92,90%	99,97%

Sumber: SINTESA (diolah)

Satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat memperoleh alokasi pagu yang dominan yakni 97,97%. Fokus kegiatan utama pada Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Sanitasi adalah untuk Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu yang terdistribusi pada tigas jenis *sub-output* yakni (i) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi; (ii) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu, serta (iii) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal. Rincian *Sub-Output* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu memperoleh distribusi pagu terbesar yakni mencapai 93,12% dari total alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Sanitasi. Namun, dari segi realisasi sampai dengan akhir tahun 2026 hanya mampu terserap 92,73% dari pagu yang telah ditetapkan. Rincian sub-*output* tersebut dikelola oleh satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 4.10 Jenis Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Sanitasi

Rincian *Sub-Ouput* (RO)	Pagu	Realisasi	%Real
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	33,57	31,13	92,73%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	1,75	1,68	96,23%
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	0,73	0,73	99,97%

Sumber: SINTESA (diolah)

Pada bidang Irigasi, Belanja K/L (RO) Harmonis juga dikelola oleh Kementerian Perkerjaan Umum yang dialokasi kepada tiga satuan kerja yakni Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I (694133), SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat (694222), serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (694091). Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat merupakan satuan kerja dengan kewenangan Tugas Perbantuan.

Grafik 4.8 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Irigasi

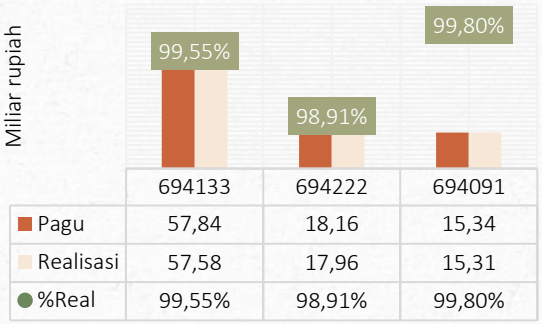

Sumber: SINTESA (diolah)

Terdapat dua fokus kegiatan dalam Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Irigasi yakni yang pertama Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana yang didalamnya terdapat tiga rincian *sub-ouput* yakni Kelembagaan Bidang Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Daerah Irigasi, serta Pemeliharaan Danau. Fokus kegiatan yang kedua yakni Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi yang didalamnya terdapat dua rincian *sub-output* yakni Dokumen Teknis Bidang Irigasi Dan Rawa serta Rehabilitasi/peningkatan Prasarana Irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal.

Tabel 4.11 Jenis Kegiatan dan Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Irigasi

Jenis Kegiatan- Rincian *Sub* Ouput (RO)	Pagu	Realisasi	%Real
	miliar rupiah		
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	73,18	72,89	99,60%
Kelembagaan Bidang Irigasi	0,39	0,33	84,64%
Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Daerah Irigasi	66,90	66,69	99,69%
Pemeliharaan Danau	5,89	5,87	99,62%
Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	18,16	17,96	98,91%
Dokumen Teknis Bidang Irigasi Dan Rawa	0,40	0,21	52,83%
Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	17,76	17,75	99,95%

Sumber: SINTESA (diolah)

Rincian sub-*output* Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Daerah Irigasi memperoleh alokasi pagu terbesar, yaitu Rp66,90 miliar atau 73,25% dari total pagu Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Irigasi. Dari sisi realisasi, sub-output ini juga menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan tingkat penyerapan anggaran di atas 99%, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Sebaliknya, rincian sub-output Dokumen Teknis Bidang Irigasi dan Rawa serta Kelembagaan Bidang Irigasi mencatat tingkat penyerapan yang relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 52,83% dan 84,64%. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa Belanja K/L (RO Harmonis) pada bidang Irigasi lebih difokuskan pada kegiatan operasional, pembangunan, dan preservasi infrastruktur, dengan proporsi yang lebih terbatas pada dukungan manajerial dan penguatan kelembagaan.

Sejalan dengan Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Irigasi, pada bidang Perumahan juga dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang didistribusikan kepada tiga satuan kerja yakni Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat (693975), Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (694013), dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat (694044).

Grafik 4.9 Sebaran Satuan Kerja Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Perumahan

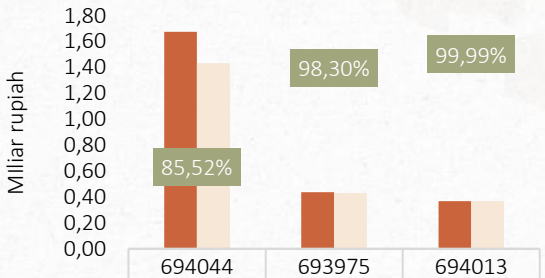

	694044	693975	694013
Pagu	1,67	0,44	0,37
Realisasi	1,43	0,43	0,37
%Real	85,52%	98,30%	99,99%

Sumber: SINTESA (diolah)

Kegiatan Belanja K/L (RO Harmonis) di bidang Perumahan difokuskan pada dua hal yakni Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis serta Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya. Ditinjau dari segi rincian *sub-output*, Belanja K/L (RO Harmonis) teralokasikan dalam tiga jenis yakni Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman, serta Pengembangan Kawasan Permukiman.

Tabel 4.12 Jenis Kegiatan dan Rincian Sub-Output Belanja K/L (RO Harmonis) Bidang Perumahan

Jenis Kegiatan- Rincian *Sub* Ouput (RO)	Pagu	Realisasi	%Real
	miliar rupiah		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis	2,04	1,80	88,12%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,37	0,37	99,99%
Pengembangan Kawasan Permukiman	1,67	1,43	85,52%
Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya	0,44	0,43	98,30%
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman	0,44	0,43	98,30%

Sumber: SINTESA (diolah)

Rincian *sub-output* Pengembangan Kawasan memperoleh alokasi pagu terbesar, yaitu Rp1,67 miliar atau 67,53% dari total pagu Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Perumahan. Meskipun demikian, tingkat realisasinya hingga akhir tahun 2025 tercatat sebesar 85,52%. Rincian *sub-output* tersebut dikelola oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat.

4.2.4. Capaian RO utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik

a. Bidang Pendidikan

Dukungan Belanja K/L (RO harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik di bidang Pendidikan hanya memiliki satu rincian *sub-output* utama yakni Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas Yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya yang berada pada kegiatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen.

Alokasi pada rincian sub-output (RO) Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya ditujukan untuk menjangkau 9.556 lembaga pendidikan. Realisasi anggaran

mencapai 71,78% dari pagu yang ditetapkan, sehingga secara nominal tingkat penyerapannya terlihat belum optimal. Namun demikian, apabila ditinjau dari capaian kinerja berbasis *output*, target volume telah terealisasi 100% atau seluruh 9.556 lembaga berhasil difasilitasi sesuai rencana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap mampu memenuhi sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.13 Capaian Output Utama Belanja K/L Yang Mendukung 10 Bidang DAK Fisik

No	Nama RO	Satuan	Pagu	Realisasi	%Real	Volume RO	Realisasi RO	%Capaian RO
			miliar rupiah					
Bidang Pendidikan								
1	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5,65	4,06	71,78%	9.566	9.566	100,00%
Bidang Kesehatan								
2	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	Paket	1,02	0,86	84,88%	10	11	110,00%
Bidang Jalan								
3	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	122,14	122,13	99,99%	1.011	949	93,87%
4	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	49,58	49,58	100,00%	37	20	54,54%
5	Preservasi Jembatan	m	45,85	45,76	99,82%	10.334	6.461	62,53%
Bidang Air Minum								
6	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	13,88	13,81	99,47%	2.000	2.000	100,00%
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Daerah (ProvKabKota)	0,82	0,82	99,99%	14	14	100,00%
8	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	unit	0,12	0,12	96,80%	7	7	100,00%
Bidang Ketahanan Pangan								
9	Kawasan Kelapa	Hektar	2,51	2,48	98,82%	500	500	100,00%
10	Perangkat Perlindungan Perkebunan	unit	0,47	0,45	95,32%	7	7	100,00%
11	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	unit	0,27	0,25	95,88%	1	1	100,00%
Bidang Sanitasi								
12	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	KK	33,57	31,13	92,73%	1.750	1.750	100,00%
13	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	KK	1,75	1,68	96,23%	36	36	100,00%
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah (ProvKabKota)	0,73	0,73	99,97%	14	14	100,00%
Bidang Irigasi								
15	Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Daerah Irigasi	Km	66,90	66,69	99,69%	1.908	1.908	100,00%
16	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	Km	17,76	17,75	99,95%	78	78	100,00%
17	Pemeliharaan Danau	unit	5,89	5,87	99,62%	4	4	100,00%
Bidang Perumahan								
18	Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	1,67	1,43	85,52%	1	1	100,00%
19	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman	Laporan	0,44	0,43	98,30%	1	1	100,00%
20	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Daerah (ProvKabKota)	0,37	0,37	99,99%	14	14	100,00%

Sumber: SINTESA (diolah)

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada RO Harmonis bidang Pendidikan tidak mengurangi kualitas maupun cakupan layanan. Sebaliknya, optimalisasi belanja mampu mendorong efektivitas pelaksanaan program, sehingga target kinerja tercapai secara penuh dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

b. Bidang Kesehatan

Sejalan dengan bidang Pendidikan, dukungan Belanja K/L (RO harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik di bidang Kesehatan hanya memiliki satu rincian sub-output utama yakni Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29) pada kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. Rincian *sub-output* tersebut dikelola oleh dua satuan kerja yakni Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak (415975) dan Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong (690546).

Target volume rincian *sub-output* Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29) ditetapkan sebanyak 10 paket. Alokasi tersebut didistribusikan kepada dua satuan kerja, yaitu 4 paket pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak dan 6 paket pada Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong. Pembagian ini mencerminkan penyesuaian kebutuhan operasional pada masing-masing satuan kerja, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi pelayanan kekarantinaan lintas batas negara.

Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) di bidang Kesehatan hingga akhir tahun 2025 mencapai 84,88% dari pagu yang telah ditetapkan. Persentase tersebut relatif belum optimal dan dipengaruhi oleh kebijakan pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi belanja pemerintah. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak berdampak pada capaian kinerja fisik. Target volume rincian *sub-output* justru terealisasi sebesar 110% atau setara dengan 11 paket alat dan bahan kekarantinaan, melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Bidang Jalan

Fokus utama Belanja K/L (RO Harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik berada pada bidang Jalan. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi pagu yang mencapai Rp460,97 miliar atau setara dengan 74,83% dari total pagu RO Harmonis di Kalimantan Barat.

Terdapat 12 jenis *sub-ouput* pada Belanja K/L (RO Harmonis) yang mendukung DAK Fisik bidang Jalan. Tiga jenis *sub-output* (RO) utama yang memperoleh alokasi pagu terbesar adalah Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan; Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan; serta Preservasi Jembatan.

Rincian sub-*ouput* (RO) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan memperoleh alokasi pagu tertinggi yakni Rp122,13 miliar dan mampu terealisasi 99,99%. Alokasi tersebut ditargetkan untuk untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1.011 km. Rincian *sub-ouput (*RO) ini dikelola oleh lima satuan kerja yakni Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalbar (693903), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar (693902), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar (693904), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (693762), Serta Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk – Temajok (693791).

Tabel 4.14 Satuan Kerja Pengelola Rincian Sub-Ouput Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

Kode Satker	Satuan	Pagu	Relisasi	%Real	Vol RO	Realisasi RO	% Capaian RO
		miliar rupiah					
693903	Km	59,95	59,95	100,00%	387,04	387,04	100,00%
693902	Km	31,88	31,88	100,00%	301,64	259,27	85,95%
693904	Km	21,21	21,21	100,00%	215,97	215,96	100,00%
693762	Km	5,88	5,88	100,00%	80,30	60,72	75,62%
693791	Km	3,22	3,20	99,49%	26,03	26,03	100,00%

Sumber: SINTESA (diolah)

Realisasi volume pada rincian *sub-output* Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan tercatat sebesar 949 km atau 93,87% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kegiatan telah terlaksana, meskipun masih terdapat deviasi terbatas dari target awal. Secara parsial, realisasi yang belum mencapai 100% terjadi pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat (693902) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (693762). Kondisi ini dipengaruhi oleh pemblokiran anggaran pada *output* OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), sehingga terjadi penyesuaian terhadap target volume *output* menjadi 259 km untuk Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat

dan 61 km untuk Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara kapasitas anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) yang mendukung DAK Fisik di bidang Jalan tertinggi selanjutnya terdapat pada rincian *sub-output* Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dengan pagu Rp49,58 miliar dan mampu terealisasi 100%. Rincian *sub-output* tersebut ditargetkan untuk 49,58 km preservasi rekontruksi dan rehabilitasi jalan. Terdapat empat satuan kerja yang mengelola rincian *sub-output* Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan yakni Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar (693902), Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk – Temajok (693791), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar (693904), Serta Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalbar (693903).

Tabel 4.15 Satuan Kerja Pengelola Rincian Sub-Ouput Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

Kode Satker	Satuan	Pagu (miliar rupiah)	Relisasi (miliar rupiah)	%Real	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
693902	Km	22,19	22,19	100%	16,87	4,70	27,86%
693791	Km	18,83	18,83	100%	1,00	0,14	14,00%
693904	Km	5,54	5,54	100%	4,07	0,07	1,72%
693903	Km	3,02	3,02	100%	15,52	15,52	100,00%

Sumber: SINTESA (diolah)

Realisasi volume pada rincian sub-*output* Preservasi Rekonstruksi/Rehabilitasi Jalan mencapai 20 km atau 54,54% dari target. Secara umum, capaian volume pada satuan kerja penerima alokasi belum optimal, kecuali pada Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalbar (693903).

Kondisi ini sejalan dengan yang terjadi pada rincian sub-*output* Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan. Ketidakoptimalan capaian volume dipengaruhi oleh pemblokiran anggaran pada OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), khususnya pada akun 523131 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan), sehingga dilakukan penyesuaian target volume. Target direvisi menjadi 5 km untuk Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar, 0,14 km untuk Paralel Perbatasan Nanga Badau–Entikong–Aruk–Temajok, dan 0,07 km untuk Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar.

Belanja K/L (RO Harmonis) yang mendukung DAK Fisik di bidang Jalan tertinggi ketiga terletak pada rincian *sub-output* Presevasi Jembatan dengan alokasi pagu Rp45,85 miliar dan mampu terealisasi 99,82% atau Rp45,76 miliar. Rincian sub-*output* Preservasi Jembatan dikelola oleh 5 satuan kerja yakni Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar (693904), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalbar (693903), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar (693902), Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk – Temajok (693791), Serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (693762).

Tabel 4.16 Satuan Kerja Pengelola Rincian Sub-Ouput Presevasi Jembatan

Kode Satker	Satuan	Pagu (miliar rupiah)	Relisasi (miliar rupiah)	%Real	Vol RO	Realisasi RO	% Capaian RO
693904	m	17,54	17,54	100,00%	1653,9	1653,9	100,00%
693903	m	13,65	13,65	99,98%	2641,25	2641,25	100,00%
693902	m	10,28	10,28	100,00%	5605,4	1803,2	32,17%
693791	m	3,95	3,87	97,94%	338,06	278,06	82,25%
693762	m	0,43	0,43	100,00%	95,2	84,9	89,18%

Sumber: SINTESA (diolah)

Rincian sub-*output* Preservasi Jembatan ditargetkan akan mencapai 10.334 meter namun hanya mampu terealisasi 6.461 meter atau 62,53%. Terdapat tiga satuan kerja yang capaian realisasi rincian *sub-outputnya* tidak mencapai 100% yakni Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar (32,17%), Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk – Temajok (82,25%), dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (89,18%). T

Tidak optimalnya capaian volume *sub-output* Preservasi Jembatan pada tiga satuan kerja tersebut dipengaruhi oleh blokir anggaran pada *output* OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) terkhususnya pada akun 534141 (Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan) dan 523131 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) sehingga juga terdapat penyesuaian targetnya. Taget volume rincian *sub-output* disesuaikan menjadi 1.802 m Untuk Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar, 278 m untuk Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong – Aruk yang – Temajok, Dan 85 m untuk Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

d. Bidang Air Minum

Dukungan Belanja K/L (RO Harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Air Minum mencakup tiga rincian *sub-output*. Dua di antaranya, yaitu Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat serta Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM, berada pada kegiatan Penyelenggaraan Air Minum yang Aman. Sementara itu, satu *sub-output* lainnya, yakni Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, terdapat pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana.

Fokus utama Belanja K/L (RO Harmonis) pada bidang Air Minum terletak pada rincian *sub-output* Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat yang memperoleh alokasi pagu terbesar, yakni Rp13,88 miliar. Rincian *sub-output* ini dikelola oleh satu satuan kerja, yaitu Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat (693975). Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran pada rincian *sub-output* tersebut mencapai Rp13,81 miliar atau 99,47% dari pagu yang ditetapkan. Dari sisi kinerja fisik, capaian volume terealisasi secara optimal, yakni sebesar 2.000 SR atau 100% dari target yang telah ditentukan.

Pagu tertinggi berikutnya terdapat pada rincian *sub-output* Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM yakni Rp0,82 miliar yang hanya dikelola oleh satuan kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (694013). Realisasi belanja pada rincian *sub-ouput* tersebut mencapai 99,99% dari pagu yang telah ditetapkan dengan capaian volume rincian *sub-output* mencapai 100% atau telah menyasar ke 14 daerah di Kalimantan Barat.

Dukungan Belanja K/L (RO Harmonis) terhadap DAK Fisik bidang Air Minum juga terdapat pada rincian *sub-output* Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku dengan alokasi pagu sebesar Rp0,12 miliar. Rincian *sub-output* ini dikelola oleh satu satuan kerja, yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I (694133). Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja mencapai 96,80% dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, capaian volume rincian *sub-output* terealisasi secara optimal, yakni sebesar 100% dari target yang direncanakan.

e. Bidang Ketahanan Pangan

Pada tahun 2025, Belanja K/L (RO Harmonis) yang mendukung DAK Fisik bidang Ketahanan Pangan tersebar dalam enam jenis rincian *sub-output*. Dengan alokasi pagu tertinggi terdistribusi pada rincian *sub-output* Kawasan Kelapa yakni Rp2,51 miliar yang terdapat pada kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Rincian *sub-output* tersebut sampai dengan akhir tahun 2025 mampu terealisasi 98,82% dengan capaian volume rincian sub-*output* yang optimal yakni 100% atau telah mencapai 500 hektar. Rincian *sub-output* Kawasan Kelapa ini dikelola oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (567521).

Rincian *sub-output* selanjutnya yang memperoleh alokasi pagu tertinggi adalah Perangkat Perlindungan Perkebunan yakni sebesar Rp0,47 miliar. Rincian *sub-output* tersebut berada dalam kegiatan Perlindungan Perkebunan. Dari segi realisasi, rincian *sub-output* Perangkat Perlindungan Perkebunan mampu menyerap belanja Rp0,45 miliar atau 95,32%. Adapun capaian volume terealisasi secara optimal, yakni 100% atau sebanyak 7 perangkat perlindungan perkebunan sesuai target yang direncanakan. Rincian *sub-output* Perangkat Perlindungan Perkebunan dikelola oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (567521).

Alokasi pagu tertinggi ketiga pada Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Ketahanan Pangan terdapat pada rincian *sub-output* Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW) yakni Rp0,27 miliar. Rincian *sub-output* ini dikelola oleh satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139134) dengan kewenangan Tugas Perbantuan. Dari segi realisasi, rincian *sub -output* Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW) mampu menyerap belanja Rp0,25 miliar atau 95,88%. Adapun pelaksanaan pengadaan alat dan mesin pertanian telah diselesaikan seluruhnya dengan capaian fisik mencapai 100%.

f. Bidang Sanitasi

Dukungan Belanja K/L (RO Harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Sanitasi memperoleh alokasi tertinggi ketiga setelah bidang

Jalan dan Irigasi. Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) dibidang Sanitasi tersebar pada tiga jenis rincian *sub-output* yakni Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal, serta Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi. Ketiga *sub-output* tersebut berada pada kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu.

Rincian sub-*output* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu menjadi fokus utama Belanja K/L (RO Harmonis) pada bidang Sanitasi karena memperoleh alokasi pagu yang sangat dominan, yakni sebesar Rp33,57 miliar atau 93,12% dari total pagu Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Sanitasi. Rincian *sub-output* ini dikelola oleh satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat (694044).

Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi belanja pada rincian *sub-output* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu mencapai 92,73% dari pagu yang dialokasikan atau sebesar Rp31,13 miliar. Secara persentase, capaian penyerapan anggaran tersebut belum maksimal. Namun demikian, dari sisi kinerja fisik, target volume telah terealisasi secara optimal, yakni 100% atau sebanyak 1.750 KK sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sejalan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu, realisasi pada rincian *sub-output* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal hanya mencapai 96,23% dari pagu Rp1,75 miliar, yang mana secara persentase penyerapan belanja tersebut dapat dikatakan belum optimal. Namun demikian, dari sisi kinerja fisik, target volume telah terealisasi secara optimal, yakni 100% atau sebanyak 36 KK sesuai dengan target yang ditetapkan. Rincian *sub-output* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal juga dikelola oleh Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat (694044).

Rincian *sub-output* yang memperoleh pagu terendah pada Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Sanitasi adalah Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi yakni Rp0,73 miliar dan mampu terealisasi 99,97% sampai dengan akhir tahun 2025. Dari segi realisasi volume rincian *sub-output* juga tergolong sangat optimal yakni mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rincian *sub-output* Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (694013) untuk 14 daerah.

g. Bidang Irigasi

Dukungan Belanja K/L (RO Harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik terbesar kedua setelah bidang Jalan terdapat pada bidang Irigasi. Belanja K/L (RO harmonis) yang bersinergi dengan DAK Fisik memang difokuskan pada penyelenggaraan infrastruktur termasuk sumber daya air yang berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian daerah.

Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Irigasi tersebar lima rincian *sub-output*. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Daerah Irigasi menjadi rincian *sub-output* yang memperoleh alokasi anggaran dominan yakni 73,25% dari total pagu Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Irigasi. Rincian *sub-output* tersebut berada pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dan dikelola oleh dua satuan kerja yakni Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I (694133) serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (694091).

Ditinjau dari sisi penyerapan anggaran, rincian *sub-output* Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Daerah Irigasi mampu merealisasikan belanja sebesar 99,69% dari pagu yang telah dialokasikan. Tingginya tingkat penyerapan tersebut selaras dengan capaian kinerja fisik yang juga optimal, yakni mencapai 100%. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi sepanjang 1.908 km.

Alokasi pagu Belanja K/L (RO) Harmonis dibidang Irigasi tertinggi selanjutnya berada pada rincian *sub-output* Rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal yakni Rp17,76 miliar. Rincian *sub-output* ini berada pada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi dan dikelola oleh satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat (694222).

Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi belanja pada pada rincian *sub-output* Rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal mencapai 99,95% dari pagu yang telah ditetapkan atau senilai Rp17,75 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merehabilitasi dan meningkatkan prasarana irigasi sepanjang 78 km sesuai target. Dengan demikian, capaian volume kegiatan terealisasi secara optimal, yakni 100% dari target yang direncanakan.

Pagu rincian *sub-output* tertinggi ketiga di Belanja K/L (RO Harmonis) terdapat pada Pemeliharaan Danau. Rincian *sub-output* tersebut memperoleh pagu Rp5,89 miliar dan termasuk dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana. Alokasi ini dikelola oleh satuan kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I (694133).

Dari sisi realisasi, belanja pada rincian *sub-output* Pemeliharaan Danau mencapai 99,62% dari pagu yang ditetapkan atau setara Rp5,87 miliar. Kinerja fisiknya juga terealisasi secara optimal dengan capaian volume sebesar 100% sesuai target yang direncanakan.

h. Bidang Perumahan

Pada tahun 2025, Belanja K/L (RO Harmonis) yang mendukung DAK Fisik bidang Perumahan tersebar dalam tiga jenis rincian *sub-output*. Rincian *sub-output* yang memperoleh pagu tertinggi dalam Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Perumahan adalah Pengembangan Kawasan Permukiman yakni Rp1,67 miliar. Alokasi tersebut terdapat pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis dan dikelola oleh satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat (694044).

Realisasi belanja pada rincian *sub-output* Pengembangan Kawasan Permukiman hanya mencapai 85,52%. Meskipun tingkat penyerapan anggaran belum maksimal, capaian volume kegiatan tetap terealisasi secara optimal, yakni 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rincian *sub-output* selanjutnya pada Belanja K/L (RO Harmonis) bidang Perumahan adalah Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman. Rincian *sub-output* tersebut memperoleh alokasi Rp0,44 miliar dan termasuk dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya. Satuan kerja yang mengelola rincian *sub-output* Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman adalah Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat (693975). Sampai dengan akhir tahun 2025, rincian *sub-output* ini merealisasikan belanja sebesar 98,30% dari pagu yang ditetapkan. Kinerja fisiknya juga tercapai secara optimal, dengan capaian volume sebesar 100% sesuai target yang direncanakan.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman merupakan rincian *sub-output* pada Belanja K/L (RO Harmonis) di bidang Perumahan yang memperoleh alokasi pagu terkecil yakni Rp0,37 miliar. Rincian *sub-output* ini berada pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis dan dikelola oleh satuan kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (694013).

Capaian penyerapan belanja sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 99,99% dari pagu yang ditetapkan. Sejalan dengan kedua rincian *sub-output* sebelumnya, capaian volume rincian *sub-output* Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman terealisasi 100% (optimal).

4.3. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L

Meskipun penyerapan Belanja K/L (RO Harmonis) di Kalimantan Barat tergolong sangat optimal dengan realisasi anggaran secara kumulatif mencapai 99,07% dari pagu serta capaian volume rincian *sub-output* yang terealisasi secara maksimal, pelaksanaan harmonisasi dan dukungan Belanja K/L terhadap DAK Fisik masih menghadapi sejumlah isu, tantangan, dan kendala. Berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi SINTESA dan pelaksanaan

survei kepada satuan kerja yang memperoleh alokasi Belanja K/L (RO Harmonis), isu, tantangan dan kendala yang dihadapi meliputi:

4.3.1. Penganggaran

a. Revisi Anggaran
   - Terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan revisi pagu perjalanan dinas, sementara kegiatan pemeliharaan tetap dituntut untuk mencapai target *output* fisik sebagaimana telah direncanakan. Perjalanan dinas dilaksanakan guna mendukung pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan guna memastikan tercapainya target fisik tersebut.
   - Pada tahun anggaran berjalan, waktu atau periode pembukaan blokir anggaran belum dapat dipastikan. Ketidakpastian ini menyulitkan satuan kerja dalam menyusun perencanaan, melakukan penyesuaian kegiatan maupun revisi secara optimal dan tepat waktu.

b. Halaman III DIPA
   - Deviasi antara Halaman III DIPA dan realisasi anggaran terjadi karena penyedia jasa belum tepat waktu dalam menyampaikan pertanggungjawaban realisasi keuangan atas pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan.

c. Blokir Anggaran
   - Sejumlah anggaran kegiatan terdampak kebijakan efisiensi belanja sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal.
   - Terjadi pemblokiran anggaran pada rincian tertentu, sementara alokasi tersebut sedianya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan kegiatan selama satu tahun anggaran. Kondisi ini mengharuskan dilakukannya revisi melalui mekanisme pergeseran anggaran agar pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan operasionalnya.

d. Blokir Anggaran
   - Rincian *sub-output* Jalan Strategis (ProPN) yang bersumber dari dana SBSN menghadapi kendala karena pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan akibat masih menunggu persetujuan izin MYC. Sebagai tindak lanjut, satuan kerja secara intensif melakukan koordinasi dengan unit Eselon I guna mempercepat proses persetujuan dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

4.3.2. Sumber Daya Manusia

a. Terjadi keterbatasan jumlah pejabat perbendaharaan yang tersedia, sehingga menimbulkan kondisi rangkap jabatan, di mana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
b. Terjadi pergantian pejabat perbendaharaan yang berdampak pada belum optimalnya penguasaan dan kapabilitas dalam penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan.

4.3.3. Eksekusi Kegiatan

a. Faktor Luar
   - Kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi mengakibatkan kurang optimalnya pekerjaan fisik sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan realisasi anggaran.

b. Kesiapan Pedum (Pedoman umum), Petunjuk Teknis (Juknis), Dokumen Pelaksanaan Lain
   - Lambatnya proses penetapan penerima bantuan serta belum optimalnya kesiapan Pedum, Juknis, dan dokumen pelaksanaan lainnya menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini berdampak pada tertundanya tahapan implementasi serta berpotensi memengaruhi ketepatan waktu realisasi anggaran
   - Perubahan atau revisi Pedum dan Juknis yang terjadi pada saat tahun anggaran berjalan turut menjadi tantangan bagi satuan kerja. Hal ini karena satuan kerja perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kondisi tersebut turut andil dalam menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan sekaligus memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

c. Kekurangan Prasyarat
   - Proses penentuan calon petani dan lokasi kegiatan memerlukan waktu dan tindaklanjut kegiatan oleh satuan kerja dapat dilaksanakan setelah hal tersebut ditetapkan.

d. Kenaikan Harga Bahan
   - Terdapat kenaikan harga bahan sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam hal eksekusi kegiatan.

4.3.4. Pengadaan Barang dan Jasa

a. Proses Lelang
   - Kegiatan lelang mengalami keterlambatan dari rencana awal, yang berdampak pada mundurnya jadwal penandatanganan kontrak dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.
   - Belum semua jenis pekerjaan diakomodir dalam aplikasi harga perkiraan yang diluncurkan oleh K/L terkait.

b. TKDN
   - Pengadaan barang yang telah memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus inden, sehingga memerlukan waktu tunggu dalam proses penyediaannya. Kondisi ini menyebabkan adanya jeda waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak dapat direalisasikan secara segera.

c. *E-Catalog*
   - Terdapat perbedaan harga pada *e-catalog* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran untuk produk sejenis.
   - Masih terdapat item mobilisasi *pada e-catalog* yang belum tersedia secara lengkap. Selain itu, terdapat kendala pada sisi penyedia, khususnya dalam proses penawaran, yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan.

4.3.5. Regulasi Pelaksanaan Anggaran

a. Regulasi K/L
   - Regulasi yang ditetapkan oleh K/L pusat turut memengaruhi kelancaran proses realisasi anggaran. Beberapa ketentuan pelaksanaan yang bersifat spesifik menimbulkan keterbatasan dalam implementasinya di lapangan, terutama pada wilayah dengan kondisi geografis dan ketersediaan fasilitas yang terbatas, sehingga berdampak pada tertundanya realisasi kegiatan.

b. Regulasi Kementerian Keuangan
   - Perubahan regulasi Kementerian Keuangan baik melalui PMK maupun Perdirjen yang terjadi di tengah tahun anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja dalam merealisasikan kegiatan. Satuan kerja dituntut untuk melakukan penyesuaian secara cepat terhadap ketentuan baru, sehingga memerlukan adaptasi administratif dan teknis dalam waktu yang relatif terbatas.

4.3.6. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik Pada 10 Bidang

Penyaluran DAK Fisik pada 10 Bidang yang diharmonisasikan dengan Belanja K/L hingga akhir tahun 2025 mampu tersalurkan 95,45% dari alokasi pagu akhir yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan penyaluran DAK Fisik tahun 2025 tentunya pihak-pihak terkait menghadapi isu, tantangan dan kendala. Kondisi tersebut berdampak gagal salurnya beberapa bidang/subbidang DAK Fisik di Kalimantan Barat, meliputi:

a. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kubu Raya tidak memperoleh pagu RK karena anggaran tidak sesuai dengan peruntukan dana DAK Fisiknya sehingga tidak terdapat penyaluran.
b. Bidang Pendidikan subbidang Perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya terjadi gagal salur karena gagal lelang.
c. Bidang Air Minum di Kabupaten Kapuas Hulu terjadi gagal salur yang disebabkan karena sumber air untuk pembangunan SPAM tercemar limbah sawit dan tidak diperoleh penggantinya sehingga diputuskan untuk tidak dilakukan pembangunan.
d. Bidang Kesehatan sub bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kayong Utara terjadi gagal salur karena keterlambatan sertifikasi PPK dan proses sanggah banding lelang melewati batas waktu.

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK Fisik di Kalimantan Barat dikelompokkan menggunakan metode *Affinity Diagram* untuk mengidentifikasi dan

Gambar 4.1 Affinity Diagram Kendala dan Tantangan DAK Fisik

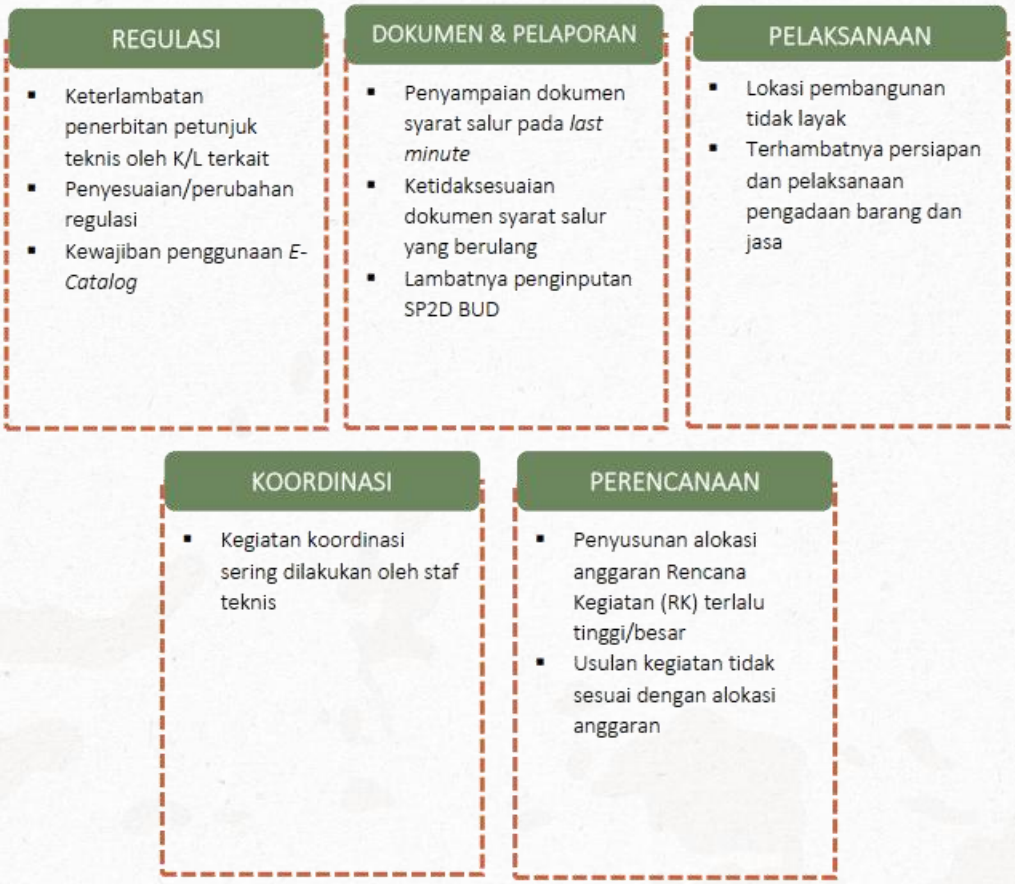

Sumber: Laporan TKD Lingkup Kalimantan Barat (diolah)

mengklasifikasikan isu-isu yang muncul secara sistematis.

a. Tantangan Terkait Regulasi

Pada pelaksanaan DAK Fisik di Kalimantan Barat menghadapi tantangan dan kendala yang dikategorikan dalam hal regulasi, yakni:

- Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dari kementerian/lembaga terkait yang menyebabkan penundaan perencanaan dan pengadaan di pemerintah daerah.
- Perubahan regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terjadi berdampak pada penundaan proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sehingga penyaluran DAK Fisik seringkali mendekati batas akhir/*last minute*.
- Kontrak DAK Fisik dibeberapa pemda diwajibkan menggunakan *e-catalog,* namun *e-catalog* belum mengakomodir pembayaran secara bertahap/termin sehingga dilunasi dalam sekali pembayaran namun menggunakan sumber daya lain (DAU dan APBD).

b. Tantangan Terkait Dokumen dan Pelaporan

Tantangan pelaksanaan DAK Fisik selanjutnya berada pada kategori pemenuhan administrasi dokumen dan pelaporan, yakni:

- Terdapat pola kebiasaan pemerintah daerah yang mengajukan dokumen syarat penyaluran mendekati batas waktu (*last minute*), sehingga tidak tersedia waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan pada dokumen.
- Proses perbaikan dokumen persyaratan yang belum lengkap memerlukan waktu lebih lama, sehingga berdampak pada keterlambatan/gagalnya penyaluran DAK Fisik.
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lambat dalam melakukan penginputan data SP2D BUD dan capaian *output* sehingga berpengaruh pada laporan capaian realisasi dan *ouput* sebagai salah satu syarat salur

c. Tantangan Tekait Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan DAK Fisik di Kalimantan Barat menghadapi tantangan dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan/eksekusi kegiatan yang meliputi:

- Tidak tersedianya lokasi pengganti untuk pembangunan infrastruktur setelah lokasi awal dinyatakan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Terhambatnya persiapan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun dikarenakan menunggu penetapan APBD-Penyesuaian/Perubahan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

d. Tantangan Terkait Koordinasi

Tantangan dan kendala selanjutnya terkait pelaksanaan DAK Fisik berada pada kategori koordinasi, yakni:

- Koordinasi dalam proses penyaluran sering kali dilakukan melalui staf teknis (operator) yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung.

e. Tantangan Terkait Perencanaan

Pelaksanaan DAK Fisik di Kalimantan Barat juga menghadapi tantangan dan kendala yang dikategorikan dalam perencanaan, yakni:

- Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) yang terlalu besar, sementara nilai kontrak yang terealisasi jauh di bawah RK, menyebabkan adanya sisa anggaran yang tidak dapat disalurkan sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dioptimalkan.
- Usulan kegiatan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan peruntukkan DAK Fisiknya sehingga ditolak oleh Kementerian/Lembaga terkait.

4.4. Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Sebagai salah satu langkah untuk memotret upaya sinkronisasi Belanja K/L (RO Harmonis) dengan DAK Fisik di daerah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan penyebaran kuesioner kepada 15 pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Barat. Kuesioner tersebut ditujukan kepada Biro/Bagian Administrasi Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana DAK Fisik. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh para responden, diperoleh beberapa kesimpulan terkait upaya yang telah dilaksanakan pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat dalam mengharmonisasikan Belanja K/L (RO Harmonis) dan DAK Fisik:

- Pemerintah daerah melaksanakan inventarisasi kegiatan agar tidak tumpang tindih.
- Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga melalui forum pertemuan maupun komunikasi secara virtual terkait alokasi anggaran DAK Fisik dan Belanja K/L, termasuk dalam rangka penyelarasan kegiatan. Namun demikian, koordinasi tersebut masih bersifat tentatif dan belum terjadwal secara berkala.
- Koordinasi yang dilakukan secara rutin antara pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga pada umumnya masih berfokus pada aspek teknis pelaksanaan dan penyaluran DAK Fisik. Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh OPD terkait dengan Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang DAK Fisik masing-masing.

Di samping itu, untuk memperoleh gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga terkhususnya satuan kerja penerima alokasi RO Harmonis di Kalimantan Barat, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan penyebaran kuisioner kepada *stakeholder* tersebut. Adapun kesimpulan atas hasil pengisian kuisoner oleh responden terkait upaya harmonisasi Belanja K/L (RO Harmonis) dan DAK Fisik, yakni:

- Satuan kerja melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait usulan lokasi, pagu anggaran, serta penentuan penerima bantuan. Namun kegiatan dimaksud dilaksanakan pada saat verifikasi anggaran dan jika terdapat kendala pada proses realisasinya.
- Satuan kerja melaksanakan koordinasi langsung dengan kantor pusat masing-masing guna membahas sinkronisasi alokasi anggaran dan belanja Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut di beberapa satuan kerja telah dilaksanakan secara periodik.

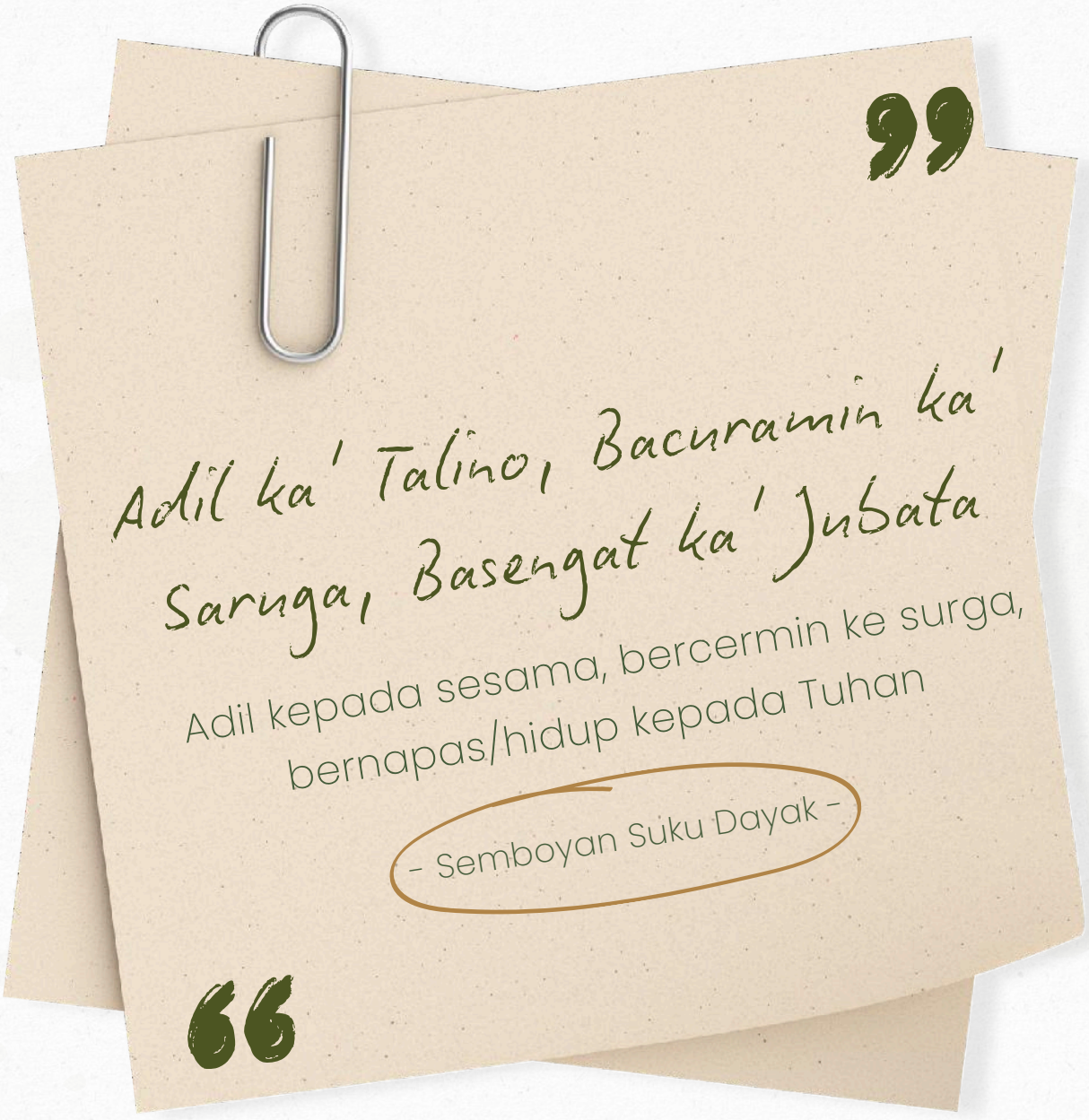
Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata
Adil kepada sesama, bercermin ke surga, bernapas/hidup kepada Tuhan
- Semboyan Suku Dayak -

BAB V

ANALISIS TEMATIK

BAB V
Analisis Tematik

5.1. Program Penyaluran MBG

"Dalam perjalanan membangun generasi masa depan yang sehat, unggul, dan berdaya saing, Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap anak mendapat asupan gizi seimbang sebagai tonggak penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas sejak dini."

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu Program Strategis Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program MBG ini terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 pada Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Dalam rangka pencapaian sasaran PN 4 tersebut, dilakukan serangkaian intervensi dan perumusan program-program yang menjadi penekanan salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, dengan kelompok sasaran terdiri dari peserta didik di sekolah dan pesantren, serta non peserta didik mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program MBG merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi seimbang, dan diharapkan mampu memperbaiki asupan energi dan zat gizi penting, ketahanan fisik, meningkatkan preferensi makanan lokal/daerah yang bergizi, serta memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat anak Indonesia.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp60,28 triliun atau setara dengan 81,6% dari total pagu APBN MBG sebesar Rp73,84 triliun dengan jumlah penerima 55,1 juta orang, atau setara 88% dari total target 62,5 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025, yang akan dilayani melalui sekitar 19.188 SPPG. Realisasi program MBG di Kalimantan Barat hingga Desember 2025 baru mencapai 858.998 penerima manfaat atau sekitar 70% dari target 1.250.037 penerima manfaat yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga masih perlu diakselerasi untuk dapat menjangkau jumlah penerima manfaat yang telah ditargetkan.

Makan bergizi gratis akan diberikan dalam bentuk 1) makanan lengkap siap saji untuk anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dan santri; 2) makanan lengkap siap saji untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan status gizi normal; serta 3) makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, balita gizi kurang, balita dengan berat badan kurang, dan balita tidak mengalami peningkatan berat badan.

5.1.1. Perkembangan Ketersediaan pangan

Program MBG di Kalimantan Barat resmi dimulai pada tanggal 20 Januari 2025, dan pertama kali dilaksanakan serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak. Adapun target penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebanyak 1.250.037 penerima manfaat yang dilayani 586 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Sampai dengan bulan Desember 2025, program MBG di Kalimantan Barat berkembang semakin luas. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah SPPG, yang secara akumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 219 SPPG menjadi 396 SPPG secara akumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Secara total, terdapat penambahan 177 SPPG yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pelaksanaan MBG terbanyak berdasarkan jumlah penerima manfaat adalah Kota Pontianak dengan total SPPG sebanyak 66 SPPG dan 164.041 penerima manfaat MBG. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah melakukan implementasi MBG dengan jumlah penerima

manfaat paling sedikit adalah Kabupaten Sekadau dengan 6 mitra SPPG dan 11.348 penerima manfaat MBG. Secara total, pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Desember 2025 telah mencapai sasaran ke 858.998 penerima manfaat MBG.

Tabel 5.1 Data Sebaran Pelaksanaan MBG per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (s.d. Desember 2025)

Kabupaten/Kota Pelaksanaan MBG	Jumlah SPPG	Jumlah Penerima Manfaat
Kab. Kubu Raya	67	161.251
Kota Pontianak	66	164.041
Kab. Ketapang	47	85.153
Kab. Sambas	44	86.113
Kab. Landak	30	67.638
Kab. Mempawah	27	56.869
Kota Singkawang	24	54.163
Kab. Sanggau	23	47.831
Kab. Melawi	16	24.012
Kab. Bengkayang	16	34.108
Kab. Kayong Utara	14	30.399
Kab. Kapuas Hulu	9	20.030
Kab. Sintang	7	16.042
Kab. Sekadau	6	11.348
Total	**396**	**858.998**

Sumber: Koordinator SPPG Prov. Kalbar (diolah)

Secara keseluruhan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 pada Regional Kalimantan terdapat 396 SPPG yang telah menyalurkan MBG kepada 858.998 penerima manfaat. Penyerapan pada masing-masing provinsi di Kalimantan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Program MBG di Regional Kalimantan (s.d. Desember 2025)

No	Prov	Sppg	Penerima
1	**Kalbar**	**396**	**858.998**
2	Kalsel	208	567.758
3	Kalteng	67	186.711
4	Kaltim	145	316.752
5	Kaltara	46	65.041
Jumlah		**862**	**1.995.260**

Sumber: Sintesa dan Koordinator SPPG Prov. Kalbar (diolah)

Berdasarkan data pada tabel diatas, Kalimantan Barat merupakan Provinsi di Regional Kalimantan dengan realisasi Program MBG terbesar dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Kalimantan, dengan jumlah penerima manfaat sampai dengan Desember Tahun 2025 sebanyak 858.998 penerima manfaat dengan 396 SPPG. Dari jumlah penerima di Regional Kalimantan, maka sebanyak 43,05% penerima manfaat terdapat di Kalimantan Barat. Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Provinsi Kalimantan Barat menjadi Provinsi dengan implementasi MBG terbanyak di Regional Pulau Kalimantan, diantaranya:

a. Geografis, Jumlah dan Usia Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Secara geografis Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas kedua setelah Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah yang mencapai 147.037 km² atau sekitar 1,13 kali luas Pulau Jawa, hal ini pun yang menjadikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas kedua di Indonesia. Selanjutnya, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan yang mencapai 5,7 juta jiwa pada Tahun 2025. Dari wilayah dengan jumlah penduduk yang besar, maka kelompok penerima manfaat MBG juga lebih banyak terdapat di Kalimantan Barat, dimana sasaran kelompok penerima manfaat MBG yang terdiri dari anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Tabel 5.3 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tahun 2024 dan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tahun 2025

Provinsi	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Ribu)
Kalimantan Barat	**147.037,04**	**5.766,0**
Kalimantan Tengah	153.443,91	2.845,0
Kalimantan Selatan	37.135,05	4.323,3
Kalimantan Timur	126.981,28	4.267,6
Kalimantan Utara	70.101,18	749,4

Sumber: BPS (diolah)

Selanjutnya jika dilihat dari segi usia penduduk, dengan pengelompokan usia Balita (0 s.d 4 tahun), usia sekolah (5-19 tahun), usia kuliah (20 s.d 29 tahun), usia produktif (30 s.d 59 tahun), usia lansia (di atas 60 tahun), maka dapat terlihat bahwa usia Balita, Sekolah, dan Lansia di Kalimantan Barat lebih

banyak dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Regional Kalimantan Tahun 2025

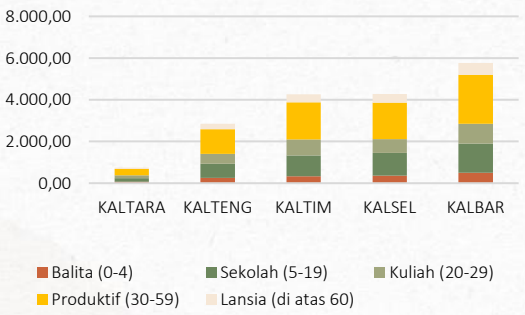

Sumber: BPS (diolah)

Oleh karena itu, faktor geografis yang luas dan jumlah penduduk dengan usia balita, usia sekolah dan usia lansia yang lebih banyak dibandingkan Provinsi lain di Regional Kalimantan, menjadi faktor pendorong implementasi Program MBG di Kalimantan Barat lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan.

b. Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data BPS, Regional Kalimantan Barat memiliki infrastruktur sekolah yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan provinsi lain di Regional Kalimantan. Jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Barat pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 6.600 sekolah, hampir 2 (dua) kali lipat dari jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta bahkan 8 (delapan) kali lipat dibandingkan Kalimantan Utara.

Tabel 5.4 Sebaran Jumlah Sekolah Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2025/2026

Provinsi	Jumlah Sekolah				Total Sekolah
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kalimantan Barat	4.470	1.404	492	234	6.600
Kalimantan Tengah	2.667	892	253	142	3.954
Kalimantan Selatan	2.936	649	216	128	3.929
Kalimantan Timur	1.966	735	247	217	3.165
Kalimantan Utara	496	204	75	35	810

Sumber: Kemdikdasmen (diolah)

Banyaknya infrastruktur sekolah di Kalimantan Barat menjadi faktor pendorong dalam implementasi program MBG, mengingat target penerima manfaat untuk MBG saat ini masih didominasi dari kalangan para pelajar yang menduduki kelas SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tabel 5.5 Sebaran Jumlah Siswa Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2025/2026 (dalam ribuan)

Provinsi	Jumlah Siswa				Total Siswa
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kalimantan Barat	552	236	136	75	999
Kalimantan Tengah	277	109	64	33	483
Kalimantan Selatan	349	117	71	60	597
Kalimantan Timur	425	170	86	85	767
Kalimantan Utara	81	34	20	10	145
Jumlah	1683	666	378	263	2990

Sumber: Kemdikdasmen (diolah)

Sebagaimana tabel di atas, dapat terlihat bahwa jumlah sekolah di masing-masing regional Kalimantan ini, berbanding lurus dengan jumlah siswa yang ada. Dengan banyaknya jumlah sekolah, jumlah siswa di Kalimantan Barat juga semakin besar. Kondisi ini turut melengkapi faktor pendorong tingginya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat dibandingkan dengan wilayah lain di Regional Kalimantan.

5.1.2. Dampak Implementasi Program MBG

Untuk mengetahui dampak program MBG yang telah dijalankan selama satu tahun pada tahun 2025, maka dilakukan analisis pelaksanaan program MBG terhadap perubahan tingkat harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat, pada NTP dan NTN di Kalimantan Barat, serta pada tingkat inflasi di Kalimantan Barat. Analisa dilakukan dengan menggunakan Uji Friedman. Uji Friedman merupakan statistika non parametrik yang tidak membutuhkan asumsi data berdistribusi normal dan juga varians populasi tidak diketahui (Wiliyanti, et al., 2025). Menurut Wiliyanti et al. (2025), uji ini menjadi salah satu alternatif dari metode *repeated measures* ANOVA apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi dalam desain *repeated measures*.

Uji Friedman akan digunakan untuk menganalisis perbedaan harga bahan pokok makanan di Kalimantan Barat, serta NTP dan NTN di Kalimantan Barat antara periode sebelum dan sesudah implementasi program MBG dengan membandingkan data pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 sebagai periode sebelum implementasi MBG dengan kelompok data pada Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebagai periode setelah implementasi MBG. Selanjutnya, perbedaan tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dianalisis menggunakan pendekatan yang sama dengan membandingkan data inflasi selama periode Januari hingga Desember 2025. Statistik uji yang digunakan pada uji Friedman mengikuti distribusi Chi-Square (X^2) dengan derajat bebas $k-1$. Berikut rumus perhitungan statistik uji Friedman (Muhid, 2019).

$$X^2 = \frac{12}{Nk(k+1)}\sum_{j=1}^{k}(R_j)^2 - 3N(k+1)$$

dengan N adalah jumlah unit pengamatan atau ukuran sampel; k adalah jumlah kelompok; dan R_j adalah jumlah ranking pada kelompok ke-j.

a. Dampak Program MBG terhadap Harga Bahan Pokok Makanan di Kalimantan Barat

Analisis ini menggunakan harga rata-rata dalam kategori yang terdapat pada harga bahan pokok makanan yang datanya bersumber dari Badan Pangan Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Harga Bahan Pokok Makanan di Kalimantan Barat

Harga Bahan Pokok Makanan	TW III 2024 (Sebelum MBG)	TW IV 2024 (Sebelum MBG)	TW I 2025 (Setelah MBG)	TW II 2025 (Setelah MBG)	TW III 2025 (Setelah MBG)	TW IV 2025 (Setelah MBG)
Bawang Merah	30.647	49.111	38.065	55.914	43.448	53.776
Bawang Putih (Bonggol)	38.437	44.222	40.000	40.407	35.000	37.765
Beras Medium	14.526	14.311	14.565	14.727	14.226	14.231
Beras Premium	17.111	17.018	17.130	17.343	17.420	17.283
Beras SPHP	12.983	13.000	13.051	13.025	12.970	12.884
Cabai Merah Keriting	58.874	67.000	81.538	58.977	67.875	84.583
Cabai Rawit Merah	67.263	80.714	104.204	63.540	58.918	88.833
Daging Ayam Ras	42.542	46.333	50.000	41.059	44.654	44.854
Daging Sapi Murni	155.976	147.500	160.000	155.323	155.781	155.000
Garam Konsumsi	13.247	12.296	12.857	12.703	12.260	12.245
Gula Konsumsi	17.937	17.389	18.483	18.479	17.969	17.947
Ikan Bandeng	34.176	34.125	28.000	34.463	35.455	34.985
Ikan Kembung	41.974	43.750	45.000	44.463	47.071	49.952
Ikan Tongkol	40.842	42.250	35.000	41.396	44.467	55.167
Jagung Tingkat Peternak	5.333	5.700	5.750	5.850	6.300	6.800
Kedelai Biji Kering	11.553	10.300	10.940	10.875	10.830	10.750
Minyak Goreng Curah	16.819	19.200	18.217	17.977	17.753	18.022
Minyak Goreng Kemasan	18.553	21.375	20.000	21.393	21.423	21.477
Telur Ayam Ras	29.326	32.600	33.014	32.607	31.551	35.321
Tepung Terigu Curah	11.353	10.125	10.840	10.980	10.771	10.810
Tepung Terigu Kemasan	13.747	14.222	13.672	13.759	13.609	13.681

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Sebelum dilakukan analisis menggunakan uji Friedman, akan dilakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan metode Shapiro Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50 (Dahlan, 2009). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 5%, dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu H_0 ditolak jika nilai *p-value* lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Hasil Uji Normalitas Harga Bahan Pokok Makanan

Periode	*Sig.*	Keputusan	Kesimpulan
TW III 2024	0,000	Tolak H_0	Tidak Normal
TW IV 2024	0,000	Tolak H_0	Tidak Normal
TW I 2025	0,000	Tolak H_0	Tidak Normal
TW II 2025	0,000	Tolak H_0	Tidak Normal
TW III 2025	0,000	Tolak H_0	Tidak Normal
TW IV 2025	0,000	Tolak H_0	Tidak Normal

Sumber: SPSS (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, analisis dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji Friedman. Kriteria pengambilan Keputusan adalah H_0 ditolak jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel dengan hipotesis berikut.

H_0: Tidak terdapat perbedaan signifikan pada harga bahan pokok makanan di Kalimantan Barat antara periode sebelum dan sesudah implementasi Program MBG.

H_1: Terdapat perbedaan signifikan pada harga bahan pokok makanan di Kalimantan Barat antara periode sebelum dan sesudah implementasi Program MBG.

Hasil analisis dampak program MBG terhadap harga bahan pokok makanan di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Hasil Uji Friedman Dampak MBG terhadap Harga Bahan Pokok Makanan

Keterangan	Nilai
Statistik Friedman (X^2)	9,1633
df	5
X^2 Tabel (α = 5%)	11,0705
Keputusan	Gagal Tolak H_0

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Hasil uji Friedman menggunakan Microsoft Excel menghasilkan keputusan gagal menolak H_0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada harga bahan pokok makanan di Kalimantan Barat antara periode sebelum dan sesudah implementasi Program MBG di Kalimantan Barat.

Meskipun hasil uji Friedman menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan harga bahan pokok makanan antara periode sebelum dan sesudah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga komoditas tetap mengalami fluktuasi sepanjang periode pengamatan. Pada akhir Triwulan III dan Triwulan IV 2024, dinamika harga dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang periode perayaan akhir tahun. Selanjutnya, pada Triwulan I hingga Triwulan II 2025, peningkatan permintaan musiman juga terjadi seiring dengan rangkaian hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idulfitri. Memasuki Triwulan III dan Triwulan IV 2025, aktivitas ekonomi relatif kembali stabil, namun fluktuasi harga tetap dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan distribusi komoditas di pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga lebih dipengaruhi oleh faktor musiman dan kondisi pasokan dibandingkan oleh implementasi kebijakan MBG.

b. Dampak Program MBG terhadap NTP dan NTN di Kalimantan Barat

Analisis kedua dilakukan dengan menggunakan data Nilai Tukar Petani (NTP) Per Subsektor dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)
- Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)
- Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR)
- Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)
- Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Perbandingan dilakukan antara periode sebelum implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diwakili oleh data Triwulan III Tahun 2024, dengan periode setelah implementasi, yang diwakili oleh data Triwulan IV Tahun 2025. Data kedua periode tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Nilai NTP Per Subsektor

Jenis NTP	TW III 2024 (Sebelum MBG)	TW IV 2024 (Sebelum MBG)	TW I 2025 (Setelah MBG)	TW II 2025 (Setelah MBG)	TW III 2025 (Setelah MBG)	TW IV 2025 (Setelah MBG)
NTPP (Tanaman Pangan)	94,09	98,27	97,10	97,06	103,07	103,94
NTPH (Hortikultura)	102,81	102,10	108,41	105,60	100,89	102,14
NTPR (Perkebunan Rakyat)	189,84	207,64	211,89	209,61	207,09	210,81
NTPT (Peternakan)	101,06	101,16	99,90	98,48	98,56	99,83
NTNP (Nelayan)	98,89	100,00	100,94	100,25	100,16	100,55

Sumber: BPS (diolah)

Dikarenakan jumlah sampel pada analisis NTP relatif kecil, yaitu sebanyak 5 sampel, maka uji asumsi normalitas tidak perlu dilakukan dan analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji Friedman (Le Boedec, 2016). Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah H_0 ditolak jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel dengan hipotesis berikut.

H_0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NTP per subsektor antara periode sebelum dan setelah implementasi program MBG.

H_1: Terdapat perbedaan yang signifikan pada NTP per subsektor antara periode sebelum dan setelah implementasi program MBG.

Hasil analisis dampak program MBG terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Per Subsektor di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Hasil Uji Friedman Dampak MBG terhadap Nilai NTP Per Subsektor

Keterangan	Nilai
Statistik Friedman (X^2)	7,4
df	5
X^2 Tabel (α = 5%)	11,0705
Keputusan	Gagal Tolak H_0

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Hasil uji Friedman menggunakan Microsoft Excel menghasilkan keputusan gagal menolak H_0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NTP per subsektor antara periode sebelum dan setelah implementasi program MBG di Kalimantan Barat.

Faktor program MBG tidak berdampak signifikan terhadap NTP di regional Kalimantan Barat dapat berupa bahan baku dari dalam wilayah Kalimantan Barat yang terbatas sehingga harus mengandalkan pasokan dari luar Kalimantan Barat, bahkan terdapat ketergantungan terhadap Pulau Jawa khususnya tanaman pangan. Hal ini dimungkinkan terjadi di Kalimantan Barat mengingat komoditas utama Kalimantan Barat adalah dari sektor perkebunan khususnya kelapa sawit.

c. Dampak Program MBG terhadap Tingkat Inflasi di Kalimantan Barat

Selanjutnya, analisis dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan menggunakan data inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode Januari s.d. Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Lima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Aug '25	Sep '25	Oct '25	Nov '25	Dec '25
Ketapang	1,27	0,59	0,06	0,32	-0,83	0,11	1,23	-0,62	0,16	0,16	0,16	0,16
Sintang	1,03	0,06	0,1	0,71	-0,94	0,3	0,84	-0,33	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
Kayong Utara	1,54	0,73	-0,34	0,15	-0,75	0,18	1,26	0,22	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Pontianak	1,03	0,32	0,33	-0,02	-1,54	0,59	1,3	-0,58	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Singkawang	1,59	0,76	0,14	-0,74	-0,88	0,66	0,64	-0,04	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

H_0: Tidak terdapat perbedaan tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau antar bulan pengamatan (Januari-Desember 2025) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

H_1: Terdapat perbedaan tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau antar bulan pengamatan (Januari-Desember 2025) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Dengan jumlah sampel sebanyak 5 sampel, maka uji asumsi normalitas tidak perlu dilakukan (Le Boedec, 2016). Analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji Friedman dengan kriteria pengambilan keputusan adalah H_0 ditolak jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel dengan hipotesis berikut.

Hasil analisis dampak program MBG terhadap inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Hasil Uji Friedman Dampak MBG terhadap Inflasi

Keterangan	Nilai
Statistik Friedman (X^2)	39,2923
df	11
X^2 Tabel (α = 5%)	19,6751
Keputusan	Tolak H_0

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Hasil uji Friedman menggunakan Microsoft Excel menghasilkan keputusan menolak H_0, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi MBG memberikan pengaruh terhadap tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau antar bulan pengamatan (Januari-Desember 2025) pada lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama satu tahun terakhir dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

5.1.3. Isu Pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Barat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting, penguatan ketahanan gizi keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dalam implementasinya di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

a. Target Jumlah SPPG Kalimantan Barat Belum Memenuhi Kebutuhan Ideal

Pada Desember 2025, realisasi jumlah penerima manfaat Program MBG di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 858.998 penerima, masih jauh di bawah proyeksi perencanaan Tahun 2025 yang mencapai 1.250.037 penerima manfaat. Kondisi ini sejalan dengan capaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia menu bergizi, yang baru mencapai 396 SPPG atau sekitar 67,58% dari target Tahun 2025 sebesar 586 SPPG.

Capaian jumlah SPPG yang masih di bawah target tidak terlepas dari belum terpenuhinya jumlah SPPG sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keterbatasan jumlah SPPG berdampak langsung pada terbatasnya jangkauan layanan, sehingga sebagian sasaran Program MBG belum secara optimal terlaksana ke seluruh sasaran. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan antara realisasi dan target yang ada, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa kapasitas layanan MBG saat ini belum selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

Berdasarkan tabel 5.13, total peserta didik di Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebanyak 2,07 juta siswa. Jika mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 yang menetapkan bahwa setiap lokasi SPPG melayani sebanyak 2.500 peserta didik, maka estimasi kebutuhan SPPG untuk menjangkau seluruh sasaran peserta didik sesuai ketentuan dimaksud adalah sebanyak 829 SPPG. Jumlah ini lebih besar 41,5% dari target SPPG yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Kalimantan Barat sebanyak 586 unit (Sintesa, 2025), atau dibutuhkan sekitar 141,47% SPPG dari target untuk memenuhi kebutuhan ideal daerah.

Hingga Desember, realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Barat telah mencapai 396 unit, setara dengan 57% dari kebutuhan ideal daerah dan sekitar 67,6% dari target pusat. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun progres pembentukan SPPG terus meningkat, masih terdapat kesenjangan yang perlu diakselerasi agar target nasional maupun kebutuhan riil daerah dapat terpenuhi secara optimal.

Secara kabupaten/kota, capaian realisasi SPPG menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kabupaten Kayong Utara mencatat capaian

Tabel 5.13 Kebutuhan dan Realisasi SPPG Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	RA 25/26	TK 25/26	KB 25/26	TPA 25/26	SPS 25/26	PKBM 25/26	SKB 25/26	MI 25/26	SD 25/26	MTs 25/26	SMP 25/26	MA 25/26	SMA 25/26	SMK 25/26	SLB 25/26	TOTAL	Perkiraan Kebutuhan Jumlah SPPG	Realisasi Jumlah SPPG s.d. Des	%Realisasi
Kab. Kayong Utara	82	1.536	704	0	293	1.480	0	7.224	12.745	5.582	5.129	1.519	3.697	1.073	38	41.102	16	14	85%
Kab. Landak	449	1.849	4.800	0	279	1.120	0	15.075	42.821	7.689	20.078	4.993	12.701	2.957	71	114.882	46	30	65%
Kab. Ketapang	1.072	7.048	5.551	103	101	3.672	249	25.216	62.031	26.610	22.623	13.339	11.300	7.479	166	186.560	75	47	63%
Kab. Melawi	48	1.488	3.101	26	0	1.070	183	8.109	22.255	5.863	10.148	6.136	5.255	2.374	71	66.127	26	16	60%
Kota Pontianak	1.289	7.741	3.964	112	82	2.512	428	69.126	59.718	49.411	28.236	31.646	21.875	12.803	599	289.542	116	66	57%
Kota Singkawang	600	2.711	757	65	0	958	0	19.217	25.292	18.847	11.703	13.280	6.051	6.040	361	105.882	42	24	57%
Kab. Bengkayang	196	1.532	2.879	0	175	975	48	6.763	31.597	7.132	13.641	2.845	8.089	3.456	120	79.448	32	16	50%
Kab. Kubu Raya	1.351	4.143	7.115	0	169	4.385	394	117.552	56.290	75.376	23.155	38.077	13.755	6.220	117	348.099	139	67	48%
Kab. Sambas	534	2.888	8.369	32	187	3.256	539	60.864	63.357	39.315	27.654	9.612	12.581	12.235	112	241.535	97	44	46%
Kab. Sanggau	501	3.328	3.908	20	31	2.441	85	17.505	49.189	9.979	21.176	3.434	10.867	6.273	99	128.836	52	23	45%
Kab. Mempawah	899	1.768	4.317	60	206	2.897	951	49.263	25.216	44.177	9.525	23.788	6.100	2.545	102	171.814	69	27	39%
Kab. Sekadau	134	1.084	3.091	22	22	1.023	30	6.233	23.498	5.642	10.006	1.382	5.493	2.798	55	60.513	24	6	25%
Kab. Kapuas Hulu	373	1.387	4.472	0	0	879	0	15.853	28.090	13.852	11.733	6.464	7.520	1.787	68	92.478	37	9	24%
Kab. Sintang	454	4.518	1.705	80	22	1.462	1.176	20.691	49.847	16.767	21.255	9.634	10.388	6.857	143	144.999	58	7	12%
Total	**7.982**	**43.021**	**54.733**	**520**	**1.567**	**28.130**	**4.083**	**438.691**	**551.946**	**326.242**	**236.062**	**166.149**	**135.672**	**74.897**	**2.122**	**2.071.817**	**829**	**396**	**48%**

Sumber: Kemendikdasmen (diolah)

tertinggi dengan tingkat realisasi sebesar 85%. Capaian relatif tinggi juga tercatat di Kabupaten Landak (65%), Kabupaten Ketapang (63%), dan Kabupaten Melawi (60%). Sebaliknya, beberapa daerah masih berada pada tingkat capaian rendah, antara lain Kabupaten Sintang (12%), Kabupaten Kapuas Hulu (24%), dan Kabupaten Sekadau (25%), yang mengindikasikan perlunya perhatian dan intervensi lebih lanjut.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus mengingat daerah-daerah dengan capaian realisasi SPPG yang rendah umumnya juga memiliki IPM yang berada di bawah rata-rata provinsi. Keterbatasan pembentukan SPPG di wilayah-wilayah tersebut berpotensi membatasi perluasan layanan pemenuhan gizi, yang pada gilirannya dapat menghambat akselerasi IPM daerah tersebut. Oleh karena itu, percepatan dan penajaman strategi pembentukan SPPG di daerah dengan capaian rendah dan IPM relatif rendah menjadi penting untuk mendukung upaya peningkatan pembangunan manusia secara lebih merata.

Percepatan pelaksanaan Program MBG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kecukupan pendanaan, serta ketersediaan sumber daya manusia. Alokasi anggaran MBG Tahun 2025 sebesar Rp73,84 triliun diharapkan dapat terealisasi secara optimal guna mendukung akselerasi capaian program. Selain itu, penguatan tata kelola serta peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas pelaksanaan Program MBG.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) SPPG di Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan audiensi dan forum diskusi bersama perwakilan SPPG di Kalimantan Barat. Hasil diskusi dan FGD menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi SPPG dalam implementasi program MBG adalah penyusunan laporan keuangan yang belum optimal, antara lain disebabkan oleh proses pembukuan yang belum terstandar serta penggunaan aplikasi dan tools yang beragam pada masing-masing entitas.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Balai Diklat Keuangan Pontianak serta melibatkan BPKP Kalimantan Barat untuk memetakan kebutuhan SPPG dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai upaya penguatan kapasitas dan harmonisasi pelaporan, diselenggarakan Lokakarya Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran SPPG pada Selasa, 14 Oktober 2025, yang diikuti oleh sekitar 200 peserta terdiri atas Pengawas Pengadaan Barang Pangan (akuntan) dan staf akuntansi SPPG. Pelaksanaan lokakarya tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan teknis pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran, sekaligus menyamakan persepsi dan format pelaporan antar-SPPG di Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan yang teridentifikasi, dikembangkan inovasi *Financial Advisory* Pembukuan Akuntan SPPG melalui pembangunan Aplikasi KAPUAZ (Laporan Penggunaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis). Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, BDK Pontianak, dan BPKP Kalimantan Barat, serta sejalan dengan Nota Dinas BGN Nomor B-3/03/03/01/2026/Roumku mengenai dukungan penyelenggaraan pelatihan aplikasi KAPUAZ.

Pengembangan KAPUAZ dilaksanakan secara bertahap. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2025 dilakukan penyempurnaan dan uji coba KAPUAZ versi 4.0 berbasis Excel, sekaligus pengembangan awal KAPUAZ berbasis web. Selanjutnya, pada November sampai dengan Desember 2025 dilakukan pengembangan lanjutan KAPUAZ berbasis web serta opsi piloting untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan melibatkan KPPN. Selanjutnya di tahun 2026 akan dilaksanakan FGD sinergi asistensi penyusunan laporan keuangan SPPG MBG lingkup Kalbar, demonstrasi dan *launching* KAPUAZ versi 4.0, serta penyampaian *User Requirement Document* (URD) kepada Pusdiklat AP untuk pengembangan sistem berbasis web yang lebih terintegrasi.

Sebagai puncak kegiatan, KAPUAZ resmi diluncurkan dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan SPPG, hasil kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, BDK Pontianak, Koordinator SPPG, dan SPPG yang telah mengikuti *Training of Trainers* (ToT). Ke depan, aplikasi KAPUAZ akan terus dievaluasi dan disempurnakan guna mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi laporan Penggunaan Anggaran SPPG dalam mendukung keberhasilan Program MBG.

c. Program MBG Memberi Pengaruh terhadap Tingkat Inflasi pada Komponen Makanan,

Minuman, dan Tembakau di Lima Kabupaten/Kota Kalimantan Barat

Pelaksanaan Program MBG di lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode Januari hingga Desember 2025 turut memengaruhi dinamika inflasi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Peningkatan permintaan pangan sebagai dampak dari pelaksanaan program, apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai, berpotensi mendorong kenaikan harga di wilayah tersebut.

Komoditas utama yang memberikan kontribusi terhadap inflasi di Kalimantan Barat antara lain beras, ikan kembung, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, ikan baung, daging ayam ras, ikan nila, serta telur ayam ras. Mengingat sebagian besar sentra produksi pangan nasional berada di Pulau Jawa, biaya logistik yang tinggi turut menyebabkan disparitas harga pangan antarwilayah. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau berpotensi berlanjut.

d. Program MBG Tidak Memberi Pengaruh terhadap NTP dan NTN di Kalimantan Barat

Hingga Desember 2025, implementasi Program MBG di Kalimantan Barat belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program telah berjalan selama sekitar satu tahun, peningkatan indikator harga dan daya beli petani serta nelayan belum terlihat secara optimal. Namun demikian, Program MBG memiliki potensi untuk mendukung kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan harga dan volume produksi, yang dapat dicapai melalui pengoptimalan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

5.1.4. Rekomendasi Pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil identifikasi isu, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diprioritaskan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun strategi yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut.

1. Penyesuaian Taget Nasional SPPG Berbasis Kebutuhan Riil Daerah

Penentuan target ideal SPPG sebaiknya berbasis pada indikator kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat, serta proyeksi pertumbuhan peserta didik di masing-masing wilayah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menetapkan kebutuhan unit SPPG secara lebih terukur dan proporsional, sehingga dapat mendukung pemerataan akses layanan secara nasional.

2. Pengembangan KAPUAZ Berbasis Web Terintegrasi

Perlu dilakukan percepatan pengembangan Aplikasi KAPUAZ berbasis web yang terintegrasi dan terstandardisasi sebagai instrumen pelaporan keuangan SPPG, guna meningkatkan konsistensi, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan, sekaligus mendukung konsolidasi data dan penguatan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah maupun nasional.

3. Penguatan Persebaran Produksi Pangan untuk Menekan Disparitas Harga Nasional

Diversifikasi dan pemerataan sentra produksi pangan ke wilayah luar Pulau Jawa perlu didorong guna mengurangi ketergantungan pada satu kawasan produksi. Pengembangan pasar produksi lokal, pemetaan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan petani, serta penguatan ekosistem distribusi dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi sekaligus menekan biaya logistik antarwilayah.

4. Optimalisasi Mekanisme Pelaksanaan MBG

Optimalisasi pelaksanaan Program MBG juga dapat dilakukan melalui penerapan mekanisme agregasi dan konsolidasi permintaan produk pertanian dan perikanan. Penghimpunan kebutuhan dalam skala besar dapat menjadi dasar perencanaan produksi yang lebih terarah bagi petani dan nelayan. Pembentukan konsolidator lokal diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Program MBG dengan kelompok tani dan nelayan, sekaligus mendukung kepastian pasar dan keberlanjutan produksi.

5.2. Landasan Konseptual dan Potret IPM Kalimantan Barat

"Pembangunan manusia pada akhirnya ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat memiliki kesempatan yang nyata untuk hidup sehat, mengakses pendidikan yang bermakna, dan mencapai standar hidup yang layak. Karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator ringkas yang penting untuk membaca arah kemajuan sekaligus kesenjangan pembangunan antardaerah."

Bagian ini menyajikan landasan konseptual dan potret awal Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kalimantan Barat. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai IPM sebagai indeks komposit, termasuk makna substantif tiga dimensinya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sebagaimana digunakan secara internasional dan diadopsi dalam statistik resmi Indonesia. Selanjutnya, bagian ini memotret dinamika IPM Kalimantan Barat pada periode 2023–2025 untuk menangkap perkembangan terkini, mencakup perubahan komponen pembentuk IPM serta disparitas capaian antar kabupaten/kota. Berangkat dari potret tersebut, analisis pada bagian berikutnya memfokuskan diagnosis hambatan utama per dimensi dengan dukungan data mikro (Susenas 2024–2025) dan keterkaitannya dengan instrumen belanja pemerintah menurut fungsi (APBN–APBD), sebelum dirumuskan arah rekomendasi dan strategi penguraian hambatan utama.

5.2.1 IPM sebagai Ukuran Pembangunan Manusia

Kerangka pembangunan manusia secara luas dipopulerkan melalui *Human Development Report* yang diterbitkan UNDP sejak 1990, dengan penekanan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari perluasan kesempatan dan pilihan manusia untuk menjalani kehidupan yang sehat, berpengetahuan, dan layak. Dalam kerangka tersebut, UNDP mengembangkan *Human Development Index* (HDI) sebagai ukuran ringkas untuk merangkum capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Di Indonesia, pendekatan yang sepadan digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). BPS menjelaskan bahwa IPM disusun untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi yang sama, yaitu (i) umur panjang dan hidup sehat, (ii) pengetahuan, dan (iii) standar hidup layak. Indikator yang digunakan BPS adalah umur harapan hidup saat lahir untuk dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk dimensi pendidikan, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk dimensi standar hidup.

BPS (2015) juga menjelaskan bahwa penyempurnaan metodologi IPM dilakukan agar indikator yang digunakan lebih relevan dan lebih mampu membedakan capaian antardaerah, termasuk penggunaan pengeluaran per kapita disesuaikan yang bersumber dari Susenas sebagai proksi standar hidup. Dengan demikian, IPM berfungsi sebagai indikator ringkas yang dapat dibandingkan lintas wilayah dan lintas waktu, serta dapat diurai kembali untuk membaca dimensi mana yang relatif kuat dan dimensi mana yang masih tertahan.

Secara konseptual, literatur akademik juga menekankan bahwa kesejahteraan bersifat multidimensi dan tidak cukup ditangkap oleh pendapatan semata. Robeyns (2011), misalnya, menguraikan pentingnya melihat kesejahteraan melalui capaian dan kemampuan yang dapat diwujudkan oleh manusia, bukan hanya melalui sumber daya atau *output* ekonomi. Penguatan konseptual ini selaras dengan penggunaan IPM sebagai indeks komposit yang menempatkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup sebagai kemampuan dasar yang perlu dipantau secara bersama.

5.2.2 Dimensi dan Komponen Pembentuk IPM

IPM disusun sebagai indeks komposit yang merangkum capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam statistik resmi Indonesia, BPS menggunakan empat indikator untuk membentuk ketiga dimensi tersebut, yakni umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. BPS (2015) menegaskan bahwa penggunaan indikator-indikator tersebut dimaksudkan agar IPM mampu menggambarkan capaian pembangunan manusia secara lebih utuh dan dapat dibandingkan antardaerah maupun antarwaktu.

a. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dalam IPM diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH). Secara konseptual, UHH merupakan indikator hasil (*outcome*) yang merangkum dampak jangka panjang berbagai determinan kesehatan, seperti akses dan mutu layanan kesehatan, status gizi, kondisi sanitasi, kualitas lingkungan, serta perilaku kesehatan masyarakat. Karena sifatnya *outcome* dan dipengaruhi faktor struktural, perubahan UHH umumnya terjadi secara gradual. Dalam kerangka HDI, UNDP juga menempatkan *life expectancy at birth* sebagai proksi "*long and healthy life*" yang merefleksikan capaian kesehatan pada level populasi.

Implikasi pembacaan UHH adalah sebagai berikut. Pertama, kenaikan UHH biasanya mencerminkan perbaikan yang relatif luas, sehingga sering kali

membutuhkan konsistensi kebijakan lintas sektor (kesehatan, air minum dan sanitasi, ketahanan pangan-gizi, serta perlindungan sosial). Kedua, apabila UHH meningkat namun relatif lambat dibanding wilayah pembanding, hal ini dapat menjadi sinyal bahwa perbaikan determinan kesehatan dasar masih perlu dipercepat atau belum merata.

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dalam IPM menggunakan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). BPS menegaskan bahwa kombinasi keduanya diperlukan karena menangkap dua aspek yang berbeda, yakni prospek lama sekolah penduduk usia sekolah (HLS) dan stok pendidikan penduduk dewasa (RLS) (BPS, 2015).

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia sekolah. Secara kebijakan, HLS berkaitan erat dengan akses, retensi, dan kemampuan sistem pendidikan memastikan anak tetap bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. HLS dapat meningkat ketika akses layanan pendidikan meluas, hambatan biaya berkurang, serta risiko putus sekolah pada transisi jenjang dapat ditekan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk dewasa. RLS lebih bersifat "stok" dan mencerminkan capaian pendidikan masa lalu, sehingga perubahannya lebih lambat dibanding HLS. Namun, RLS penting untuk membaca kualitas modal manusia yang telah terbentuk, termasuk implikasinya terhadap produktivitas dan peluang kerja. Pada kerangka HDI internasional, UNDP juga menggunakan *mean years of schooling dan expected years of schooling* untuk mewakili dimensi pendidikan, sehingga secara konsep sejalan dengan penggunaan RLS dan HLS dalam IPM Indonesia.

Implikasi pembacaan dimensi pendidikan adalah bahwa peningkatan IPM dapat bersumber dari penguatan akses dan retensi pendidikan generasi muda (tercermin pada HLS), sekaligus pembenahan kualitas dan pemerataan capaian pendidikan penduduk dewasa (tercermin pada RLS). Kesenjangan HLS–RLS juga dapat memberi sinyal dinamika struktural: misalnya, HLS relatif tinggi tetapi RLS tertahan dapat mengindikasikan bahwa akses pendidikan generasi muda mulai membaik, tetapi stok pendidikan penduduk dewasa masih membutuhkan waktu untuk mengejar.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak dalam IPM Indonesia diukur menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. BPS (2015) menjelaskan penggunaan pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) sebagai proksi standar hidup yang bersumber dari Susenas dan memungkinkan perbandingan antardaerah (BPS, 2015).

Pengeluaran per kapita disesuaikan penting dibaca sebagai ukuran kemampuan konsumsi rumah tangga dan daya beli riil. Ketika dimensi ini tertahan, isu yang relevan sering kali tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga kerentanan konsumsi, keterbatasan akses layanan dasar yang meningkatkan biaya hidup (misalnya air, sanitasi, energi), serta efektivitas perlindungan sosial dalam menjaga standar hidup minimum. Karena itu, dimensi standar hidup layak berfungsi sebagai "jembatan" antara indikator kesejahteraan ekonomi dan kondisi hidup sehari-hari rumah tangga.

Dengan demikian, IPM merupakan ukuran komposit yang merangkum capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang dibentuk oleh UHH, HLS, RLS, serta pengeluaran per kapita disesuaikan sebagaimana dijelaskan dalam metodologi BPS dan sejalan dengan kerangka HDI UNDP. Kerangka dimensi dan indikator tersebut selanjutnya menjadi dasar penyajian potret IPM Kalimantan Barat pada periode 2023–2025, termasuk perubahan komponen pembentuknya dan perbedaan capaian antarwilayah.

5.2.3 IPM sebagai Peta Pembangunan Manusia

Dalam penggunaannya, IPM tidak hanya diperlakukan sebagai angka ringkas untuk menunjukkan capaian rata-rata, tetapi juga dapat digunakan sebagai peta yang membantu membaca pencapaian, posisi relatif, dan disparitas pembangunan manusia antardaerah. BPS (2015) menegaskan bahwa IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, sekaligus memungkinkan perbandingan antarwilayah dan antarwaktu.

Pertama, sebagai ukuran pencapaian, IPM merangkum kemajuan pembangunan manusia pada tiga dimensi dasar melalui indikator yang terstandar. Karena berbentuk indeks komposit, IPM memudahkan pemantauan tren (misalnya peningkatan dari tahun ke tahun) tanpa

menghilangkan fakta bahwa perubahan tersebut berasal dari dimensi yang berbeda-beda. Dalam kerangka HDI, UNDP juga menekankan bahwa ukuran komposit seperti HDI/IPM dimaksudkan untuk menangkap kemajuan multidimensi yang tidak dapat dicerminkan oleh indikator ekonomi tunggal.

Kedua, sebagai ukuran posisi relatif, IPM memungkinkan pembacaan capaian suatu wilayah dibanding wilayah lain pada periode yang sama. Pembacaan posisi relatif penting karena dua wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tampak serupa dapat memiliki kualitas pembangunan manusia yang berbeda, baik karena perbedaan akses layanan dasar, struktur sosial-ekonomi rumah tangga, maupun pemerataan hasil pembangunan. Dengan kata lain, posisi IPM membantu mengidentifikasi apakah suatu wilayah sudah memiliki pergerakan yang sama dibandingkan dengan wilayah pembanding atau masih tertinggal pada dimensi tertentu.

Ketiga, sebagai alat membaca disparitas, IPM bermanfaat untuk mengungkap kesenjangan internal antardaerah, misalnya antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Disparitas ini krusial dalam analisis wilayah karena rata-rata provinsi dapat menutupi kantong-kantong capaian yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, analisis yang menggunakan IPM sebagai peta pembangunan umumnya perlu melengkapi pembacaan rata-rata provinsi dengan distribusi IPM antar kabupaten/kota agar arah kebijakan lebih tepat sasaran.

Dengan fungsi tersebut, IPM menyediakan kerangka awal untuk menyusun narasi pembangunan manusia yang terstruktur: (i) bagaimana tren capaian wilayah berubah, (ii) bagaimana posisi wilayah dibanding pembanding, dan (iii) di mana letak kesenjangan internal yang perlu menjadi fokus lokus kebijakan. Kerangka ini menjadi pengantar bagi potret IPM Kalimantan Barat periode 2023–2025 pada bagian berikutnya, termasuk perubahan komponen pembentuk serta variasi capaian antar kabupaten/kota berdasarkan data resmi BPS.

5.2.4 Landasan Hukum yang Relevan

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

Perpres ini menetapkan RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan. Substansinya mengatur arah kebijakan, sasaran, serta kerangka implementasi pembangunan nasional lintas sektor dalam periode 2025–2029. Dalam konteks pembangunan manusia, RPJMN menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu fokus pembangunan, sehingga indikator seperti IPM dan indikator turunannya lazim digunakan sebagai ukuran kemajuan dan evaluasi capaian pembangunan manusia pada level pusat dan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan dan penegasan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Karena itu, pembacaan dimensi kesehatan dan pendidikan dalam IPM relevan ditautkan dengan mandat daerah dalam memastikan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029

Perda ini menetapkan RPJMD 2025–2029 sebagai penjabaran visi–misi kepala daerah untuk kurun waktu lima tahun, yang menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran perangkat daerah. Secara substansi, RPJMD memuat arah kebijakan dan target pembangunan daerah, termasuk agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, IPM dapat digunakan sebagai indikator ringkas untuk membaca capaian pembangunan manusia daerah serta memetakan area yang masih memerlukan percepatan perbaikan pada periode RPJMD berjalan.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023–2025

Pergub ini secara khusus mengatur rencana aksi percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat untuk periode 2023–2025. Substansinya berfungsi sebagai pedoman koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan capaian IPM melalui intervensi yang terkait dengan tiga dimensi IPM (kesehatan,

pendidikan, dan standar hidup layak), termasuk penajaman sasaran dan arah kegiatan pendukung di tingkat daerah. Dalam bab tematik ini, Pergub 98/2022 menjadi rujukan kebijakan daerah yang memperkuat relevansi diagnosis per dimensi IPM dan membantu memastikan rekomendasi yang disusun tetap sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

5.2.5 Potret IPM Kalimantan Barat 2023-2025

Bagian ini menyajikan perkembangan IPM Kalimantan Barat dalam tiga tahun terakhir (2023–2025) berdasarkan statistik resmi yang dipublikasikan secara berkala. Penyajian difokuskan pada tiga hal, yaitu dinamika IPM tingkat provinsi, perubahan indikator pembentuk IPM, serta variasi capaian antar kabupaten/kota. Potret ini disusun sebagai konteks dasar untuk memahami capaian terkini pembangunan manusia di Kalimantan Barat sebelum pembahasan beralih pada diagnosis hambatan utama per dimensi pada sub bab berikutnya.

a. Tren IPM Provinsi Kalimantan Barat 2023-2025

Dalam tiga tahun terakhir, IPM Kalimantan Barat meningkat secara konsisten. Nilai IPM tercatat 70,47 pada 2023, meningkat menjadi 71,19 pada 2024, dan kembali naik menjadi 72,09 pada 2025. Dengan demikian, akumulasi kenaikan selama 2023–2025 mencapai 1,62 poin. Kenaikan tahunan juga menguat pada periode terbaru, yaitu +0,72 poin (2024 terhadap 2023) dan +0,90 poin (2025 terhadap 2024). Pola ini memperlihatkan perbaikan berkelanjutan pada capaian pembangunan manusia, sekaligus menjadi penanda penting bahwa dinamika terbaru perlu dibaca bersama perubahan indikator pembentuknya.

Grafik 5.2 Tren IPM Kalbar 2023-2025

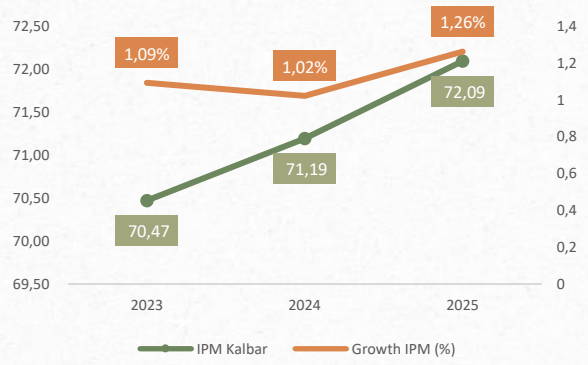

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Dari perspektif perbandingan, capaian IPM Kalimantan Barat masih berada di bawah rata-rata nasional maupun provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pada 2025, IPM Kalimantan Barat sebesar 72,09, sementara IPM Indonesia mencapai sekitar 75,9. Di tingkat provinsi se-Kalimantan, posisi 2025 menunjukkan Kalimantan Timur berada pada level tertinggi, disusul Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, sementara Kalimantan Barat berada pada level terendah.

Grafik 5.3 Perbandingan IPM Kalbar 2023-2025

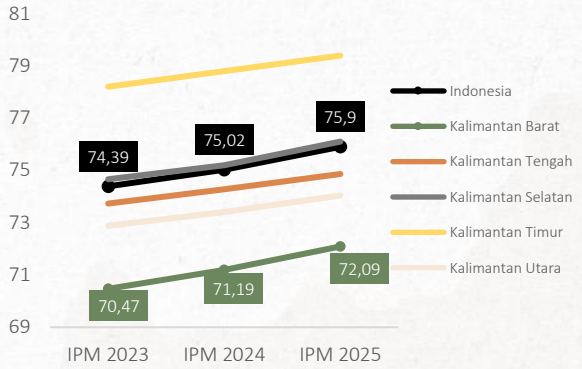

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Meski demikian, pembacaan posisi perlu dilengkapi dengan pembacaan laju perbaikan. Selama 2023–2025, IPM Kalimantan Barat meningkat 1,62 poin atau rata-rata 0,81 poin per tahun, lebih tinggi dibanding kenaikan nasional (1,51 poin; 0,76 poin per tahun) dan juga lebih tinggi dibanding beberapa provinsi lain di Kalimantan (Gambar 5.4). Artinya, Kalimantan Barat mengalami perbaikan yang relatif cepat dalam tiga tahun terakhir, namun karena titik awalnya lebih rendah, capaian 2025 masih tertinggal. Dengan kerangka ini, pembahasan berikutnya akan mengarahkan analisis pada dimensi apa yang paling menentukan percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.

Grafik 5.4 Perbandingan Δ IPM Kalbar 2023-2025

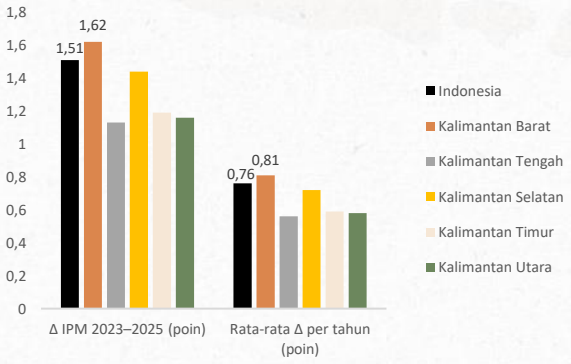

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

b. Perubahan Indikator Pembentuk IPM

Perubahan IPM pada dasarnya merupakan refleksi dari pergerakan indikator pembentuknya. Pada level provinsi, indikator tersebut meliputi umur harapan hidup saat lahir (UHH) untuk dimensi

kesehatan, harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) untuk dimensi pendidikan, serta pengeluaran per kapita disesuaikan untuk dimensi standar hidup. Pada 2025, indikator Kalimantan Barat tercatat UHH 74,28 tahun, HLS 12,69 tahun, RLS 8,07 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan 10.689 ribu rupiah per tahun. Secara kumulatif 2023–2025 dan rata-rata per tahun, indikator pembentuk IPM Kalimantan Barat bergerak sebagai berikut:

- UHH (tahun) meningkat dari 73,71 (2023) menjadi 74,28 (2025), atau naik 0,57 tahun selama 2023–2025, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,29 tahun per tahun.

Grafik 5.5 Tren Umur Harapan Hidup Kalbar 2023-2025

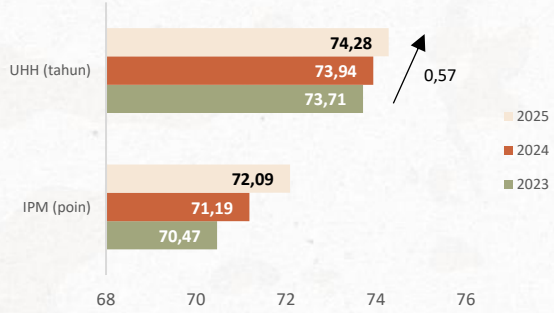

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

- HLS (tahun) meningkat dari 12,67 (2023) menjadi 12,69 (2025), atau naik 0,02 tahun selama 2023–2025, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,01 tahun per tahun.
- RLS (tahun) meningkat dari 7,71 (2023) menjadi 8,07 (2025), atau naik 0,36 tahun selama 2023–2025, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,18 tahun per tahun.

Grafik 5.6 Tren HLS dan RLS Kalbar 2023-2025

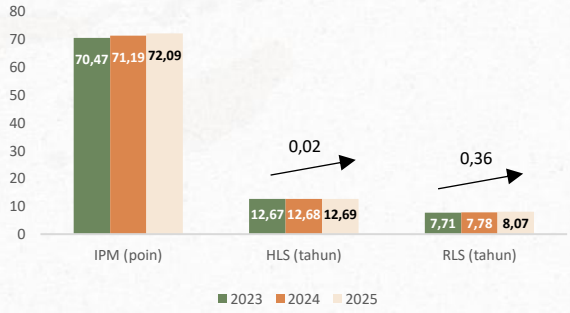

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

- Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah per kapita per tahun) meningkat dari 9.810 (2023) menjadi 10.689 (2025), atau naik 879 selama 2023–2025, dengan rata-rata kenaikan sekitar 439,5 per tahun.

Grafik 5.7 Tren Pengeluaran per Kapita Kalbar 2023-2025

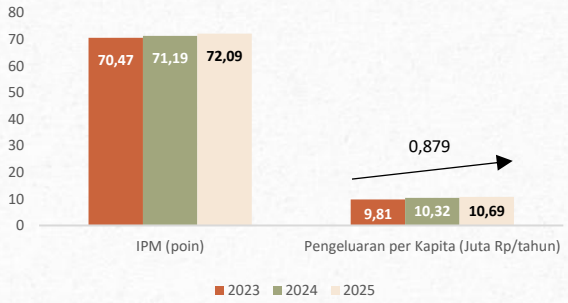

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

c. Variasi Capaian antar Kabupaten/Kota

Pada 2025, capaian IPM antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih beragam. Capaian tertinggi berada di Kota Pontianak (82,80), sedangkan capaian terendah tercatat di Kabupaten Kayong Utara (67,60), sehingga selisih keduanya mencapai 15,20 poin. Selain perbedaan ekstrem tersebut, variasi antardaerah juga terlihat dari rata-rata selisih absolut IPM kabupaten/kota terhadap IPM provinsi 2025, yaitu sekitar 2,56 poin.

Grafik 5.8 IPM Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2025

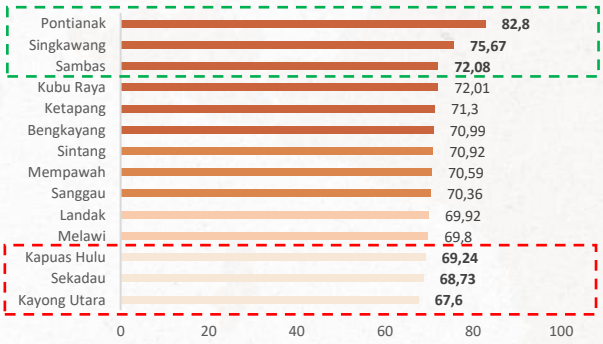

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Selanjutnya, dinamika 2023–2025 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan IPM, namun lajunya tidak sepenuhnya seragam. Kenaikan kumulatif terbesar selama 2023–2025 terjadi di Kabupaten Sekadau (+1,90 poin), sementara kenaikan kumulatif terkecil terjadi di Kota Pontianak (+1,17 poin). Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan peningkatan tercepat tidak selalu merupakan daerah dengan capaian tertinggi. Dalam konteks capaian 2025, Kota Pontianak tetap berada pada posisi tertinggi, namun perbaikannya dalam tiga tahun terakhir relatif lebih moderat; sebaliknya Kabupaten Kayong Utara sebagai capaian terendah 2025 tetap mengalami peningkatan dari 2023 ke 2025.

Sebagai contoh pada lokus dengan capaian terendah 2025, Kabupaten Kayong Utara mencatat IPM naik dari 66,06 (2023) menjadi 67,05 (2024) dan 67,60 (2025), atau meningkat kumulatif 1,54 poin selama 2023–2025; kenaikan tahunannya sebesar +0,99 poin (2024 terhadap 2023) dan +0,55 poin (2025 terhadap 2024).

Secara keseluruhan, delta peningkatan IPM antar kabupaten/kota bersifat variatif, baik dari sisi perubahan tahunan maupun kumulatif 2023–2025. Dengan demikian, perbaikan capaian pembangunan manusia tidak berlangsung dengan laju yang seragam di seluruh wilayah, sehingga pembacaan IPM perlu mempertimbangkan sekaligus level capaian dan arah pergerakan masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 5.9 Δ IPM Kabupaten/Kota di Kalbar

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Secara ringkas, potret 2023–2025 menunjukkan peningkatan capaian IPM di tingkat provinsi, disertai variasi capaian yang nyata antar kabupaten/kota. Bagian berikutnya akan mengarahkan pembahasan pada diagnosis hambatan utama per dimensi dengan dukungan data mikro Susenas 2024–2025 dan keterkaitannya dengan instrumen belanja pemerintah menurut fungsi (APBN–APBD), sebelum dirumuskan rekomendasi dan strategi pada bagian penutup.

5.2.6 Potret IPM Kalimantan Barat 2023-2025

Meski IPM Kalimantan Barat pada 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan, posisi relatifnya masih berada di bawah capaian nasional dan provinsi lain di Pulau Kalimantan, serta kesenjangan antar kabupaten/kota masih terlihat cukup signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan capaian pembangunan manusia berlangsung, namun belum cukup untuk mempercepat penyempitan ketertinggalan dan disparitas internal. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada diagnosis faktor penahan percepatan melalui pembacaan tiga dimensi IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Diagnosis disusun dengan pendekatan berlapis: indikator komponen IPM sebagai sinyal makro, penguatan bukti melalui data mikro Susenas 2024–2025, serta keterkaitan awal dengan belanja pemerintah menurut fungsi (APBN–APBD) sebagai konteks instrumen kebijakan.

5.2.6.1 Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan, capaian pembangunan manusia direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH). Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa dalam periode 2023–2025, UHH Kalimantan Barat meningkat dari 73,71 tahun (2023) menjadi 74,28 tahun (2025) atau naik 0,57 tahun selama periode pengamatan. Pergerakan ini menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan populasi secara agregat. Perbaikan ini perlu dibaca lebih rinci melalui indikator rumah tangga, terutama kondisi keluhan kesehatan dan pemanfaatan layanan, untuk melihat dinamika kesehatan yang tidak selalu tercermin pada indikator agregat.

Susenas 2024–2025 menggambarkan kondisi kesehatan penduduk dan pemanfaatan layanan. Proporsi penduduk yang melaporkan keluhan kesehatan dalam dua minggu terakhir meningkat dari 25,71% (2024) menjadi 26,14% (2025). Pada saat yang sama, pemanfaatan layanan rawat jalan menurun dari 30,72% (2024) menjadi 28,83% (2025). Meski demikian, proporsi rawat inap dalam satu tahun terakhir meningkat dari 2,53% (2024) menjadi 3,11% (2025). Kombinasi indikator ini menunjukkan bahwa dinamika pada dimensi kesehatan tidak hanya terkait perubahan keluhan, tetapi juga terkait akses, kebutuhan layanan, serta perilaku pencarian pengobatan.

Grafik 5.10 Perbandingan Kesehatan Penduduk dan Pemanfaatan Pelayanan

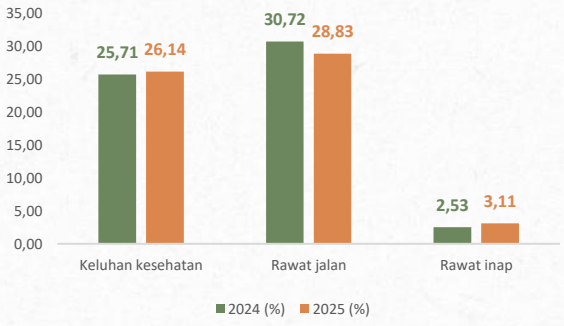

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Meningkatnya keluhan kesehatan yang diikuti penurunan pemanfaatan layanan rawat jalan mengisyaratkan perlunya penguatan langkah pencegahan dan promosi kesehatan untuk

menekan kejadian keluhan, sekaligus perbaikan kemudahan akses layanan rawat jalan. Penurunan rawat jalan pada saat keluhan meningkat dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor, antara lain keterjangkauan biaya dan cakupan jaminan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, preferensi pengobatan mandiri, maupun perubahan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan berobat. Sementara itu, peningkatan rawat inap dapat mengindikasikan adanya kasus yang lebih berat atau kebutuhan tindak lanjut layanan pada sebagian penduduk.

Pada level kabupaten/kota, perubahan keluhan kesehatan 2024–2025 terlihat sangat beragam dan membentuk dua kutub yang kontras. Di kelompok yang membaik (keluhan menurun), penurunan paling besar terjadi di Bengkayang (27,06% → 20,61%), Kubu Raya (20,41% → 15,92%), dan Melawi (28,79% → 23,49%). Perbaikan ini menunjukkan bahwa penurunan keluhan kesehatan tidak bersifat kebetulan—ada wilayah yang mampu menekan keluhan secara nyata dalam setahun, sehingga praktik baik pencegahan/penanganan keluhan di wilayah-wilayah ini layak dicermati sebagai pembanding. Sebaliknya, di kelompok yang memburuk (keluhan meningkat), lonjakan paling menonjol terjadi di Mempawah (28,93% → 41,98%) dan Landak (32,20% → 41,42%), disusul Sekadau (16,88% → 20,55%) dan Sambas (29,07% → 31,81%). Pola ini penting karena mengindikasikan adanya kantong wilayah dengan tekanan kesehatan yang meningkat lebih cepat daripada rata-rata provinsi. Dengan kata lain, kenaikan keluhan pada 2025 tidak "rata", melainkan terkonsentrasi pada beberapa kabupaten yang perlu menjadi prioritas penguatan layanan primer dan intervensi promotif–preventif.

Grafik 5.11 Pergerakan Tingkat Keluhan Kesehatan Kabupaten/Kota di Kalbar

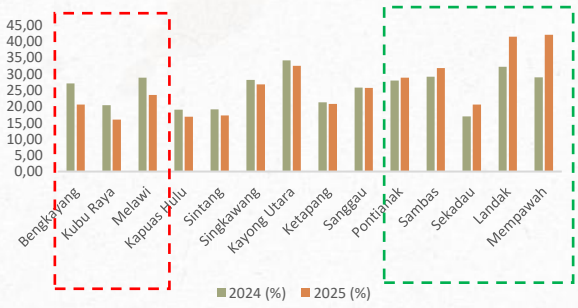

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Dari sisi instrumen fiskal, dukungan terhadap dimensi kesehatan di Kalimantan Barat tercermin dari belanja menurut fungsi pada APBN dan APBD yang dapat dibaca berdampingan dengan dinamika pada dimensi kesehatan. Dalam analisis ini, belanja menurut fungsi digunakan sebagai proksi karena klasifikasi fungsi belanja merefleksikan tujuan pelayanan publik yang didanai pemerintah. Pada dimensi kesehatan, fungsi yang paling langsung berkaitan adalah fungsi Kesehatan karena mencakup pembiayaan layanan kesehatan, penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kegiatan kesehatan masyarakat. Selain itu, capaian kesehatan juga dipengaruhi determinan yang lebih luas sehingga fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dapat dicermati sebagai proksi dukungan layanan dasar (misalnya air dan sanitasi) yang beririsan dengan risiko kesehatan masyarakat. Dengan kerangka tersebut, uraian belanja APBN–APBD menurut fungsi pada 2023–2025 ditempatkan sebagai konteks dukungan instrumen fiskal.

Grafik 5.12 Perbandingan Tingkat Sanitasi dan Air Bersih Kalbar

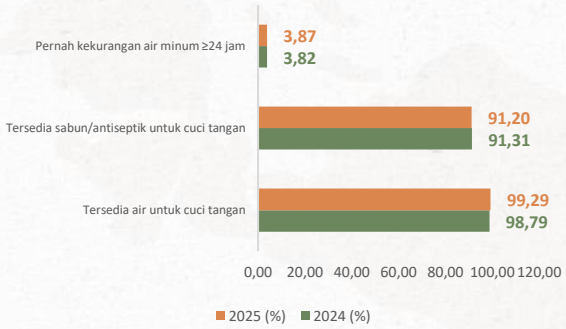

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Pada fungsi Kesehatan, realisasi APBN di lokus Kalbar relatif kecil dan cenderung stabil pada 2023–2024 sekitar Rp0,16 triliun, kemudian turun menjadi Rp0,14 triliun pada 2025. Dari sisi APBD, belanja fungsi Kesehatan berada pada kisaran Rp4,61 triliun (2023) dan Rp4,65 triliun (2024), lalu tercatat Rp1,43 triliun pada 2025. Pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, realisasi APBN menurun dari sekitar Rp0,69 triliun (2023) menjadi Rp0,53 triliun (2024) dan Rp0,20 triliun pada 2025. Sementara itu, belanja APBD pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum berada pada kisaran Rp4,62 triliun (2023) dan Rp4,93 triliun (2024), kemudian tercatat Rp2,19 triliun pada 2025. Struktur belanja tersebut menunjukkan bahwa dukungan fiskal pada fungsi yang diproksikan dengan dimensi kesehatan masih bertumpu pada APBD, baik untuk fungsi kesehatan maupun fungsi perumahan dan fasilitas umum.

Grafik 5.13 Perbandingan Belanja Pemerintah per Fungsi Terkait Dimensi Kesehatan

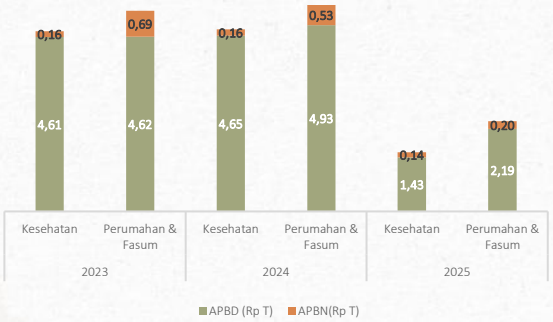

Sumber: Sintesa (diolah)

Selanjutnya, dinamika belanja fungsi tersebut dapat dibaca berdampingan dengan pergerakan dimensi kesehatan. Pada periode yang sama, UHH Kalimantan Barat meningkat dari 73,71 tahun (2023) menjadi 73,94 tahun (2024) dan 74,28 tahun (2025). Namun, data Susenas menunjukkan peningkatan keluhan kesehatan serta penurunan pemanfaatan layanan kesehatan, khususnya rawat jalan, pada 2025 dibanding 2024. Kondisi ini perlu dicermati karena berpotensi menahan akselerasi perbaikan kesehatan, terutama jika penurunan rawat jalan mencerminkan hambatan akses layanan primer. Di sisi lain, selama 2023–2024 belanja fungsi Kesehatan serta Perumahan dan Fasilitas Umum pada APBD relatif tinggi, selaras dengan pergerakan UHH yang terus meningkat. Pada 2025, besaran belanja pada kedua fungsi tersebut menurun, sehingga kesinambungan dukungan fiskal perlu dicermati, terutama ketika keluhan kesehatan meningkat, pemanfaatan layanan rawat jalan menurun, serta masih terdapat sebagian rumah tangga yang mengalami gangguan akses air minum.

Dengan demikian, diagnosis dimensi kesehatan dalam kajian ini mengarah pada dua temuan utama. Pertama, meskipun indikator agregat (UHH) membaik, peningkatan keluhan kesehatan yang disertai penurunan pemanfaatan layanan rawat jalan menandakan adanya tantangan pada sisi promotif–preventif sekaligus potensi kendala akses layanan primer. Pengayaan level kabupaten/kota memperlihatkan bahwa dinamika tersebut tidak merata antarwilayah, sehingga respons kebijakan perlu lebih terarah, baik untuk mempertahankan wilayah yang membaik maupun memitigasi wilayah yang menunjukkan peningkatan keluhan. Kedua, pada determinan kesehatan, praktik higiene rumah tangga cenderung membaik namun sebagian rumah tangga masih mengalami gangguan akses air minum, sehingga penguatan layanan dasar terkait air tetap menjadi prasyarat penting untuk menurunkan risiko kesehatan berbasis lingkungan. Dalam konteks instrumen fiskal yang dominan bertumpu pada APBD, konsistensi dukungan pada fungsi kesehatan dan layanan dasar menjadi kunci agar perbaikan UHH dapat lebih cepat terkonversi menjadi penurunan keluhan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup.

5.2.6.2 Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan, capaian pembangunan manusia direpresentasikan oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa dalam periode 2023–2025, HLS Kalimantan Barat meningkat dari 12,67 tahun (2023) menjadi 12,69 tahun (2025) atau naik 0,02 tahun, sedangkan RLS meningkat dari 7,71 tahun (2023) menjadi 8,07 tahun (2025) atau naik 0,36 tahun selama periode pengamatan. Pergerakan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan akumulasi capaian pendidikan secara agregat. Namun, perbaikan tersebut perlu dibaca lebih rinci melalui indikator mikro (individu/rumah tangga), terutama Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur dan komposisi pendidikan tertinggi, untuk menangkap dinamika keberlanjutan sekolah yang tidak selalu tercermin pada indikator agregat.

Data Susenas 2024–2025 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Barat relatif tinggi pada usia sekolah dasar dan menengah pertama, namun mulai menurun pada kelompok usia sekolah menengah atas. Secara agregat provinsi, APS usia 7–12 tahun berada pada tingkat sangat tinggi dan relatif stabil (99,00% pada 2024 dan 98,98% pada 2025). Pada kelompok usia 13–15 tahun, APS meningkat dari 93,28% (2024) menjadi 94,29% (2025). Peningkatan yang lebih terasa terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun, dari 68,70% (2024) menjadi 70,54% (2025).

Meski terdapat perbaikan pada usia 16–18 tahun, kesenjangan APS antara usia 13–15 dan 16–18 tahun mengindikasikan adanya isu pada keberlanjutan sekolah. Level APS 16–18 masih jauh lebih rendah dibanding kelompok usia lain sehingga menunjukkan adanya risiko putus sekolah pada jenjang menengah atas. Dinamika ini dapat dipengaruhi oleh faktor biaya tidak langsung sekolah, kebutuhan bekerja/membantu keluarga, akses sekolah menengah atas di wilayah tertentu, maupun preferensi rumah tangga terhadap pendidikan lanjutan.

Grafik 5.14 Perbandingan APS Kalimantan Barat Menurut Kelompok Umur

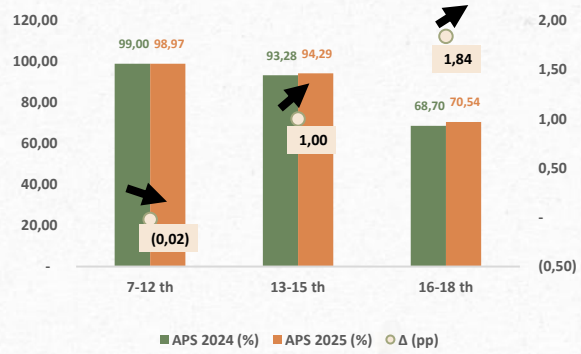

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Selain partisipasi sekolah, struktur capaian pendidikan penduduk juga perlu dicermati melalui komposisi pendidikan tertinggi. Pada tingkat provinsi, komposisi pendidikan penduduk menunjukkan perbaikan yang gradual: porsi penduduk dengan pendidikan tertinggi ≤SMP menurun dari 74,68% (2024) menjadi 73,85% (2025), sementara porsi SMA meningkat dari 19,29% menjadi 19,72%, dan porsi >SMA meningkat dari 6,03% menjadi 6,43%. Pergeseran ini mengarah pada penguatan stok pendidikan, meski perubahannya masih bertahap sehingga penguatan akses dan kualitas pendidikan menengah-atas tetap menjadi fokus.

Grafik 5.15 Komposisi Pendidikan Tertinggi Penduduk Kalbar

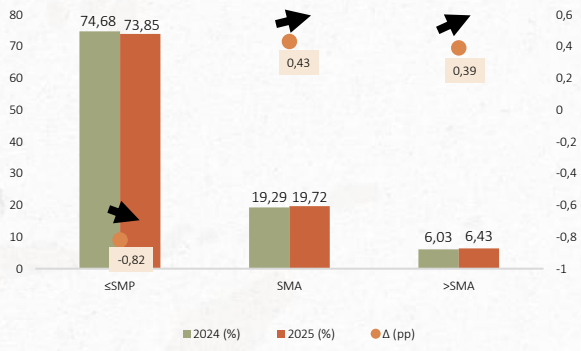

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Pada level kabupaten/kota, isu keberlanjutan menuju jenjang menengah atas terlihat lebih tajam ketika APS usia 16–18 tahun dibaca berdampingan dengan komposisi pendidikan tertinggi. Dari sisi komposisi, beberapa wilayah masih didominasi penduduk berpendidikan ≤SMP, antara lain Sambas (81,75%), Kayong Utara (80,95%), dan Sekadau (79,54%), sementara porsi SMA dan >SMA relatif terbatas. Sebaliknya, Kota Pontianak menunjukkan struktur yang lebih kuat, dengan porsi ≤SMP 52,30%, SMA 32,23%, dan >SMA 15,47%. Pola ini sejalan dengan dinamika APS 16–18 tahun yang tidak merata antarwilayah: terdapat perbaikan cukup besar di Sanggau (+14,07 poin persentase) dan Kayong Utara (+12,74 poin), namun penurunan terjadi di Singkawang (−7,70 poin) dan Sintang (−5,85 poin). Temuan ini memperlihatkan bahwa kesenjangan keberlanjutan sekolah menuju SMA dan pendidikan lanjutan terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu, sehingga pembacaan kab/kota menjadi kunci sebelum masuk ke konteks dukungan fiskal.

Grafik 5.16 Perbandingan APS 16–18 Tahun per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

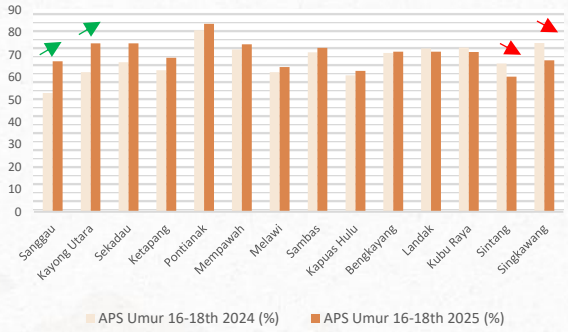

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Grafik 5.17 Komposisi Pendidikan Tertinggi per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

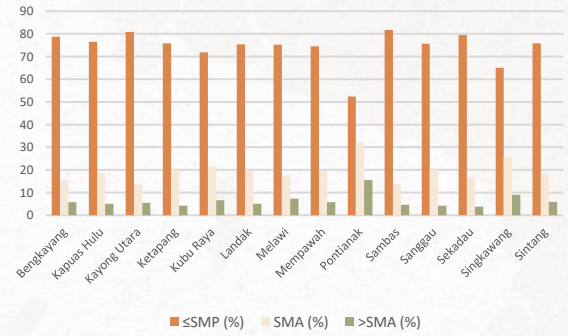

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Dari sisi instrumen fiskal, dukungan terhadap dimensi pendidikan tercermin dari belanja pemerintah menurut fungsi yang dapat dibaca berdampingan dengan dinamika pada dimensi pendidikan. Dalam analisis ini, belanja menurut fungsi digunakan sebagai proksi karena klasifikasi fungsi belanja merefleksikan tujuan pelayanan publik yang didanai pemerintah. Pada dimensi pendidikan, fungsi yang paling langsung berkaitan adalah fungsi Pendidikan karena mencakup pembiayaan layanan pendidikan, sarana-prasarana, dan penguatan kualitas tenaga pendidik. Dengan kerangka tersebut, uraian belanja APBN–APBD menurut fungsi pada 2023–2025 ditempatkan sebagai konteks dukungan instrumen fiskal untuk memperkuat akses dan keberlanjutan sekolah,

khususnya pada jenjang menengah atas yang paling rentan.

Pada fungsi Pendidikan, realisasi APBN di lokus Kalbar meningkat dari Rp1,99 triliun (2023) menjadi Rp2,24 triliun (2024), kemudian tercatat Rp2,04 triliun pada 2025. Dari sisi APBD, belanja fungsi Pendidikan berada pada kisaran Rp7,45 triliun (2023) dan Rp8,01 triliun (2024), lalu tercatat Rp1,16 triliun pada 2025. Dengan demikian, belanja publik (APBN+APBD) fungsi Pendidikan mencapai Rp9,44 triliun pada 2023 dan Rp10,25 triliun pada 2024, kemudian tercatat Rp3,19 triliun pada 2025. Struktur ini menunjukkan bahwa dukungan fiskal pada fungsi Pendidikan secara umum masih bertumpu pada APBD, sementara APBN berperan sebagai pelengkap dukungan.

Grafik 5.18 Perbandingan Belanja Pemerintah per Fungsi Pendidikan

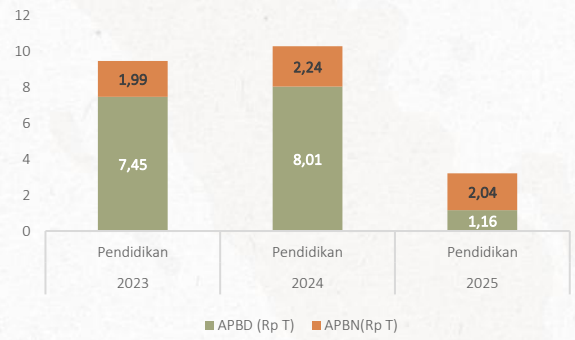

Sumber: Sintesa (diolah)

Selanjutnya, dinamika belanja fungsi Pendidikan tersebut dapat dibaca berdampingan dengan indikator pendidikan. Pada periode 2024–2025, Susenas menunjukkan perbaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS), terutama pada kelompok usia 16–18 tahun, serta pergeseran komposisi pendidikan tertinggi yang bergerak gradual ke arah pendidikan menengah dan tinggi. Namun, kesenjangan keberlanjutan sekolah pada transisi menuju jenjang menengah atas masih terlihat, serta variasi kabupaten/kota menunjukkan bahwa penguatan keberlanjutan sekolah memerlukan pendekatan yang lebih terarah antarwilayah. Dalam konteks tersebut, kesinambungan dukungan fiskal pada fungsi Pendidikan perlu dicermati agar perbaikan indikator agregat (HLS dan RLS) dapat lebih cepat terkonversi menjadi penguatan keberlanjutan sekolah pada usia 16–18 tahun dan peningkatan stok pendidikan penduduk (SMA dan pendidikan tinggi).

Dengan demikian, diagnosis dimensi pendidikan dalam kajian ini mengarah pada dua temuan utama. Pertama, perbaikan APS pada 2025 menunjukkan arah yang positif, namun kerentanan keberlanjutan sekolah masih paling kuat pada jenjang menengah atas (usia 16–18), sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan pada pencegahan putus sekolah dan penguatan transisi ke pendidikan menengah atas, terutama pada wilayah dengan kesenjangan yang lebih besar. Kedua, struktur pendidikan penduduk membaik secara bertahap (penurunan porsi ≤SMP dan kenaikan porsi SMA serta >SMA), namun laju perubahannya masih gradual, sehingga efektivitas belanja fungsi pendidikan perlu terus dijaga agar perbaikan indikator pendidikan agregat dapat lebih cepat terkonversi menjadi peningkatan keberlanjutan sekolah dan akumulasi capaian pendidikan penduduk.

5.2.6.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Pada dimensi standar hidup layak, capaian pembangunan manusia direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa dalam periode 2023–2025, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kalimantan Barat meningkat dari 9.810,00 (2023) menjadi 10.689,00 (2025) atau naik 879,00 selama periode pengamatan. Pergerakan ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan standar hidup secara agregat. Namun demikian, dinamika standar hidup layak juga perlu dibaca lebih rinci melalui indikator rumah tangga/individu, terutama partisipasi ekonomi serta kondisi kerentanan dan kualitas hunian, untuk menangkap variasi kesejahteraan yang tidak selalu tercermin pada indikator agregat.

Data Susenas 2024–2025 dalam kajian ini digunakan untuk memperkaya pembacaan standar hidup melalui sisi partisipasi ekonomi penduduk, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai indikatornya. Pada tingkat provinsi, TPAK Kalimantan Barat meningkat dari 70,44% (2024) menjadi 70,90% (2025) atau naik 0,46 poin persentase. Meski kenaikannya moderat, pergerakan ini tetap penting dicermati karena partisipasi ekonomi merupakan salah satu saluran utama yang berpengaruh pada kemampuan rumah tangga membentuk pendapatan dan menjaga pemenuhan kebutuhan dasar.

Meskipun indikator provinsi memberi gambaran umum, standar hidup pada level rumah tangga sering kali tidak bergerak seragam antardaerah. Karena itu, setelah melihat konteks partisipasi ekonomi di tingkat provinsi melalui TPAK, pembacaan standar hidup kemudian difokuskan pada level kabupaten/kota dengan menggunakan

indikator yang lebih dekat dengan kondisi hidup sehari-hari. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi wilayah yang tertinggal atau lebih rentan, terutama ketika rata-rata provinsi dapat menutupi variasi antarwilayah.

Grafik 5.19 Perbandingan TPAK Kalimantan Barat

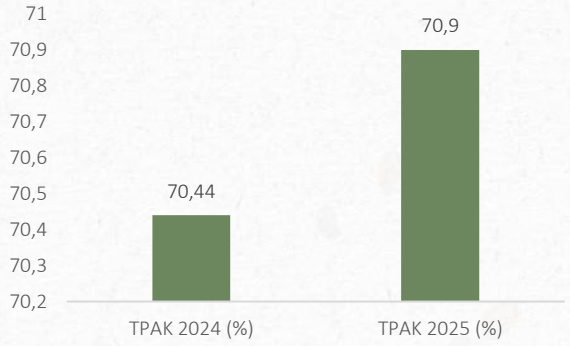

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Kondisi standar hidup pada level rumah tangga dapat dibaca dari kualitas hunian yang ditempati sehari-hari. Kualitas lantai dipakai sebagai indikator yang praktis untuk menangkap apakah sebagian rumah tangga masih hidup pada standar minimum kenyamanan dan keamanan tempat tinggal. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi.

Grafik 5.20 Perbandingan Kualitas Lantai Layak per Kabupaten/Kota

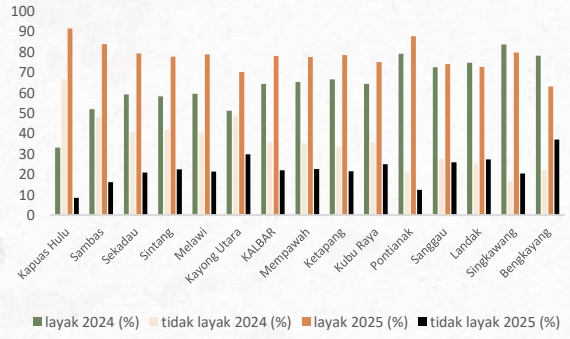

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Pada 2025, persentase lantai layak tertinggi antara lain Kapuas Hulu (91,53%), Kota Pontianak (87,68%), dan Sambas (83,85%), sementara yang relatif lebih rendah antara lain Bengkayang (63,02%), Kayong Utara (70,19%), dan Landak (72,69%). Perubahan 2024–2025 juga menunjukkan variasi antardaerah. Perbaikan terbesar terjadi di Kapuas Hulu (naik 58,37 poin persentase) dan Sambas (naik 31,91 poin persentase), sedangkan penurunan terjadi di Bengkayang (turun 15,05 poin persentase). Variasi ini menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga mencapai hunian yang lebih layak belum merata antarwilayah dan cenderung terkait dengan perbedaan kondisi sosial ekonomi.

Standar hidup juga sangat ditentukan oleh kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan makan. Pada 2025, persentase rumah tangga rentan pangan tertinggi terlihat di Kayong Utara (18,39%), Sintang (15,44%), dan Mempawah (15,40%), sementara yang relatif rendah antara lain Kapuas Hulu (5,58%), Singkawang (8,43%), dan Kubu Raya (9,09%). Perubahan 2024–2025 menunjukkan adanya kantong wilayah yang memburuk. Kenaikan kerentanan pangan tertinggi terjadi di Sintang (naik 6,36 poin persentase), Sanggau (naik 5,46 poin persentase), dan Kayong Utara (naik 5,23 poin persentase), sedangkan perbaikan terlihat di Melawi (turun 4,58 poin persentase) dan Landak (turun 3,01 poin persentase). Pola ini menegaskan bahwa perbaikan standar hidup tidak selalu seragam, dan pada sebagian wilayah masih terdapat rumah tangga yang menghadapi tekanan pemenuhan kebutuhan paling dasar.

Grafik 5.21 Perbandingan Kerentanan Pangan (Rentan Pangan vs Tidak Rentan) per Kabupaten/Kota

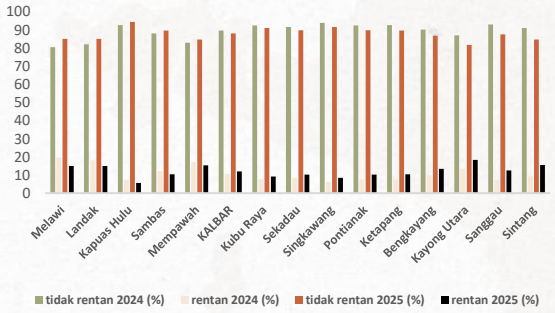

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi ekonomi rumah tangga juga dapat dibaca dari aset yang dimiliki. Kepemilikan aset digunakan sebagai potret sederhana untuk melihat ketahanan ekonomi rumah tangga dan ruang gerak rumah tangga dalam memperbaiki kualitas hidup secara bertahap, termasuk kualitas hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pada 2025, persentase rumah tangga dengan aset rendah relatif tinggi di Kayong Utara (47,41%), Landak (45,82%), dan Bengkayang (44,13%), sedangkan yang relatif lebih rendah antara lain Singkawang (20,97%), Kota Pontianak (22,89%), dan Mempawah (23,65%). Perubahan 2024–2025 menunjukkan variasi yang kuat. Peningkatan aset rendah terbesar terjadi di Melawi (naik 5,25 poin persentase), sementara penurunan aset rendah terlihat kuat di Sekadau (turun 11,27 poin

persentase), Sanggau (turun 7,72 poin persentase), dan Mempawah (turun 7,69 poin persentase). Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas ekonomi rumah tangga tidak merata antardaerah, sehingga perbaikan standar hidup juga berpotensi berjalan dengan kecepatan yang berbeda antarwilayah.

Grafik 5.22 Perbandingan Kepemilikan Aset (Aset Rendah vs Relatif Baik) per Kabupaten/Kota

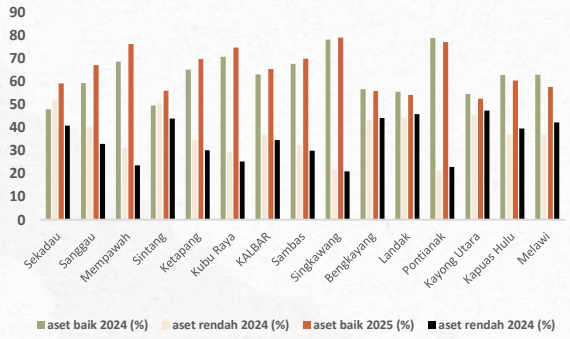

Sumber: BPS Susenas KOR Maret 2024 & 2025 (diolah)

Dari sisi instrumen fiskal, dukungan terhadap dimensi standar hidup layak dapat dibaca melalui belanja pemerintah menurut fungsi yang beririsan dengan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga dan pemenuhan layanan dasar, terutama fungsi Ekonomi, Perumahan dan Fasilitas Umum, serta Perlindungan Sosial.

Grafik 5.23 Perbandingan Belanja Pemerintah per Fungsi Terkait Dimensi Standar Hidup Layak

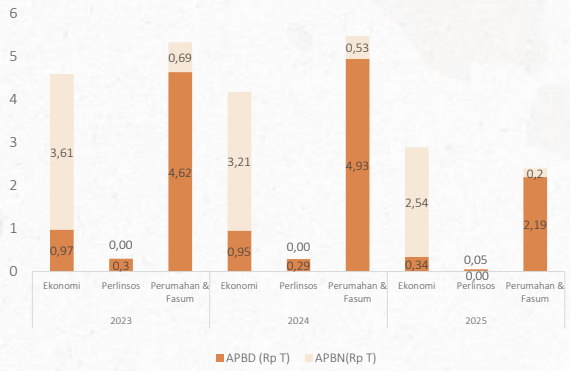

Sumber: Sintesa (diolah)

Pada fungsi Ekonomi, total belanja pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) menurun dari Rp4,58 triliun (2023) menjadi Rp4,16 triliun (2024) dan Rp2,88 triliun (2025). Pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, total belanja pemerintah berada pada Rp5,31 triliun (2023) dan Rp5,46 triliun (2024), lalu turun menjadi Rp2,38 triliun (2025). Sementara itu, pada fungsi Perlindungan Sosial, total belanja pemerintah tercatat Rp0,30 triliun (2023), Rp0,29 triliun (2024), dan Rp0,05 triliun (2025). Pola ini menunjukkan bahwa peran APBD cukup dominan, terutama pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, sementara pada 2025 terlihat penurunan besaran belanja pada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penguatan layanan dasar dan perlindungan rumah tangga rentan.

Selanjutnya, dinamika belanja pemerintah menurut fungsi tersebut dapat dibaca berdampingan dengan gambaran kondisi rumah tangga. Pada periode yang sama, partisipasi ekonomi provinsi cenderung stabil membaik, namun pada level kabupaten/kota masih terlihat kantong kerentanan yang perlu dicermati, terutama wilayah dengan kerentanan pangan yang tinggi atau meningkat, aset rendah yang besar, serta kualitas hunian yang relatif tertinggal atau menurun. Dalam konteks ini, kesinambungan belanja pemerintah pusat dan daerah yang memperkuat kapasitas ekonomi produktif dan melindungi rumah tangga rentan menjadi penting agar perbaikan standar hidup dapat lebih merata antardaerah.

Dengan demikian, diagnosis dimensi standar hidup layak mengarah pada dua temuan utama. Pertama, indikator provinsi menunjukkan partisipasi ekonomi yang relatif stabil membaik, namun pemerataan standar hidup masih menghadapi tantangan karena kualitas hunian, kerentanan pangan, dan kondisi aset menunjukkan variasi kabupaten/kota yang tajam. Kedua, terdapat kantong wilayah yang membutuhkan pendekatan lebih terarah, khususnya daerah dengan kerentanan pangan tinggi atau memburuk serta aset rendah yang besar. Penguatan kesempatan kerja produktif, perlindungan rumah tangga rentan, dan perbaikan kondisi hidup dasar menjadi kunci agar perbaikan standar hidup lebih cepat tercermin pada penurunan kerentanan dan peningkatan kualitas hidup.

5.2.7 Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi IPM Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pembahasan pada subbab sebelumnya, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang berkaitan dengan aspek kemiskinan, ketenagakerjaan, serta efektivitas belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai variabel sosial dan fiskal daerah. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan data *cross-section* tahun 2025 dengan unit observasi

sebanyak 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Analisis ini akan menggunakan lima variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia di tingkat kabupaten/kota dan variabel independen (X) yang digunakan terdiri dari Persentase Penduduk Miskin (X_1), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X_2), Jumlah Belanja Kesehatan (X_3), dan Jumlah Belanja Pendidikan (X_4).

Pemodelan dilakukan melalui estimasi regresi linear berganda yang dilengkapi dengan pengujian parameter model. Selanjutnya, untuk memastikan validitas dan kelayakan model, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, akan dilanjutkan dengan interpretasi model regresi linear berganda.

a) Pemodelan Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan bantuan aplikasi Minitab 18, hasil estimasi parameter model regresi linear berganda pada seluruh variabel analisis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Hasil Estimasi Parameter Model Regresi Linear Berganda

Parameter	Nilai Estimasi
$Constant$	104,2
X_1	-0,541
X_2	-0,427
X_3	-0,0030
X_4	0,0263

Sumber: Aplikasi Minitab 18 (diolah)

Model tersebut menghasilkan nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 64,52%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 64,52% variasi IPM antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat dapat dijelaskan oleh variabel Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Belanja Kesehatan, dan Belanja Pendidikan dalam model. Sementara itu, sisanya sebesar 35,48% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang dianalisis.

Selanjutnya, dilakukan uji serempak parameter model regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,037. Hipotesis pada uji serempak parameter model adalah:

H_0: Tidak terdapat pengaruh Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Jumlah Belanja Kesehatan, dan Jumlah Belanja Pendidikan secara serempak terhadap IPM.

H_1: Terdapat pengaruh Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Jumlah Belanja Kesehatan, dan Jumlah Belanja Pendidikan secara serempak terhadap IPM.

Dengan taraf signifikansi 5%, nilai tersebut lebih kecil dari α sebesar 0,05, sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara serempak Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Jumlah Belanja Kesehatan, dan Jumlah Belanja Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat tahun 2025.

Setelah diketahui bahwa variabel independen secara serempak berpengaruh terhadap IPM, langkah selanjutnya adalah melakukan uji individu parameter. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui variabel mana saja yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, sehingga dapat diidentifikasi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi capaian IPM antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Hipotesis pengujian yang akan digunakan adalah:

H_0: Tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap IPM secara individu.

H_1: Terdapat pengaruh variabel independen terhadap IPM secara individu.

Hasil uji individu parameter model dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Hasil Uji Individu Parameter Model Regresi Linear Berganda

Parameter	Nilai *t*	*P-Value*	Keputusan
$Constant$	7,46	0	-
X_1	-1,39	0,199	Terima H_0
X_2	-2,34	0,044	Tolak H_0
X_3	-0,28	0,789	Terima H_0
X_4	0,86	0,41	Terima H_0

Sumber: Aplikasi Minitab 18 (diolah)

Berdasarkan hasil uji individu parameter, dari seluruh variabel independen yang dianalisis, hanya variabel TPAK yang secara statistik terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat tahun 2025 pada tingkat signifikansi 5%. Sementara itu, variabel Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Belanja Kesehatan, dan Jumlah Belanja Pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individu terhadap IPM

Kalimantan Barat pada tahun 2025. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hasil estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara valid, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

b) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual dilakukan menggunakan metode Shapiro Wilk untuk memastikan bahwa residual dari model regresi linear berganda berdistribusi normal. Pemilihan metode Shapiro Wilk didasarkan pada jumlah sampel yang relatif kecil, sehingga uji ini dinilai lebih sesuai dan sensitif dalam mendeteksi penyimpangan dari distribusi normal. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap pemenuhan asumsi normalitas.

H_0: Residual berdistribusi normal.

H_1: Residual tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji Shapiro Wilk, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,693. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H_0 tidak ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

c) Uji Multikolinearitas

Penggunaan model regresi akan menjadi kurang tepat apabila terjadi kasus multikolinearitas karena ketidakstabilan taksiran regresi serta nilai koefisien regresinya sangat besar. Hasil uji multikolinearitas pada seluruh variabel prediktor ditampilkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 5.16 Hasil Uji Multikolinearitas

Parameter	Nilai VIF
X_1	1,26
X_2	1,29
X_3	1,23
X_4	1,65

Sumber: Aplikasi Minitab 18 (diolah)

Berdasarkan tabel dapat diketahui jika seluruh variabel prediktor tidak terindikasi kasus multikolinearitas yang ditandai dengan nilai VIF tidak lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model, sehingga model regresi layak untuk diinterpretasikan lebih lanjut.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan. Dalam analisis ini, pengujian heteroskedastisitas akan menggunakan metode Glejser. Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut.

H_0: Tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

H_1: Terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Minitab 18 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Parameter	*P-Value*	Keputusan
X_1	0,379	Terima H_0
X_2	0,169	Terima H_0
X_3	0,475	Terima H_0
X_4	0,213	Terima H_0

Sumber: Aplikasi Minitab 18 (diolah)

Berdasarkan hasil uji Glejser, seluruh variabel independen memiliki nilai *p-value* lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, varians residual dapat dikatakan bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga asumsi klasik terkait heteroskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak untuk diinterpretasikan lebih lanjut.

e) Interpretasi Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan model regresi linear berganda yang diolah menggunakan Minitab 18 untuk menguji faktor apa saja yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat, diperoleh persamaan regresi berikut.

$$\hat{Y} = 104{,}2 - 0{,}541\,X_1 - 0{,}427\,X_2 - 0{,}003\,X_3 + 0{,}0263\,X_4$$

Dalam model regresi ini Persentase Penduduk Miskin (X_1) dan Jumlah Belanja Pendidikan (X_4) tidak terbukti signifikan secara statistik. Namun demikian, arah koefisien keduanya telah sesuai dengan teori. Dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan Persentase Penduduk Miskin (X_1) sebesar 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 0,541 satuan dengan asumsi seluruh variabel independen bernilai konstan. Arah hubungan ini sejalan dengan naiknya tingkat

kemiskinan mencerminkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang merupakan tiga dimensi utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, peningkatan kemiskinan cenderung berdampak pada penurunan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Lubis (2023) yang menyatakan bahwa kemiskinan di suatu daerah memiliki kontribusi terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia daerah. Sementara itu, nilai koefisien X_4 bernilai positif dapat diartikan apabila Jumlah Belanja Pendidikan naik 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,0263 dengan variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda koefisien positif ini sesuai dengan teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa investasi pada sektor pendidikan merupakan salah satu determinan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (Maryozi et al., 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kahang et al. (2016) yang menemukan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki hubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat melalui indikator HLS dan RLS, yang mana kedua hal tersebut terus mengalami peningkatan selama tahun 2023-2025. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan yang dalam jangka menengah dan panjang meski belum cukup untuk mengakselerasi peningkatan IPM.

Selanjutnya, hasil estimasi menunjukkan TPAK (X_2) memiliki arah koefisien yang berbeda dari hubungan yang secara teoritis diharapkan, meski TPAK (X_2) berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia. Setiap kenaikan TPAK sebesar 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 0,427 satuan dengan asumsi seluruh variabel independen bernilai konstan. Hasil ini tidak sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja seharusnya mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Faelassuffa & Yuliani, 2021). Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nastiti dan Nailufar (2023) juga menemukan koefisien negatif pada pengaruh TPAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yang disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja serta partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh tingkat pendidikan dan kualitas pekerjaan yang memadai.

Temuan analisis pada variabel TPAK sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila peningkatan TPAK didominasi oleh pekerja pada sektor dengan pendapatan relatif rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas. Sesuai dengan potret pendidikan tertinggi penduduk Kalimantan Barat yang masih didominasi oleh lulusan SMP dan di bawahnya. Data BPS Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat, dimana pekerja pada sektor ini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan sektor non-pertanian (BPS Kalbar, 2025). Selain itu, masih tingginya penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kalimantan Barat relatif belum optimal. Tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah juga lebih mudah terserap di pasar kerja karena tidak menuntut banyak persyaratan, namun kondisi tersebut tidak selalu diikuti dengan tingkat pendapatan tinggi. Dengan demikian, peningkatan TPAK yang didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah dan sektor informal atau pertanian tradisional belum tentu mampu mendorong peningkatan IPM.

Selanjutnya pada variabel jumlah Belanja Kesehatan (X_3) menunjukkan koefisien regresi bertanda negatif, yang tidak sesuai dengan ekspektasi teoritis. Secara numerik, nilai koefisien tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan Jumlah Belanja Kesehatan 1 satuan dapat mengakibatkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,003 satuan dengan seluruh variabel independen diasumsikan konstan. Namun demikian, variabel ini tidak terbukti signifikan secara statistik, sehingga hubungan tersebut tidak dapat dinyatakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam model ini. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kahang et al. (2016) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan secara individu terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara teoritis, belanja kesehatan merupakan bentuk investasi publik yang berperan dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan derajat kesehatan masyarakat (Maryozi et al., 2022). Oleh karena itu, arah koefisien yang negatif dan tidak signifikan dalam penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan belanja kesehatan belum secara langsung tercermin dalam peningkatan indikator IPM. Kondisi ini dimungkinkan karena dampak belanja kesehatan bersifat tidak langsung dan memerlukan waktu, serta dipengaruhi oleh efektivitas dan kualitas pengelolaan anggaran. Selain itu, komposisi belanja yang lebih dominan pada belanja operasional dibandingkan belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat juga dapat memengaruhi hasil estimasi tersebut.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Jumlah Belanja Kesehatan, dan Jumlah Belanja Pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat, dengan kemampuan model dalam menjelaskan variasi IPM antar kabupaten/kota sebesar 64,52%. Namun secara parsial, hanya variabel TPAK yang terbukti signifikan, meskipun memiliki arah koefisien yang tidak sesuai dengan ekspektasi teoritis. Dengan demikian diperlukan kalibrasi ulang pada strategi akselerasi IPM dengan menyasar pada faktor yang signifikan untuk menjadi prioritas pada penyusunan kebijakan pemerintah terkait IPM di Kalimantan Barat.

5.2.8 Evaluasi Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Daerah 2023–2025

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2022 disusun sebagai instrumen untuk mengintegrasikan program dan kegiatan para pihak dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat, dengan orientasi mendorong pergeseran kategori IPM dari sedang ke tinggi melalui peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam batang tubuh regulasi, Pasal 2 mendefinisikan rencana aksi sebagai dokumen rencana kerja tingkat provinsi yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan hingga kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan rencana aksi sebagai pedoman pencapaian target dan indikator IPM, sekaligus menyebut indikator pembentuk IPM pada tiga dimensi: dimensi pengetahuan melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dimensi umur panjang dan hidup sehat melalui Umur Harapan Hidup, serta dimensi standar hidup layak melalui Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Dengan penguncian indikator seperti ini, Pergub menempatkan percepatan IPM sebagai agenda terukur.

Implikasinya, Pergub ini menjadi kerangka orkestrasi lintas perangkat daerah dan lintas level pemerintahan untuk menutup gap kinerja indikator pembentuk IPM melalui intervensi yang terarah. Pada kajian ini, evaluasi ditempatkan sebagai evaluasi desain kebijakan dan perangkat operasionalnya, serta keselarasan arah Pergub dengan dinamika indikator pada data 2024–2025.

5.2.7.1 Fokus dan Ruang Lingkup

Fokus kebijakan dalam Pergub ini dikunci sejak awal melalui Pasal 3, karena pasal tersebut bukan hanya menyebut tiga dimensi, tetapi juga menyatakan indikator pembentuk IPM yang menjadi rujukan target. Ini penting untuk evaluasi, karena standar keberhasilan desain rencana aksi pada akhirnya adalah kemampuan mendorong perbaikan pada indikator yang memang membentuk IPM, bukan sekadar menambah kegiatan.

Di luar perangkat daerah, Pergub juga membuka ruang kolaborasi dengan para pihak non pemerintah. Kerangka ini tampak pada bagian monitoring dan evaluasi dalam dokumen rencana aksi, yang mengatur bahwa kontribusi pihak non-pemerintah dapat dilaporkan melalui penilaian diri sukarela menggunakan *self assessment tool* yang disepakati. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Pergub mengakui IPM sebagai agenda lintas aktor, terutama untuk intervensi yang membutuhkan dukungan sumber daya non-APBD, inovasi layanan, atau perubahan perilaku.

Namun, karena pelaporannya bersifat sukarela, maka daya dorong kolaborasi bergantung pada konsistensi tata kelola dan definisi indikator kolaborasi yang dipakai dalam forum koordinasi. Dengan kata lain, Pergub sudah menyediakan pintu kolaborasi, tetapi kualitas hasil kolaborasi akan ditentukan oleh seberapa rapi mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya.

5.2.7.2 Tata Kelola dan Akuntabilitas

Aspek tata kelola terutama diikat oleh Pasal 6. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Koordinasi Daerah Percepatan Peningkatan IPM yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 6 juga

menegaskan bahwa koordinasi pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi sebagai sekretaris tim, serta menetapkan periodisasi yang jelas: pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali dan evaluasi dilakukan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pengaturan Pasal 6 kemudian dijabarkan lebih rinci pada bagian monitoring dan evaluasi dalam dokumen rencana aksi. Di bagian tersebut, monev diarahkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan rencana serta ketercapaian target pada tiga dimensi IPM. Mekanisme pembahasan capaian oleh kelompok kerja setiap enam bulan juga ditegaskan, termasuk fokus pada ketercapaian indikator pembentuk IPM dan dukungan anggaran, serta pelaporan berjenjang sampai pimpinan daerah. Pada sisi non-pemerintah, pelaporan melalui *self assessment tool* menegaskan bahwa dukungan para pihak diposisikan sebagai informasi yang dapat dihimpun, meskipun sifatnya tetap sukarela.

Dari sisi desain, Pergub telah menyediakan siklus akuntabilitas yang periodik dan struktur koordinasi yang jelas. Tantangan desain yang perlu dicermati adalah memastikan forum enam bulanan tidak hanya menjadi ruang pelaporan aktivitas, tetapi benar-benar dipakai untuk menilai kesesuaian output terhadap target dimensi IPM serta menajamkan lokus dan prioritas kegiatan ketika dinamika indikator bergerak tidak merata antarwilayah.

5.2.7.3 Pembiayaan dan Penguncian Program

Basis pembiayaan rencana aksi diatur pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa pembiayaan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat. Ruang pendanaan yang luas merupakan kekuatan desain, karena memungkinkan mobilisasi sumber daya lintas level dan kemitraan non-APBD sepanjang tidak mengikat.

Agar pembiayaan yang luas tersebut tidak tersebar tanpa fokus, penguncian program bergantung pada perangkat operasional yang ditetapkan dalam Pasal 4. Pasal 4 menjelaskan sistematika rencana aksi dan menegaskan bahwa uraian rencana aksi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pergub. Dengan konstruksi ini, keberhasilan desain Pergub tidak bisa dilepaskan dari kualitas lampiran.

Pada lampiran rencana aksi, format matriks memuat elemen yang relatif lengkap, seperti program, kegiatan dan subkegiatan, deskripsi, lokus kabupaten/kota, *output, baseline*, target tahunan 2023–2025, sumber pendanaan (APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, APBDes, swasta), dan penanggung jawab. Selain itu, terdapat lampiran kerangka logis yang dinyatakan digunakan untuk membantu pengembangan kerangka pengukuran kinerja dan memudahkan melihat hubungan kausal antar tujuan dalam kerangka waktu rencana aksi. Secara desain, kombinasi matriks rencana aksi dan kerangka logis ini seharusnya cukup untuk menautkan input dan output program dengan arah perbaikan indikator IPM, terutama bila dipakai secara konsisten dalam siklus pemantauan enam bulanan sebagaimana diatur Pasal 6.

5.2.7.4 Kesesuaian dengan Temuan Data

Bagian ini mengevaluasi keselarasan arah Pergub dengan dinamika indikator pada data 2024–2025 yang digunakan dalam kajian. Pijakan evaluasinya tetap merujuk pada Pasal 3 sebagai pengunci indikator pembentuk IPM, pada Pasal 4 sebagai pengunci perangkat operasional melalui lampiran, dan pada Pasal 6 sebagai pengunci mekanisme pemantauan periodik untuk penajaman.

a) Dimensi Kesehatan

Pada kajian ini, indikator agregat (UHH) membaik, tetapi indikator rumah tangga menunjukkan dinamika yang perlu direspons lebih terarah, terutama ketika keluhan kesehatan meningkat dan pemanfaatan layanan rawat jalan menurun, sementara rawat inap meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan agregat tidak selalu berjalan seiring dengan perbaikan kondisi kesehatan pada level rumah tangga, dan variasi antar kabupaten/kota menjadi penting untuk menentukan prioritas.

Dalam Pergub, dimensi kesehatan dikunci sebagai bagian dari indikator pembentuk IPM melalui Umur Harapan Hidup sebagaimana disebut dalam Pasal 3. Sementara kanal intervensinya diturunkan dalam lampiran rencana aksi yang memuat program, lokus, *output*, dan target tahunan sebagaimana mandat Pasal 4. Karena itu, kesesuaian desain Pergub terhadap dinamika data sangat bergantung pada bagaimana lampiran dan mekanisme pemantauan periodik dimanfaatkan. Pasal 6 memberikan ruang pemantauan enam bulanan, yang secara desain dapat digunakan untuk menajamkan lokus ketika indikator rumah tangga menunjukkan peningkatan tekanan kesehatan di kabupaten/kota tertentu. Dengan pendekatan ini,

Pergub sudah menyediakan kerangka, dan pembacaan data 2024–2025 memperkuat urgensi penajaman lokus layanan primer dan intervensi promotif preventif pada wilayah yang tekanan indikatornya memburuk.

b) Dimensi Pendidikan

Temuan pendidikan dalam kajian menonjol pada isu keberlanjutan sekolah menuju jenjang menengah atas. Angka Partisipasi Sekolah usia 16–18 tahun lebih rendah dibanding kelompok usia sebelumnya, dan komposisi pendidikan tertinggi menunjukkan porsi SMA dan setelahnya yang relatif lebih kecil pada sebagian wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa titik rawan berada pada transisi dari SMP menuju SMA, yang juga tampak bervariasi antar kabupaten/kota.

Dalam Pergub, dimensi pengetahuan dikunci melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pasal 3) agar selaras dengan definisi IPM. Kanal program dijabarkan dalam lampiran rencana aksi sesuai mandat Pasal 4, termasuk peningkatan akses pendidikan dan program kesetaraan untuk memperkuat rata-rata lama sekolah. Kesesuaian desain terhadap temuan data bergantung pada ketepatan sasaran di kabupaten/kota dengan kesenjangan terbesar serta efektivitas pemantauan enam bulanan (Pasal 6) dalam menjaga fokus intervensi pada titik rawan transisi SMP ke SMA, terutama terkait akses, biaya tidak langsung, dan kebutuhan bekerja.

c) Dimensi Standar Hidup layak

Dalam kajian ini, dimensi standar hidup layak tidak hanya dibaca melalui indikator agregat, tetapi juga melalui kondisi rumah tangga yang lebih dekat dengan standar hidup sehari-hari, seperti kualitas hunian, kerentanan pangan, dan kepemilikan aset. Indikator-indikator tersebut menunjukkan variasi kabupaten/kota yang tajam, sehingga rata-rata provinsi berpotensi menutupi kantong wilayah yang lebih rentan.

Dalam Pergub, dimensi standar hidup layak dikunci melalui indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan sebagaimana disebut dalam Pasal 3, dan ditegaskan sebagai dimensi yang dinilai dalam mekanisme monitoring dan evaluasi pada dokumen rencana aksi. Arah program yang bersinggungan dengan penguatan ekonomi, distribusi barang, logistik, dan stabilitas harga tercermin pada lampiran rencana aksi sebagaimana mandat Pasal 4, sehingga secara desain tersedia kanal intervensi sistem yang mendukung keterjangkauan kebutuhan dasar. Kesesuaian desain Pergub terhadap temuan data terutama bergantung pada pemanfaatan siklus pemantauan sebagaimana diatur Pasal 6, agar program yang bersifat sistem dapat ditautkan pada perubahan kondisi rumah tangga di wilayah yang paling rentan. Dengan demikian, pembacaan berbasis data 2024–2025 memperkuat pentingnya penajaman lokus pada wilayah dengan kerentanan yang lebih tinggi, tanpa mengubah kerangka tujuan yang sudah dikunci Pergub.

Dengan kerangka Pasal 3 yang mengunci indikator pembentuk IPM, Pasal 4 yang menempatkan lampiran sebagai perangkat operasional rencana aksi, serta Pasal 6 yang mengatur pemantauan enam bulanan dan evaluasi tahunan, Pergub 98/2022 pada dasarnya telah menyediakan fondasi tata kelola percepatan IPM 2023–2025. Pembacaan terhadap temuan data 2024–2025 dalam kajian ini kemudian digunakan untuk menajamkan titik-titik prioritas dan kebutuhan penguncian lokus agar perangkat rencana aksi dapat lebih responsif terhadap dinamika antarwilayah. Oleh karena itu, bagian rekomendasi dan strategi pada kajian ini disusun dengan menjadikan perangkat Pergub tersebut sebagai rujukan, sekaligus memastikan usulan langkah bersifat terukur dan dapat ditindaklanjuti dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

5.2.9 Rekomendasi dan Strategi

Berangkat dari diagnosis tiga dimensi, arah rekomendasi utama kajian ini adalah mempercepat kenaikan IPM Kalimantan Barat dengan cara mengunci fokus pada indikator pembentuk IPM versi BPS, yaitu Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Karena tren provinsi sudah membaik namun masih tertinggal dari nasional dan variasi antar kabupaten/kota masih lebar, strategi percepatan perlu menggeser orientasi dari sekadar rata-rata provinsi menjadi penguatan lokus prioritas dan intervensi yang spesifik per dimensi. Dengan kata lain, yang dikejar bukan hanya “kenaikan angka”, tetapi penutupan kantong-kantong tertahan yang membuat akselerasi melambat dan kesenjangan internal tetap lebar.

Pada dimensi kesehatan, rekomendasi diarahkan pada penguatan layanan primer serta agenda promotif dan preventif yang lebih tajam antarwilayah, karena indikator agregat dapat membaik tetapi sinyal tekanan kesehatan masih dapat terlihat pada indikator rumah tangga.

Strateginya adalah memprioritaskan kabupaten/kota yang menunjukkan memburuknya indikator rumah tangga untuk penguatan pencegahan, deteksi dini, dan kemudahan akses rawat jalan, sekaligus mempertahankan praktik baik di wilayah yang membaik. Penguatan determinan kesehatan berbasis lingkungan tetap perlu dijaga, terutama layanan dasar yang beririsan dengan risiko kesehatan, agar perbaikan kesehatan agregat lebih cepat terkonversi menjadi penurunan keluhan dan perbaikan kualitas hidup sehari-hari.

Pada dimensi pendidikan, rekomendasi kuncinya adalah menutup isu keberlanjutan sekolah pada transisi SMP ke SMA, karena perbaikan agregat HLS dan RLS tidak otomatis berarti keberlanjutan sekolah sudah kuat di usia sekolah menengah atas. Strateginya adalah mengunci lokus kabupaten/kota dengan kesenjangan partisipasi sekolah usia 16–18 tahun dan komposisi pendidikan yang masih didominasi ≤SMP, lalu mengarahkan paket intervensi yang langsung menahan risiko putus sekolah: penguatan akses SMA dan keterjangkauan biaya tidak langsung, dukungan retensi bagi keluarga rentan, serta penguatan jalur pendidikan kesetaraan sebagai "jaring pengaman" bagi yang sudah terlanjur keluar dari sekolah. Dengan cara ini, belanja fungsi pendidikan dapat lebih nyata menguatkan keberlanjutan sekolah dan mempercepat pergeseran komposisi pendidikan ke SMA dan setelahnya.

Pada dimensi standar hidup layak, rekomendasi diarahkan pada pemerataan kemampuan rumah tangga mencapai standar hidup yang lebih layak, karena rata-rata provinsi dapat menutupi kantong kerentanan di level kabupaten/kota. Strateginya adalah mengunci wilayah yang menunjukkan kerentanan lebih tinggi pada indikator rumah tangga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, lalu mengarahkan bauran kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi produktif dan melindungi rumah tangga rentan, agar peningkatan standar hidup lebih cepat tercermin pada menurunnya kerentanan dan membaiknya kualitas hidup. Dalam kerangka tata kelola, strategi lintas dimensi yang paling penting adalah menjadikan siklus pemantauan enam bulanan dan evaluasi tahunan sebagai mekanisme penajaman lokus dan pergeseran prioritas, sehingga rencana aksi dan penganggaran tahunan benar-benar responsif terhadap dinamika data terbaru, bukan hanya meneruskan pola kegiatan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada kajian ini, terdapat berbagai temuan dimana variabel Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Jumlah Belanja Kesehatan, dan Jumlah Belanja Pendidikan berpengaruh signifikan pada IPM. Namun menjadi perhatian pada variabel TPAK dimana secara parsial hanya TPAK yang berpengaruh signifikan pada IPM namun memiliki arah koefisien yang tidak sesuai dengan ekspektasi teoritis. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan. Dengan demikian, upaya peningkatan IPM tidak cukup dengan hanya mendorong perluasan kesempatan kerja secara kuantitatif, tetapi juga perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, berupah layak, yang didukung oleh peningkatan keterampilan tenaga kerja. Perbaikan struktur ketenagakerjaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kerja terhadap dimensi standar hidup layak, sehingga ke depan hubungan antara partisipasi angkatan kerja dan IPM dapat bergerak searah dengan teori pembangunan ekonomi.

Pada aspek tata kelola, Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022 pada dasarnya sudah menyediakan kerangka yang memadai untuk percepatan IPM, mulai dari penguncian indikator pembentuk IPM, penempatan lampiran sebagai perangkat operasional, hingga siklus pemantauan enam bulanan dan evaluasi tahunan. Karena itu, rekomendasi pada level regulasi bukan menambah aturan baru, melainkan memastikan instrumen yang sudah ada benar-benar dipakai sebagai "mesin pengarah" program lintas perangkat daerah dan lintas kabupaten/kota. Strateginya adalah mengoperasionalkan rencana aksi Pergub secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, lalu menggunakan forum pemantauan periodik sebagai ruang penajaman lokus dan prioritas berdasarkan dinamika indikator terbaru, sehingga rencana aksi tidak berhenti pada daftar kegiatan, tetapi menjadi mekanisme koreksi kebijakan yang terukur dan responsif antarwilayah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI
Kesimpulan Dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada setiap Bab, dapat disimpulkan poin-poin sebagai berikut:

6.1.1. Sasaran dan Tantangan Pembangunan

1) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2026 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi guna menjamin kesinambungan pembangunan daerah pada masa kekosongan RPJMD, dengan tetap berpedoman pada visi jangka panjang "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
2) Perumusan RPD Tahun 2025–2026 menggunakan pendekatan strategis yang mengacu pada RPJPD 2025–2045, agenda RPJMN 2025–2029, rancangan RPJMD 2025–2029, serta isu-isu strategis daerah, sehingga arah kebijakan tetap terintegrasi dan selaras dengan pembangunan nasional.
3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempertimbangkan empat hal dalam menyusun RPD 2025-2026, yakni:
   - Sembilan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045;
   - Delapan agenda pembangunan RPJMN 2025-2029;
   - Tujuh agenda pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029;
   - Isu-isu strategis 2025-2026.
4) Tujuan pembangunan daerah periode 2025–2026 difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing, perwujudan perekonomian yang tumbuh inklusif dan berkelanjutan, serta reformasi birokrasi yang berprinsip *good governance*.
5) Target indikator kinerja dalam RPD 2025–2026 diarahkan pada peningkatan IPM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan akuntabilitas birokrasi.
6) RKPD Tahun 2025 sebagai penjabaran RPD mengusung tema penguatan perekonomian dan daya saing daerah melalui pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, stabilisasi daya beli, percepatan penurunan stunting, penguatan UMKM dan investasi, serta peningkatan infrastruktur dasar.
7) Strategi pengembangan wilayah diterapkan melalui pendekatan kluster kabupaten/kota berdasarkan potensi unggulan, karakteristik geografis, serta permasalahan spesifik wilayah, guna mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas serta pusat pertumbuhan baru.
8) Keselarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029 memastikan harmonisasi kebijakan daerah dan nasional, khususnya pada prioritas infrastruktur, pembangunan SDM, perekonomian inklusif, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.
9) Capaian indikator makro pembangunan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif positif dan berada pada jalur target, terutama pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta rasio gini, yang mencerminkan stabilitas dan penguatan fondasi ekonomi daerah.
10) Terdapat sejumlah tantangan pembangunan pada sektor investasi, infrastruktur, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, serta pemerataan layanan dasar seperti air bersih, yang memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas SDM, serta sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Kalimantan Barat.

6.1.2. Analisis Ekonomi Regional

1) Ekonomi Kalimantan Barat Pada Tahun 2025 Tumbuh Sebesar 5,39% (*c-to-c*) Dan Pada Triwulan IV-2025 Tumbuh 5,62%. Hampir

seluruh lapangan usaha mengalami bertumbuhan positif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 2,83% secara *q-to-q*.

2) Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Triwulan IV-2025 mencapai Rp328,57 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp171,33 triliun pada triwulan IV-2025.
3) Pada Desember 2025, Kalimantan Barat mengalami inflasi 1,85% secara *y-on-y*, berada diatas tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,92%. IHK Kalimantan Barat sebesar 108,8% dengan tingkat inflasi *m-to-m* dan tingkat inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar 0,28% dan 1,85%.
4) IPM Di Kalimantan Barat Pada Tahun 2025 Mencapai 72,09 (Kategori Tinggi), Namun Masih Berada Dibawah Capaian IPM Nasional. Tingkat IPM Kalimantan Barat selama periode 2023 – 2025 mengalami tren kenaikan.
5) Persentase Penduduk Miskin Pada September 2025 Sebesar 5,97%, dan Selalu Berada di Bawah Presentase Kemiskinan Nasional Sejak Tahun 2023 s.d. 2025. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada September 2025 mencapai 322,54 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun 8,41 ribu orang.
6) Pada September 2025, koefisien rasio gini di Kalimantan Barat sebesar 0,308, terpantau lebih baik karena masih terjaga dibawah rata rata nasional. Angka ini naik 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,316.
7) TPT di Kalimantan Barat Sebesar 4,63% (Selalu Berada Di Bawah TPT Nasional Sejak Tahun 2023 s.d 2025), Sektor yang Menyerap Tenaga Kerja Paling Besar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sebesar 41,44%, dan Penduduk yang bekerja Didominasi oleh Tingkat Pendidikan SD Ke Bawah (38,17%).
8) Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat Bulan Desember 2025 sebesar 170,26 Poin (tertinggi se-Regional Kalimantan) dan NTP Tahunan 2025 sebesar 169,94 Poin. Secara umum, jika NTP >100 maka petani mengalami surplus. Sejalan dengan NTP, NTN di Kalimantan Barat selalu terjaga di angka >100, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi nelayan Kalbar mengalami surplus karena harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.
9) Berdasarkan *review* atas sasaran makro dan kesejahteraan antara capaian dan target tahun 2025 dalam RKPD, seluruh sasaran di Kalimantan Barat telah tercapai.

6.1.3. Analisis Fiskal Regional

1) Pendapatan Negara dan Hibah di regional Kalimantan Barat Tahun 2025 terealisasi Rp12.980,92 miliar (104,54% dari target) yang didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp11.639,88miliar.
2) Belanja Negara regional Kalimantan Barat terealisasi Rp29.982 miliar atau 95,79% dari pagu, dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp9.756,75 miliar atau berkontribusi 94,45% dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp20.226,20 miliar atau berkontribusi 96,45%. Realisasi Belanja Negara Tahun 2025 terkontraksi 9,11% yoy seiring dengan penurunan alokasi pagu dan kebijakan efisiensi sejak awal tahun anggaran 2025 dengan tetap berorientasi pada outcome yang efektif.
3) Realisasi BPP di Kalimantan Barat masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sementara Belanja Modal konsisten menjadi jenis belanja dengan penyerapan terendah. Pada tahun 2025, rendahnya serapan Belanja Modal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (i) keterbatasan akses dan infrastruktur, (ii) Terbatasnya calon penyedia/vendor yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, (iii) Keterlambatan proses pengadaan, pendaftaran kontrak, dan penyelesaian fisik pekerjaan dan konstruksi, (iv) serta kendala lainnya termasuk sistem, SDM, dan faktor alam.
4) Penyaluran TKD tertinggi secara nominal di lingkup Kalimantan Barat terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yakni Rp2.991,50 miliar, sedangkan terendah pada Kota Singkawang sebesar Rp669, miliar. Sementara itu, dari sisi persentase terhadap total alokasi TKD, realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Melawi (99,18%) dan terendah oleh Kabupaten Sekadau (94,21%). Komponen DAK fisik mengalami kontraksi sebesar 83,59% yang

disebabkan oleh kebijakan efisiensi, sementara Komponen DBH, DAU, dan DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan tahun 2025

5) Tiga Kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi terbesar di regional Kalimantan Barat adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu berdasarkan fungsi, pagu APBN regional Kalimantan Barat tahun 2025 dengan alokasi tertinggi terdapat pada Pelayanan Umum, Ekonomi, serta Ketertiban dan Keamanan.
6) Defisit APBN Regional Kalimantan Barat pada Tahun 2025 mencapai Rp2.9982,95miliar, menyempit 3,15% (yoy), yang mencerminkan pengelolaan belanja negara semakin efektif dan efisien.
7) Penyaluran KUR di Kalimantan Barat turun sekitar Rp15 miliar pada tahun 2025 atau sekitar 0,36persen dari realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp4,27 triliun menjadi sebesar Rp4,31 triliun. Penyaluran terbesar terdapat pada sektor sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp1.254,13 miliar untuk 14.222 pelaku usaha. Sementara Penyaluran UMi Kalimantan Barat Tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan sekitar Rp62,98 miliar atau setara dengan 153,11% secara yoy. Penyaluran terbesar terealisasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp176,75 miliar atau sekitar 97,35%.
8) Realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2025 mencapai Rp23.329,47 miliar atau 81,46% dari target yang telah ditetapkan. Sementara pada sisi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp20.534,43 miliar atau 69,88% dari pagu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, APBD Kalimantan Barat masih menunjukkan kondisi surplus sebesar Rp2.795,04 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp3.430,48 miliar.
9) Selama tahun 2023 s.d. 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat mengalami penurunan. Namun, pos Pendapatan Transfer memiliki kontribusi tertinggi untuk total pendapatan daerah yakni sebesar 78,13% untuk tahun 2023 dan 78,68% untuk tahun 2024, dan 76,25% untuk tahun 2025.
10) Belanja Daerah terbesar berada pada pos Belanja Operasi sebesar Rp15.268,12 miliar, disusul oleh belanja transfer sebesar Rp3.072,00 miliar dan belanja modal sebesar Rp2.163,58 miliar serta belanja tidak terduga sebesar Rp30,73 miliar.
11) Realisasi pendapatan konsolidasian tingkat wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 mencapai Rp18.474,15 miliar, mengalami kontraksi sebesar 3,82% dibanding tahun 2024. Pendapatan konsolidasi didominasi oleh pos Pendapatan Perpajakan dan disusul oleh pos PNBP.
12) Belanja konsolidasian tingkat wilayah Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai Rp32.691,42 miliar, mengalami kontraksi sebesar 15,79%, terdiri dari dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp29.993,35 miliar dan pemerintah daerah Rp17.813,74 miliar dan telah mengalami proses eliminasi atas akun-akun resiprokal.

6.1.4. Pengembangan Ekonomi Daerah

1) Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) di lingkup Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai Rp616,03 miliar yang tersebar dalam 8 bidang DAK Fisik yakni Air Minum, Irigasi, Jalan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Perumahan, serta .Sanitasi. Penyerapan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik (RO Harmonis) sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 99,07% atau Rp610,34 miliar
2) Alokasi DAK Fisik yang telah dilakukan sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat pada tahap perencanaan/penganggaran berdasarkan pagu akhir setelah dilaksanakan pencadangan sebesar Rp795,68 miliar dan tersalurkan sebesar 95,43% atau Rp759,32 miliar. Alokasi pagu tersebut tersebar dalam enam bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

3) Ditinjau dari besaran pagu, alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) didominasi oleh bidang Jalan dan Irigasi, sejalan dengan kebijakan pencadangan DAK Fisik pada sektor konektivitas dan irigasi. Sementara itu, pagu DAK Fisik lebih difokuskan pada bidang Kesehatan dan Air Minum. Kondisi ini menunjukkan adanya keselarasan kebijakan, di

mana Belanja K/L (RO Harmonis) diarahkan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan, sedangkan DAK Fisik difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

4) Alokasi Belanja K/L (RO Harmonis) yang mendukung DAK Fisik di Kalimantan Barat tersebar pada empat Kementerian/Lembaga dan 20 Satuan Kerja dengan total 34 jenis Rincian *Output* (RO).
5) Kementerian Pekerjaan Umum memiliki dominasi pagu yakni 98,32% dari total pagu Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Alokasi pagu pada Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan pada pembangunan, preservasi dan dukungan infrastruktur konektivitas yakni Bidang Jalan.
6) Realisasi penyerapan Belanja K/L (RO Harmonis) di lingkup Kalimantan Barat telah mencapai 99,07% dan tergolong optimal. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat sejumlah kendala, khususnya pada aspek penganggaran, sumber daya manusia, eksekusi kegiatan, pengadaan barang/jasa, serta regulasi:
   - Pada aspek penganggaran, terdapat keterbatasan revisi anggaran (khususnya perjalanan dinas), ketidakpastian pembukaan blokir, deviasi Halaman III DIPA akibat keterlambatan pertanggungjawaban penyedia, dampak kebijakan efisiensi belanja, serta pemblokiran anggaran tertentu termasuk pekerjaan SBSN yang masih menunggu persetujuan MYC.
   - Pada aspek sumber daya manusia, terjadi keterbatasan pejabat perbendaharaan yang menyebabkan rangkap jabatan serta pergantian pejabat yang berdampak pada belum optimalnya penguasaan aplikasi pengelolaan keuangan.
   - Pada aspek eksekusi kegiatan, kendala meliputi faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, keterlambatan penetapan penerima bantuan dan prasyarat kegiatan, belum optimalnya kesiapan Pedum dan Juknis serta adanya perubahan regulasi teknis di tengah tahun, serta kenaikan harga bahan.
   - Pada aspek pengadaan barang dan jasa, tantangan muncul dari keterlambatan proses lelang, keterbatasan fitur dan referensi harga dalam aplikasi, kewajiban TKDN yang memerlukan inden, perbedaan harga *e-catalog* dengan harga pasar, serta kendala pada sisi penyedia.
   - Pada aspek regulasi, ketentuan dari K/L pusat dan perubahan regulasi Kementerian Keuangan di tengah tahun anggaran menuntut penyesuaian cepat, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan realisasi anggaran.
7) Penyaluran DAK Fisik pada 10 bidang yang diharmonisasikan dengan Belanja K/L hingga akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 95,45% dari pagu akhir. Meskipun capaian tersebut tergolong optimal, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala tersebut dipetakan menggunakan *Affinity Diagram* ke dalam lima kategori utama, yaitu regulasi, dokumen dan pelaporan, pelaksanaan, koordinasi, serta perencanaan.
   - Pada kategori regulasi, kendala yang terjadi adalah keterlambatan penerbitan petunjuk, penyesuaian/perubahan regulasi dan kewajiban penggunaan *e-catalog*.
   - Pada kategori dokumen dan pelaporan kendala, yang terjadi adalah penyampaian dokumen syarat salur di *last minute*, ketidaksesuaian dokumen syarat salur, dan lambatnya penginputan SP2D BUD.
   - Pada kategori pelaksanaan, kendala yang terjadi adalah lokasi pembangunan infrastruktur yang tidak layak serta terhambatnya persiapan dan pelaksanaan PBJ.
   - Dalam kategori koordinasi, kendala yang terjadi adalah pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang sebagian besar dilakukan oleh staf teknis, sehingga pengambilan keputusan strategis dan percepatan penyelesaian permasalahan menjadi kurang optimal.
   - Pada kategori perencaan, kendala yang dihadapi adalah penyunan alokasi anggaran RK terlalu tinggi serta usulan kegiatan tidak sesuai dengan alokasi anggaran.
8) Sebagai upaya memotret tingkat sinkronisasi antara Belanja K/L (RO Harmonis) dan DAK Fisik, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah menyebarkan kuesioner kepada 15 pemerintah

daerah serta satuan kerja penerima alokasi RO Harmonis. Hasil pengolahan kuesioner tersebut menunjukkan bahwa:

- Pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kegiatan untuk menghindari tumpang tindih serta menjalin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, baik melalui pertemuan maupun komunikasi virtual. Namun, koordinasi tersebut umumnya masih bersifat tentatif dan lebih berfokus pada aspek teknis pelaksanaan dan penyaluran DAK Fisik.
- Sementara itu, satuan kerja juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait lokasi, pagu, dan penerima bantuan, meskipun umumnya dilakukan pada tahap verifikasi anggaran atau saat muncul kendala realisasi. Selain itu, satuan kerja melakukan koordinasi dengan kantor pusat masing-masing dalam rangka sinkronisasi alokasi anggaran, yang pada beberapa satker telah dilaksanakan secara periodik.

6.1.5. Analisis Tematik

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat

1) Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan realisasi Program MBG terbesar di Regional Kalimantan. Hal tersebut dipengaruhi oleh:
   - Kondisi geografis, dimana menjadi provinsi terluas kedua setelah Kalimantan Tengah.
   - Jumlah Penduduk Kalimantan Barat merupakan yang terbesar di regional Kalimantan pada tahun 2025.
   - Usia penduduk, kelompok Balita, Sekolah, dan Lansia di Kalimantan Barat lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan.
   - Jumlah sekolah dan siswa di Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi di regional Kalimantan.
2) Berdasarkan hasil uji Friedman, dapat disimpulkan bahwa implementasi MBG di Kalimantan Barat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan harga bahan pokok. Ketiadaan pengaruh tersebut dipengaruhi oleh adanya rangkaian *festive season* yang berlangsung sejak Triwulan IV 2025 hingga Triwulan II 2025, pada Trwiulan III DAN Triwulan IV 2025 aktivitas ekonomi mulai berangsur normal. Meski demikian, fluktuasi harga tetap terjadi pada Triwulan III dan Triwulan IV salah satunya akibat adanya dinamika stok komoditas di pasar, baik karena faktor peningkatan permintaan maupun faktor keterlambatan pasokan dari produsen.
3) Berdasarkan hasil uji Friedman, tidak terdapat perubahan capaian NTP setelah implementasi program MBG di Kalimantan Barat. Faktornya dapat berupa bahan baku dari dalam wilayah Kalimantan Barat yang terbatas sehingga harus mengandalkan pasokan dari luar Kalimantan Barat, bahkan terdapat ketergantungan terhadap Pulau Jawa khususnya tanaman pangan.
4) Sesuai dengan hasil Uji Friedman, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi MBG memberi pengaruh terhadap tingkat inflasi pada komponen makanan, minuman, dan tembakau di lima Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama dua belas bulan terakhir dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.
5) Isu, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Barat meliputi:
   - Target jumlah SPPG Kalimantan Barat belum memenuhi kebutuhan ideal, berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik di Provinsi Kalimantan Barat diperlukan 829 SPPG untuk mencapai seluruh sasaran sedangkan target SPPG yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Kalimatan Barat adalah sebanyak 586 unit (Sintesa, 2025), atau sekitar 70,68% dari kebutuhan ideal daerah.
   - Realisasi penerima manfaat dan jumlah SPPG Program MBG di Kalimantan Barat masih jauh di bawah target, sehingga diperlukan percepatan implementasi untuk memastikan cakupan program tercapai. Optimalisasi pemanfaatan anggaran serta penguatan tata kelola dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci akselerasi pelaksanaan.
   - Kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan SPPG masih belum seragam antarunit, dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang dan ketiadaan format standar pelaporan. Upaya penguatan melalui lokakarya DJPb–BDK Pontianak telah meningkatkan pemahaman dan

harmonisasi, namun masih menunggu sistem pelaporan resmi dari BGN untuk konsistensi nasional. Selanjutnya dilakukan pengembangan Aplikasi KAPUAZ sebagai keberlanjutan laporan Penggunaan Anggaran SPPG.

- Pelaksanaan Program MBG di beberapa kabupaten/kota meningkatkan permintaan pangan dan mendorong inflasi komponen makanan, minuman, dan tembakau, terutama pada komoditas beras, ikan, dan minyak goreng. Tanpa penguatan pasokan lokal dan perbaikan distribusi, tekanan inflasi pangan berpotensi berlanjut.
- Hingga Triwulan IV, Program MBG belum memberikan dampak signifikan terhadap NTP dan NTN di Kalimantan Barat, sehingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan belum optimal. Diperlukan optimalisasi keterhubungan program dengan rantai pasok dan penyerapan produksi lokal agar manfaat MBG lebih langsung dirasakan produsen pangan daerah.

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat

1) IPM Kalimantan Barat menunjukkan tren membaik pada periode 2023–2025, namun perbaikan agregat belum otomatis berarti perbaikan yang merata antarkabupaten/kota. Variasi indikator antarwilayah masih terlihat, sehingga rata-rata provinsi berpotensi menutupi kantong wilayah yang tertahan dan membuat akselerasi IPM berjalan kurang optimal.
2) Indikator agregat (UHH) bergerak membaik, tetapi indikator rumah tangga menunjukkan dinamika yang perlu dicermati, terutama ketika keluhan kesehatan meningkat dan pemanfaatan layanan rawat jalan menurun, sementara rawat inap meningkat. Pola ini mengindikasikan bahwa perbaikan kesehatan belum sepenuhnya tercermin pada kondisi rumah tangga, serta terdapat kebutuhan penajaman lokus dan penguatan layanan primer serta promotif–preventif agar outcome kesehatan lebih terasa.
3) Perbaikan indikator pendidikan agregat (HLS dan RLS) menunjukkan arah positif, namun isu utama tetap berada pada keberlanjutan sekolah menuju jenjang menengah atas, tercermin dari kesenjangan partisipasi sekolah usia 16–18 tahun dibanding usia lebih muda. Variasi kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian wilayah masih didominasi capaian pendidikan ≤SMP, sehingga peningkatan RLS berpotensi melambat bila transisi SMP ke SMA tidak menjadi fokus intervensi.
4) Peningkatan standar hidup pada level agregat perlu dibaca bersama kondisi rumah tangga, karena indikator yang dekat dengan kehidupan sehari-hari menunjukkan kantong kerentanan di level kabupaten/kota. Variasi pada kualitas hunian, kerentanan pangan, dan kepemilikan aset memperlihatkan bahwa kemampuan rumah tangga mencapai standar hidup yang lebih layak belum merata, sehingga penguatan standar hidup perlu lebih terarah pada wilayah dan kelompok rumah tangga yang relatif rentan.
5) Analisis regresi kabupaten/kota tahun 2025 yang menggunakan variabel Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Belanja Kesehatan, dan Belanja Pendidikan menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama relevan dalam menjelaskan perbedaan IPM antarwilayah. Namun secara parsial hanya TPAK yang signifikan (p-value 0,044) dengan koefisien negatif (−0,427), yang mengindikasikan bahwa kenaikan partisipasi kerja di Kalbar belum identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan karena didorong oleh penyerapan kerja berproduktivitas dan berupah relatif rendah serta tingkat pendidikan yang terbatas.
6) Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022 dirancang untuk rencana aksi percepatan IPM 2023–2025. Karena periode tersebut telah berakhir, fokus kebijakan berikutnya adalah menutup periode melalui evaluasi akhir dan menyiapkan rencana aksi percepatan IPM periode berikutnya yang selaras dengan dokumen perencanaan terbaru, dengan tetap memanfaatkan struktur rencana aksi yang sudah baik.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab I s.d. bab V, terdapat rekomendasi sebagai berikut:

6.2.1. Sasaran, Tantangan Pembangunan, Kinerja Ekonomi dan Fiskal Kalimantan Barat

Pemerintah Pusat dan Kementerian/ Lembaga (K/L):

1) Optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara baik Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pennerimaan Cukai melalui:
   - penguatan pengawasan perpajakan dan ekstensifikasi sektor dominan seperti perdagangan besar, pertanian, industri pengolahan untuk mengurangi ketergantungan pada PPN dan PPh, Penguatan koordinasi DJP dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan formal maupun material;
   - intensifikasi pengawasan Bea Cukai terus dioptimalkan untuk menjaga tern positif penerimaan terutama terhadap barang-barang illegal;
   - optimalisasi pemanfaatan BMN idle melalui skema kerja sama pemanfaatan, sewa, atau KPBU kecil.
2) Percepatan penyusunan juknis dan pedoman teknis agar satker tidak menunggu realisasi belanja hingga pertengahan tahun, penerapan lelang dini secara konsisten, terutama pada belanja modal yang selama ini realisasinya rendah, serta mendorong satker untuk mengkonsolidasikan paket pengadaan dan memperluas penyedia lokal melalui pelatihan penggunaan e-katalog V6.
3) APBN dan APBD perlu tetap diarahkan pada program strategis yang menjaga daya beli, stabilisasi harga pangan, dan penguatan ketahanan pangan.

Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Barat:

1) Melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah berbasis digitalisasi dan penguatan pengelolaan BUMD dalam hal optimalisasi dividen sebagai sumber PAD.
2) Mendorong implementasi aplikasi e BLUD, e Billing, dan integrasi pembayaran digital agar efisiensi meningkat dan pencatatan lebih akurat serta pelatihan SDM untuk meningkatkan tata kelola dan inovasi layanan kesehatan pada BLUD sektor kesehatan.
3) Meningkatkan sosialisasi ke UMKM mengenai skema KUR yang benar agar masyarakat tidak beralih ke peer to peer lending ilegal atau berisiko tinggi.
4) Penyusunan cash forecasting triwulanan yang disiplin untuk mencegah penumpukan belanja di akhir tahun.
5) Sinkronisasi regulasi daerah agar tidak memperlambat eksekusi anggaran.
6) Perlu evaluasi berkala terhadap kesiapan OPD dalam memenuhi target output dan RVRO setelah terjadi pemotongan atau revisi anggaran
7) Penguatan Kapasitas SDM Perlu pelatihan intensif bagi pejabat perbendaharaan, pejabat PBJ, operator, dan pengelola keuangan daerah.

Satuan Kerja:

1) Melakukan perbaikan pada setiap proses tahapan pengadaan barang dan jasa serta dapat melakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan hambatan dalam pengadaan barang dan jasa.
2) Berkoordinasi dengan unit Eselon I K/L untuk persiapan kebutuhan pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa yang sumber dana dari SBSN agar dalam proses penyelesaian pekerjaan memiliki waktu yang memadai.
3) Berkoordinasi dengan Eselon I K/L berkenaan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pembukaan blokir. Selanjutnya dapat dilakukan pembahasan pembukaan blokir anggaran belanja modal dan setelah pembukaan blokir agar segera dilakukan proses pengadaan barang dan jasa serta agar tidak terjadi penumpukan kontrakan pada triwulan akhir tahun anggaran.
4) Berkoordinasi dengan pihak pemberi hibah langsung, terutama terkait dengan kejelasan jadwal waktu penarikan dana hibah langsung.
5) Melaksanakan pelatihan secara lebih dini apabila ada pembaruan atau perbaikan pada aplikasi (teknologi informasi baru) yang

digunakan oleh satker terkait dalam pengelolaan keuangan.

Kanwil/KPPN:

1) Meningkatkan kegiatan pendampingan kepada Satuan Kerja K/L, Pelaku UMKM, dan Debitur KUR dan UMi;
2) Meningkatkan pemahaman satker/pemda melalui sosialisasi peraturan dan bimbingan teknis aplikasi;
3) Meningkatkan kegiatan asistensi pembinaan BLUD berkolaborasi dengan pemda.

6.2.2. Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemerintah Pusat dan Kementerian/ Lembaga (K/L):

1) Menyampaikan perkiraan waktu (indicative timeline) pembukaan blokir sebagai dasar perencanaan sementara satuan kerja.
2) Kementerian/Lembaga terkait dapat melakukan analisis beban kerja sebagai dasar penyusunan kebutuhan pegawai guna meminimalisit terjadinya rangkap jabatan antara PPK dan KPA.
3) Mendorong penyusunan dan penetapan Pedum/Juknis sebelum tahun anggaran berjalan agar satuan kerja dapat segera melaksanakan tahapan kegiatan sejak awal tahun.

Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Barat:

1) Melakukan Melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan evaluasi secara periodik bersama satuan kerja Kementerian/Lembaga pengelola kegiatan RO Harmonis terkait perencanaan maupun eksekusi kegiatan pembangunan infrastruktur.
2) Pemerintah daerah memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada titik-titik yang belum dilaksanakan pembangunan oleh Kementerian/Lembaga.
3) Menerbitkan juknis/regulasi agar tidak terjadi pengajuan dokumen persyaratan penyaluran di hari terakhir/last minute yang berdampak pada gagal salur TKD.
4) Peningkatan awareness dan kapasitas SDM secara berkala, khususnya dalam pengelolaan TKD untuk meminimalisir kendala saat terjadinya pergantian petugas.
5) Penyusunan RK perlu didasarkan pada data historis harga kontrak, hasil survei pasar terkini, serta analisis kewajaran harga (HPS) agar estimasi lebih realistis.

Satuan Kerja:

1) Melakukan Mendorong penggabungan beberapa agenda pengawasan dalam satu perjalanan dinas guna meningkatkan efisiensi biaya.
2) Menyusun analisis dampak keterlambatan pembukaan blokir terhadap capaian output dan menyampaikannya sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan.
3) Membangun sistem pemantauan berkala (mingguan/bulanan) antara PPK dan penyedia untuk mendeteksi potensi keterlambatan sejak dini, termasuk checklist kelengkapan dokumen sebelum termin pembayaran.
4) Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan substansi dan administratif sebelum kegiatan dimulai.
5) Menyusun pedoman teknis singkat (*simple guidance*) internal yang memuat alur proses dan tahapan penggunaan aplikasi untuk memudahkan adaptasi pejabat baru.
6) Menyusun rencana kaderisasi dan penyiapan calon pejabat perbendaharaan secara bertahap guna menjamin keberlanjutan tata kelola keuangan.

Kanwil/KPPN:

1) Mengkomunikasikan secara periodik terkait pelaksanaan kegiatan di daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mendorong harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik.
2) Melaksanakan Focus Group Discussion secara periodik bersama pihak terkait guna mendorong percepatan belanja daerah atas TKD yang telah disalurkan.
3) Melakukan percepatan penyaluran TKD yang telah diajukan dokumennya secara lengkap dan benar.

6.2.3. Analisis Tematik: Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat

Pemerintah Pusat:

1. Penyesuaian target nasional berbasis kebutuhan riil daerah, perlu adanya melakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, tenaga pengajar dan seluruh penerima manfaat MBG di masing-masing daerah.
2. Perlu dilakukan percepatan pengembangan Aplikasi KAPUAZ berbasis web yang terintegrasi dan terstandardisasi sebagai instrumen pelaporan keuangan SPPG, guna meningkatkan konsistensi, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan, sekaligus mendukung konsolidasi data dan penguatan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah maupun nasional.

Pemerintah Daerah

1) Mendorong diversifikasi dan persebaran sentra produksi pangan di luar Jawa melalui pengembangan pasar produksi lokal, pemetaan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan petani/nelayan, dan penguatan ekosistem distribusi guna menekan disparitas harga dan biaya logistik.
2) Mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan MBG melalui agregasi dan konsolidasi permintaan produk pertanian dan perikanan, pembentukan konsolidator lokal, serta penguatan keterhubungan antara program MBG dengan kelompok tani dan nelayan sebagai dasar perencanaan produksi dan penyerapan hasil.

6.2.4. Analisis Tematik: Potret IPM Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Pusat:

1) Dukungan kebijakan dan pendanaan APBN perlu lebih diarahkan pada wilayah prioritas di Kalimantan Barat yang menunjukkan kesenjangan indikator IPM dan sinyal tekanan pada indikator rumah tangga, agar intervensi tidak tersebar dan memiliki daya ungkit yang lebih kuat. Penguatan koordinasi K/L dan instansi vertikal di daerah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk menyepakati lokus, target output, serta keterpautan program dengan indikator pembentuk IPM dan indikator antara yang sensitif di tingkat rumah tangga.
2) Penguatan kualitas layanan dasar dan perlindungan sosial melalui program pemerintah pusat perlu difokuskan pada isu yang paling menahan akselerasi IPM, terutama penguatan layanan primer kesehatan serta keberlanjutan sekolah pada jenjang menengah atas. Penajaman pelaksanaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan data indikator rumah tangga sebagai dasar pembacaan berkala dan penyesuaian prioritas lokus, sehingga dukungan pusat lebih efektif menutup kantong wilayah yang tertinggal.
3) Dukungan program pusat perlu lebih menekankan peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan (bukan hanya perluasan kesempatan kerja), melalui penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan pasar, pengembangan sektor bernilai tambah yang menyerap tenaga kerja formal dan berupah lebih baik, serta penajaman intervensi lintas K/L pada kabupaten/kota prioritas agar kenaikan partisipasi kerja lebih konsisten berkontribusi pada peningkatan IPM.

Pemerintah Daerah

1) Pemerintah daerah perlu mengunci percepatan IPM melalui penetapan kabupaten/kota prioritas per dimensi, dengan menggunakan indikator yang peka terhadap perubahan di tingkat rumah tangga agar rata-rata provinsi tidak menutupi variasi antardaerah. Penetapan lokus prioritas tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan paket intervensi lintas perangkat daerah, penganggaran tahunan, dan pemantauan periodik sehingga koreksi kebijakan dapat dilakukan secara adaptif mengikuti dinamika indikator.
2) Pada dimensi kesehatan, penguatan layanan primer dan agenda promotif–preventif perlu diprioritaskan pada wilayah yang menunjukkan peningkatan tekanan indikator rumah tangga, agar perbaikan indikator agregat lebih cepat tercermin pada penurunan keluhan kesehatan dan peningkatan akses layanan rawat jalan. Penguatan determinan kesehatan yang terkait layanan dasar tetap perlu dijaga sebagai bagian

dari upaya menurunkan risiko kesehatan berbasis lingkungan.

3) Pada dimensi pendidikan, fokus intervensi perlu diarahkan pada keberlanjutan sekolah menuju jenjang menengah atas, karena kesenjangan partisipasi sekolah usia 16–18 tahun dan dominasi capaian pendidikan ≤SMP pada sejumlah wilayah berpotensi menahan kenaikan RLS. Penajaman lokus dilakukan pada kabupaten/kota dengan kesenjangan terbesar, disertai paket retensi untuk menahan putus sekolah, penguatan akses SMA/SMK termasuk hambatan spasial, dukungan keterjangkauan biaya tidak langsung, serta penguatan pendidikan kesetaraan sebagai jaring pengaman bagi penduduk yang sudah keluar dari jalur formal.
4) Pada dimensi standar hidup layak, peningkatan kemampuan rumah tangga mencapai standar hidup yang lebih layak perlu dipercepat pada wilayah dengan kerentanan pangan tinggi atau memburuk serta aset rendah yang besar, karena indikator-indikator ini memotret kantong ketidakmampuan yang tidak selalu terlihat pada rata-rata provinsi. Arah kebijakan difokuskan pada bauran penguatan kesempatan kerja produktif, perlindungan rumah tangga rentan, dan perbaikan kondisi hidup dasar, dengan pemantauan indikator hunian, kerentanan pangan, dan aset untuk memastikan intervensi benar-benar menyentuh kondisi rumah tangga.
5) Pemerintah daerah perlu menggeser fokus kebijakan ketenagakerjaan dari capaian kuantitatif menjadi perbaikan struktur ketenagakerjaan, melalui penguatan link and match pendidikan-menengah/kejuruan dengan kebutuhan kerja lokal, peningkatan produktivitas sektor penyerap tenaga kerja, serta penajaman program peningkatan keterampilan pada wilayah dengan IPM rendah agar kenaikan partisipasi kerja tidak terkunci pada pekerjaan berpendapatan rendah dan berkontribusi lebih nyata pada peningkatan kualitas hidup.
6) Mengingat Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022 mengatur rencana aksi percepatan IPM untuk periode 2023–2025, fase setelah 2025 memerlukan penyusunan rencana aksi periode berikutnya yang selaras dengan dokumen perencanaan terbaru, dengan mengadopsi elemen desain yang telah kuat seperti penguncian indikator pembentuk IPM, lampiran matriks sebagai perangkat operasional, dan pemantauan periodik. Pembaruan utama dilakukan pada penajaman lokus dan indikator yang paling sensitif berdasarkan temuan 2024–2025, lalu diturunkan secara konsisten ke perencanaan dan penganggaran tahunan agar rencana aksi baru berfungsi sebagai instrumen pengarah yang terukur dan adaptif.

Kluster Rekomendasi berdasakan Jangka Waktu Penyelesaian

No	Jangka Waktu	Fokus Kebijakan	Rekomendasi Pilihan
1	Jangka Pendek (≤ 1 Tahun)	Percepatan eksekusi anggaran dan perbaikan tata kelola langsung	1. Percepatan penyusunan juknis dan pedoman teknis agar satker tidak menunggu realisasi belanja hingga pertengahan tahun, penerapan lelang dini secara konsisten, terutama pada belanja modal yang selama ini realisasinya rendah, serta mendorong satker untuk mengkonsolidasikan paket pengadaan dan memperluas penyedia lokal melalui pelatihan penggunaan e-katalog V6. 2. Penyusunan *cash forecasting* triwulanan yang disiplin untuk mencegah penumpukan belanja di akhir tahun. 3. Berkoordinasi dengan Eselon I K/L berkenaan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pembukaan blokir. Selanjutnya dapat dilakukan pembahasan pembukaan blokir anggaran belanja modal dan setelah pembukaan blokir agar segera dilakukan proses pengadaan barang dan jasa serta agar tidak terjadi penumpukan kontrakan pada triwulan akhir tahun anggaran. 4. Membangun sistem pemantauan berkala (mingguan/bulanan) antara PPK dan penyedia untuk mendeteksi potensi keterlambatan sejak dini, termasuk checklist kelengkapan dokumen sebelum termin pembayaran. 5. Meningkatkan pemahaman satker/pemda melalui sosialisasi peraturan dan bimbingan teknis aplikasi.
2	Jangka Menengah (1–3 Tahun)	Penguatan sistem, digitalisasi, dan kapasitas kelembagaan	1. Melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah berbasis digitalisasi dan penguatan pengelolaan BUMD dalam hal optimalisasi dividen sebagai sumber PAD. 2. Mendorong implementasi aplikasi e BLUD, e Billing, dan integrasi pembayaran digital agar efisiensi meningkat dan pencatatan lebih akurat serta pelatihan SDM untuk meningkatkan tata kelola dan inovasi layanan kesehatan pada BLUD sektor kesehatan. 3. Penguatan Kapasitas SDM Perlu pelatihan intensif bagi pejabat perbendaharaan, pejabat PBJ, operator, dan pengelola keuangan daerah. 4. Perlu dilakukan percepatan pengembangan Aplikasi KAPUAZ berbasis web yang terintegrasi dan terstandardisasi sebagai instrumen pelaporan keuangan SPPG, guna meningkatkan konsistensi, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan, sekaligus mendukung konsolidasi data dan penguatan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah maupun nasional.

			5. Mengkomunikasikan secara periodik terkait pelaksanaan kegiatan di daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mendorong harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik.
3	Jangka Panjang (> 3 Tahun)	Transformasi struktural dan peningkatan kualitas pembangunan	1. Dukungan kebijakan dan pendanaan APBN perlu lebih diarahkan pada wilayah prioritas di Kalimantan Barat yang menunjukkan kesenjangan indikator IPM dan sinyal tekanan pada indikator rumah tangga, agar intervensi tidak tersebar dan memiliki daya ungkit yang lebih kuat. 2. Pada dimensi pendidikan, fokus intervensi perlu diarahkan pada keberlanjutan sekolah menuju jenjang menengah atas, karena kesenjangan partisipasi sekolah usia 16–18 tahun dan dominasi capaian pendidikan ≤SMP pada sejumlah wilayah berpotensi menahan kenaikan RLS. 3. Mendorong diversifikasi dan persebaran sentra produksi pangan di luar Jawa melalui pengembangan pasar produksi lokal, pemetaan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan petani/nelayan, dan penguatan ekosistem distribusi guna menekan disparitas harga dan biaya logistik. 4. Pemerintah daerah perlu menggeser fokus kebijakan ketenagakerjaan dari capaian kuantitatif menjadi perbaikan struktur ketenagakerjaan, melalui penguatan link and match pendidikan menengah/kejuruan dengan kebutuhan kerja lokal, peningkatan produktivitas sektor penyerap tenaga kerja, serta penajaman program peningkatan keterampilan pada wilayah dengan IPM rendah agar kenaikan partisipasi kerja tidak terkunci pada pekerjaan berpendapatan rendah dan berkontribusi lebih nyata pada peningkatan kualitas hidup. 5. Mengingat Pergub Kalbar Nomor 98 Tahun 2022 mengatur rencana aksi percepatan IPM untuk periode 2023–2025, fase setelah 2025 memerlukan penyusunan rencana aksi periode berikutnya yang selaras dengan dokumen perencanaan terbaru, dengan mengadopsi elemen desain yang telah kuat seperti penguncian indikator pembentuk IPM, lampiran matriks sebagai perangkat operasional, dan pemantauan periodik.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pelaksanaan Anggaran (SINTESA). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Ardianto, P. (2026, Februari 8). *BPS: Program MBG Tekan Kemiskinan di Kalbar*. Diambil kembali dari Investor: https://investor.id/macroeconomy/427733/bps-program-mbg-tekan-kemiskinan-di-kalbar

Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat November 2025.* Pontianak: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Tahun 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Barat Desember 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat Desember 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2025). *Profil Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat September 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat November 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BPS Kalbar. (2025). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Barat September 2025.* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

BRMP Kalbar. (2025, November 27). *BRMP Kalbar Hadiri Gerakan Tanam Padi Program CSR TA. 2025 di Kecamatan Seluas*. Diambil kembali dari https://kalbar.brmp.pertanian.go.id/berita/brmp-kalbar-hadiri-gerakan-tanam-padi-program-csr-ta-2025-di-kecamatan-seluas

Dahlan, M. S. (2009). *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan, Edisi 4 (Deskriptif, Bivariat dan Multivariat, dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS).* Jakarta: Salemba Medika.

Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2021). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*.

Heryanah. (2017). Kesenjangan Pendapatan di Indonesia: Studi Empiris Berdasarkan Susenas 2008, 2011, dan 2013. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 43-58.

Kabaronline. (2025, November 18). *Tingkatkan Posisi Tawar Petani Lokal, Pemprov Kalbar Siap Bangun Gudang dan Penggilingan Padi*. Diambil kembali dari Kabaronline: https://kalbaronline.com/2025/11/18/tingkatkan-posisi-tawar-petani-lokal-pemprov-kalbar-siap-bangun-gudang-dan-penggilingan-padi/#:~:text=meningkatkan%20kesejahteraan%20petani%2C%E2%80%9D%20tegas%20Harison.%20Sementara%20itu%2C,pada%20penguatan%20sektor%

Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *In Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 130-140.

Le Boedec, K. (2016). Sensitivity and specificity of normality tests and consequences on reference interval accuracy at small sample size: a computer-simulation study. *Veterinary clinical pathology*, 648-656.

Liman, U. S. (2026, Januari 5). *BPS: Emas perhiasan penyumbang andil inflasi terbesar sepanjang 2025*. Diambil kembali dari Antara: https://www.antaranews.com/berita/5333770/bps-emas-perhiasan-penyumbang-andil-inflasi-terbesar-sepanjang-2025

Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 1-11.

Muhid, A. (2019). *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik dengan SPSS for Windows.* Sidoarjo: Zifatma Jawara.

Narwati. (2025, Oktober 25). *Pemprov Kalbar mendorong peningkatan SDM lewat pelatihan kompetensi*. Diambil kembali dari Antara Kalbar: https://kalbar.antaranews.com/berita/670357/pemprov-kalbar-mendorong-peningkatan-sdm-lewat-pelatihan-kompetensi

Nastiti, A. W., & Nailufar, F. (2023). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1-9.

Oxtora, R. (2025, April 7). *Pemprov Kalbar fokus peningkatan indeks pembangunan manusia*. Diambil kembali dari Antara Kalbar: https://kalbar.antaranews.com/berita/633625/pemprov-kalbar-fokus-peningkatan-indeks-pembangunan-manusia

Oxtora, R. (2026, Februari 6). *Program MBG turunkan angka pengangguran di Kalbar*. Diambil kembali dari Antara Kalbar: https://kalbar.antaranews.com/berita/687650/program-mbg-turunkan-angka-pengangguran-di-kalbar#:~:text=Program%20MBG%20turunkan%20angka%20pengangguran%20di%20Kalbar%20%2D%20ANTARA%20News%20Kalimantan%20Barat

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Saputra, H. A., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Jumlah Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 529-540.

Tarigan, Robinson. (2014). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur*. International Journal of Management Finance, 2(4), 59–64.

Wiliyanti, V., Judijanto, L., Situmeang, R. J., Saraswati, S., Cipta, E. S., Nurwiani, N., & Rodliyah, I. (2025). *Statistika Non Parametrik: Konsep & Aplikasi.* Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.

Adissta Mega Christia, B. I. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 149-163.

Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.

Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1-25.

Bachtiar; Arioma. (2022). Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dengan Metoda *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara,* 5 (2), 128-141.

Arsyad, Lincolin. (2014). Ekonomi Pembangunan Lanjutan. *Ekonomi Pembangunan Lanjutan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Assouline, et al. (2014). *From Regressive Pollution Taxes to Progressive Environmental Tax Reforms. European Economic Review*, 69 (C) p. 126-142.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat 2023*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

Ramadhani, Dinas Rizky dkk. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 20-37.

Endah, K. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 797-804.

Hastuti, Proborini. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara,* 784.

Hijrawati. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020; *Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika*, 2(3), 1-9.

Kusmanto, Heru. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI,* 25*:* 13-23.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *GFS Kantor Wilayah Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2024*. Pontianak: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2024*. Pontianak: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kanwil DJP Kalimantan Barat. (2024). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2024*. Pontianak: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2024). *Informasi APBN 2024*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuagan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Mustabsyirah. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Putra, Andre., & Melti Roza Adry. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan di 6 Negara Asean. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11 (2): 120-127.

Putra, G. A. (2022). Motivasi dan kendala Percepatan Penyaluran Kas Daerah. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 175-191.

Ritonga, A. Anshari, dkk. (2004). *Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi)*. Jakarata: Penerbit Buku Kompas.

Salsa, Shabila Siti., & Darya Setia Nugraha. (2022). Pengaruh Umur Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estat Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2 (03): 692-703.

Saefulloh, M., Fahlevi, M., & Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3.

Salim, A., Fadilla., & Punamasari. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7:17.

Septianingsih, Amin. (2022). Permodelan Data Panel Menggunakan *Random Effect Model* Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umum Harapan Hidup Di Indonesia; *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 3(3), 525-536.

Sadono, Sukirno. (2010). Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.

Suryani, T. (2013). Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang (Analisis Tabel Input Output Kabupaten Pemalang Tahun 2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Priyatmo, Tri. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Aset Tetap Dan Ekuitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Riau; *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 156-168.

Qodriyatun. (2024). *Komitmen Indonesia Menghentikan Deforestasi Pada Tahun 2023.* Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Republik Indobesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah.

United Nations. (2021). *United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries.* New York: United Nations.

Yuda, M. Agung Patra., & Idris. (2022). Analisis Kepadatan Penduduk, Perumbuhan Ekonomi dan Anggaran Lingkungan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4 (2): 53-62.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

JL. K. Sasuit Tubun No.36, Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121

@djpbkalbar